



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BITUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALI KOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2025-
2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah yang dipimpin oleh kepala Daerah dan perangkat Daerah, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di Daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan RPJMD adalah untuk menetapkan pedoman perencanaan sebagai acuan penyusunan Renstra PD, RKPD, rencana kerja PD dan perencanaan penganggaran.
- (2) Tujuan ditetapkan RPJMD adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup RPJMD meliputi:

- a. penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang penyusunannya berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program PD, lintas PD serta program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; dan
- c. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD meliputi:

- a. bab I pendahuluan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. dasar hukum;
 3. hubungan antar dokumen;
 4. maksud dan tujuan; dan
 5. sistematika dokumen RPJMD Kota Bitung Tahun 2025-2029;
- b. bab II gambaran umum kondisi Daerah, meliputi:
 1. gambaran umum kondisi Daerah;
 2. gambaran keuangan Daerah; dan
 3. permasalahan dan isu strategis Daerah
- c. bab III visi, misi dan program prioritas pembangunan Daerah meliputi:
 1. visi, misi, tujuan dan sasaran; dan
 2. strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Daerah;
- d. bab IV program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan perangkat Daerah meliputi:
 1. program perangkat Daerah; dan
 2. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. bab V penutup.

BAB V ISI DAN URAIAN

Pasal 5

Isi dan uraian RPJMD dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal ...

WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RPJMD KOTA BITUNG TAHUN 2025-2029

URAIAN RPJMD TAHUN 2025-2029

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

1.1.1. Pengertian.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang-undang tersebut juga menekankan bahwa pembangunan daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi.

Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Dalam menyusun RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah, dengan berorientasi pada proses maka digunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. Pendekatan atas – bawah dan bawah – atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi, hingga Nasional.

Berorientasi pada substansi maka digunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan holistik – tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur / bagian / kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;

3. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.1.2. Proses Penyusunan.

Proses penyusunan RPJMD melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 dan selanjutnya melalui beberapa proses, yaitu:

- Dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD.
- Rancangan Awal RPJMD yang disempurnakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- Rancangan Awal RPJMD yang disempurnakan berdasarkan Nota Kesepakatan dengan DPRD dikonsultasikan kepada Gubernur untuk memperoleh masukan.
- Rancangan Awal RPJMD yang disempurnakan berdasarkan saran penyempurnaan dari Gubernur menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah.

2. Penyusunan Rancangan RPJMD

Penyusunan Rancangan RPJMD adalah penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD berdasarkan Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Bappeda, yang kemudian dibahas pada Musrenbang RPJMD untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan sebelumnya.

3. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RPJMD, kemudian dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan untuk pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Rancangan Perda tentang RPJMD dipaparkan kepada Kepala Daerah

kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.

4. Penetapan RPJMD

Wali Kota menetapkan Rancangan Perda tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik.

1.1.3 Kedudukan RPJMD Tahun 2025 – 2029 dalam RPJPD.

Berdasarkan Undang – Undang nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045, periode RPJMD mengikuti periode RPJM Nasional, yaitu:

- a. RPJMD I Tahun 2025 – 2029;
- b. RPJMD II Tahun 2030 – 2034;
- c. RPJMD III Tahun 2035 – 2039;
- d. RPJMD IV Tahun 2040 – 2045.

Sehingga RPJMD Kota Bitung Tahun 2025 – 2029 merupakan RPJMD Tahap Pertama dalam RPJPD Kota Bitung Tahun 2025 – 2045.

1.2 Dasar Hukum.

Landasan peraturan dan perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bitung Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda Tanggal 12 Juni 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029;
23. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor: 500.7.2/1730/Bangda tanggal 11 Desember 2023 tentang Ujicoba Penerapan Sistem CIP dalam Penyusunan RPJMD/RKPD di 5 (lima) Kota Percontohan NUDP Tahap I;
24. Peraturan Daerah Kota Bitung nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 32);
25. Peraturan Daerah Kota Bitung nomor 5 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2022 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Bitung nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bitung Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 10).

1.3 Hubungan antar Dokumen.

1.3.1 Keterhubungan dengan RPJMN.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung Tahun 2025-2029 disusun dan diselaraskan dengan pembangunan Nasional, terutama pembangunan Nasional yang berkaitan dengan program pembangunan Daerah. Penyelarasan ini bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan di daerah berpengaruh terhadap pembangunan Nasional.

Penyusunan RPJMD di telaah berdasarkan isu-isu strategis nasional, yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan sangat diperlukan agar target-target yang dicanangkan dalam RPJMN mendapat

dukungan dari pemerintah Kota Bitung, sekaligus pola penyusunan RPJMN menjadi dasar menentukan target pada RPJMD Kota Bitung tahun 2025-2029.

1.3.2 Keterhubungan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.

Proses penyusunan RPJMD Kota Bitung juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, meskipun penyusunannya bersamaan, tetapi acuan program sangat berkaitan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, seperti arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis, serta target RPJMD Provinsi yang pencapaiannya didukung oleh Pemerintah Kota Bitung.

1.3.3 Keterhubungan dengan RPJPD Kota Bitung.

RPJMD Kota Bitung Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran Tahap Pertama dari RPJPD Kota Bitung Tahun 2025 – 2045 dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah yaitu “Bitung Kota Industri yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan.”

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 8 (delapan) Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2045, sebagai berikut:

1. Transformasi daya saing sumber daya manusia;
2. Transformasi ekonomi inklusif dan produktivitas daerah;
3. Transformasi tata kelola;
4. Penegakan peraturan daerah dan pemeliharaan stabilitas daerah;
5. Lingkungan ekologi dan sosial yang sehat dan budaya yang maju;
6. Pembangunan kewilayahan yang berkeadilan;
7. Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Pembangunan berkelanjutan.

1.3.4 Keterhubungan dengan KLHS RPJMD Kota Bitung.

KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen RPJMD.

KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD dengan memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan.

Jadi fungsinya sebagai analisis awal keberlanjutan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, sasaran, dan program dalam RPJMD tidak merusak lingkungan dan sosial-ekologi daerah.

1.3.5 Keterhubungan dengan RTRW Kota Bitung serta Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa Utara.

Lokasi untuk pelaksanaan program-program prioritas / unggulan dalam RPJMD mempertimbangkan arahan yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bitung Tahun 2013 – 2033.

Selain sesuai dengan RTRW Kota Bitung, perlu juga memperhatikan RTRW Provinsi Sulawesi Utara dan RTRW Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Bitung. Penyesuaian ini penting untuk dilakukan agar tercipta sinkronisasi dan sinergitas pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten / kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan kabupaten / kota lain, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten / kota, yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.6 Keterhubungan dengan RKPD Kota Bitung.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, merupakan penjabaran dari RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun).

Dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok – pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses /penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.3.7 Keterhubungan dengan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, disusun berpedoman pada RPJMD.

Rancangan Akhir RPJMD menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra PD.

1.4 Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bitung Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan tahunan Kota Bitung yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bitung selama 5 (lima) tahun;
2. Menjadi pedoman untuk penyempurnaan rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bitung Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Memuat data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah;
2. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan;
3. Menggambarkan pengelolaan keuangan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar untuk menentukan proyeksi keuangan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan;
4. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis daerah dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Kota Bitung Tahun 2025-2045, dan Laporan KLHS RPJMD Kota Bitung;
5. Merumuskan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

1.5 Sistematika Rancangan Akhir RPJMD Kota Bitung Tahun 2025-2029.

Rancangan Akhir RPJMD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III. Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.

A. Posisi Geografis.

Salah satu dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara adalah Kota Bitung. Kota ini terletak di ujung timur Pulau Sulawesi pada koordinat 1023'23" – 1035'39" LU dan 12501'43" – 125018'13" BT. Wilayahnya berbatasan dengan Kecamatan Likupang (Kabupaten Minahasa Utara dan Laut Maluku) di sebelah utara, Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku di sebelah selatan, serta Kecamatan Kauditan (Kabupaten Minahasa Utara) di sebelah barat.

Gambar 1



Sumber: Draft revisi RTRW Kota Bitung.

Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Teknis Sinkronisasi Substansi Revisi Perda Provinsi Sulawesi Utara nomor 1 tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara 2014-2034 dengan Revisi Perda Kota Bitung nomor 11 tahun 2013 tentang RTRW Kota Bitung 2013-2033 yang mengacu pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Bitung

dengan Kabupaten Minahasa Utara, luas wilayah daratan adalah 329,72 Km² atau 32.972,49 Ha, sedangkan luas wilayah perairan mencapai 439,8 Km² atau 43.980 Ha. Panjang total garis pantai adalah 162,61 Km. Berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan di Kota Bitung dari lima kecamatan menjadi delapan Kecamatan dan berdasarkan Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/107/2022 tentang Penetapan jumlah kepala lingkungan dan ketua Rukun Tetangga (RT) di Kota Bitung maka Kecamatan, Kelurahan, lingkungan dan RT dimaksud sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Kelurahan per Kecamatan di Kota Bitung

NO	NAMA KECAMATAN	LUAS (Ha)	JUMLAH		
			KELURAHAN	LINGKUNGAN	RT
1	Lembah Selatan	3.163,91	7	21	60
2	Madidir	2.046,30	8	43	200
3	Ranowulu	16.070,39	11	34	105
4	Aertembaga	5.978,69	10	40	149
5	Matuari	2.065,45	8	34	140
6	Girian	513,80	7	39	131
7	Maesa	781,30	8	36	155
8	Lembah Utara	2.388,76	10	27	61
JUMLAH		33.008,60	69	274	1.001

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bitung 2025

B. Peran Ekonomi.

- o Pintu Gerbang Asia Pasifik dan Pusat Pedagangan:

Kota Bitung berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan internasional bagi Indonesi ke kawasan Asia pasifik. Ini didukung oleh pengembangan Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan internasional, yang mempermudah distribusi barang dan jasa (memfasilitasi ekspor dan impor) ke wilayah Asia Timur, Pasifik dan sekitarnya.

Pelabuhan Bitung merupakan pelabuhan internasional strategis di Sulawesi Utara yang berperan sebagai pintu gerbang perdagangan Asia Pasifik. Pelabuhan ini dikembangkan sebagai Pelabuhan Hub Internasional dalam Proyek Strategis Nasional, dengan kapasitas yang ditingkatkan hingga 2,7 juta TEUs untuk mendukung ekspor-impor di kawasan timur Indonesia, termasuk ke negara-negara Asia Timur seperti Filipina dan Vietnam

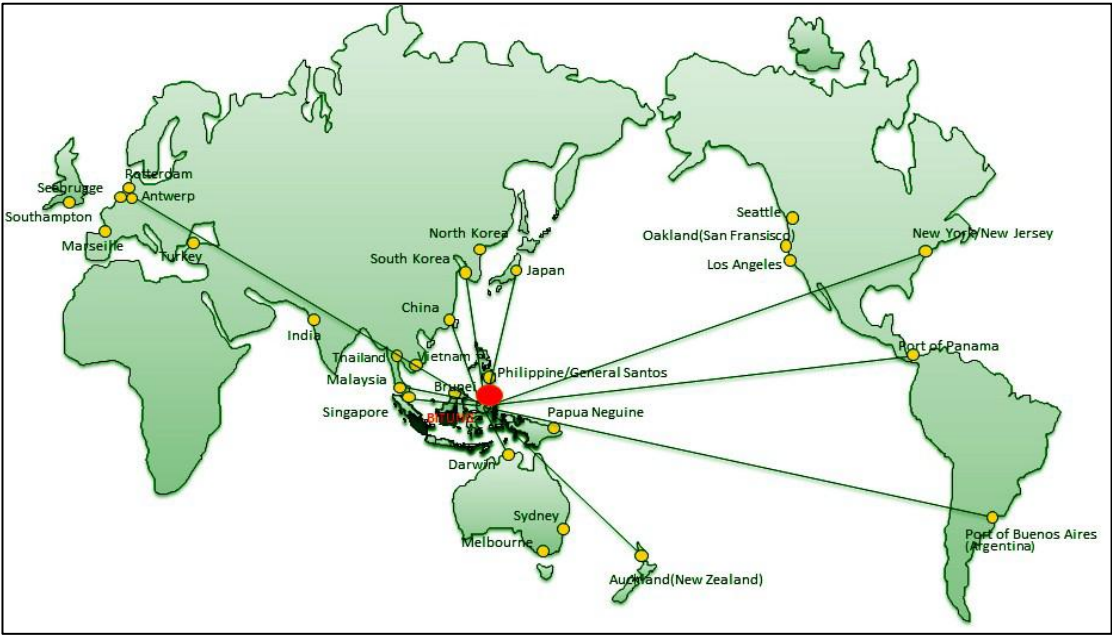
Letaknya yang berada di jalur pelayaran utama antara Asia Timur, Australia, dan Pasifik Selatan menjadikan Bitung sebagai titik transit penting bagi kapal-kapal pengangkut barang dari Tiongkok, Jepang,

dan Korea Selatan ke Australia dan Selandia Baru. Dengan fasilitas lengkap seperti dermaga dalam berbagai kedalaman, alat bongkar muat, gudang, serta layanan pendukung kapal, pelabuhan ini mampu meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi barang di kawasan Indo-Pasifik.

Pengembangan Pelabuhan Bitung juga mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang fokus pada industri pengolahan ikan dan produk ekspor lainnya, sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Selain itu, pelabuhan ini meningkatkan posisi geopolitik Indonesia sebagai kekuatan maritim di Asia Pasifik serta mendorong investasi infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja di Sulawesi Utara.

Singkatnya, Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan internasional dan pintu gerbang Asia Pasifik berperan penting dalam mendukung perangkat ekonomi Indonesia melalui peningkatan perdagangan, logistik, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus yang berorientasi ekspor-impor regional dan global.

Gambar 2
Peta Perdagangan (Pelabuhan) Kota Bitung



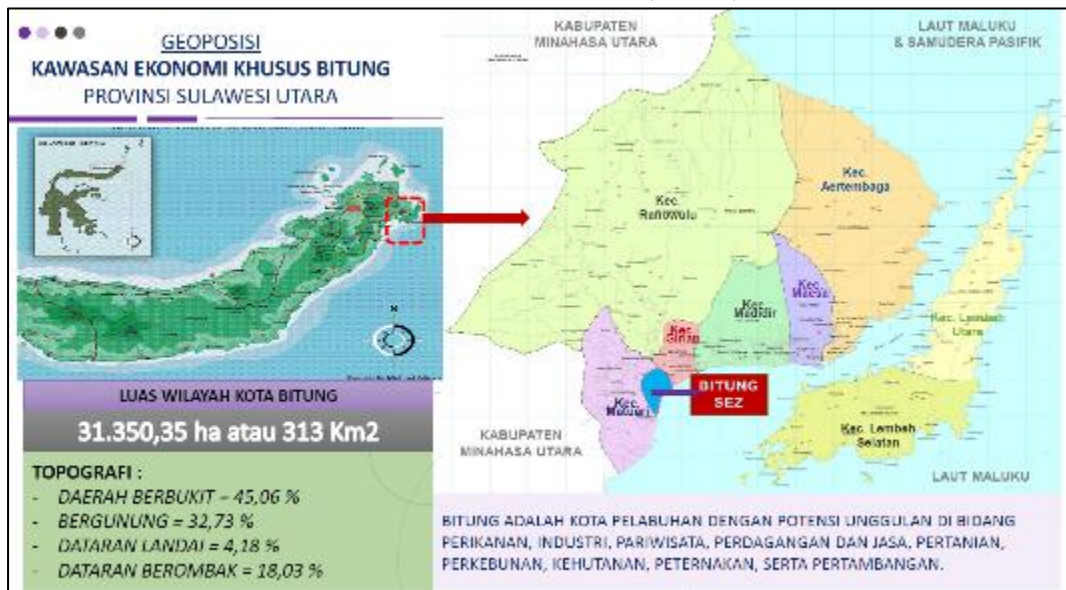
Sumber: DPMPSTP Kota Bitung.

Dengan melihat geoposisi pelabuhan Bitung yang sangat strategis bagi perdagangan di kawasan asia pasifik, maka kebijakan yang mendukung pegembangan Pelabuhan Bitung sebagai *International Hub Port* sangat diperlukan baik melalui kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara maupun Kota Bitung. Hal ini tentunya akan berdampak langsung bagi perekonomian Sulawesi Utara yang juga mendukung pencapaian visi Sulawesi Utara.

o Kawasan Ekonomi Khusus (KEK):

Pemerintah menetapkan Kota Bitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang mencakup area seluas 534 Ha dengan rencana pengembangan hingga 2500 Ha. Fokus utama adalah industri pengolahan kelapa, ikan dan farmasi.

Gambar 3
Peta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung



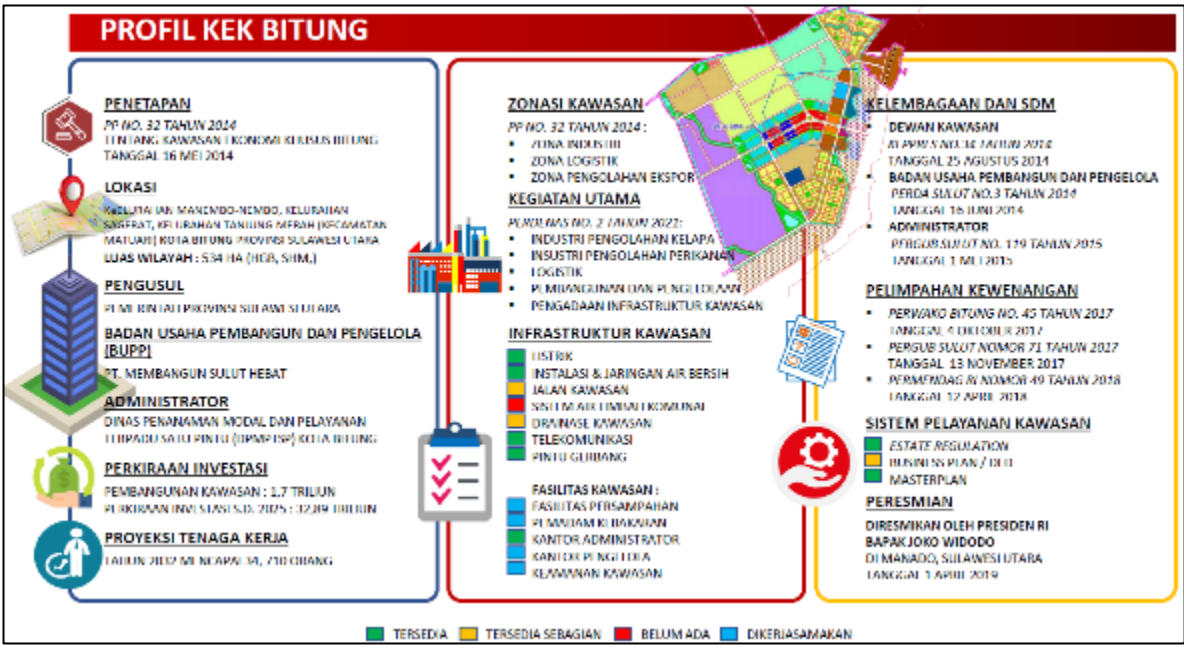
Sumber: DPMPSTSP Kota Bitung

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dan Indonesia secara umum melalui beberapa aspek utama:

- KEK Bitung memanfaatkan keunggulan geostrategisnya sebagai pintu gerbang ekonomi ke negara-negara Asia Pasifik, sehingga menjadi pusat perdagangan dan logistik yang strategis.
- KEK ini fokus pada pengembangan industri pengolahan perikanan, agro, farmasi, kelapa, dan logistik yang memberikan multiplier effect, meningkatkan kontribusi sektor industri menengah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta membuka lapangan kerja bagi sekitar 34.700 orang.
- Optimalisasi KEK Bitung mendukung peningkatan ekspor dan impor komoditas unggulan, dengan fasilitas pendukung seperti Pelabuhan Samudra Bitung, Bandara Internasional Sam Ratulangi, dan Jalan Tol Manado-Bitung yang meningkatkan konektivitas dan daya saing industri.

- KEK Bitung juga menarik investasi besar, diperkirakan mencapai Rp32,9 triliun, yang memperkuat basis industri dan ekonomi lokal serta nasional.
- Pemerintah memberikan kemudahan berupa insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendukung iklim investasi dan pengembangan kawasan ini, sehingga mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Gambar 4
Profil Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung



Sumber: DPMPTSP Kota Bitung.

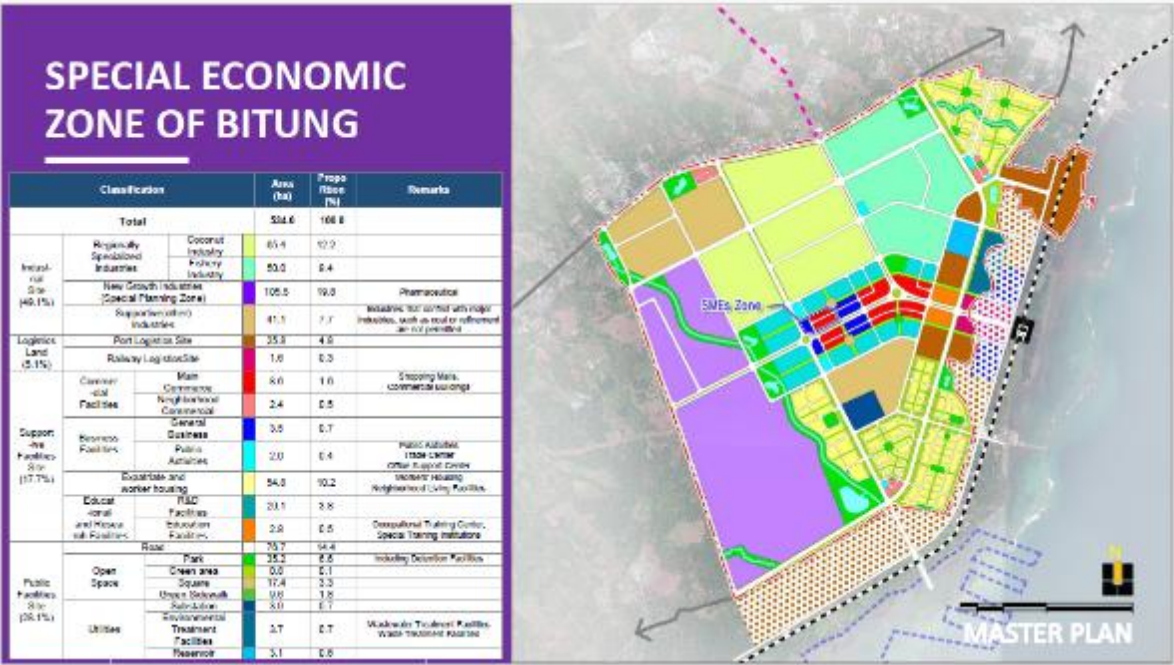
Secara keseluruhan, KEK Bitung berperan sebagai motor penggerak industri, perdagangan, dan ekspor-impor yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan daya saing Sulawesi Utara di pasar global.

Gambar 5
Bitung SEZ Perspective



Sumber: DPMPSTSP Kota Bitung.

Gambar 6
Master Plan Spesial Economic Zone Bitung



Sumber: DPMPSTSP Kota Bitung.

C. Peran Infrastruktur.

- Transportasi.
Infrastruktur jalan dan pelabuhan yang terus ditingkatkan mendukung aksesibilitas dan mobilitas barang serta orang, memperkuat konektivitas dengan daerah lain di Indonesia dan luar negeri.

Pembangunan jalan Tol Manado-Bitung sepanjang 39,8 km mempercepat akses transportasi antara Kota Bitung - Kota Manado dan sekitarnya, memfasilitasi pergerakan barang dan penumpang. Pembangunan jalan Tol ini juga mendukung secara langsung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Kota Bitung.

Gambar 7
Jalan Tol Manado - Bitung



Sumber: DPMPTSP Kota Bitung.

Jalan Tol Manado-Bitung sepanjang sekitar 39,8 km menghubungkan Kota Manado dan Kota Bitung di Sulawesi Utara, dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan investasi sekitar Rp 4,95-8,9 triliun, dan telah selesai serta beroperasi penuh sejak Februari 2022.

Peran Jalan Tol Manado-Bitung dalam Mendukung Perangkat Ekonomi di Kota Bitung:

- Mempercepat Akses dan Mobilitas: Jalan tol ini memangkas waktu tempuh Manado-Bitung dari 1,5-2 jam menjadi sekitar 35 menit, sehingga mempermudah mobilitas orang dan pengiriman logistik dari Manado ke Bitung dan Pelabuhan Internasional Bitung.
- Dukungan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung: Jalan tol menjadi akses utama ke KEK Bitung yang sedang dikembangkan, memudahkan distribusi barang dan jasa, serta menarik investor untuk pengembangan industri di wilayah tersebut.
- Pengurangan Beban Jalan Arteri dan Efisiensi Logistik: Dengan tol ini, beban jalan nasional yang padat berkurang, biaya logistik dari Pelabuhan Bitung dapat ditekan, sehingga mendukung kegiatan ekspor-impor dan pertumbuhan ekonomi lokal.

- Pengembangan Pariwisata dan Industri: Jalan tol terintegrasi dengan kawasan industri dan pariwisata, termasuk destinasi wisata super prioritas Manado-Bitung-Likupang, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi baru di sektor pariwisata dan industri perikanan.
- Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara: Infrastruktur ini diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulut yang telah melebihi angka nasional, dengan membuka titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Bitung dan sekitarnya.

Jalan Tol Manado-Bitung berfungsi sebagai tulang punggung infrastruktur yang memperkuat konektivitas, efisiensi logistik, dan pengembangan ekonomi di Kota Bitung, khususnya dalam mendukung KEK dan Pelabuhan Internasional Bitung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional.

- o Air dan Energi.

Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bertujuan untuk menyediakan air bersih dengan cakupan pelayanan 90% pada tahun 2035, yang esensial untuk kesehatan masyarakat dan pengembangan kawasan. Pembangunan jaringan ketenagalistrikan yang lebih baik, termasuk gardu induk dan pembangkit listrik tenaga surya, untuk mendukung kebutuhan energi dan rumah tangga.

Pengembangan sumber daya air dan energi yang mendukung perangkat ekonomi di Kota Bitung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Energi di Kota Bitung:

Kota Bitung sedang mengembangkan konsep *Low Carbon Model Town* (LCMT) yang fokus pada penggunaan energi ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini menjadikan Bitung sebagai kota percontohan penggunaan energi hijau di Indonesia.

Potensi energi laut di sekitar Bitung sangat besar, terutama di Selat Lembeh. Energi laut seperti energi arus, gelombang, dan *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC) dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yang mendukung kebutuhan energi kota ini. Potensi energi laut di Sulawesi Utara termasuk Bitung diperkirakan mencapai puluhan gigawatt.

Selain energi laut, Bitung juga memiliki potensi energi panas bumi di Gunung Dua Sudara dengan kapasitas yang diperkirakan mencapai

125 megawatt. Namun, pengembangan energi panas bumi ini masih terkendala kurangnya minat investor.

Infrastruktur energi fosil juga ada di Bitung, seperti Fuel Terminal Bitung yang menyuplai bahan bakar minyak ke berbagai wilayah di Sulawesi Utara dengan kapasitas tangki lebih dari 44.000 kilo liter dan distribusi harian 1200-1800 kilo liter. Terminal ini penting untuk ketahanan energi berbasis bahan bakar fosil.

Sistem kelistrikan di Bitung meliputi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan kapasitas 56,25 MW, gardu induk dengan kapasitas total puluhan megawatt, serta rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat di Pulau Lembeh dan pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Penerapan energi terbarukan adalah penggunaan PLTS atap di Alfamidi Bitung yang mampu menghasilkan energi hijau sebesar 374,874 kWp per tahun, menghemat biaya energi dan mendukung penggunaan energi bersih.

Air dan Sumber Daya Air di Kota Bitung:

Kota Bitung memiliki sistem jaringan sumber daya air sebagai bagian dari infrastruktur perkotaan yang mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Pengelolaan air bersih dan sanitasi menjadi bagian penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan produktivitas ekonomi, meskipun detail spesifik tentang infrastruktur air bersih di Bitung tidak tersedia dalam hasil pencarian.

Kota Bitung mengandalkan kombinasi sumber energi fosil dan energi terbarukan, termasuk energi laut, panas bumi, dan tenaga surya, untuk mendukung kebutuhan listrik dan kegiatan ekonomi. Infrastruktur energi yang ada juga didukung oleh terminal bahan bakar minyak yang besar. Sumber daya air, terutama laut, sangat vital bagi sektor perikanan yang merupakan pilar ekonomi utama kota ini. Pengembangan energi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya air yang baik menjadi kunci bagi keberlanjutan ekonomi Kota Bitung.

D. Dukungan Pemerintah.

Kebijakan pemerintah mendukung pengembangan investasi asing dan pariwisata, menjadikan Kota Bitung sebagai lokasi strategis untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Dengan posisi geografis yang strategis dan peran sebagai pusat perdagangan serta industri, Kota Bitung tidak hanya berkontribusi pada ekonomi lokal tetapi juga perekonomian nasional sebagai jembatan ke pasar internasional.

Pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah pusat memberikan dukungan signifikan terkait pengembangan pariwisata, jembatan, dan bandara di Pulau Lembeh, Kota Bitung sebagai berikut:

Dukungan Pemerintah Pusat:

- Pemerintah pusat merencanakan pembangunan jembatan sepanjang sekitar 1 kilometer yang menghubungkan daratan Kota Bitung dengan Pulau Lembeh. Jembatan ini akan mempermudah akses ke Pulau Lembeh dan mendukung pengembangan pariwisata serta industri di kawasan tersebut. Pembangunan jembatan ini juga akan terintegrasi dengan jalan tol Manado-Bitung yang sedang dibangun.
- Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga mendukung rencana pembangunan Bandara Internasional Lembeh yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Merah Bitung.

Dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara:

- Pembangunan jembatan Bitung-Lembeh dan Bandara Lembeh telah menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk dijadikan sebagai salah satu program strategis yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah.
- Gubernur Sulut menegaskan bahwa pembangunan bandara dan jembatan sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara 2014-2034 dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yang menetapkan Pulau Lembeh sebagai kawasan cepat tumbuh yang membutuhkan infrastruktur penunjang.
- Pemerintah provinsi juga meminta dukungan dari Bappenas untuk percepatan perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut sebagai bagian dari 10 poin pembangunan Sulawesi Utara, termasuk jembatan Bitung-Lembeh dan bandara Lembeh.

- o Selain itu, pemerintah daerah melalui organisasi pariwisata lokal juga berupaya meningkatkan pengelolaan dan promosi objek wisata di Selat Lembeh agar lebih menarik wisatawan.

Dukungan pemerintah pusat dan provinsi terfokus pada pembangunan infrastruktur jembatan penghubung dan bandara baru di Pulau Lembeh untuk memperkuat aksesibilitas, mendukung pengembangan pariwisata, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung dan sekitarnya.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kota Bitung yang terletak diujung utara pulau Sulawesi yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dioptimalkan sebagai keunggulan komparatif untuk memajukan ekonomi daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berikut beberapa aspek penting dari potensi tersebut:

A. Aspek Topografi.

Kota Bitung memiliki topografi tanah yang bervariasi untuk tiap kecamatan. Sebagian besar daratan Kota Bitung 45,06 persen berbukit dan 32,73 persen bergunung. Hanya 4,18 persen merupakan dataran landai serta sisanya 18,03 persen berombak. Mulai dari bagian Timur, dari pesisir pantai Aertembaga, sampai dengan Tanjung Merah di Bagian Barat merupakan dataran yang relatif cukup datar dengan kemiringan 0 – 15 derajat sehingga secara fisik dapat dikembangkan sebagai wilayah perkotaan, industri, perdagangan dan jasa serta pemukiman.

Pada bagian utara, keadaan topografi semakin bergelombang dan berbukit-bukit. Bagian utama dari lahan tersebut merupakan kawasan pertanian, perkebunan, hutan lindung, taman margasatwa dan cagar alam. Di bagian selatan terdapat sebuah pulau yaitu Pulau Lembeh. Keadaan tanahnya secara umum kasar dan ditutupi oleh tanaman kelapa, hortikultura serta palawija. Pulau Lembeh memiliki pesisir pantai yang indah dan mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari.

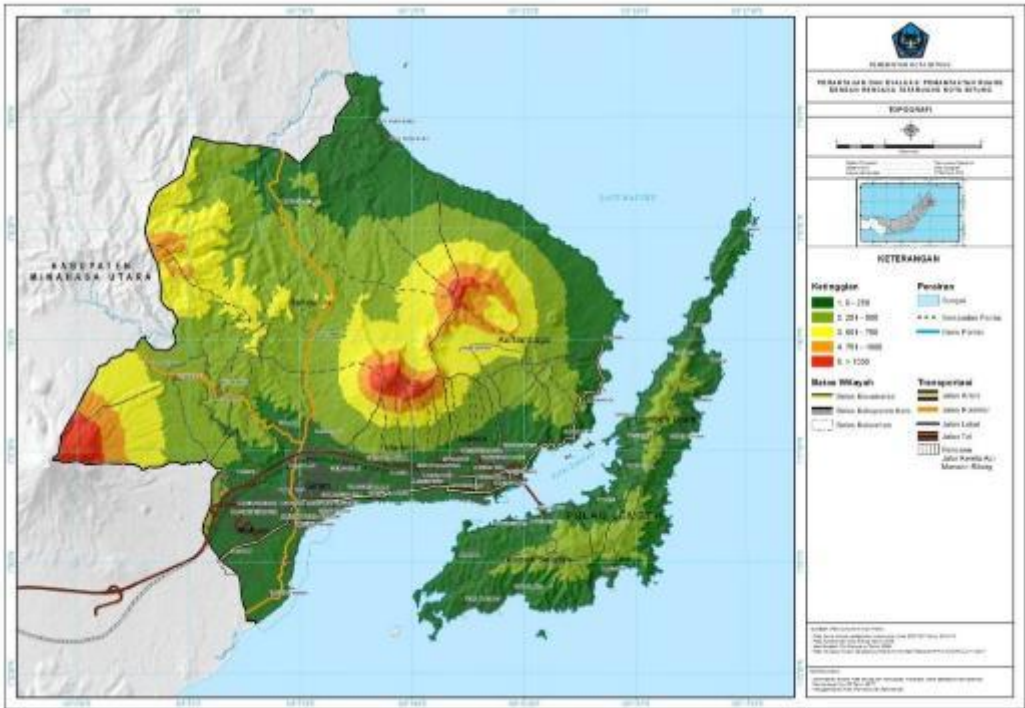
Kemiringan lereng di Kota Bitung sebagian besar didominasi oleh kelerengan antara 25 – 40 %. Hal ini terlihat dari luas wilayah kelerengan 25 – 40 % yang mempunyai wilayah terluas yaitu sebesar 11.759 Ha atau sekitar 37,52 % dari total luas Kota Bitung saat ini. Memang secara visual juga terlihat bahwa Kota Bitung hampir seluruh wilayahnya merupakan

daerah perbukitan atau pegunungan. Dan hasil perhitungan menunjukkan bahwa daerah yang datar yaitu kemiringan lereng antara 0 – 8 % hanya memiliki luas paling kecil, yaitu 2.274 % atau sebesar 7,89 % dari total luas kota Bitung.

Di Kota Bitung terdapat lima gunung, yaitu Gunung Duasudara (1.350 m), Gunung Tangkoko (870 m), Gunung Batu Angus (1.099 m), Gunung Klabat (1.990 m), Gunung Wiau (861 m). Gunung Batu Angus masih tercatat sebagai gunung berapi namun tidak aktif. Terdapat lima buah sungai kecil yang bermuara di Selat Lembeh, yaitu Girian, Sagerat, Tanjung Merah, Tewa'an, Rinondoran.

Kota Bitung merupakan satu-satunya kota di Sulawesi Utara dan bahkan kedua sesudah Kota Pontianak di Indonesia yang memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Sebagian besar hutan di Kota Bitung berdasarkan data BPS dapat diklasifikasikan dengan hutan lindung seluas 4.611 Ha, hutan wisata 1.271,5 Ha, dan hutan cagar alam 7.495 Ha².

Gambar 8
Peta Topografi Kota Bitung



Sumber: Draft Revisi RTRW Kota Bitung.

B. Aspek Hidrologi.

Dari aspek hidrologi, Kota Bitung memiliki air permukaan meliputi aliran-aliran sungai yang melintas di wilayah Kota Bitung, yaitu :

1. Sungai Girian, panjang 17.50 km.
2. Sungai Tewaan, panjang 8.75 km.
3. Sungai Batu Putih, panjang 9.25 km.
4. Sungai Rinondoran, panjang 11.25 km.
5. Sungai Sagerat, panjang 9.50 km.

Selain itu ada beberapa lokasi mata air di Kota Bitung yang memiliki debit air yang cukup besar, yaitu :

- Mata air dengan volume + 50 liter/detik, terletak di sekitar Lokasi RSUD Manembo-nembo.
- Mata air di kelurahan Danowudu yang dimanfaatkan Kota Bitung termasuk pelabuhan Bitung berlokasi di bagian utara kelurahan.
- Mata air (oleh masyarakat disebut mata air hujan) terletak di sebelah selatan kelurahan Donowudu yang berbatasan dengan kelurahan Girian Permai dan sudah dikelola oleh PDAM Bitung.
- Mata Air di kelurahan Tewaan, sekarang ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat umum tapi belum memenuhi syarat.
- Mata air di kelurahan Girian Indah (sebelah utara berbatasan dengan perkebunan kelurahan Danowudu kecamatan Ranowulu), saat ini dikelola dan dimanfaatkan oleh SECATA B (dahulu Dodik XII Wangurer) dan masyarakat kelurahan Girian Indah Lingkungan VI.
- Mata air di kelurahan Bitung Barat II.
- Mata air di kelurahan Aertembaga Dua (Lingkungan I).
- Mata air di kelurahan Makawidey (Lingkungan I).
- Mata air di kelurahan Kasawari.
- yang ditata dengan baik, untuk saat ini masih dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.

Dari gambaran dan penjelasan beberapa aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kota Bitung memiliki potensi sumber daya alam melimpah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu juga ada beberapa sektor potensi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi sektor perikanan, sektor perkebunan,

sektor pariwisata, dan sektor lainnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung. Berikut penjelasan beberapa sektor potensi yang berasal dari sumber daya alam di Kota Bitung:

1. Sumber Daya Laut: Kota Bitung memiliki garis pantai yang panjang dan akses langsung ke laut, sehingga memiliki potensi sumber daya laut termasuk ikan (Tuna, Cakalang, Tongkol), udang (Windu, Putih) dan kerang (Hijau, Kerang Darah, mutiara).
2. Perikanan: Kota Bitung memiliki potensi perikanan yang besar, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Bitung dikenal sebagai salah satu pusat perikanan terbesar di Indonesia, dengan hasil tangkapan unggulan seperti ikan cakalang, tuna, dan ikan layang. Produksi ikan cakalang (Skipjack Tuna) mencapai 21.248 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 410,7 miliar, Sementara itu, produksi ikan tongkol (eastern little tuna) juga menunjukkan angka yang signifikan, yakni 3.743ton dengan nilai produksi mencapai Rp 60,1 miliar pada tahun 2023, dengan nilai produksi yang signifikan. Sektor perikanan ini tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian lokal tetapi juga membuka peluang ekspor ke negara-negara lain.
3. Pertanian dan Perkebunan: Selain perikanan, Kota Bitung juga memiliki potensi dalam pertanian, seperti padi, jagung, dan kelapa. Produksi jagung mencapai sekitar 17.549 ton. Pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani.
4. Wisata bahari: Kota Bitung memiliki potensi wisata bahari yang besar, termasuk pantai, snorkeling dan diving.
5. Wisata alam: Kota Bitung memiliki potensi wisata alam seperti wisata alam (Geopark) Batu Angus, Taman Nasional Tangkoko yang memiliki keanekaragaman hayati, Hutan Mangrove Lirang, Gunung Duasudara, dll. Beberapa pengembangan wisata alam di Kota Bitung:
 - o Taman Wisata Alam (Geopark) Batu Angus adalah kawasan wisata alam yang terletak di Kelurahan Kasawari, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Tempat ini berjarak sekitar 45 km dari Manado.
 - Daya Tarik dan Sejarah:

Batu Angus terbentuk dari aliran lava yang membeku setelah letusan gunung berapi ribuan tahun lalu, menghasilkan formasi batuan hitam legam yang unik. Nama "Batu Angus" sendiri

berasal dari kondisi bebatuan di pantai yang berwarna hitam seperti hangus terbakar. Kawasan ini ditetapkan sebagai Monumen Alam (Natuurmonumenten) pada tahun 1919 pada masa kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, statusnya tetap dipertahankan dan dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tangkoko sejak tahun 2016.

- Spot Utama:

Taman Wisata Alam Batu Angus memiliki dua spot utama:

Padang Batu Lava: Pengunjung dapat menikmati panorama alam yang memadukan padang batu, hutan, padang semak, dan pantai.

Pantai dan Tebing: Pantai ini dikelilingi tebing tinggi yang menahan gelombang laut, menciptakan perairan yang tenang. Pengunjung dapat menikmati pemandangan tebing yang dramatis dan pulau-pulau kecil di sekitar pantai. Keindahan bawah lautnya juga memungkinkan aktivitas snorkeling.

- Flora dan Fauna:

Batu Angus juga menjadi habitat bagi berbagai satwa dan flora yang langka dan endemik. Beberapa fauna yang dapat ditemukan di sini antara lain Mahang (*Macaranga* sp.), Tangkasi (*Tarsius tarsier*), Rusa (*Rusa timorensis*), Yaki (*Macaca nigra*), Kus-kus (*Phalanger ursinus*), dan Raja Udang (*Tlelovon chotis*). Selain itu, terdapat juga flora endemik seperti Putat Laut (*Barringtonia* sp.), Pandan (*Pandanus* sp.), dan Bugis (*Diospyros* sp.). Terdapat 26 jenis mamalia yang teridentifikasi di sini, termasuk 10 spesies endemik Sulawesi, serta 180 jenis burung, dengan 59 di antaranya merupakan endemik Sulawesi.

- Fasilitas dan Aksesibilitas:

Taman Wisata Alam Batu Angus dapat diakses dengan kendaraan pribadi atau sewaan. Rute menuju lokasi mungkin memerlukan perhatian khusus karena beberapa arahan dari aplikasi peta daring dapat menyesatkan. Pengelola Taman Wisata Alam Batu Angus menyediakan tempat parkir yang luas. Dari area parkir, pengunjung harus berjalan kaki sekitar satu menit untuk mencapai lokasi utama.

- Tips Pengunjung:

Karena lokasinya merupakan kawasan terbuka dengan jalur trekking yang lumayan panjang, pengunjung disarankan untuk membawa air minum yang cukup. Terdapat warung kecil dan toilet di dekat tempat parkir.

- o Taman Nasional Tangkoko adalah kawasan konservasi seluas sekitar 8.700 hektare yang terletak di Kota Bitung, Sulawesi Utara, sekitar satu jam perjalanan dari Manado. Taman ini merupakan habitat bagi 47 spesies hewan endemik dan dilindungi, termasuk monyet hitam Sulawesi (*Macaca nigra* atau yaki), tarsius (mamalia terkecil di dunia), babirusa, anoa gunung, kuskus, maleo, dan berbagai jenis burung endemik seperti rangkong Sulawesi.

Taman Nasional Tangkoko memiliki beragam ekosistem mulai dari hutan hujan tropis, hutan lumut, hingga pantai berpasir putih, dengan topografi yang meliputi gunung, lembah, dan pantai. Kawasan ini juga dikenal sebagai tempat penelitian alam sejak abad ke-19 oleh Alfred Russel Wallace.

Pengunjung dapat menikmati wisata alam dengan mengamati satwa langka dalam habitat aslinya, trekking di hutan, dan menikmati pemandangan alam yang memukau. Taman ini juga berperan penting dalam konservasi keanekaragaman hayati Sulawesi Utara.

6. Sumber Daya Alam lainnya: Kota Bitung memiliki potensi sumberdaya alam lainnya seperti hutan, tanah, mineral (logam emas, Pasir, Batu), panas bumi disekitar gunung duasudara dan air yang melimpah.

Pengembangan potensi sumber daya alam di Bitung harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan:

1. Pengelolaan yang Bijaksana: Penggunaan sumber daya harus dilakukan dengan cara yang tidak melebihi kapasitas regeneratifnya dan menjaga kualitas lingkungan. Ini termasuk praktik konservasi dan pemanfaatan yang ramah lingkungan.
2. Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil. Ini juga membantu dalam menjaga keseimbangan sosial dan mengurangi konflik.
3. Kerjasama Multistakeholder: Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini akan mendorong

pengembangan yang lebih efisien dan berdampak positif terhadap lingkungan serta masyarakat.

Pengelolaan sumber daya ini secara berkelanjutan dan memanfaatkan teknologi yang tepat, Kota Bitung dapat mengoptimalkan keunggulan komparatifnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini akan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah dua konsep penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan perencanaan wilayah.

A. Kondisi Geologi.

Wilayah Kota Bitung merupakan suatu daerah berlahan khas gunung api yang dicirikan langsung oleh corak morfologi deretan kerucut vulkanik yang dibentuk oleh batuan vulkanik akibat aktifitas vulkanisme. Corak morfologi berintikan batuan vulkanik ini berada di dalam pengaruh iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi yang khas untuk daerah di dalam zona meridian. Jenis batuan, morfologi, aktifitas vulkanisme dan iklim ini mempengaruhi pembentukan tanah daerah ini. Batuan pembentuk lahan Wilayah Kota Bitung ditutupi oleh tanah lapukan dan endapan yang dapat digolongkan berdasarkan sifat fisik dan teknis ke dalam 4 (empat) satuan, yaitu : satuan pasir lempungan, satuan pasir kerikilan, satuan pasir gravel dan satuan pasir lumpuran.

Daya dukung dan kestabilan lahan suatu daerah untuk dapat memikul beban konstruksi ditentukan oleh morfologi permukaan lahan serta jenis dan tatanan material pembentuk lahan tersebut sebagai faktor internal di bawah pengaruh faktor external seperti kondisi iklim dan budidaya atau penggunaan lahan. Berdasarkan sifat fisik dan keteknikan tanah dan batuan serta morfologi bentang lahan, maka Wilayah Kota Bitung dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) satuan geologi teknik sesuai dengan daya dukung dan kestabilannya, yaitu :

- Satuan geologi teknik I yang berdaya dukung tinggi dengan kestabilan sedang tinggi.
- Satuan geologi teknik II yang berdaya dukung sangat tinggi dengan kestabilan rendah.

- Satuan geologi teknik III yang berdaya dukung rendah dengan kestabilan tinggi.

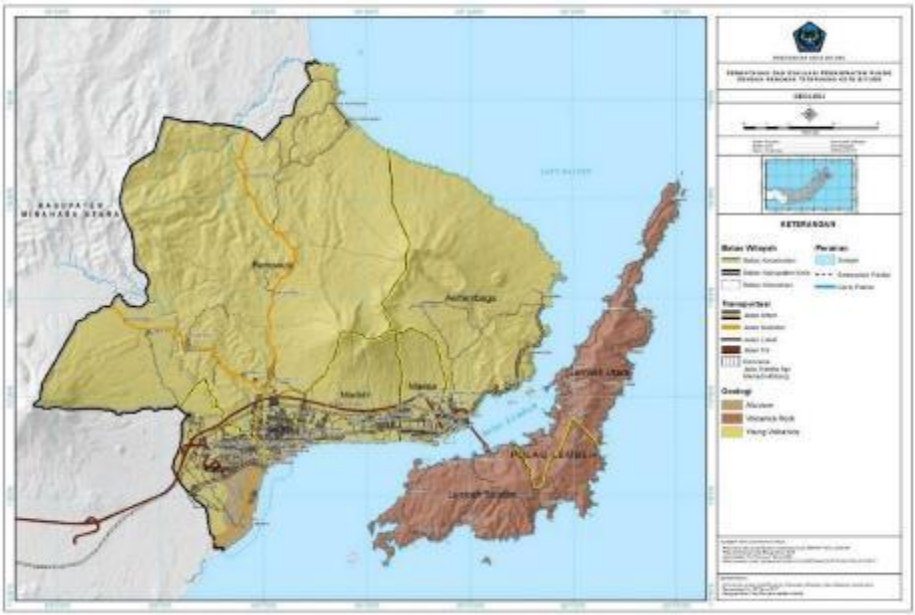
Satuan geologi teknik I umumnya meliputi lahan bagian selatan yang membentang dari barat ke timur mulai dari Sagerat hingga Tandurusa dan ke arah utara sampai daerah Danowudu dan sebagian lagi sekitar Pinasungkulan dan Tinerungan serta Batu Putih. Lahan daerah tersebut dibentuk oleh material pembentuk yang mampu memikul beban konstruksi berat serta relatif stabil. Kemampuan menopang beban konstruksi berat tersebut disebabkan oleh material pembentuknya yang terdiri atas batuan piroklastika sebagai batuan dasar yang ditutupi tanah lapukan pasir lanauan – lempungan dan tanah endapan jatuhan pasir kerikilan – lanauan serta tanah endapan terangkut pasir gravelan. Material ini mampu memikul beban konstruksi hingga 16 ton/cm² untuk fondasi dangkal bahkan hingga 96 ton/cm² untuk fondasi tinggi disebabkan oleh bentang lahan berupa pedataran hingga punggung perbukitan dengan kemiringan lereng yang datar hingga landai (<15%).

Satuan geologi teknik II ini umumnya meliputi lahan tubuh gunung api Dudasudara dan Tangkoko serta daerah pegunungan dan pebukitan yang sebagian dijadikan lokasi pemukiman, yaitu : Kelurahan Apela dan Tendeki di bagian barat serta Pinangunian, Tandurusa dan Makawidey di bagian timur. Lahan daerah tersebut dibentuk oleh material pembentuk yang mampu memikul beban konstruksi berat seperti halnya satuan geologi teknik I, namun kondisinya kurang stabil. Kemampuan menopang beban konstruksi tersebut bahkan lebih besar dan lebih ekonomis sebab tanah penutup batuan batuan dasar yang terdiri atas lapukan pasir lanauan – lempungan dan tanah endapan jatuhan pasir kerikilan – lanauan tersebut relatif lebih tipis (<1m) sehingga mudah untuk dikupas. Kondisi ini tidak memerlukan tiang pancang, karena fondasi dapat langsung diletakan pada batuan dasar yang mampu memikul beban konstruksi hingga 96 ton/cm², namun kondisinya relatif kurang stabil karena bentang lahan umumnya berupa pebukitan hingga pegunungan dengan kemiringan lereng yang agak curam hingga terjal (15-90%).

Untuk satuan geologi teknik III meliputi lahan di sepanjang daratan Aluvium pantai di sekitar muara sungai utama Sungai Girian dan Sungai Batu Putih serta sungai-sungai lainnya seperti Sungai Airprang. Lahan satuan ini dibentuk oleh material pembentuk yang kurang mampu memikul beban konstruksi berat meskipun kondisinya relatif lebih stabil. Ketidak

mampuan menopang beban konstruksi berat tersebut disebabkan oleh tutupan tanah endapan terangkut yang relatif tebal (5-40m) dan umumnya masih bersifat sangat urai dan sebagian bersifat lumpuran, meskipun umumnya terdiri atas pasir yang tersebar merata membentuk bentang lahan datar (<5%). Kondisi ini memang relatif sangat stabil namun memerlukan tiang pancang hingga kedalaman tersebut untuk konstruksi berat sehingga tidak ekonomis, sedangkan untuk konstruksi ringan dengan fondasi dangkal hanya mampu mendukung beban sebesar 4-6 ton/cm².

Gambar 9
Peta Geologi Kota Bitung



Sumber: Draft Revisi RTRW Kota Bitung

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Bitung.

Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, diantaranya yang disepakati oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada forum koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) seluruh Indonesia adalah penggunaan pendekatan jasa ekosistem yang mengacu pada klasifikasi Millenium Assesment (MEA) Tahun 2005 Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh manusia dari suatu ekosistem, makin tinggi ekosistem di suatu Kawasan berarti makin tinggi daya dukung kawasan tersebut. Berikut adalah klasifikasi jasa ekosistem menurut MEA.

Tabel 2
Klasifikasi Jasa Ekosistem Menurut MEA

Klasifikasi Layanan Ekosistem		Definisi Operasional Umum
Fungsi Penyediaan (<i>Provisioning</i>)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian & perkebunan untuk pangan, hasil peternakan

2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (<i>fiber</i>)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (<i>fuel</i>)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar dari fosil
Fungsi Pengaturan (<i>Regulating</i>)		
1	Pengaturan iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca & karbon
2	Pengaturan tata aliran air & banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Pengaturan penyerbukan alami (<i>pollination</i>)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama & penyakit	Distribusi habitat spesies <i>trigger</i> dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (<i>Cultural</i>)		
1	Spiritual & warisan leluhur	Ruang & tempat suci, peninggalan sejarah, peninggalan leluhur
2	Tempat tinggal & ruang hidup (<i>sense of place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang punya nilai sentimental
3	Rekreasi & ecotourism	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Ikatan budaya, adat, pola hidup	Keterikatan komunitas dan hubungan sosial, pelestarian keragaman budaya (misalnya komunitas nelayan, komunitas adat, masyarakat pedalaman, dll.)
5	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
6	Pendidikan & pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (<i>Supporting</i>)		
1	Pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (<i>nutrient</i>)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies
4	Biodiversity	Keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna

Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Berikut ini diuraikan/dijelaskan mengenai pendekatan jasa ekosistem daya dukung dan daya tampung kota bitung beserta detail definisinya:

1. Fungsi Penyediaan (*Provisioning*).

a. Analisis Jasa Lingkungan Penyedia Pangan.

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis

pangan di Indonesia sangat bervariasi seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, buah-buahan, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Indikator keadaan dan kinerjanya adalah stok total dan rata-rata dalam kg/ha serta produktivitas bersih (dalam kkal/ha/tahun atau unit lainnya). Hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan penyediaan pangan, sebaran wilayah fungsi ekosistem penyediaan pangan Kota Bitung disajikan dalam peta dan tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Berdasarkan Bentang Lahan Kota Bitung

Bentang Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	966.79	92.06	291.59	1,875.68	3,226.10
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	22.96	6.22	40.66	2,563.41	2,633.25
Pegunungan vulkanik kerucut bermaterial piroklastik	1,323.88	4.23	54.38	14,527.30	15,909.79
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	282.39	1.70	228.71	10,503.34	11,016.14
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	0.31		4.39	165.11	169.81
Total (Ha)	2,596.33	104.21	619.72	29,634.83	32,955.10

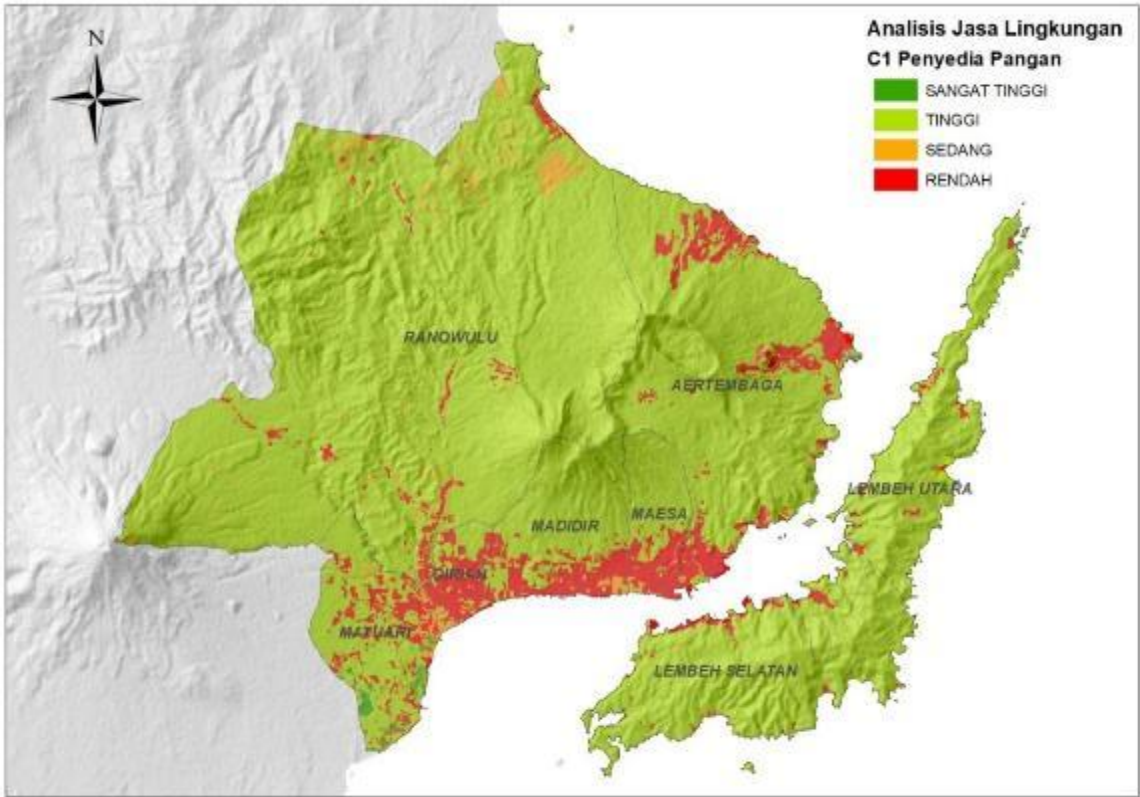
Sumber: Hasil Analisis KLHS

Tabel 4
Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Berdasarkan Tutupan Lahan Kota Bitung

Penutup Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Hutan Bakau/Mangrove	-	3.02	-	-	3.02
Hutan Rimba	-	-	40.73	9,218.35	9,259.08
Padang Rumput	-	-	395.03	-	395.03
Pasir/Bukit Pasir Darat	21.68	-	-	-	21.68
Pemukaman Khusus	5.23	-	-	-	5.23
Perkebunan/Kebun	-	-	62.45	17,435.95	17,498.41
Permukiman dan Tempat Kegiatan	1,774.06	-	-	-	1,774.06
Semak Belukar	-	-	119.59	2,602.00	2,721.58
Tanah Kosong/Gundul	795.36	-	-	-	795.36
Tegalan/Ladang	-	-	1.93	328.15	330.08
Total (Ha)	2,596.33	104.21	619.72	29,634.83	32,955.10

Sumber: Hasil Analisis KLHS

Gambar 10
Analisis Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kota Bitung



Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Berdasarkan hasil analisis fungsi jasa ekosistem penyedia pangan di Kota bitung secara keseluruhan yakni kategori rendah 8%, kategori sangat tinggi 0.32%, kategori sedang 2% dan kategori tinggi 90%.

b. Jasa Lingkungan Penyedia Air.

Ekosistem yang memberikan manfaat ketersediaan air baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestic, pertanian, industry maupun jasa. Penyediaan jasa air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti penutupan lahan. Indikator keadaannya adalah jumlah air dalam m³/ha. Sedangkan Indikator kinerjanya adalah jumlah air yang diambil secara terus-menerus (m³/ha/tahun). Dalam perhitungannya, jasa lingkungann penyediaan air dihitung menggunakan sumber atau stock air permukaan. Hasil perhitungan kenerja jasa lingkungan penyediaan air, sebaran wilayah fungsi ekosistem penyediaan air Kota Bitung disajikan sebagai berikut:

Tabel 5
Jasa Ekosistem Penyedia Air Berdasarkan Bentang Lahan Kota Bitung

Bentang Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	2,501.56	-	7.19	711.95	5.40	3,226.10
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	1,137.53	-	6.08	1,489.65	-	2,633.25
Pegunungan vulkanik kerucut bermaterial piroklastik	1,380.27	7,981.81	-	6,522.90	24.80	15,909.79



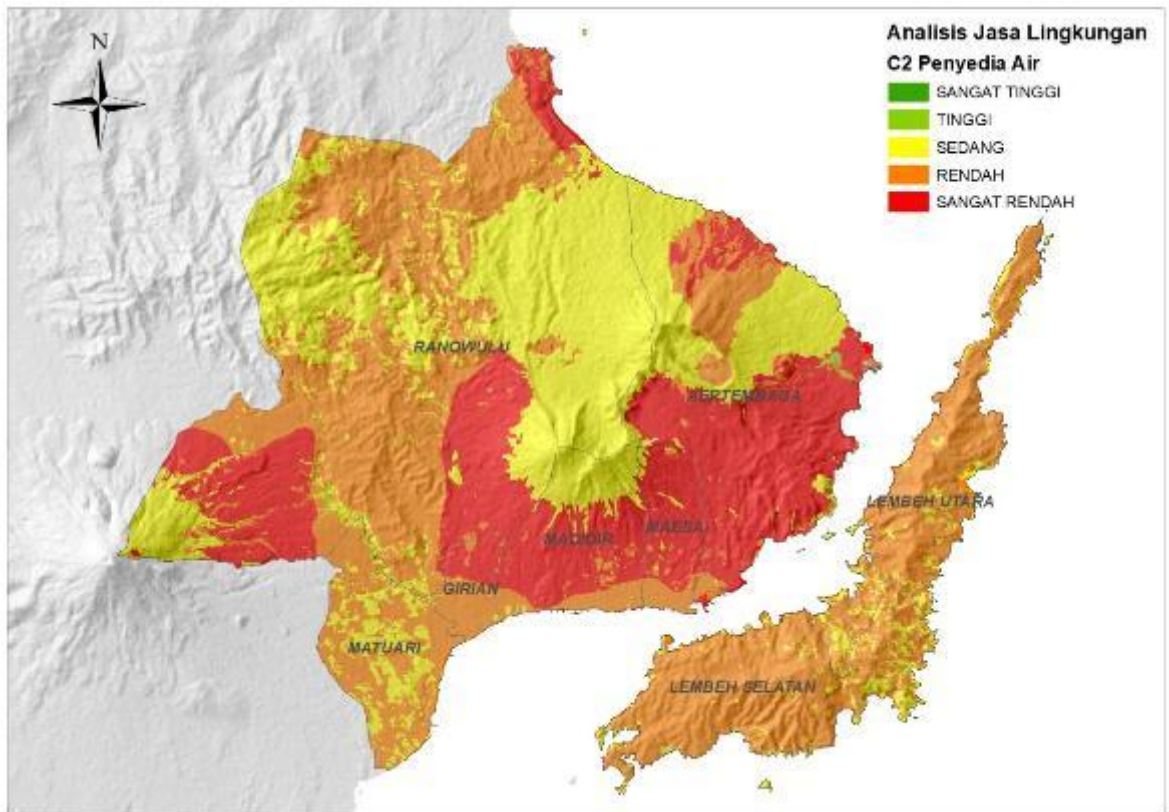
Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Tabel 6
Jasa Ekosistem Penyedia Air Berdasarkan Tutupan Lahan Kota Bitung

Penutup Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Total (Ha)
Hutan Bakau/Mangrove	3.02	-	-	3.02
Hutan Rimba	-	-	9,259.08	9,259.08
Padang Rumput	340.65	54.38	-	395.03
Pasir/Bukit Pasir Darat	8.31	13.37	-	21.68
Pemukaman Khusus	3.04	2.19	-	5.23
Perkebunan/Kebun	10,898.70	6,599.70	-	17,498.41
Permukiman dan Tempat Kegi	1,018.88	755.18	-	1,774.06
Semak Belukar	1,563.47	-	1,158.12	2,721.58
Tanah Kosong/Gundul	242.22	553.14	-	795.36
Tegalan/Ladang	47.02	-	283.05	330.08
Total (Ha)	14,163.20	7,981.81	10,754.23	32,955.10

Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Gambar 11
Analisis Jasa Ekosistem Penyedia Air Kota Bitung



Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Berdasarkan hasil analisis fungsi jasa ekosistem penyedia air di Kota bitung secara keseluruhan yakni kategori rendah 42.98%, kategori sangat rendah 24.22%, kategori sangat tinggi 0.07%, kategori sedang 32.63%, kategori tinggi 0.10%.

c. Penyediaan Serat, Bahan Bakar Dan Material Lain:

Serat (fiber) adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan / serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (3) serat mineral seperti logam dan carbon. Serat alami hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan menjadi material dasar dalam proses produksi dan industri serta *bio-chemical*

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan serat yaitu ketersediaan spesies atau komponen abiotic dengan potensi penggunaan kayu, bahan bakar atau bahan dasar. Serat alami meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam:

1. Serat tumbuhan/serat pangan



- 2. Serat tumbuhan/serat pangan
- 3. Serat kayu
- 4. Serat hewan
- 5. Serat mineral seperti logam dan karbon.

Serat alami hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan menjadi material dasar dalam proses produksi dan industry serta bio-chemical. Indikator keadaan dan kinerjanya adalah total biomassa dalam kg/ha serta jumlah optimum yang layak diekstrasi (dalam kg/ha/tahun). Hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan penyediaan serat, sebaran wilayah fungsi ekosistem penyediaan serat Kota Bitung disajikan sebagai berikut:

Tabel 7
Jasa Ekosistem Penyedia serat,bahan bakar dan material Berdasarkan Bentang Lahan Kota Bitung

Bentang Lahan Kota Bitung	Rendah	Sedang	Total (Ha)
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	1,869.54	1,356.56	3,226.10
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	178.94	2,454.32	2,633.25
Pegunungan vulkanik kerucut bermaterial piroklastik	2,787.18	13,122.61	15,909.79
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	1,324.34	9,691.80	11,016.14
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	25.94	143.87	169.81
Total (Ha)	6,185.94	26,769.16	32,955.10

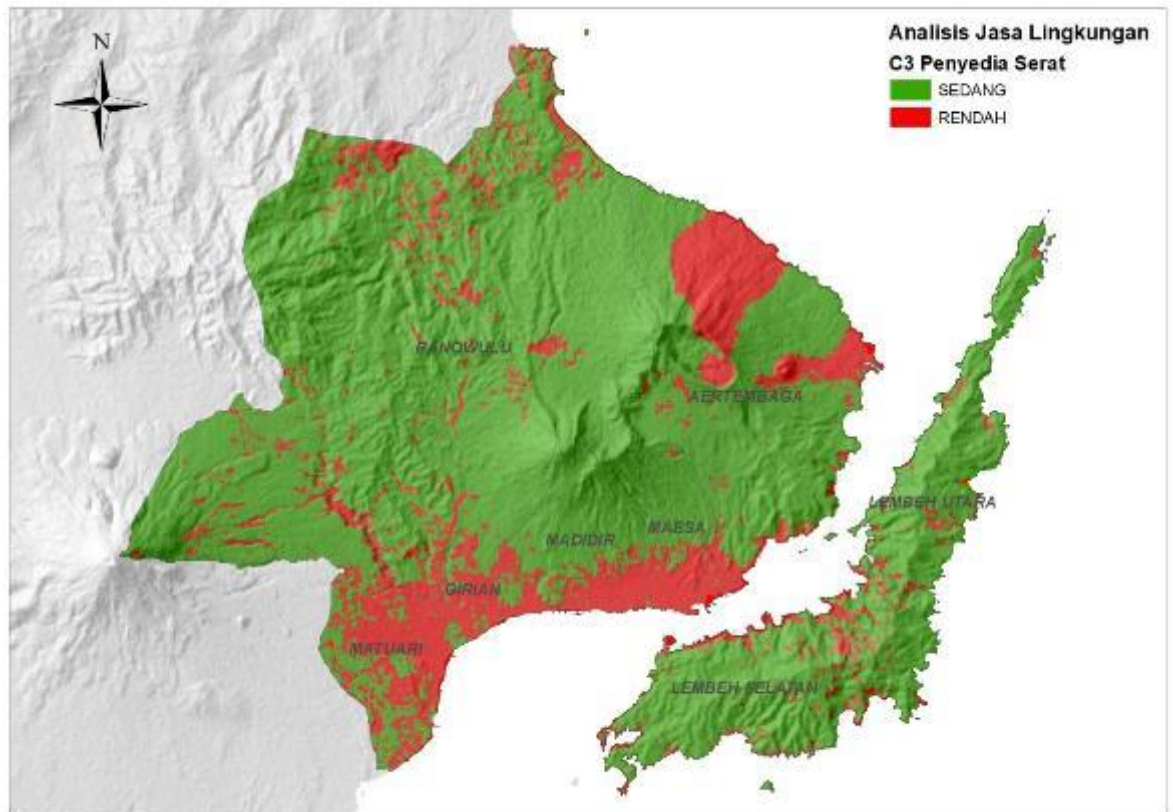
Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Tabel. 8
Jasa Ekosistem Penyedia serat,bahan bakar dan material Berdasarkan Tutupan Lahan Kota Bitung

Penutup Lahan Kota Bitung	Rendah	Sedang	Total (Ha)
Hutan Bakau/Mangrove	-	3.02	3.02
Hutan Rimba	-	9,259.08	9,259.08
Padang Rumput	395.03	-	395.03
Pasir/Bukit Pasir Darat	21.68	-	21.68
Pemakaman Khusus	5.23	-	5.23
Perkebunan/Kebun	-	17,498.41	17,498.41
Permukiman dan Tempat Kegi	1,774.06	-	1,774.06
Semak Belukar	2,721.58	-	2,721.58
Tanah Kosong/Gundul	795.36	-	795.36
Tegalan/Ladang	330.08	-	330.08
Total (Ha)	6,185.94	26,769.16	32,955.10

Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Gambar. 12
**Analisis Jasa Ekosistem serat,bahan bakar dan material
Kota Bitung**



Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Berdasarkan hasil analisis fungsi jasa ekosistem penyedia serat di Kota bitung secara keseluruhan yakni kategori rendah 19%, dan kategori sedang 81.23%

2. Fungsi Pengaturan (*Regulating*).

Jasa Lingkungan Pengaturan (*Regulating*) adalah manfaat yang diperoleh manusia dari pengaturan proses layanan ekosistem; pengaturan kualitas udara, pengaturan iklim, pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam banjir; longsor dan kebakaran, pengaturan air, pemurnian air, pengaturan penyerbukan alami, dan pengaturan pengendalian hama.

a. Pengaturan Kualitas Udara.

Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor – faktor meteorologis (angina, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Kapasitas ekosistem untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer, pada kawasan bervegetasi dan pada daerah



bertopografi tinggi umumnya lebih baik disbanding dengan daerah non vegetasi.

Tabel. 9
Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara Berdasarkan Bentang Lahan Kota Bitung

Bentang Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	1,576.54	-	43.83	1,598.54	7.19	3,226.10
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	130.39	-	1,470.92	1,007.14	24.81	2,633.25
Pegunungan vulkanik kerucut bermaterial piroklastik	8,790.14	572.54		24.80	6,522.31	15,909.79
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	1,021.82	-	1,205.99	8,779.11	9.22	11,016.14
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	19.57	-	0.33	149.40	0.52	169.81
Total (Ha)	11,538.45	572.54	2,721.06	11,559.00	6,564.04	32,955.10

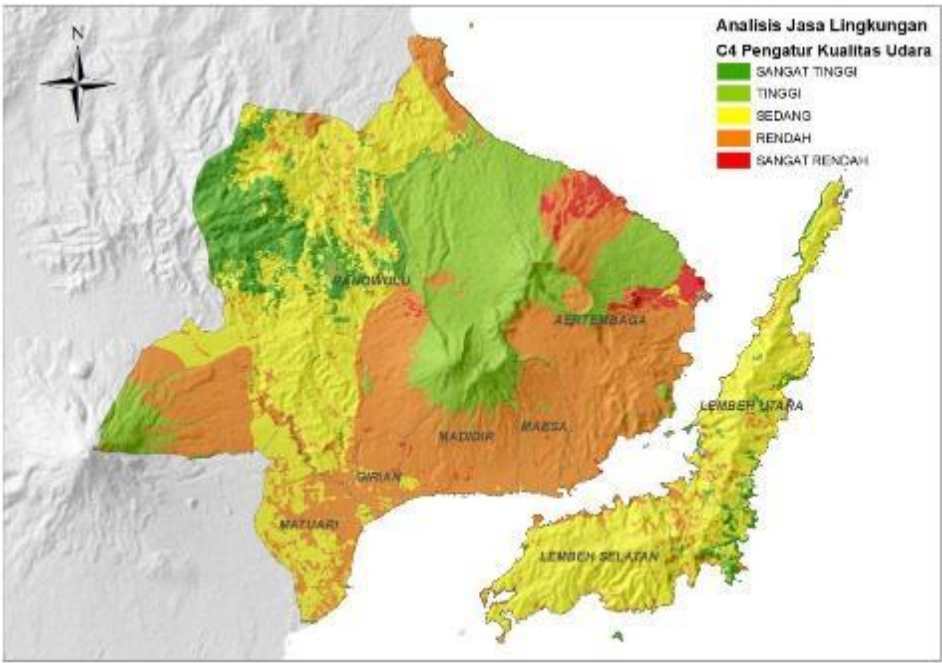
Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Tabel. 10
Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara Berdasarkan Tutupan Lahan Kota Bitung

Penutup Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Hutan Bakau/Mangrove	-	-	3.02	-	-	3.02
Hutan Rimba	-	-	2,718.05	-	6,541.04	9,259.08
Padang Rumput	54.38	-	-	340.65	-	395.03
Pasir/Bukit Pasir Darat	8.31	13.37	-	-	-	21.68
Pemukaman Khusus	3.04	2.19	-	-	-	5.23
Perkebunan/Kebun	6,599.70	-	-	10,898.70	-	17,498.41
Permukiman dan Tempat Kegiatan	1,774.06	-	-	-	-	1,774.06
Semak Belukar	2,721.58	-	-	-	-	2,721.58
Tanah Kosong/Gundul	242.22	553.14	-	-	-	795.36
Tegalan/Ladang	43.29	-	-	286.79	-	330.08
Total (Ha)	11,538.45	572.54	2,721.06	11,559.00	6,564.04	32,955.10

Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Gambar. 13
**Analisis Jasa Ekosistem pengaturan kualitas udara
Kota Bitung**



Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Berdasarkan hasil analisis fungsi jasa ekosistem pengatur kualitas udara di Kota bitung secara keseluruhan yakni kategori rendah 35%, kategori sangat rendah 1.74%, kategori sangat tinggi 8.26%, kategori sedang 35.07% dan kategori tinggi 19.92%.

b. Pengaturan Iklim.

Secara alamiah ekkosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan angina, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.



Tabel.11
Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Berdasarkan Bentang Lahan Kota Bitung

Bentang Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	1,002.82	-	43.83	2,166.86	12.59	3,226.10
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	23.10	-	1,470.92	1,114.43	24.81	2,633.25
Pegunungan vulkanik kerucut bermaterial piroklastik	0.39	1,327.73		8,059.37	6,522.31	15,909.79
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	283.72	-	1,205.99	9,514.56	11.87	11,016.14
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	0.31	-	0.33	168.65	0.52	169.81
Total (Ha)	1,310.34	1,327.73	2,721.06	21,023.87	6,572.10	32,955.10

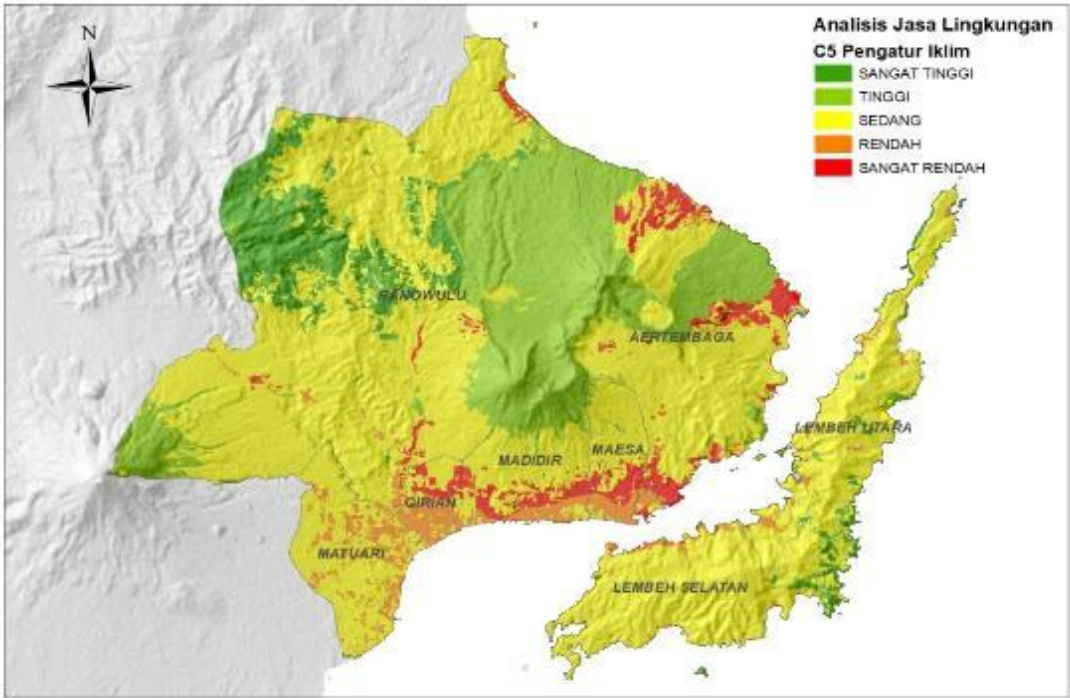
Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Tabel.12
Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Berdasarkan Tutupan Lahan Kota Bitung

Penutup Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Hutan Bakau/Mangrove	-	-	3.02	-	-	3.02
Hutan Rimba	-	-	2,718.05	-	6,541.04	9,259.08
Padang Rumput	-	-	-	395.03	-	395.03
Pasir/Bukit Pasir Darat	8.31	13.37	-	-	-	21.68
Pemukaman Khusus	3.04	2.19	-	-	-	5.23
Perkebunan/Kebun	-	-	-	17,498.41	-	17,498.41
Permukiman dan Tempat Kegi	1,018.88	755.18	-	-	-	1,774.06
Semak Belukar	-	-	-	2,721.58	-	2,721.58
Tanah Kosong/Gundul	242.22	553.14	-	-	-	795.36
Tegalan/Ladang	-	-	-	330.08	-	330.08
Total (Ha)	1,310.34	1,327.73	2,721.06	21,023.87	6,572.10	32,955.10

Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Gambar. 14
Analisis Jasa Ekosistem pengaturan Iklim Kota Bitung





Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Berdasarkan hasil analisis fungsi jasa ekosistem pengatur Iklim di Kota bitung secara keseluruhan yakni kategori rendah 5%, kategori sangat rendah 4.03%, kategori sangat tinggi 8.26%, kategori sedang 63.80% dan kategori tinggi 19.94%.

c. Pengaturan Perlindungan dan pencegahan dari Bencana Longsor.

Ruang Lingkup jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam longsor adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa bencana khususnya tanah longsor. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari longsor atau pergerakan tanah. Selain itu bentuklahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

Tabel.13
Jasa Ekosistem Mitigasi bencana Longsor Berdasarkan Bentang Lahan Kota Bitung

Bentang Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	966.79	-	11.45	2,176.11	71.76	3,226.10
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	22.96	-	6.08	1,114.57	1,489.65	2,633.25
Pegunungan vulkanik kerucut bermaterial piroklastik	8,034.36	1,323.88	-	3.84	6,547.71	15,909.79
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	282.39	-	1,217.86	9,514.56	1.33	11,016.14
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	0.31	-	0.85	168.65	-	169.81
Total (Ha)	9,306.81	1,323.88	1,236.24	12,977.74	8,110.44	32,955.10

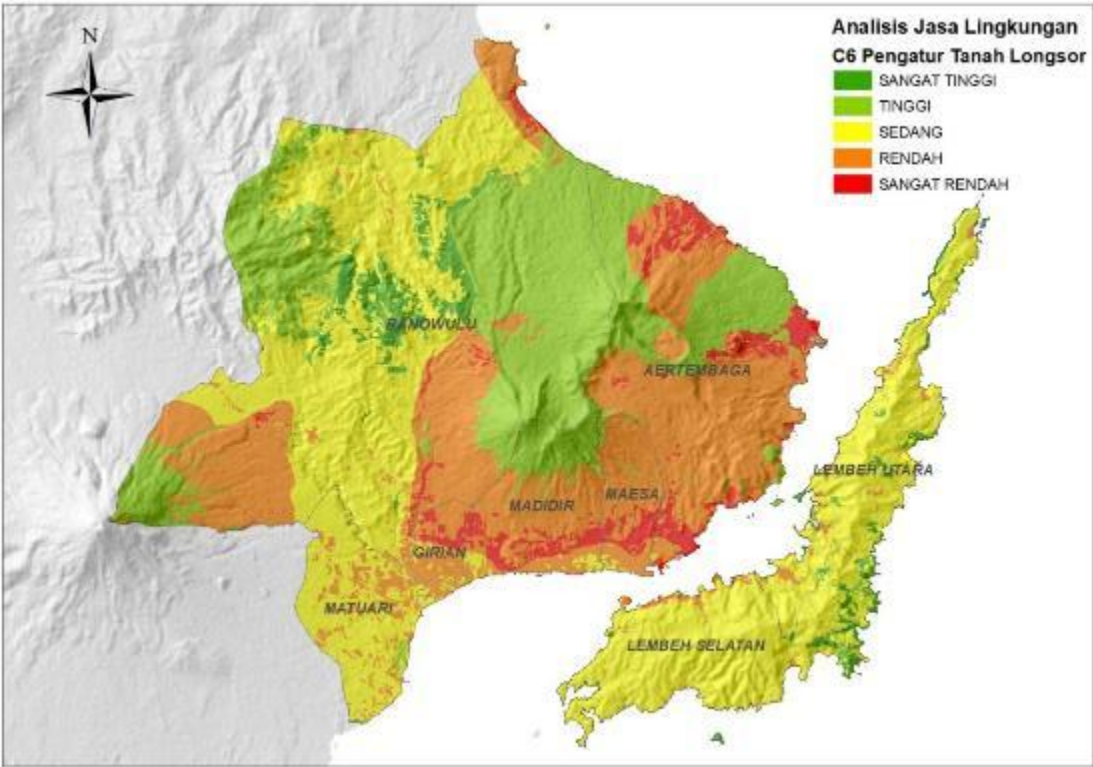
Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Tabel.14
Jasa Ekosistem Mitigasi bencana Longsor Berdasarkan Tutupan Lahan Lahan Kota Bitung

Penutup Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Hutan Bakau/Mangrove	-	-	3.02	-	-	3.02
Hutan Rimba	-	-	1,206.40	-	8,052.69	9,259.08
Padang Rumput	54.38	-	-	340.65	-	395.03
Pasir/Bukit Pasir Darat	8.31	13.37	-	-	-	21.68
Pemukaman Khusus	3.04	2.19	-	-	-	5.23
Perkebunan/Kebun	6,599.70	-	-	10,898.70	-	17,498.41
Permukiman dan Tempat Kegi	1,018.88	755.18	-	-	-	1,774.06
Semak Belukar	1,336.60	-	-	1,384.99	-	2,721.58
Tanah Kosong/Gundul	242.22	553.14	-	-	-	795.36
Tegalan/Ladang	43.29	-	-	286.79	-	330.08
Total (Ha)	9,306.81	1,323.88	1,236.24	12,977.74	8,110.44	32,955.10

Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Gambar.15
**Analisis Jasa Ekosistem pengaturan Mitigasi Longsor
Kota Bitung**



Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Berdasarkan hasil analisis fungsi jasa ekosistem pengatur Iklim di Kota bitung secara keseluruhan yakni kategori rendah 28%, kategori sangat rendah 4,02%, kategori sangat tinggi 3,75%, kategori sedang 39,38% dan kategori tinggi 24,61%.

d. Analisis Jasa Ekosistem Pengaturan Perlindungan dan pencegahan dari Bencana Banjir.

Jasa Pengaturan Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam banjir sebagai salah satu fungsi ekosistem yang mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa bencana seperti banjir. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari banjir.



Handwritten signature

Tabel.15
Jasa Ekosistem Mitigasi bencana Banjir Berdasarkan Bentang Lahan Kota Bitung

Bentang Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	1,862.35	-	40.82	1,312.73	10.21	3,226.10
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	172.86	-	1,495.73	964.67	-	2,633.25
Pegunungan vulkanik kerucut bermaterial piroklastik	6,600.30	2,762.38	-	-	6,547.11	15,909.79
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	1,315.12	-	1,215.21	8,485.82	-	11,016.14
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	25.42	-	0.85	143.54	-	169.81
Total (Ha)	9,976.05	2,762.38	2,752.59	10,906.76	6,557.32	32,955.10

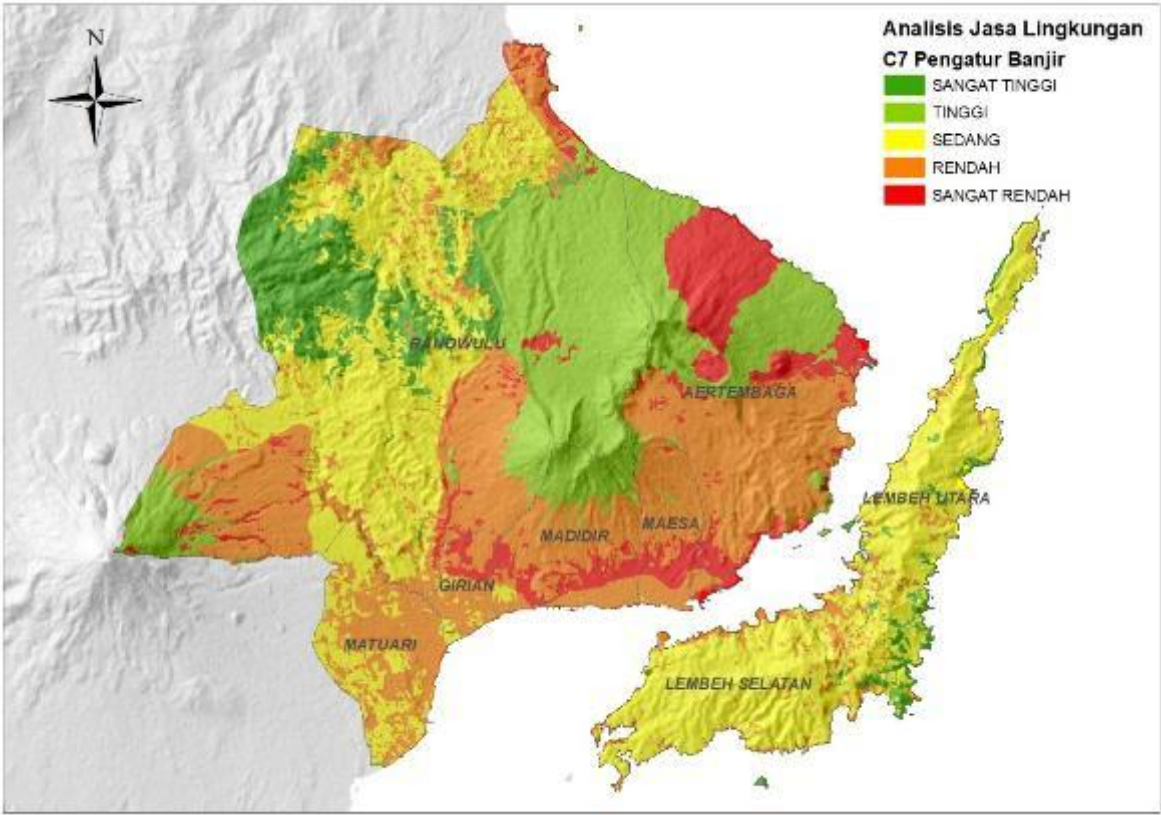
Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Tabel.16
Jasa Ekosistem Mitigasi bencana Banjir Berdasarkan Tutupan Lahan Kota Bitung

Penutup Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Hutan Bakau/Mangrove	-	-	-	-	3.02	3.02
Hutan Rimba	-	-	2,736.78	-	6,522.31	9,259.08
Padang Rumput	340.65	54.38	-	-	-	395.03
Pasir/Bukit Pasir Darat	8.31	13.37	-	-	-	21.68
Pemakaman Khusus	3.04	2.19	-	-	-	5.23
Perkebunan/Kebun	6,599.70	-	-	10,898.70	-	17,498.41
Permukiman dan Tempat Kegi	1,018.88	755.18	-	-	-	1,774.06
Semak Belukar	1,384.99	1,336.60	-	-	-	2,721.58
Tanah Kosong/Gundul	242.22	553.14	-	-	-	795.36
Tegalan/Ladang	286.79	43.29	-	-	-	330.08
Total (Ha)	9,976.05	2,762.38	2,752.59	10,906.76	6,557.32	32,955.10

Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Gambar.16
**Analisis Jasa Ekosistem Mitigasi bencana banjir
Kota Bitung**



Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Berdasarkan hasil analisis fungsi jasa ekosistem Mitigasi bencana banjir di Kota Bitung secara keseluruhan yakni kategori rendah 30%, kategori sangat rendah 8,38%, kategori sangat tinggi 8,35%, kategori sedang 33,10% dan kategori tinggi 19.90%.

e. Analisis Jasa Ekosistem Pengaturan Perlindungan dan pencegahan dari Bencana Kebakaran.

Kinerja jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana kebakaran adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada ifrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya kebakaran.



Tabel.17
Jasa Ekosistem Pengaturan, perlindungan dan pencegahan dari bencana kebakaran Berdasarkan Bentang Lahan Kota Bitung

Bentang Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	2,896.11	-	7.19	246.25	76.55	3,226.10
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	1,116.90	-	6.08	20.49	1,489.79	2,633.25
Pegunungan vulkanik kerucut bermaterial piroklastik	569.69	8,789.15	-	6,526.15	24.80	15,909.79
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	9,748.34	-	9.22	48.61	1,209.97	11,016.14
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	168.65	-	0.52	0.31	0.33	169.81
Total (Ha)	14,499.69	8,789.15	23.01	6,841.81	2,801.44	32,955.10

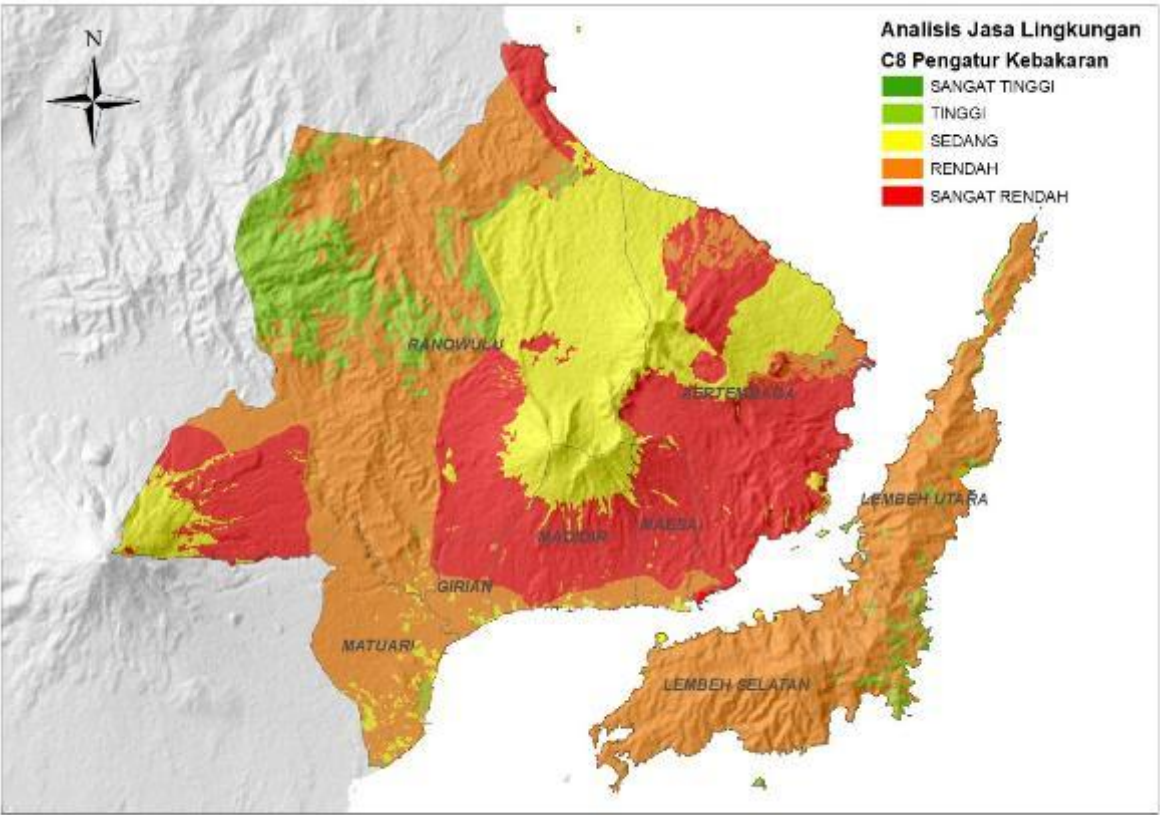
Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Tabel.18
Jasa Ekosistem Pengaturan, perlindungan dan pencegahandari bencana kebakaran Berdasarkan Tutupan Lahan Kota Bitung.

Penutup Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Hutan Bakau/Mangrove	-	-	-	3.02	3.02
Hutan Rimba	-	-	6,522.31	2,736.78	9,259.08
Padang Rumput	340.65	54.38	-	-	395.03
Pasir/Bukit Pasir Darat	13.37	-	8.31	-	21.68
Pemukaman Khusus	2.19	-	3.04	-	5.23
Perkebunan/Kebun	10,898.70	6,599.70	-	-	17,498.41
Permukiman dan Tempat Kegiat	1,018.88	755.18	-	-	1,774.06
Semak Belukar	1,384.99	1,336.60	-	-	2,721.58
Tanah Kosong/Gundul	553.14	-	242.22	-	795.36
Tegalan/Ladang	286.79	43.29	-	-	330.08
Total (Ha)	14,499.69	8,789.15	6,841.81	2,801.44	32,955.10

Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Gambar.17
**Analisis Jasa Ekosistem Pengaturan, perlindungan dan pencegahan
dari bencana kebakaran Kota Bitung**



Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Berdasarkan hasil analisis fungsi jasa ekosistem pengatur perlindungan, dan pencegahan dari bencana kebakaran di Kota bitung secara keseluruhan yakni kategori rendah 28%, kategori sangat rendah 4,02%, kategori sangat tinggi 3,75%, kategori sedang 39,38% dan kategori tinggi 24,61%.

f. Pengaturan Air.

Ekosistem Siklus Hidrologi adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan, pendinginan masa udara, hujan, dan pengaliran. Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, eevapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.



Ekosistem dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala. Indikator keadaannya adalah kapasitas infiltrasi (litology, topografi, curah hujan, vegetasi, tutupan) dan retensi air (vegetasi, topografi, litology) danalm m³ dan retensi air serta pengaruhnya terhadap wilayah hidrologis, serta infrastruktur alam untuk menyimpan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air (contohnya irigasi).

Tabel.19
Jasa Ekosistem Pengaturan Air Berdasarkan Bentang Lahan Kota Bitung

Bentang Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	966.79	-	51.02	2,202.89	5.40	3,226.10
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	1,114.57	22.96	-	-	1,495.73	2,633.25
Pegunungan vulkanik kerucut bermaterial piroklastik	8,038.79	1,323.88	-	-	6,547.11	15,909.79
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	9,515.89	282.39	-	2.65	1,215.21	11,016.14
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	168.65	0.31	-	-	0.85	169.81
Total (Ha)	19,804.69	1,629.55	51.02	2,205.55	9,264.29	32,955.10

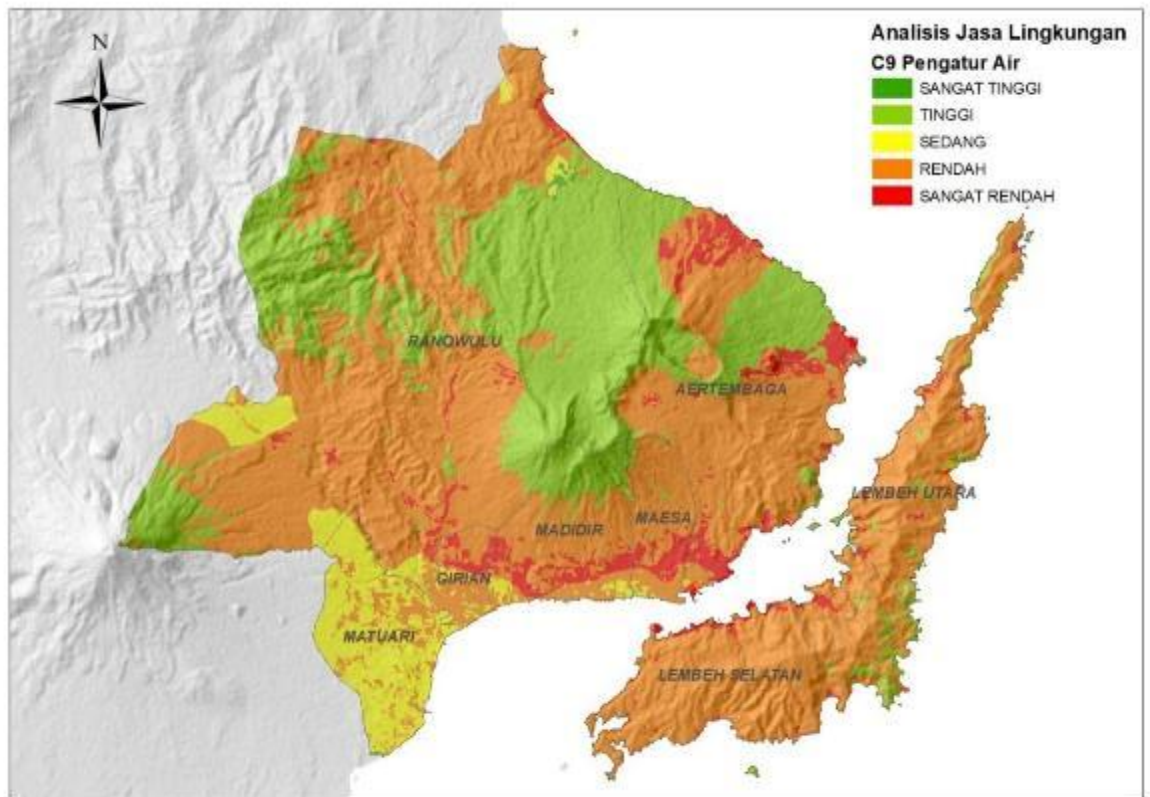
Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Tabel. 20
Jasa Ekosistem Pengaturan Air Berdasarkan Tutupan Lahan Kota Bitung

Penutup Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Hutan Bakau/Mangrove	-	-	3.02	-	-	3.02
Hutan Rimba	-	-	40.82	-	9,218.27	9,259.08
Padang Rumput	328.14	-	-	66.89	-	395.03
Pasir/Bukit Pasir Darat	3.73	17.95	-	-	-	21.68
Pemukaman Khusus	3.04	2.19	-	-	-	5.23
Perkebunan/Kebun	16,191.08	-	-	1,307.33	-	17,498.41
Permukiman dan Tempat Kegi	782.26	991.81	-	-	-	1,774.06
Semak Belukar	2,200.87	-	-	520.72	-	2,721.58
Tanah Kosong/Gundul	177.76	617.60	-	-	-	795.36
Tegalan/Ladang	111.15	-	-	218.92	-	330.08
Total (Ha)	19,804.69	1,629.55	51.02	2,205.55	9,264.29	32,955.10

Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Gambar.18
Analisis Jasa Ekosistem Pengaturan Air Kota Bitung



Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Berdasarkan hasil analisis fungsi jasa ekosistem pengatur air di Kota bitung secara keseluruhan yakni kategori rendah 60%, kategori sangat rendah 4,94%, kategori sangat tinggi 0,15%, kategori sedang 6,69% dan kategori tinggi 28,11%.

g. Pengaturan Pemurnian Air.

Ekosistem memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (self purification) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat.



Tabel. 21
Jasa Ekosistem Pemurnian Air Berdasarkan Bentang Lahan Kota Bitung

Bentang Lahan Kota Bitung	Rendah	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	3,175.08	51.02	-	3,226.10
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	-	1,156.26	1,476.99	2,633.25
Pegunungan vulkanik kerucut bermaterial piroklastik	9,362.68	6,547.11	-	15,909.79
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	9,800.93	1,205.99	9.22	11,016.14
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	168.96	0.33	0.52	169.81
Total (Ha)	22,507.66	8,960.71	1,486.73	32,955.10

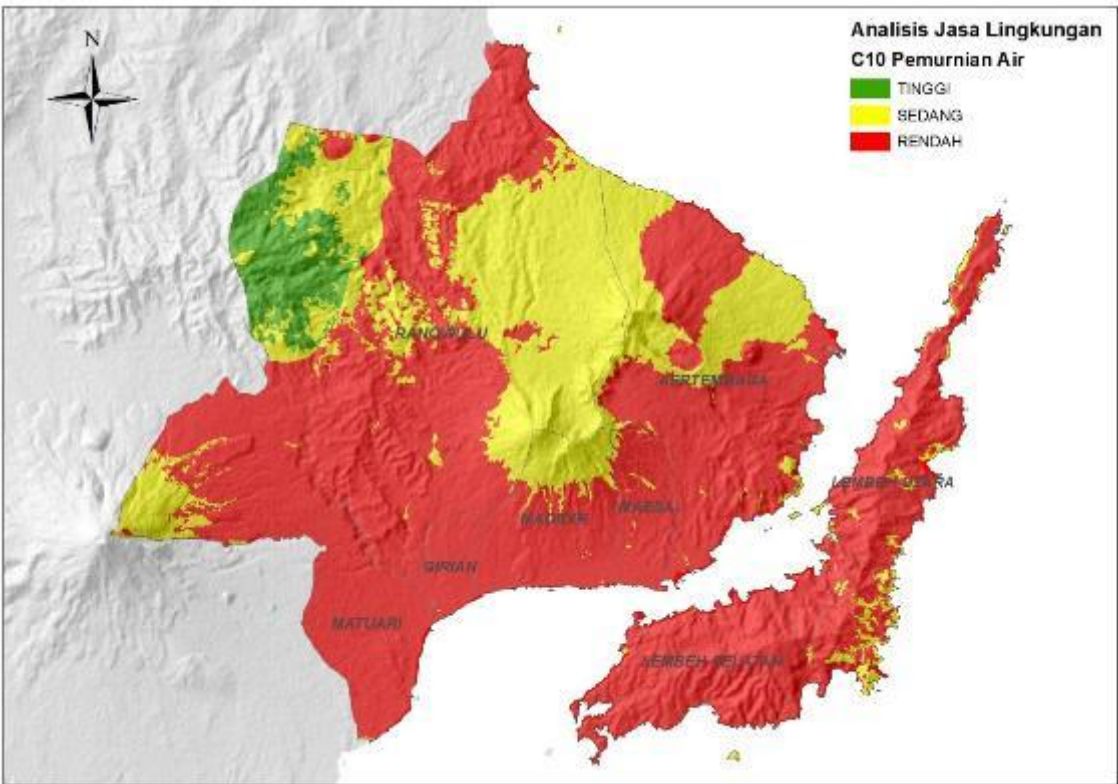
Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Tabel. 22
Jasa Ekosistem Pemurnian Air Berdasarkan Tutupan Lahan Kota Bitung

Penutup Lahan Kota Bitung	Rendah	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Hutan Bakau/Mangrove	-	3.02	-	3.02
Hutan Rimba	-	7,788.17	1,470.92	9,259.08
Padang Rumput	354.36	40.66	-	395.03
Pasir/Bukit Pasir Darat	21.68	-	-	21.68
Pemukaman Khusus	5.23	-	-	5.23
Perkebunan/Kebun	16,533.74	964.67	-	17,498.41
Permukiman dan Tempat Kegi	1,771.59	2.47	-	1,774.06
Semak Belukar	2,614.30	107.28	-	2,721.58
Tanah Kosong/Gundul	774.87	20.49	-	795.36
Tegalan/Ladang	328.27	1.81	-	330.08
Total (Ha)	22,404.04	8,928.57	1,470.92	32,955.10

Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Gambar.19
Analisis Jasa Ekosistem pemurnian Air Kota Bitung



Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Berdasarkan hasil analisis fungsi jasa ekosistem pemurnian air di Kota bitung secara keseluruhan yakni kategori rendah 68%, kategori sedang 27,19% dan kategori tinggi 4.51%.

h. Pengaturan Penyerbukan Alami.

Penyerbukan Alami adalah proses penyerbukan (berpindahnya serbuksari dari kepala sari ke kepala putik) yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau diantara bunga pada klon tanaman yang sama. Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat membantu proses penyerbukan alami. Habitat alami seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyadiakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah.

Tabel. 23
Jasa Ekosistem Pengaturan Penyebukan Alami Berdasarkan Bentang Lahan Kota Bitung

Bentang Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	3,169.68	43.83	5.40	7.19	3,226.10
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	-	1,489.65	1,137.53	6.08	2,633.25
Pegunungan vulkanik kerucut bermaterial piroklastik	9,362.08	6,522.31	25.40	-	15,909.79
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	9,798.28	1,205.99	2.65	9.22	11,016.14
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	168.96	0.33	-	0.52	169.81
Total (Ha)	22,499.01	9,262.10	1,170.98	23.01	32,955.10

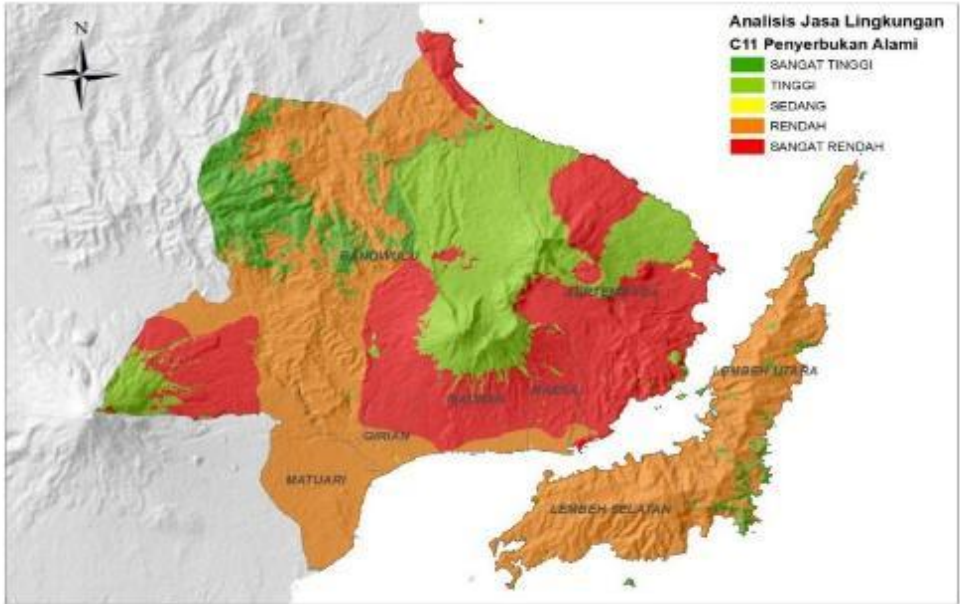
Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Tabel. 24
Jasa Ekosistem Pengaturan Penyebukan Alami Berdasarkan Tutupan Lahan Kota Bitung

Penutup Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Hutan Bakau/Mangrove	-	3.02	-	-	3.02
Hutan Rimba	-	9,259.08	-	-	9,259.08
Padang Rumput	354.36	-	40.66	-	395.03
Pasir/Bukit Pasir Darat	21.68	-	-	-	21.68
Pemukaman Khusus	5.23	-	-	-	5.23
Perkebunan/Kebun	16,533.74	-	964.67	-	17,498.41
Permukiman dan Tempat Kegi	1,771.59	-	2.47	-	1,774.06
Semak Belukar	2,614.30	-	107.28	-	2,721.58
Tanah Kosong/Gundul	774.87	-	20.49	-	795.36
Tegalan/Ladang	328.27	-	1.81	-	330.08
Total (Ha)	22,499.01	9,262.10	1,170.98	23.01	32,955.10

Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Gambar. 20
Analisis Jasa Ekosistem Pengaturan penyerbukan alami Kota Bitung





Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Berdasarkan hasil analisis fungsi jasa ekosistem pengatur penyerbukan alami di Kota bitung secara keseluruhan yakni kategori rendah 68%, kategori sangat tinggi 28.11%, kategori sedang 3,55% dan kategori tinggi 0.07%.

i. Pengaturan Pengendalian Hama.

Pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem secara alami menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit.

Tabel. 25
Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Berdasarkan Bentang Lahan Kota Bitung

Bentang Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	2,589.26	40.82	593.01	3.02	3,226.10
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	995.66	1,489.65	147.95	-	2,633.25
Pegunungan vulkanik kerucut bermaterial piroklastik	7,995.91	6,522.31	1,391.57	-	15,909.79
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	8,841.06	1,205.99	969.09	-	11,016.14
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	145.84	0.33	23.64	-	169.81
Total (Ha)	20,567.74	9,259.08	3,125.26	3.02	32,955.10

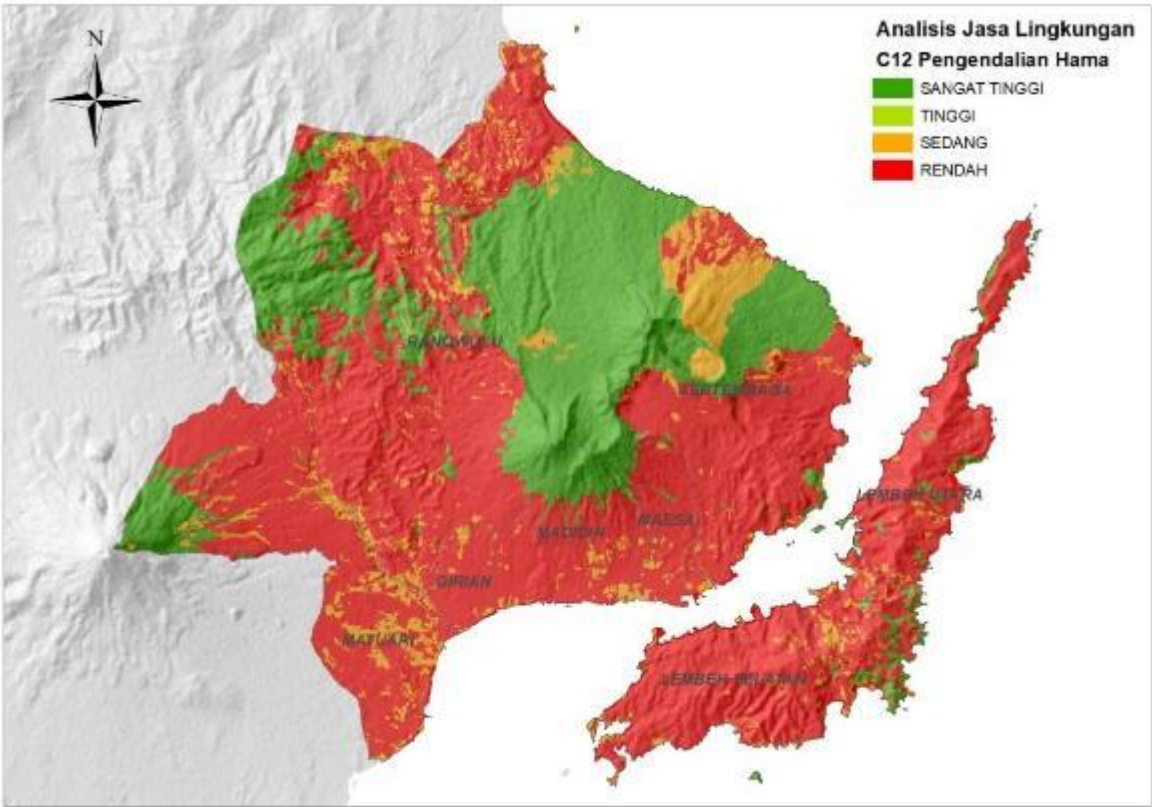
Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Tabel. 26
Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Berdasarkan Tutupan Lahan Kota Bitung

Penutup Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Hutan Bakau/Mangrove	-	-	-	3.02	3.02
Hutan Rimba	-	9,259.08	-	-	9,259.08
Padang Rumput	-	-	395.03	-	395.03
Pasir/Bukit Pasir Darat	21.68	-	-	-	21.68
Pemukaman	5.23	-	-	-	5.23
Perkebunan/Kebun	17,498.41	-	-	-	17,498.41
Permukiman dan Tempat Kegi	1,774.06	-	-	-	1,774.06
Semak Belukar	-	-	2,721.58	-	2,721.58
Tanah Kosong/Gundul	795.36	-	-	-	795.36
Tegalan/Ladang	330.08	-	-	-	330.08
Total (Ha)	20,567.74	9,259.08	3,125.26	3.02	32,955.10

Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Gambar. 21
**Analisis Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama
Kota Bitung**



Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Berdasarkan hasil analisis fungsi jasa ekosistem pengatur air di Kota bitung secara keseluruhan yakni kategori rendah 62%, kategori sangat tinggi 28,10%, kategori sedang 9,48% dan kategori tinggi 0,01%.

3. Fungsi Pendukung (Supporting).

Jasa lingkungan Pendukung (supporting) adalah layanan yang diperlukan untuk produksi semua layanan ekosistem lainnya; Habitat dan Keanekaragaman hayati; Pembentukan dan regenerasi tanah.

a. Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati.

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Dengan Indikator keadaan dan kinerja jumlah spesies dan individu transien (khususnya dengan nilai komersil) serta ketergantungan ekosistem lain (atau ekonomi)



pada jasa berkembang biak. Semakin tinggi fungsi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Tabel. 27

Jasa Ekosistem Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Bentang Lahan Kota Bitung

Bentang Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	1,833.45	1,274.75	-	66.89	51.02	3,226.10
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	24.91	-	1,495.73	1,112.62	-	2,633.25
Pegunungan vulkanik kerucut bermaterial piroklastik	1,371.40	-	6,547.11	7,991.28	-	15,909.79
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	9,572.23	-	1,215.21	228.71	-	11,016.14
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	164.57	-	0.85	4.39	-	169.81
Total (Ha)	12,966.56	1,274.75	9,258.89	9,403.88	51.02	32,955.10

Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Tabel. 28

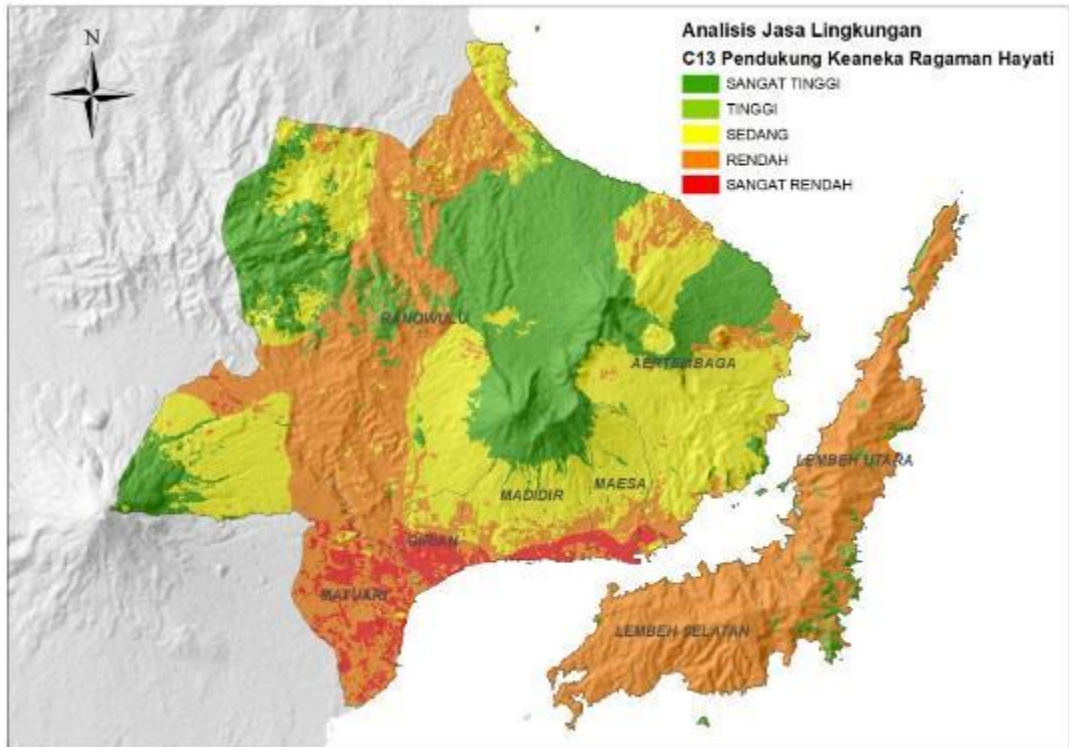
Jasa Ekosistem Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Tutupan Lahan Kota Bitung

Penutup Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Hutan Bakau/Mangrove	-	-	-	-	3.02	3.02
Hutan Rimba	-	-	9,218.27	-	40.82	9,259.08
Padang Rumput	-	-	-	395.03	-	395.03
Pasir/Bukit Pasir Darat	17.95	3.73	-	-	-	21.68
Pemukaman	2.19	3.04	-	-	-	5.23
Perkebunan/Kebun	9,934.03	-	-	7,564.37	-	17,498.41
Permukiman dan Tempat Keg	991.81	782.26	-	-	-	1,774.06
Semak Belukar	1,277.70	-	-	1,443.88	-	2,721.58
Tanah Kosong/Gundul	617.60	177.76	-	-	-	795.36
Tegalan/Ladang	111.15	218.92	-	-	-	330.08
Total (Ha)	12,966.56	1,274.75	9,258.89	9,403.88	51.02	32,955.10

Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Gambar. 22

Analisis Jasa Ekosistem Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Kota Bitung



Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Berdasarkan hasil analisis fungsi jasa ekosistem pengatur air di Kota bitung secara keseluruhan yakni kategori rendah 39%, kategori sangat rendah 3,87%, kategori sangat tinggi 28,10%, kategori sedang 28,54% dan kategori tinggi 0,15%.

b. Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah.

Ekosistem memberikan jasa pendukung pembentukan dan regenerasi tanah yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah maka pembentukan tanah semakin cepat. Regenerasi tanah dalam suatu ekosistem merupakan proses yang terintegrasi dan pergerakan/pemindahan energy dan hari didalam ekosistem itu sendiri dan juga interaksinya dengan atmosfir, biosfir, geosfir, dan hidrosfir. Energy yang dibutuhkan untuk menggerakkan sklus hara ini didapatkan dari proses yang terjadi pada biosfir yaitu proses fotosintesis.

Ekosistem secara alamiah memberikan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam tanah melalui serapan haranya dan kemudian diakumulasi dalam jaringan tumbuhan dan kembali lagi ke tanah baik langsung atau tidak langsung sebagai bahan organik. Proses dari serapan hara, akumulasi hara pada tubuh tumbuhan dan kembali ketanah melalui siklus yang bervariasi sesuai dengan kondisi tumbuhan,



iklim dan jenis tanahnya sendiri sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian yang tinggi.

Tabel. 29
Jasa Ekosistem Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah Berdasarkan Bentang Lahan Kota Bitung

Bentang Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Total (Ha)
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	3,182.27	43.83	-	3,226.10
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	1,036.33	1,489.65	107.28	2,633.25
Pegunungan vulkanik kerucut bermaterial piroklastik	9,387.48	6,522.31	-	15,909.79
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	9,810.15	1,205.99	-	11,016.14
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	169.48	0.33	-	169.81
Total (Ha)	23,585.71	9,262.10	107.28	32,955.10

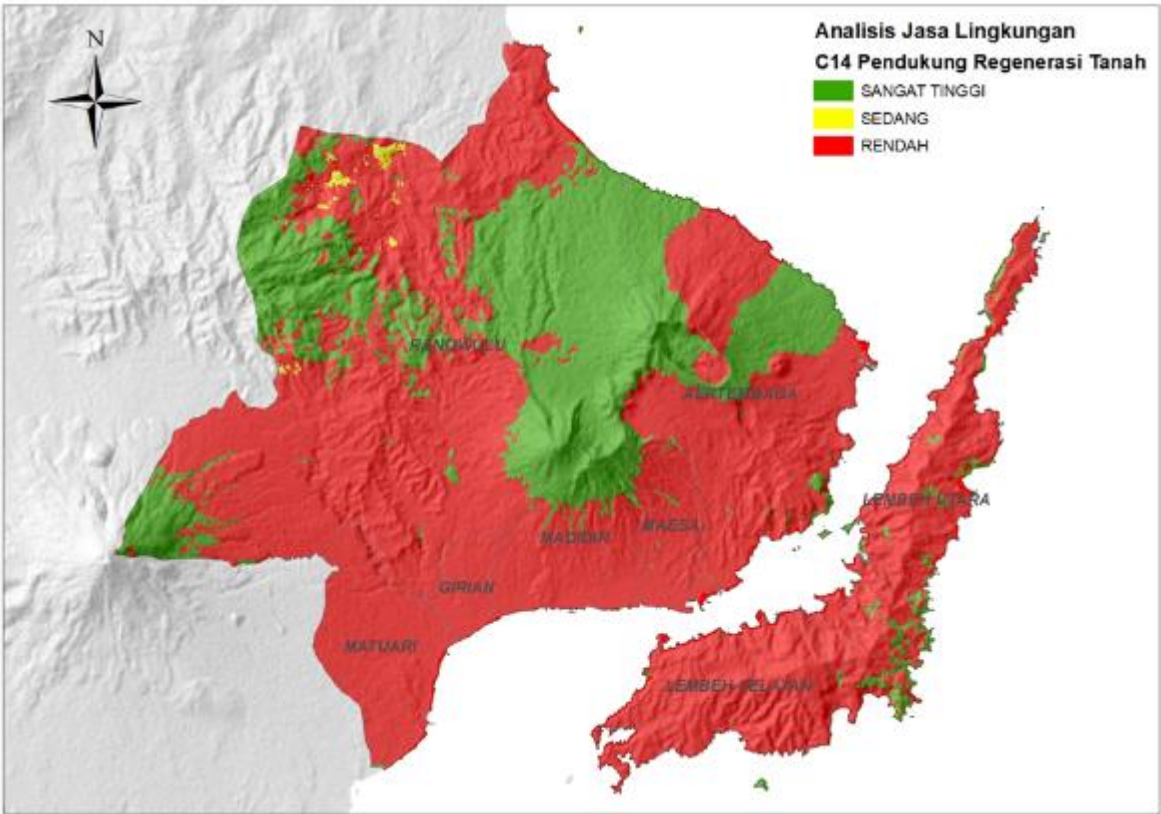
Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Tabel. 30
Jasa Ekosistem Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah Berdasarkan Tutupan Lahan Kota Bitung

Penutup Lahan Kota Bitung	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Total (Ha)
Hutan Bakau/Mangrove	-	3.02	-	3.02
Hutan Rimba	-	9,259.08	-	9,259.08
Padang Rumput	395.03	-	-	395.03
Pasir/Bukit Pasir Darat	21.68	-	-	21.68
Pemukaman	5.23	-	-	5.23
Perkebunan/Kebun	17,498.41	-	-	17,498.41
Permukiman dan Tempat Kegi	1,774.06	-	-	1,774.06
Semak Belukar	2,614.30	-	107.28	2,721.58
Tanah Kosong/Gundul	795.36	-	-	795.36
Tegalan/Ladang	330.08	-	-	330.08
Total (Ha)	23,585.71	9,262.10	107.28	32,955.10

Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Gambar. 23
Analisis Jasa Ekosistem Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah Kota Bitung



Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Berdasarkan hasil analisis fungsi jasa ekosistem pengatur air di Kota Bitung secara keseluruhan yakni kategori rendah 72%, kategori sangat tinggi 28,11%, kategori sedang 0,33%.

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan.

Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan di Kota Bitung sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi energi, air dan pangan saling berkaitan dan krusial untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia serta pembangunan berkelanjutan. Ketiga elemen ini membentuk suatu sistem yang kompleks, dimana keberhasilan satu aspek dapat mempengaruhi yang lainnya.

A. Ketahanan Energi.

Bitung memiliki infrastruktur yang kuat untuk ketahanan energi, terutama melalui Terminal BBM Bitung. Terminal ini menyuplai bahan bakar ke 65 SPBU dan beberapa industri di Sulawesi Utara, dengan kapasitas penyimpanan mencapai 44.000 kilo liter. Terminal ini juga berfungsi sebagai pusat distribusi bahan bakar untuk wilayah lain, memastikan ketersediaan energi yang stabil. Selain itu, terdapat upaya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga air dan biomassa.

Pemerintah Kota Bitung juga berupaya meningkatkan ketahanan energinya melalui pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Konsumsi listrik per kapita di Bitung merupakan indikator penting dalam menilai akses masyarakat terhadap energi. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

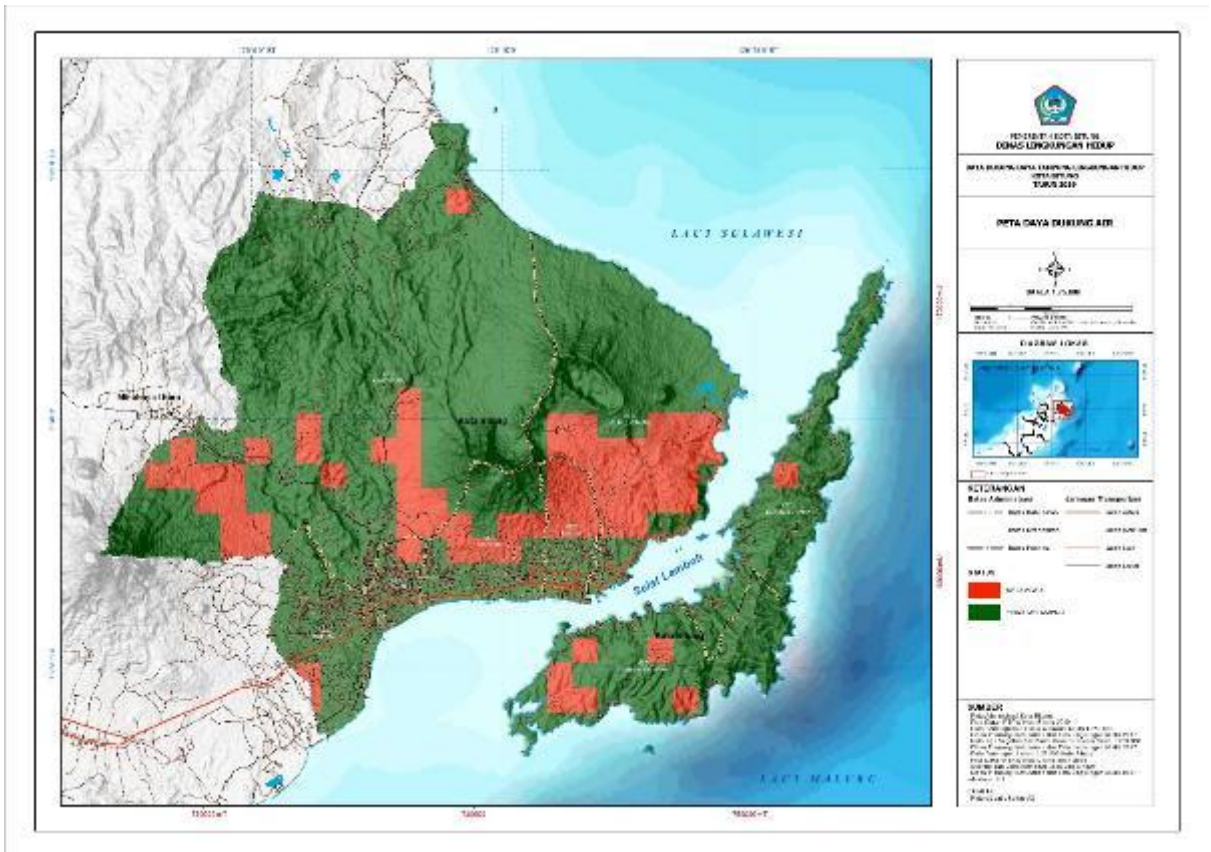
B. Ketahanan Air.

Ketahanan air di Bitung sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan sistem irigasi menjadi kunci untuk memastikan pasokan air yang cukup bagi pertanian dan kebutuhan domestik. Konservasi sumber daya air juga penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan.

Sumber daya air di Bitung sangat vital, dengan potensi yang besar namun seringkali terancam oleh alih fungsi lahan dan pengelolaan yang tidak terintegrasi. Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum yang aman adalah kunci untuk kesehatan masyarakat. Menurut data, sekitar 19,5% dari total pemanfaatan air digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengelolaan yang baik akan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan mendukung pertanian.

Perhitungan ketersediaan air dilakukan dengan mengidentifikasi nilai potensi air di Kota Bitung pada setiap sumber-sumber air dan daerah aliran sungai (DAS). Nilai ketersediaan air pada setiap grid dihubungkan dengan nilai kebutuhan air pada setiap grid. Hasil distribusi penduduk di Kota Bitung pada setiap grid, digunakan untuk menghitung kebutuhan penduduk dan lahan terhadap air yakni 86 % tidak melampaui dan 14% melampaui.

Gambar. 24
Status daya Dukung Air Kota Bitung



Sumber: Hasil Analisis KLHS.

C. Kemandirian Pangan.

Kemandirian pangan di Bitung dapat dicapai melalui diversifikasi produksi pangan lokal dan penguatan sistem pertanian. Program-program yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan serta pengelolaan sisa pangan juga diperlukan untuk mengurangi kerawanan pangan. Sinergi antara ketahanan energi dan air sangat penting, karena ketersediaan air yang baik akan meningkatkan produktivitas pertanian, yang pada gilirannya mendukung ketahanan pangan

Indeks ketahanan pangan menjadi ukuran penting untuk menilai kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan juga menjadi perhatian upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pangan lokal diperlukan untuk mengurangi angka tersebut.

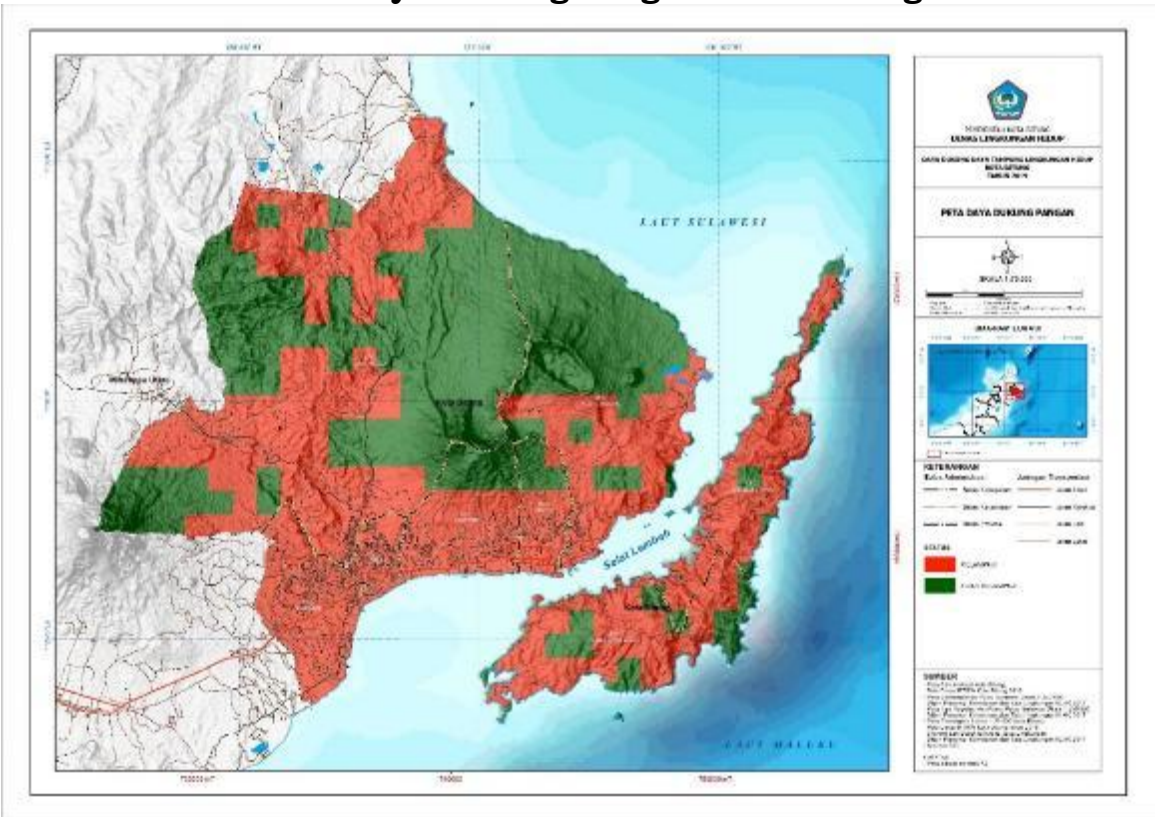
Ketiga aspek ini saling terkait dalam siklus kehidupan manusia. Misalnya, ketersediaan air yang cukup sangat penting untuk pertanian, yang pada gilirannya mempengaruhi kemandirian pangan. Energi diperlukan untuk mengolah dan mendistribusikan pangan, serta untuk mengelola sumber daya air. Oleh karena itu, pendekatan terpadu dalam pengelolaan energi, air, dan pangan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, integrasi antara ketahanan energi, air, dan pangan di Kota Bitung tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan secara lebih luas.

Hasil perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kota Bitung, kemudian digunakan untuk menghitung status daya dukung daya tampung pangan untuk mengetahui apakah terlampaui atau tidak terlampaui. Perhitungan status daya dukung daya tampung juga dilakukan untuk mengetahui jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung kebutuhan pangannya secara alamiah oleh karakteristik wilayah Kota Bitung (Ambang Batas Populasi).

Di Kota Bitung berdasarkan luas wilayah terdapat 94% status daya dukung pangan melampaui (tidak ada lagi kegiatan pertanian) dan 6% status daya dukung pangan tidak melampaui dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan adanya kegiatan pertanian sebagai penyedia pangan daerah.

Gambar. 25
Status daya Dukung Pangan Kota Bitung



Sumber: Hasil Analisis KLHS.

Status Daya Dukung Pangan Kota Bitung 57% Melampaui 43% Tidak melampaui (Defisit).

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kota Bitung, yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas. Walaupun Kota Bitung berhasil memenuhi kriteria lingkungan yang baik dan sehat, namun tantangan tetap ada, mengingat pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang pesat dapat memicu kerusakan lingkungan.

Pemerintah Kota Bitung bertekad untuk terus meningkatkan pengelolaan lingkungan, termasuk mengurangi limbah dan menjaga kebersihan kota. Program Adipura Kencana menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh. Melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pemerintah berharap dapat membangun kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan demi kesejahteraan bersama.

Dengan upaya berkelanjutan ini, Kota Bitung tidak hanya menjadi kota yang bersih dan hijau tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan berkelanjutan.

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Fluktuasi data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selama periode 2020-2024 mengindikasikan dinamika yang kompleks dalam pengelolaan lingkungan. IKLH sebagai instrumen pengukuran kondisi lingkungan berbasis tiga parameter utama yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), menunjukkan variasi yang dapat ditelaah lebih lanjut.

Pada tahun 2020, nilai IKLH berada pada 70,1 dengan kategori "Baik". Komposisi nilai berasal dari IKA sebesar 68,4, IKU sebesar 82,3, dan IKTL sebesar 59,6. Proporsi ini mengindikasikan bahwa kualitas udara memiliki kontribusi tertinggi terhadap keseluruhan nilai IKLH, sedangkan tutupan lahan menjadi komponen dengan nilai terendah. Fenomena ini sejalan dengan karakteristik pengelolaan lingkungan di banyak wilayah, di mana regulasi emisi udara relatif lebih mudah diterapkan dibandingkan konservasi tutupan lahan yang bersinggungan dengan berbagai kepentingan ekonomi dan sosial.

Pergerakan nilai IKLH pada tahun 2021 yang menurun menjadi 69,8 menunjukkan adanya penurunan kualitas



lingkungan secara marginal. Penurunan ini dipicu oleh menurunnya nilai IKA menjadi 67,9 dan IKTL menjadi 58,9, meskipun IKU mengalami peningkatan kecil menjadi 82,5. Pola ini mencerminkan adanya tekanan yang meningkat pada sumber daya air dan degradasi tutupan lahan, sementara pengendalian polusi udara menunjukkan kinerja yang sedikit membaik.

Tabel 31
IKLH Kota Bitung Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	IKLH	Status Kualitas Lingkungan
2020	68,4	82,3	59,6	70,1	Baik
2021	67,9	82,5	58,9	69,8	Baik
2022	68,2	82,7	58,3	69,7	Baik
2023	68,6	83,1	57,8	69,8	Baik
2024	69,0	83,5	57,5	70,0	Baik

Sumber: DLH (diolah)

Tahun 2022 mencatat nilai IKLH sebesar 69,7, dengan pola yang menarik dimana IKA meningkat menjadi 68,2 dan IKU juga meningkat menjadi 82,7, namun IKTL terus menurun menjadi 58,3. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun intervensi terhadap kualitas air dan udara menunjukkan hasil positif, tutupan lahan masih mengalami degradasi yang konsisten. Hal ini mengindikasikan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan tata guna lahan dan penegakan regulasi terkait perubahan alih fungsi lahan.

Pada tahun 2023, nilai IKLH kembali naik tipis menjadi 69,8. Peningkatan ini didukung oleh kenaikan IKA menjadi 68,6 dan IKU menjadi 83,1, namun IKTL masih menunjukkan tren penurunan menjadi 57,8. Data ini mengindikasikan keberhasilan program pengelolaan kualitas air dan udara, tetapi masih adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas tutupan lahan.

Tahun 2024 menunjukkan pemulihan nilai IKLH menjadi 70,0, didukung oleh peningkatan signifikan pada IKA yang mencapai 69,0 dan IKU yang naik menjadi 83,5. Namun, IKTL terus menunjukkan tren penurunan hingga mencapai 57,5. Fenomena ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan lingkungan, di mana kebijakan terkait air dan udara lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan konservasi

tutupan lahan.

Secara keseluruhan, meskipun nilai IKLH relatif stabil pada kisaran 69,7-70,1 dengan status "Baik" selama periode 2020-2024, terdapat indikasi adanya degradasi konsisten pada komponen IKTL yang menurun dari 59,6 menjadi 57,5. Penurunan ini perlu mendapatkan perhatian serius mengingat tutupan lahan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan berimplikasi pada berbagai aspek lingkungan lainnya, termasuk kualitas air dan udara dalam jangka panjang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan kualitas udara telah menunjukkan keberhasilan yang konsisten dengan peningkatan nilai IKU dari 82,3 menjadi 83,5 selama lima tahun. Demikian pula dengan kualitas air yang menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir, dari 68,2 pada tahun 2022 menjadi 69,0 pada tahun 2024. Namun, penurunan nilai IKTL sebesar 2,1 poin selama periode yang sama menjadi sinyal penting perlunya penguatan kebijakan dan implementasi program konservasi tutupan lahan.

Kesimpulannya, meskipun status IKLH tetap berada pada kategori "Baik" selama periode 2020-2024, terdapat ketidakseimbangan dalam pengelolaan komponen-komponen lingkungan. Kualitas udara dan air menunjukkan tren positif, namun degradasi tutupan lahan tetap menjadi tantangan utama yang perlu diatasi melalui implementasi kebijakan tata guna lahan yang lebih efektif, penegakan regulasi yang lebih ketat terhadap alih fungsi lahan, serta inisiatif konservasi dan rehabilitasi tutupan lahan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

B. Akses Sanitasi Aman.

Analisis data sanitasi di Kota Bitung periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan signifikan dalam penyediaan akses sanitasi aman bagi masyarakat. Berdasarkan data persentase akses sanitasi aman berdasarkan kecamatan, terlihat peningkatan konsisten di seluruh kecamatan dengan rata-rata kota yang meningkat dari 67,3% pada tahun 2020 menjadi 83,1% pada tahun 2024, atau terjadi peningkatan sebesar 15,8% selama lima tahun. Kecamatan Maesa konsisten menjadi wilayah dengan

akses sanitasi tertinggi, mencapai 90,5% pada tahun 2024, sementara Kecamatan Lembeh Utara meskipun mengalami peningkatan signifikan dari 51,3% menjadi 72,4%, masih menjadi wilayah dengan akses terendah.

Tabel. 32
Persentase Akses Sanitasi Aman Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Lembeh Selatan	54,2%	58,7%	63,5%	68,2%	72,8%
Madidir	75,6%	78,9%	82,3%	85,7%	88,4%
Ranowulu	58,3%	62,4%	67,1%	72,5%	76,9%
Aertembaga	72,5%	76,8%	81,2%	84,5%	87,3%
Matuari	70,2%	74,6%	78,5%	83,2%	86,6%
Girian	76,8%	81,4%	84,9%	87,2%	89,8%
Maesa	79,5%	83,2%	85,6%	88,3%	90,5%
Lembeh Utara	51,3%	55,9%	62,8%	67,1%	72,4%
Rata-rata Kota Bitung	67,3%	71,5%	75,7%	79,6%	83,1%

Sumber: Bappeda Kota Bitung (diolah).

Disparitas akses sanitasi antar kecamatan masih terlihat jelas, dengan selisih antara kecamatan tertinggi (Maesa) dan terendah (Lembeh Utara) mencapai 18,1% pada tahun 2024, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 28,2%. Hal ini mengindikasikan adanya upaya pemerataan akses sanitasi, namun masih diperlukan intervensi yang lebih intensif di kecamatan dengan akses rendah. Faktor geografis kemungkinan menjadi tantangan utama, terutama di wilayah kepulauan seperti Lembeh Utara dan Lembeh Selatan yang menunjukkan persentase akses lebih rendah dibandingkan kecamatan di daratan utama.

Tabel. 33
Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Tangga	65.874	67.215	68.523	70.152	73.450
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	44.333	48.059	51.872	55.841	61.037
Persentase	67,3%	71,5%	75,7%	79,6%	83,1%

Sumber: Bappeda Kota Bitung (diolah).

Dari perspektif jumlah rumah tangga, terjadi peningkatan

signifikan rumah tangga dengan akses sanitasi aman dari 44.333 pada tahun 2020 menjadi 61.037 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencapai 37,7% dalam lima tahun, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas cakupan sanitasi aman. Perlu dicatat bahwa jumlah rumah tangga meningkat 11,5% dalam periode yang sama, dari 65.874 menjadi 73.450 rumah tangga. Hal ini berarti penambahan akses sanitasi tidak hanya mengakomodasi pertumbuhan jumlah rumah tangga, tetapi juga berhasil mengurangi backlog sanitasi yang ada.

Tabel. 34
Akses Sanitasi Berdasarkan Jenis Fasilitas

Jenis Fasilitas	2020	2021	2022	2023	2024
Septik Tank Aman	56,2%	60,4%	65,1%	69,8%	74,3%
IPAL Komunal	8,6%	9,3%	9,7%	10,2%	10,8%
IPAL Terpusat	2,5%	2,8%	3,1%	3,5%	4,0%
Sanitasi Tidak Aman	32,7%	28,5%	24,3%	20,4%	16,9%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda Kota Bitung (diolah).

Analisis berdasarkan jenis fasilitas menunjukkan bahwa septik tank aman masih menjadi pilihan utama, dengan peningkatan dari 56,2% pada tahun 2020 menjadi 74,3% pada tahun 2024. Sementara itu, IPAL komunal mengalami peningkatan moderat dari 8,6% menjadi 10,8%, dan IPAL terpusat meningkat dari 2,5% menjadi 4,0%. Data ini mengindikasikan bahwa pendekatan sanitasi on-site masih dominan dibandingkan sistem off-site, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur jaringan perpipaan dan faktor biaya. Meskipun demikian, terjadi penurunan signifikan dalam persentase sanitasi tidak aman dari 32,7% menjadi 16,9%, yang menandakan keberhasilan program-program intervensi sanitasi.

Peningkatan akses sanitasi di Kecamatan Ranowulu yang mencapai 18,6% selama lima tahun (dari 58,3% menjadi 76,9%) menjadi yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain, diikuti oleh Lembeh Selatan dengan peningkatan 18,6% (dari 54,2% menjadi 72,8%). Hal ini menunjukkan adanya prioritas pada wilayah dengan akses rendah. Sementara itu, kecamatan dengan akses

sanitasi tinggi seperti Maesa dan Girian menunjukkan peningkatan yang lebih moderat, masing-masing sebesar 11,0% dan 13,0% selama periode yang sama.

Perbandingan data tahun 2022-2023 menunjukkan peningkatan akses sanitasi aman sebesar 3,9% (dari 75,7% menjadi 79,6%), sementara pada tahun 2023-2024 terjadi peningkatan sebesar 3,5% (dari 79,6% menjadi 83,1%). Perlambatan laju peningkatan ini mengindikasikan tantangan yang semakin kompleks dalam mencapai target universal access, terutama untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani di daerah terpencil atau kawasan dengan kendala teknis. Meskipun demikian, pencapaian 83,1% pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan mendekati target nasional.

Tren peningkatan akses IPAL, baik komunal maupun terpusat, meskipun masih relatif kecil, menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju sistem pengelolaan air limbah yang lebih berkelanjutan. Peningkatan akses IPAL terpusat dari 2,5% menjadi 4,0% selama lima tahun mengindikasikan upaya pengembangan infrastruktur sanitasi perkotaan, namun masih memerlukan investasi yang lebih besar untuk mencapai skala yang signifikan.

Secara keseluruhan, peningkatan akses sanitasi aman di Kota Bitung dari 67,3% pada tahun 2020 menjadi 83,1% pada tahun 2024 menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan dan program sanitasi. Namun, masih terdapat 16,9% rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi aman, yang mengindikasikan perlunya strategi yang lebih terintegrasi dan inovatif untuk mencapai target universal access. Perhatian khusus perlu diberikan pada wilayah dengan akses terendah seperti Lembah Utara dan Lembah Selatan, serta pengembangan infrastruktur IPAL yang lebih masif untuk memperbaiki kualitas pengelolaan air limbah secara keseluruhan.

C. Pengelolaan Sampah.

Timbunan sampah di Kota Bitung dikelola melalui sistem pengolahan sampah yang terintegrasi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah berupaya untuk memastikan layanan pengumpulan sampah berjalan dengan baik.

Program pengelolaan sampah termasuk penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Aertembaga untuk mengurangi dampak limbah padat terhadap lingkungan.

- Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Kota Bitung mencapai 95,76%. Ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyediaan fasilitas sanitasi yang aman dan layak bagi penduduk. Pemerintah setempat dan berbagai lembaga terus berupaya memperbaiki infrastruktur sanitasi. Kebijakan ini sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi risiko penyakit terkait sanitasi buruk. Program-program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) diperkenalkan untuk memastikan pengelolaan limbah yang efektif dan aman.
- Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah: Di Kota Bitung, pengelolaan timbunan sampah terolah dilakukan melalui sistem yang terintegrasi antara pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir. Saat ini, volume sampah yang dihasilkan mencapai 677,71 m³ per hari, namun hanya sekitar 393,95 m³ per hari yang berhasil diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Aertembaga. Tingkat pelayanan pengangkutan sampah saat ini berada di angka 58,13%, menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan efisiensi dalam sistem pengelolaan sampah. Fasilitas pengolahan sampah di Kota Bitung mencakup beberapa tempat penampungan sementara (TPS) dan armada kendaraan yang terdiri dari dump truck dan arm roll truck. Dengan total 21 unit kendaraan, upaya untuk meningkatkan jumlah sampah yang terangkut ke TPA terus dilakukan. Melalui optimasi sistem, jumlah sampah terangkut dapat ditingkatkan menjadi 472,20 m³ per hari. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program-program untuk mengurangi timbunan sampah anorganik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Program "Lima Bersih untuk Penyelamatan Lingkungan dan Pelayanan" menjadi salah satu inisiatif untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, Kota Bitung berupaya menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan demi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah: proporsi rumah tangga yang memiliki layanan penuh pengumpulan

sampah masih menjadi tantangan. Saat ini, tingkat pelayanan pengangkutan sampah hanya mencapai 58,13%, yang berarti kurang dari setengah dari total timbunan sampah yang dihasilkan dapat terangkut dan dikelola dengan baik. Dengan volume sampah harian sekitar 677,71 m³, hanya sekitar 393,95 m³ yang berhasil diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA) di Aertembaga. Hal ini menunjukkan adanya selisih signifikan antara jumlah sampah yang dihasilkan dan yang terkelola, dengan sekitar 283,76 m³ sampah tidak terangkut setiap harinya. Pemerintah Kota Bitung berupaya meningkatkan layanan pengumpulan sampah melalui berbagai program dan inisiatif. Namun, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh. Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam program pengumpulan dan pengolahan sampah secara efektif.

D. Tindakan Terhadap pencemaran.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pencemaran. Keluhan dari masyarakat mengenai pencemaran limbah, harus ditindaklanjuti melalui tindakan tegas dari Dinas Lingkungan Hidup. Beberapa perusahaan telah dikenakan sanksi administratif, agar pencemaran jangka panjang dapat diminimalisir. Tindakan terhadap pencemaran di Kota Bitung meliputi beberapa upaya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan masyarakat, antara lain:

- DLH Kota Bitung memberikan tindakan dan sanksi administratif berupa pembinaan dan teguran bertahap perusahaan yang melakukan pencemaran limbah. Sanksi ini dianggap dapat memberi efek jera bagi perusahaan atau pelaku usaha.
- DLH melakukan pengawasan dan pemantauan langsung di lapangan untuk memantau pembuangan limbah agar sesuai dengan izin dan baku mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
- Pemerintah Kota Bitung juga mendukung program pengurangan pencemaran udara, misalnya melalui program Langit Biru yang didukung Pertamina, serta upaya mengurangi penggunaan plastik untuk menekan pencemaran sampah.

- Pemerintah Daerah, Instansi Teknis dan Masyarakat, melakukan kegiatan pembersihan pantai untuk mencegah pencemaran laut dari sampah.
- Dalam kasus pencemaran oleh beberapa perusahaan, Dinas Lingkungan Hidup memberikan peringatan dan ancaman penutupan jika perusahaan tidak memperbaiki sumber pencemaran dan akan ditindaklanjuti melalui penegakan hukum lingkungan.

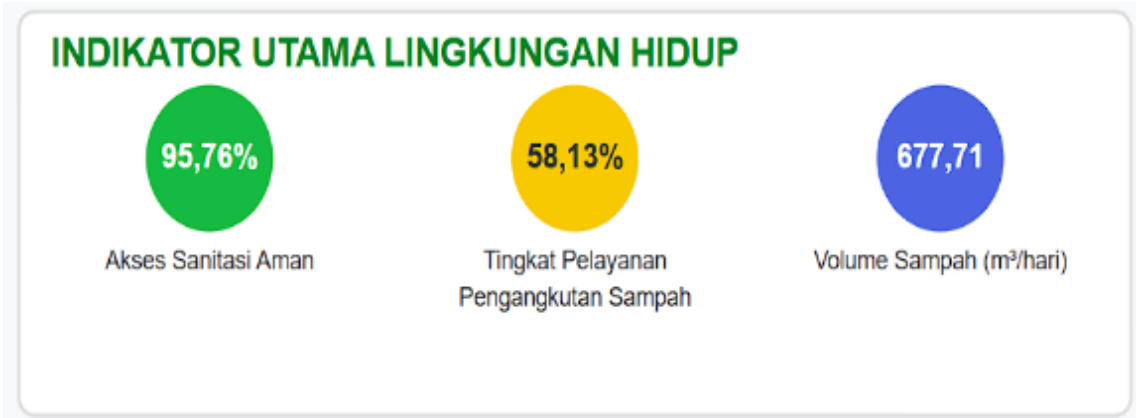
Secara keseluruhan, tindakan di Kota Bitung melibatkan pengawasan, pemberian sanksi administratif, pembinaan, dukungan program lingkungan, serta partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas menjadi kebutuhan untuk mengatasi pencemaran secara efektif.

Untuk mencapai peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Kota Bitung memperkuat pengawasan terhadap pencemaran lingkungan, memastikan akses sanitasi aman bagi seluruh masyarakat, dan meningkatkan sistem pengelolaan sampah. Langkah-langkah ini akan mendukung terciptanya lingkungan hidup yang lebih baik dan mendukung produktivitas masyarakat.

E. Peran Strategis Kota Bitung di Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Wilayah Sekitar.

Kota Bitung memiliki posisi strategis sebagai kota pelabuhan dan industri di Sulawesi Utara, menjadikannya berperan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang mempengaruhi wilayah sekitarnya. Dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menunjukkan kinerja baik, Kota Bitung berpotensi menjadi model pengelolaan lingkungan bagi kota-kota sekitarnya di Sulawesi Utara. Penerapan standar lingkungan yang tinggi di kawasan industri Bitung memberikan dampak positif pada kualitas lingkungan di wilayah pesisir sekitarnya, termasuk ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir di beberapa kabupaten tetangga.

Gambar. 26
Indikator Utama Lingkungan Hidup



Sumber: KLHS Kota Bitung (Diolah)

Pencapaian akses sanitasi aman yang mencapai 95,76% menempatkan Kota Bitung sebagai contoh dalam implementasi kebijakan sanitasi yang baik. Hal ini menjadi referensi bagi kabupaten sekitar dalam pengembangan infrastruktur sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik. Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang diterapkan Kota Bitung berpotensi menjadi model yang dapat diadopsi oleh wilayah sekitarnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat regional.

Dalam hal pengelolaan sampah, meskipun masih menghadapi tantangan dengan tingkat pelayanan pengangkutan sampah 58,13%, sistem pengelolaan sampah terintegrasi Kota Bitung dengan penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di TPA Aertembaga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sistem pengelolaan sampah regional. Sebagai kota dengan aktivitas ekonomi dan industri yang tinggi, pengelolaan sampah yang baik di Bitung tidak hanya berdampak pada kota itu sendiri tetapi juga mencegah pencemaran lintas wilayah, terutama di wilayah pesisir dan laut yang berbatasan dengan kabupaten lain.

Program "Lima Bersih untuk Penyelamatan Lingkungan dan Pelayanan" yang diimplementasikan Kota Bitung dapat menjadi model edukasi lingkungan dan partisipasi masyarakat yang dapat diadopsi oleh wilayah sekitarnya. Pengelolaan lingkungan yang baik di Kota Bitung juga mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Sulawesi Utara, mengingat banyak destinasi wisata alam yang terletak di sekitar Kota Bitung, seperti



Taman Nasional Bunaken dan pulau-pulau di sekitarnya.

Gambar. 27

Peran Strategis Kota Bitung Terhadap Wilayah Sekitar



Sumber: KLHS Kota Bitung (Diolah).

Dengan posisi geografisnya yang strategis sebagai kota pelabuhan, Bitung memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah pencemaran lintas batas yang dapat mempengaruhi ekosistem laut regional. Pengelolaan limbah industri dan aktivitas pelabuhan yang baik tidak hanya melindungi lingkungan Kota Bitung sendiri tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam di wilayah sekitarnya yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat regional, terutama sektor perikanan dan pariwisata bahari.

2.1.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Klimatologi Kota Bitung umumnya adalah daerah yang beriklim tropis, hanya dikenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin bertiup di wilayah ini. Pada bulan Oktober sampai dengan bulan April biasanya terjadi hujan penyebabnya karena angin bertiup dari arah Barat/Barat Laut yang banyak mengandung air, dan sebaliknya adalah musim kemarau yang terjadi pada bulan Juli sampai dengan bulan September hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh arus angin dari arah Timur yang tidak banyak mengandung air. Secara umum suhu rata-rata per bulan menurut hasil pengukuran Stasiun Meteorologi Bitung pada tahun 2020 adalah rata-rata suhu udara terendah terjadi pada bulan Juli yakni 27,39 oC dan tertinggi 28,80 oC dibulan Mei.

Sebagai daerah tropis Bitung mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata per bulan pada tahun 2020 berkisar antara 75,81 persen sampai dengan 83,11 persen. Jumlah curah hujan di Kota Bitung cukup beragam menurut bulan. Menurut catatan dari Stasiun Meteorologi Bitung curah hujan tertinggi selama tahun 2020 terjadi pada bulan September yang mencapai 351,50 mm³, sedangkan terendah pada bulan Agustus curah hujan yakni 30,20 mm³. Di bulan Juli diwarnai dengan hari hujan terbanyak yakni 27 hari.

Kota Bitung pada tahun 2022 mengalami bencana yang diakibatkan oleh peristiwa hujan lebat sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa jenis bencana di kawasan rawan bencana. Hujan lebat tersebut tidak hanya mengakibatkan bencana banjir, tetapi juga bencana tanah longsor dan pohon tumbang. Hal tersebut segera mendapat penanganan dari perangkat daerah terkait. Kegiatan penangan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Assesment di rumah terdampak banjir dan longsor di Kelurahan Danowudu.
2. Melakukan Assesment dan penanganan di rumah terdampak banjir di belakang Gereja GMIM Sentrum.
3. Melakukan Assesment dan Penanganan rumah warga yg tertimpah pohon di Kelurahan Danowudu.
4. Melakukan peninjauan lokasi banjir di Kelurahan Aertembaga 2 Lingkungan 2 RT 4.
5. Melakukan peninjauan sekaligus Assesment longsor di rumah warga Kelurahan Paceda Lingkungan 4 RT 15.
6. Melakukan peninjauan sekaligus Assesment longsor di Pateten dua Kel. Janis-Matubu.
7. Melakukan peninjauan sekaligus Assesment longsor di rumah raga Kelurahan Tandurusa.

Selain itu, dilakukan assessment di 18 Kelurahan dengan 26 titik lokasi sebagai berikut:

1. Kelurahan Wangurer Barat.
2. Kelurahan Wangurer Utara.
3. Kelurahan Paceda 3 titik.
4. Kelurahan Girian Permai.
5. Kelurahan Danowudu 2 titik.
6. Kelurahan Aertembaga Dua.
7. Kelurahan Tandurusa.

8. Kelurahan Pateten Dua 2 titik.
 9. Kelurahan Bitung Tengah 3 titik.
 10. Kelurahan Kakenturan Dua.
 11. Kelurahan Kareko.
 12. Kelurahan Paudean.
 13. Kelurahan Batulubang.
 14. Kelurahan Bitung Timur.
 15. Kelurahan Makawidey.
 16. Pintu Kota.
 17. Tanjung Merah.
 18. Manembo nembo Atas.
- Total 18 Kelurahan 26 Lokasi.

A. Kawasan Rawan Bencana Alam di Kota Bitung meliputi:

1. Kawasan Gempa bumi.

Gempa bumi merupakan fenomena alam yang waktu kejadiannya tidak bisa diprediksi. Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam PP No. 26 tahun 2008 adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI).

Tujuan perlindungan terhadap Kawasan Rawan Gempa Bumi adalah untuk melindungi manusia dan kegiatan dari bencana akibat terjadinya gempa bumi maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng/kulit bumi aktif yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga lempeng tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga lempeng Indo- Australia menunjam ke bawah lempeng Euro-Asia. Penunjaman lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara dengan lempeng Euro-Asia yang bergerak ke selatan menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunung api aktif sepanjang Pulau Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, belok ke utara ke Maluku dan Sulawesi Utara, sejajar dengan jalur penunjaman kedua lempeng. Daerah rawan gempa bumi di Indonesia tersebar pada daerah yang terletak dekat zona penunjaman maupun sesar aktif.

Kota Bitung tergolong daerah dengan tingkat ancaman “tinggi” terhadap gempa bumi (Peta Indeks Ancaman Gempa bumi di Indonesia, BNPB). Dari tingkat kerugian tinggi/sedang dan tingkat kapasitas

rendah/sedang, maka wilayah yang berpotensi berada di Kelurahan Papusungan, Bitung Timur, Peteten Dua, Peteten Satu, Manembo Nembo, Bitung Barat Satu, Madidir Unet, Bitung Barat Dua, Pinokalan, Paceda, Manembo Nembo Tengah, Bitung Tengah, Sagerat Weru Dua, Sagerat Weru Satu, Tendeki, Wangurer Timur, Wangurer Utara, Manembo Nembo Atas, Wangurer Barat, Sagerat, Kadoodan, Madidir Weru, Pinangunian, Tandu Rusa, dan Aertembaga Satu.

2. Kawasan Tsunami dan Gelombang Pasang.

Berdasarkan Peta Indeks Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Sulawesi Utara (BNPB), Kota Bitung termasuk dalam tingkat risiko “tinggi” terhadap tsunami. Untuk itu kondisi ini perlu diantisipasi dengan menyediakan sistem peringatan dini terhadap bahaya bencana tsunami. Daerah rawan gelombang dan tsunami di Kota Bitung meliputi Kelurahan Batuputih Atas, Kelurahan Batuputih Bawah, Kelurahan Lirang, Kelurahan Nusu, Kelurahan Motto, Kelurahan Posokan, Kelurahan Pintukota bagian timur, Kelurahan Dorbolaang, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Pancuran, Kelurahan Papusungan bagian timur, Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Wangurer Timur, Kelurahan Paceda, Kelurahan Madidir Unet, Kelurahan Madidir Ure, Kelurahan Madidir Weru, Kelurahan Kadoodan, Kelurahan Girian Bawah dan Kelurahan Wangurer.

3. Kawasan Banjir dan Banjir Bandang.

Wilayah yang berpotensi berada di Kelurahan Pinokalan, Girian Atas, Girian Weru Satu, Kakenturan Satu, Winenet Satu, Wangurer Timur, Kadoodan, Madidir Weru, Aertembaga Satu, Madidir Ure, Pakadoodan, Bitung Timur, Pateten Dua, Pateten Satu, Bitung Barat Satu, Paceda, Madidir Unet, Bitung Barat Dua, Bitung Tengah, Pateten Tiga, Girian Bawah, Wangurer, dan Winenet Dua. Sedangkan yang masuk berpontesi banjir bandang yaitu: Bitung Timur, Bitung Barat Satu, Bitung Barat Dua, Pateten Tiga, Pakadoodan, Manembo Nembo Tengah, Kakenturan Dua, Tanjung Merah, Sagerat Weru Dua, Sagerat Weru Satu, Tendeki dan Sagerat.

4. Kawasan Tanah Longsor.

Kota Bitung yang memiliki relief morfologi kasar dengan lereng-lereng yang terjal, lebih rawan terjadi gerakan tanah/ longsor karena kondisi batuan yang tidak kompak (pasir vulkanik). Hal ini diperburuk lagi oleh curah hujan yang tinggi yang sering terjadi di daerah ini. Berdasarkan Peta Indeks Risiko Bencana Gerakan Tanah di Provinsi Sulawesi Utara (BNPB),

Kota Bitung termasuk dalam tingkat risiko “tinggi” terhadap gerakan tanah. Daerah ini mempunyai potensi untuk terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Kawasan rawan bencana longsor di Kota Bitung berada pada sekitar kawasan perbukitan di seluruh wilayah kota meliputi Kelurahan Tandurusa, Kelurahan Makawidey, Kelurahan Aertembaga Dua, Kelurahan Duasudara, Kelurahan Batuputih Atas, Kelurahan Pinasungkulan, Kelurahan Apela, Kumersot, Tendeki, Girian Indah, Kakenturan, Tandurusa, Binuang, Makawidei dan Kasuari.

5. Kawasan Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung).

Wilayah yang berpotensi terdapat di Kelurahan Peteten Dua, Peteten Satu, Manembo Nembo, Bitung Timur, Bitung Barat Satu, Manembo Nembo Tengah, Pinokalan, Paceda, Madidir Unet, Bitung Barat Dua, Bitung Tengah, Papusungan, Sagerat Weru Dua, Sagerat Weru Satu, Tendeki, Wangurer Timur, Wangurer Utara, Manembo-Nembo Atas, Sagerat, Kadoodan, Madidir Weru, Pinangunian, Tandu Rusa, Aertembaga Satu dan Wangurer Barat.

6. Kawasan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Wilayah yang berpotensi terdapat di Kelurahan Kadoodan, Madidir Weru, Pinangunian, Tandu Rusa, Bitung Barat Dua, Winenet Satu, Batu Putih Bawah, Pakadoodan, Bitung Tengah, Pinasungkulan, Winenet Dua, Aertembaga Dua, Makawidey, Papusungan, Kasawari, Batu Putih Atas, dan Aertembaga Satu.

7. Letusan Gunung Berapi.

Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan gunung berapi. Di Kota Bitung terdapat gunung berapi yang aktif, yaitu Gunung Tangkoko (1.149 m) yang bertipe strato dengan kawah yang besar dan dalam serta gunung api parasit yang bernama Batu Angus (700 m). Dalam masa sejarah kegiatan Gunung Tangkoko, tampaknya letusan lebih banyak terjadi di Gunung Batu Angus dan tidak pernah di laporkan adanya korban manusia. Tetapi meskipun demikian, di masa mendatang bahaya letusan Gunung Tangkoko harus diperhitungkan karena daerah di sekitar gunung api itu, yaitu Kota Bitung terus berkembang dan bahkan makin pesat. Dalam sejarah kegiatan Gunung Tangkoko tercatat pernah terjadi letusan besar, yaitu dalam tahun 1801.

8. Sempadan Sesar.

Kawasan sempadan sesar adalah kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan sesar. Kawasan ini sangat berbahaya karena merupakan kawasan yang sangat labil. Oleh sebab itu diperlukan rencana pengelolaan untuk pengaturan sempadan sesar agar supaya resiko bencana dapat dihindari. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional ditetapkan dengan kriteria: sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif. Menurut Peta Geologi Lingkungan (Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Minahasa-Manado-Bitung, 2002), di Selat Lembeh terdapat sesar berarah Timur Laut – Barat Daya.

B. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Indeks Resiko Bencana (IRB).

Data intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Bitung periode 2020-2024 menggambarkan dinamika upaya mitigasi perubahan iklim dan peningkatan resiliensi terhadap bencana di kota pesisir strategis ini. Sebagai kota pelabuhan utama di Sulawesi Utara dengan topografi beragam yang mencakup wilayah pesisir dan perbukitan, Bitung memiliki kerentanan khas terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, dan intensifikasi bencana hidrometeorologi.

Analisis data menunjukkan bahwa meskipun total emisi GRK Kota Bitung meningkat dari 458.743ton CO₂e pada tahun 2020 menjadi 510.385ton CO₂e pada tahun 2024 (pertumbuhan 11,26%), PDRB kota ini tumbuh jauh lebih signifikan sebesar 48,56% dari 9.512,68 miliar rupiah menjadi 14.132,56 miliar rupiah. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan laju emisi menghasilkan penurunan intensitas emisi dari 48,23ton CO₂e/miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 36,11ton CO₂e/miliar rupiah pada tahun 2024, atau penurunan sebesar 25,13%.

Tabel 35
Intensitas Emisi GRK Kota Bitung

Tahun	Total Emisi GRK (ton CO ₂ e)	PDRB (Miliar Rupiah)	Intensitas Emisi (ton CO ₂ e/Miliar Rupiah)	Penurunan dari Tahun Dasar 2020 (%)
2020	458.743	9.512,68	48,23	0,00
2021	472.518	10.321,45	45,78	5,08
2022	486.874	11.452,87	42,51	11,86
2023	498.652	12.645,72	39,43	18,25
2024	510.385	14.132,56	36,11	25,13

Sumber: Bappeda (Diolah)

Dalam konteks geografis Kota Bitung sebagai wilayah pesisir dengan pelabuhan internasional dan industri perikanan yang signifikan, penurunan intensitas emisi ini memiliki implikasi penting pada resiliensi kota. Pertama, transformasi menuju ekonomi rendah karbon yang tercermin dalam data meningkatkan ketahanan ekonomi lokal terhadap risiko perubahan iklim, termasuk regulasi karbon global yang berpotensi mempengaruhi aktivitas ekspor-impor melalui Pelabuhan Bitung yang menjadi gerbang ekonomi kawasan timur Indonesia.

Karakteristik Kota Bitung sebagai kawasan industri perikanan dan pengolahan kelapa menjadikan efisiensi karbon dalam sektor-sektor ini krusial untuk resiliensi ekonomi jangka panjang. Penurunan intensitas emisi sebesar 25,13% dalam lima tahun mengindikasikan adanya modernisasi proses produksi dan efisiensi energi dalam industri-industri utama ini. Peningkatan efisiensi ini tidak hanya mengurangi jejak karbon tetapi juga meningkatkan daya saing produk-produk ekspor Bitung di pasar global yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.

Dari perspektif kebencanaan, posisi geografis Bitung yang terletak di kawasan Ring of Fire menjadikannya rentan terhadap bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami, serta bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan longsor yang diperparah oleh perubahan iklim. Penurunan intensitas emisi GRK berkontribusi pada upaya global memitigasi perubahan

iklim yang secara tidak langsung mengurangi risiko intensifikasi bencana hidrometeorologi di kawasan ini.

Tren penurunan intensitas emisi Kota Bitung yang konsisten dari tahun ke tahun (5,08% pada 2021, 11,86% pada 2022, 18,25% pada 2023, dan 25,13% pada 2024 dibandingkan tahun dasar 2020) menunjukkan adanya transformasi struktural dalam perekonomian kota ini. Akselerasi penurunan intensitas emisi ini kemungkinan besar terkait dengan implementasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan strategi adaptasi perubahan iklim yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Bitung.

Peningkatan PDRB yang signifikan (48,56% dalam lima tahun) mengindikasikan adanya kapasitas finansial yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Bitung untuk berinvestasi dalam infrastruktur tahan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Investasi ini krusial mengingat Bitung merupakan kota pesisir dengan risiko tinggi terhadap kenaikan muka air laut dan bencana pesisir lainnya. Infrastruktur pelabuhan, permukiman pesisir, dan kawasan industri di sepanjang garis pantai Bitung memerlukan adaptasi struktural untuk meningkatkan resiliensinya terhadap dampak perubahan iklim.

Sebagai kota dengan kawasan industri perikanan yang signifikan, transisi Bitung menuju ekonomi rendah karbon juga berimplikasi pada keberlanjutan sektor perikanan yang rentan terhadap perubahan iklim. Efisiensi energi dalam rantai dingin (cold chain) dan pengolahan hasil perikanan tidak hanya mengurangi intensitas emisi tetapi juga meningkatkan ketahanan sektor ini terhadap ketidakpastian pasokan energi dan volatilitas harga bahan bakar yang sering terjadi di kawasan Indonesia timur. Meskipun terdapat tren positif dalam penurunan intensitas emisi, perlu diperhatikan bahwa emisi absolut Kota Bitung masih meningkat, dari 458.743ton CO₂e menjadi 510.385ton CO₂e selama lima tahun. Mengingat posisi Bitung sebagai kota kepulauan dengan kawasan konservasi laut di sekitarnya (termasuk Taman Nasional Bunaken), peningkatan emisi absolut ini tetap menjadi tantangan bagi ketahanan ekosistem lokal yang berperan sebagai pertahanan alami

terhadap bencana pesisir dan perubahan iklim.

Dalam konteks visi pengembangan Bitung sebagai International Hub Port dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penurunan intensitas emisi menjadi indikator penting transisi menuju model pembangunan berkelanjutan yang memperkuat resiliensi kota ini terhadap tantangan iklim. Efisiensi karbon dalam aktivitas pelabuhan dan industrialisasi akan menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Partisipasi Kota Bitung dalam agenda iklim nasional yang tercermin dalam penurunan intensitas emisi membuka peluang akses terhadap pendanaan iklim dan transfer teknologi yang dapat memperkuat kapasitas lokal dalam menghadapi risiko bencana. Sebagai kota pesisir dengan infrastruktur strategis nasional, Bitung berpotensi menjadi percontohan implementasi infrastruktur hijau dan solusi berbasis alam yang tidak hanya mengurangi emisi karbon tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap bencana pesisir.

Secara keseluruhan, penurunan intensitas emisi GRK Kota Bitung sebesar 25,13% dalam lima tahun menggambarkan kemajuan signifikan dalam membangun fondasi ekonomi rendah karbon yang lebih resilient terhadap bencana dan perubahan iklim. Namun, mengingat karakteristik geografis dan kerentanan spesifik Bitung sebagai kota kepulauan dengan aktivitas ekonomi maritim yang intensif, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk mempercepat transisi menuju netral karbon sekaligus memperkuat infrastruktur dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko iklim dan bencana yang semakin kompleks.

Data Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Bitung periode 2020-2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 183,4 pada tahun 2020 menjadi 162,3 pada tahun 2024, dengan total penurunan sebesar 21,1 poin atau 11,5% selama lima tahun. Penurunan ini menandakan peningkatan kapasitas Kota Bitung dalam mengelola risiko bencana, yang tercermin dari perubahan kategori risiko dari "Tinggi" menjadi "Sedang" pada tahun 2024.



Tabel 36
Indeks Risiko Bencana Kota Bitung Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Risiko Bencana	Kategori	Perubahan dari Tahun Sebelumnya
2020	183,4	Tinggi	-
2021	179,6	Tinggi	-3,8
2022	175,2	Tinggi	-4,4
2023	168,7	Tinggi	-6,5
2024	162,3	Sedang	-6,4

Sumber: BPBD Kota Bitung (Diolah).

Dinamika penurunan IRB Kota Bitung menunjukkan akselerasi dari tahun ke tahun, dengan penurunan 3,8 poin pada 2021, meningkat menjadi 4,4 poin pada 2022, dan mencapai puncaknya pada 2023 dengan penurunan 6,5 poin. Pada tahun 2024, laju penurunan sedikit melambat menjadi 6,4 poin, namun tetap signifikan dalam mendorong perubahan kategori risiko dari "Tinggi" menjadi "Sedang". Akselerasi penurunan IRB ini mengindikasikan adanya penguatan berkelanjutan dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kota Bitung.

Karakteristik geografis Kota Bitung sebagai kota pesisir dengan topografi beragam yang mencakup dataran rendah pesisir, perbukitan, hingga kawasan kepulauan (Lembeh) menjadikannya rentan terhadap beragam jenis bencana. Posisinya di Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) meningkatkan kerentanan terhadap bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan potensi letusan gunung api dari Gunung Klabat dan gunung api lain di sekitarnya. Sementara itu, sebagai kota pesisir, Bitung juga menghadapi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai yang diperparah oleh perubahan iklim.

Penurunan IRB Kota Bitung dalam lima tahun terakhir dapat dikaitkan dengan berbagai inisiatif penguatan resiliensi yang dilakukan pemerintah kota. Implementasi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) kemungkinan menjadi faktor pendorong utama penurunan indeks risiko ini. Investasi dalam sistem peringatan dini, penguatan kapasitas

kelembagaan, serta peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat berkontribusi pada pengurangan kerentanan kota terhadap berbagai ancaman bencana.

Sebagai kota pelabuhan internasional dan pusat industri perikanan di Indonesia timur, penurunan risiko bencana di Bitung memiliki implikasi strategis tidak hanya bagi ketahanan lokal tetapi juga bagi keberlanjutan rantai pasok regional. Infrastruktur kritikal seperti Pelabuhan Bitung, kawasan industri, dan jaringan transportasi yang menghubungkan kota ini dengan wilayah lain di Sulawesi Utara perlu dilindungi dari dampak bencana untuk memastikan kontinuitas fungsi ekonomi dan logistik regional.

Perubahan kategori risiko dari "Tinggi" menjadi "Sedang" pada tahun 2024 menandai tonggak penting dalam upaya membangun resiliensi Kota Bitung. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap berbagai ancaman bencana. Namun, nilai IRB 162,3 yang masih berada di ambang atas kategori "Sedang" mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan untuk lebih memperkuat resiliensi kota.

Dalam konteks perubahan iklim, penurunan IRB Kota Bitung harus dilihat sebagai bagian dari strategi adaptasi yang lebih luas. Sebagai kota pesisir, Bitung menghadapi risiko spesifik terkait kenaikan muka air laut, peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, serta perubahan pola curah hujan yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Penurunan IRB mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas adaptasi terhadap risiko-risiko ini, namun perlu didukung dengan strategi mitigasi perubahan iklim yang komprehensif.

Korelasi antara penurunan IRB dengan data intensitas emisi GRK Kota Bitung yang juga menunjukkan tren positif (penurunan 25,13% dalam lima tahun) mencerminkan pendekatan terintegrasi dalam mengelola risiko iklim dan bencana. Penurunan intensitas emisi berkontribusi pada upaya global memitigasi perubahan iklim, yang secara tidak langsung mengurangi risiko intensifikasi bencana hidrometeorologi di masa depan. Sementara itu, penurunan IRB mencerminkan

penguatan kapasitas lokal dalam menghadapi risiko bencana yang ada saat ini.

Sebagai kota dengan kawasan industri dan pelabuhan yang signifikan, penurunan IRB Bitung juga dapat dikaitkan dengan penerapan standar keselamatan dan mitigasi risiko yang lebih ketat di sektor-sektor ini. Industri perikanan, pengolahan kelapa, dan aktivitas kepelabuhanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Bitung juga merupakan sektor-sektor yang rentan terhadap dampak bencana. Penguatan resiliensi sektor-sektor ini terhadap bencana berkontribusi pada penurunan IRB keseluruhan kota.

Dalam perspektif spasial, penurunan IRB Kota Bitung perlu dianalisis dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang beragam. Kawasan pesisir dengan konsentrasi permukiman dan infrastruktur ekonomi memiliki profil risiko berbeda dibandingkan dengan kawasan perbukitan atau wilayah kepulauan Lembah. Strategi pengurangan risiko bencana yang efektif memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik kerentanan spesifik masing-masing kawasan.

Peningkatan ketahanan infrastruktur kritikal seperti jaringan jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi terhadap bencana juga menjadi faktor penting dalam penurunan IRB Kota Bitung. Infrastruktur yang resilient tidak hanya mampu bertahan dari dampak bencana tetapi juga dapat pulih lebih cepat, mengurangi gangguan pada aktivitas sosial-ekonomi pasca bencana. Investasi dalam infrastruktur tahan bencana kemungkinan menjadi salah satu pendorong penurunan IRB yang konsisten selama lima tahun terakhir.

Meskipun terjadi penurunan signifikan, IRB Kota Bitung yang masih berada pada nilai 162,3 menandakan adanya risiko residual yang perlu dikelola. Sebagai kota yang terletak di kawasan dengan aktivitas tektonik tinggi dan dipengaruhi oleh dinamika iklim regional Laut Sulawesi, Bitung akan terus menghadapi ancaman bencana geologi dan hidrometeorologi. Penguatan kapasitas antisipasi, mitigasi, dan respons terhadap ancaman-ancaman ini perlu dilanjutkan untuk lebih

menurunkan IRB di masa depan.

Sebagai kesimpulan, penurunan IRB Kota Bitung dari 183,4 (kategori Tinggi) pada 2020 menjadi 162,3 (kategori Sedang) pada 2024 menggambarkan kemajuan signifikan dalam membangun resiliensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim. Pencapaian ini merupakan hasil dari pendekatan komprehensif dalam mengelola risiko bencana, yang mencakup aspek struktural maupun non-struktural. Namun, mengingat kompleksitas dan dinamika risiko bencana di kawasan ini, upaya penguatan resiliensi perlu terus dilanjutkan dan disesuaikan dengan tantangan yang berkembang, termasuk intensifikasi dampak perubahan iklim yang berpotensi mengubah profil risiko bencana di masa depan.

2.1.1.7. Demografi.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, jumlah penduduk Kota Bitung yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan tahun 2024 sebanyak 216.026 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 109.932 jiwa atau (51%) dan perempuan 106.094 jiwa atau (49%) dan jumlah keluarga sebanyak 73.450 kepala keluarga. Secara umum jumlah penduduk Kota Bitung lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Untuk jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan jumlah keluarga di Kota Bitung dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 37
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
di Kota Bitung Tahun 2024

KECAMATAN	KELURAHAN	PENDUDUK			KEPALA KELUARGA		
		LK	PR	JLH	LK	PR	JLH
01-LEMBEH SELATAN	1001-PASIR PANJANG	238	222	460	125	29	154
01-LEMBEH SELATAN	1002-PAUDEAN	617	522	1.139	320	82	402
01-LEMBEH SELATAN	1003-BATULUBANG	1.439	1.368	2.807	711	212	923
01-LEMBEH SELATAN	1004-PAPUSUNGAN	1.848	1.733	3.581	944	272	1.216
01-LEMBEH SELATAN	1006-PANCURAN	322	294	616	172	37	209
01-LEMBEH SELATAN	1011-DORBOLAANG	651	570	1.221	333	88	421
01-LEMBEH SELATAN	1016-KELAPA DUA	329	314	643	178	48	226
	JLH KECAMATAN	5.444	5.023	10.467	2.783	768	3.551
02-MADIDIR	1001-WANGURER BARAT	4.046	3.867	7.913	2.040	554	2.594
02-MADIDIR	1002-PACEDA	2.624	2.581	5.205	1.366	397	1.763
02-MADIDIR	1003-MADIDIR URE	1.732	1.683	3.415	871	333	1.204
02-MADIDIR	1004-KADOODAN	1.465	1.501	2.966	756	305	1.061
02-MADIDIR	1006-MADIDIR WERU	1.146	1.171	2.317	625	217	842
02-MADIDIR	1007-MADIDIR UNET	2.485	2.504	4.989	1.321	460	1.781
02-MADIDIR	1009-WANGURER TIMUR	2.143	2.095	4.238	1.117	372	1.489
02-MADIDIR	1011-WANGURER UTARA	1943	1906	3.849	1.011	273	1.284
	JLH KECAMATAN	17.584	17.308	34.892	9.107	2.911	12.018
03-RANOWULU	1001-KARONDORAN	558	526	1.084	297	62	359
03-RANOWULU	1002-KUMERESOT	712	663	1.375	369	116	485
03-RANOWULU	1004-PINOKALAN	3.059	2.894	5.953	1.537	464	2.001

03-RANOWULU	1005-TEWAAN	583	552	1.135	296	86	382
03-RANOWULU	1006-DANOWUDU	1.817	1.772	3.589	917	257	1.174
03-RANOWULU	1007-DUASADARA	574	568	1.142	311	81	392
03-RANOWULU	1008-APELA DUA	388	392	780	205	68	273
03-RANOWULU	1009-APELA SATU	199	220	419	112	44	156
03-RANOWULU	1010-PINASUNGKULAN	506	465	971	273	57	330
03-RANOWULU	1011-BATUPUTIH ATAS	1.258	1.193	2.451	660	152	812
03-RANOWULU	1012-BATUPUTIH BAWAH	1.076	1.005	2.081	557	158	715
	JLH KECAMATAN	10.730	10.250	20.980	5.534	1.545	7.079
04-AERTEMBAGA	1003-PATETEN SATU	2.228	2.111	4.339	1.102	340	1.442
04-AERTEMBAGA	1004-WINENET SATU	1.687	1.613	3.300	827	263	1.090
04-AERTEMBAGA	1005-AERTEMBAGA SATU	1.658	1.581	3.239	857	335	1.192
04-AERTEMBAGA	1006-TANDURUSA	2.132	1.995	4.127	1.103	318	1.421
04-AERTEMBAGA	1007-MAKAWIDEY	702	722	1.424	382	124	506
04-AERTEMBAGA	1008-PINANGUNIAN	597	586	1.183	307	99	406
04-AERTEMBAGA	1011-PATETEN DUA	1.789	1.711	3.500	889	268	1.157
04-AERTEMBAGA	1012-WINENET DUA	1.680	1.656	3.336	860	265	1.125
04-AERTEMBAGA	1013-KASAWARI	613	554	1.167	350	76	426
04-AERTEMBAGA	1014-AERTEMBAGA DUA	1.930	1.803	3.733	961	289	1.250
	JLH KECAMATAN	15.016	14.332	29.348	7.638	2.377	10.015
05-MATUARI	1001-TANJUNG MERAH	871	835	1.706	445	171	616
05-MATUARI	1002-SAGERAT	1.817	1.710	3.527	928	240	1.168
05-MATUARI	1003-MANEMBO-NEMBO ATAS	7.247	7.026	14.273	3.678	1.070	4.748
05-MATUARI	1007-MANEMBO-NEMBO	2.783	2.702	5.485	1.431	488	1.919
05-MATUARI	1011-SAGERAT WERU SATU	1.169	1.103	2.272	591	204	795
05-MATUARI	1012-SAGERAT WERU DUA	1.656	1.695	3.351	807	262	1.069
05-MATUARI	1013-MANEMBO-NEMBO TENGAH	2.446	2.442	4.888	1.252	377	1.629
05-MATUARI	1014-TENDEKI	1.121	1.076	2.197	589	141	730
	JLH KECAMATAN	19.110	18.589	37.699	9.721	2.953	12.674
06-GIRIAN	1001-GIRIAN ATAS	2.423	2.332	4.755	1.237	398	1.635
06-GIRIAN	1002-GIRIAN WERU SATU	1.538	1.534	3.072	814	247	1.061
06-GIRIAN	1003-GIRIAN BAWAH	2.992	2.985	5.977	1.550	466	2.016
06-GIRIAN	1004-GIRIAN PERMAI	3.181	3.097	6.278	1.620	473	2.093
06-GIRIAN	1005-GIRIAN WERU DUA	1.799	1.924	3.723	959	343	1.302
06-GIRIAN	1006-GIRIAN INDAH	5.713	5.444	11.157	2.886	803	3.689
06-GIRIAN	1007-WANGURER	1.202	1.125	2.327	589	211	800
	JLH KECAMATAN	18.848	18.441	37.289	9.655	2.941	12.596
07-MAESA	1001-BITUNG BARAT SATU	2.385	2.191	4.576	1.214	384	1.598
07-MAESA	1002-PAKADOODAN	852	800	1.652	436	175	611
07-MAESA	1003-BITUNG BARAT DUA	2.760	2.661	5.421	1.356	454	1.810
07-MAESA	1004-BITUNG TENGAH	3.207	3.127	6.334	1.629	633	2.262
07-MAESA	1005-BITUNG TIMUR	4.087	3.802	7.889	2.007	724	2.731
07-MAESA	1006-KAKENTURAN SATU	1.799	1.792	3.591	912	309	1.221
07-MAESA	1007-KEKENTURAN DUA	1.719	1.695	3.414	815	288	1.103
07-MAESA	1008-PATETEN TIGA	1.583	1.497	3.080	779	205	984
	JLH KECAMATAN	18.392	17.565	35.957	9.148	3.172	12.320
08-LEMBEH UTARA	1001-MAWALI	1.249	1.225	2.474	676	158	834
08-LEMBEH UTARA	1002-PINTUKOTA	547	518	1.065	280	85	365
08-LEMBEH UTARA	1003-BINUANG	475	433	908	251	59	310
08-LEMBEH UTARA	1004-MOTTO	324	325	649	188	49	237
08-LEMBEH UTARA	1005-LIRANG	365	351	716	195	55	250
08-LEMBEH UTARA	1006-POSOKAN	262	256	518	146	30	176
08-LEMBEH UTARA	1007-NUSU	412	401	813	224	53	277
08-LEMBEH UTARA	1008-KAREKO	456	421	877	247	56	303
08-LEMBEH UTARA	1009-GUNUNG WOKA	313	280	593	165	34	199
08-LEMBEH UTARA	1010-BATUKOTA	405	376	781	209	37	246
	JLH KECAMATAN	4.808	4.586	9.394	2.581	616	3.197
JUMLAH KOTA BITUNG		109.932	106.094	216.026	56.167	17.283	73.450

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024, Dukcapil Kota Bitung

Hampir di semua kecamatan di Kota Bitung, jumlah kepala keluarga laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan kepala keluarga perempuan. Hal ini mungkin mencerminkan struktur sosial dan budaya setempat di mana

laki-laki lebih sering menjadi kepala keluarga. Distribusi penduduk antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang di semua kecamatan, yang menunjukkan tidak adanya ketimpangan gender yang besar dalam populasi keseluruhan. Kecamatan Matuari dan Maesa merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yang dapat menunjukkan tingkat urbanisasi yang lebih tinggi di daerah-daerah tersebut.

Kecamatan Lembah Selatan memiliki total penduduk sebanyak 10.467 jiwa, yang terdiri dari 5.444 laki-laki dan 5.023 perempuan. Jumlah kepala keluarga di kecamatan ini mencapai 3.551, dengan rincian 2.783 kepala keluarga laki-laki dan 768 kepala keluarga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kepala keluarga laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan di kecamatan ini, dengan rasio kepala keluarga laki-laki yang jauh lebih tinggi.

Di Kecamatan Madidir, total penduduk mencapai 34.892 jiwa, dengan 17.584 laki-laki dan 17.308 perempuan. Jumlah kepala keluarga di kecamatan ini adalah 12.018, terdiri dari 9.107 laki-laki dan 2.911 perempuan. Kecamatan Madidir memiliki jumlah penduduk yang tinggi dengan distribusi gender yang hampir seimbang. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada jumlah kepala keluarga laki-laki dibandingkan perempuan.

Kecamatan Ranowulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 20.980 jiwa, yang terdiri dari 10.730 laki-laki dan 10.250 perempuan. Kepala keluarga di kecamatan ini berjumlah 7.079 dengan 5.534 laki-laki dan 1.545 perempuan. Kecamatan ini menunjukkan distribusi penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, namun kepala keluarga laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan perempuan.

Kecamatan Aertembaga memiliki total penduduk sebesar 29.348 jiwa, yang terdiri dari 15.016 laki-laki dan 14.332 perempuan. Jumlah kepala keluarga di kecamatan ini adalah 10.015 terdiri dari 7.638 laki-laki dan 2.337 perempuan. Seperti kecamatan lainnya, terdapat lebih banyak kepala keluarga laki-laki dibandingkan perempuan.

Di Kecamatan Matuari, terdapat 37.669 jiwa penduduk, dengan 19.110 laki-laki dan 18.589 perempuan. Jumlah kepala keluarga di kecamatan ini adalah 12.672, dengan rincian 9.721 laki-laki dan 2.953 perempuan. Kecamatan ini memiliki populasi penduduk terbesar dengan distribusi gender yang seimbang dan jumlah kepala keluarga laki-laki yang signifikan lebih tinggi.



Kecamatan Girian memiliki total penduduk sebanyak 37.289 jiwa, dengan 18.848 laki-laki dan 18.441 perempuan. Kepala keluarga di kecamatan ini berjumlah 12.596, terdiri dari 9.655 laki-laki dan 2.941 perempuan. Distribusi penduduk di kecamatan ini cukup merata antara laki-laki dan perempuan, dengan jumlah kepala keluarga laki-laki yang lebih dominan.

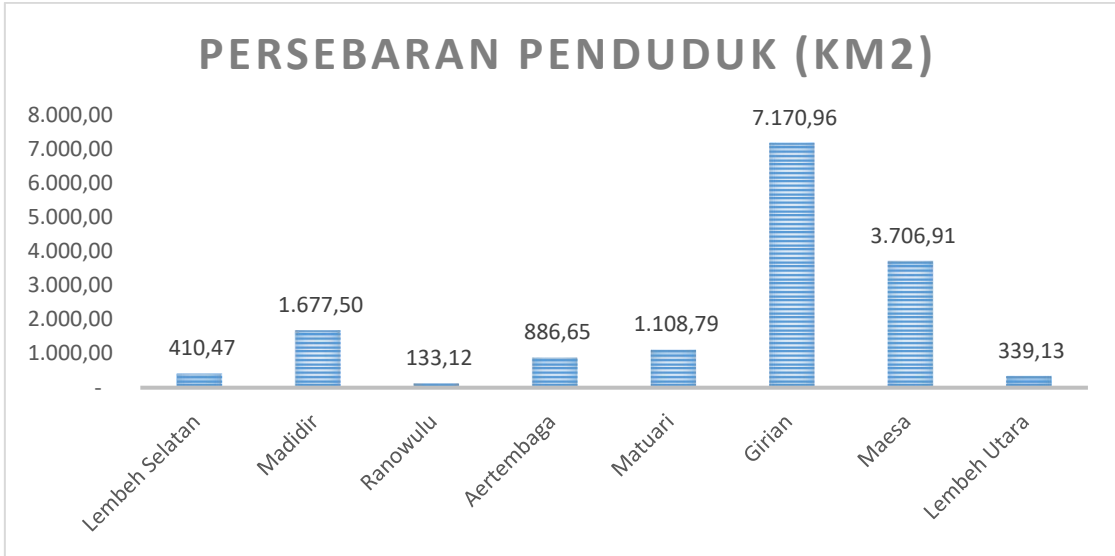
Di Kecamatan Maesa, total penduduk mencapai 35.957 jiwa, dengan 18.392 laki-laki dan 17.565 perempuan. Jumlah kepala keluarga di kecamatan ini adalah 12.320, terdiri dari 9.148 laki-laki dan 3.172 perempuan. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk yang besar dan distribusi gender yang seimbang, dengan kepala keluarga laki-laki yang lebih banyak.

Kecamatan Lembeh Utara memiliki total penduduk sebesar 9.394 jiwa, dengan 4.808 laki-laki dan 4.586 perempuan. Jumlah kepala keluarga di kecamatan ini adalah 3.197, dengan rincian 2.581 laki-laki dan 616 perempuan. Meskipun memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil, distribusi kepala keluarga di kecamatan ini juga didominasi oleh laki-laki.

Secara keseluruhan, Kota Bitung memiliki total penduduk sebanyak 216.026 jiwa, dengan 109.932 laki-laki dan 106.094 perempuan. Jumlah kepala keluarga di kota ini adalah 73.450, terdiri dari 56.167 laki-laki dan 17.283 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa Kota Bitung memiliki populasi yang cukup besar dengan distribusi gender yang hampir seimbang.

Persebaran penduduk Kota Bitung paling tinggi ada di kecamatan Girian dengan angka 7.170,96 dan paling rendah ada di kecamatan Ranowulu, seperti tergambar pada tabel dibawah ini.

Grafik 1
Persebaran Penduduk Kota Bitung Tahun 2024

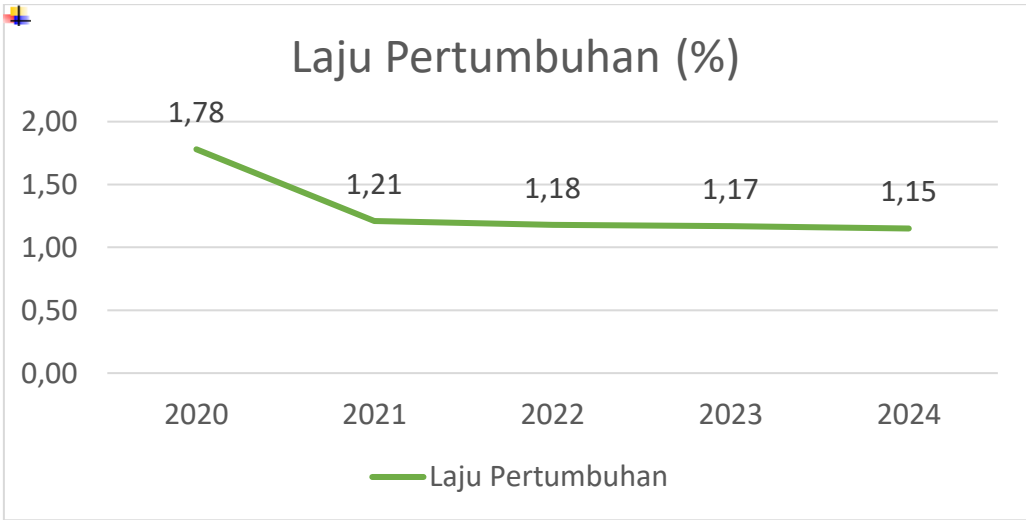


Sumber : Data Konsolidasi semester II Tahun 2024 Dukcapil Kota Bitung

Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2021 hingga tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2020 adalah sebesar 1,18 persen per tahun, artinya jumlah penduduk di Kota Bitung rata-rata meningkat sebanyak 1,18 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2020.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

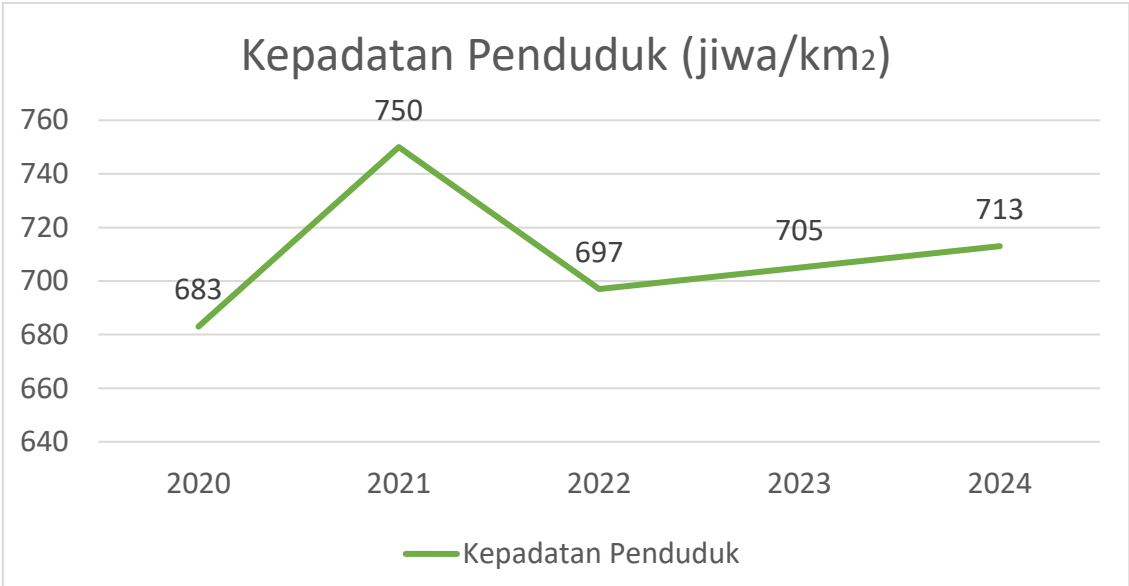
Grafik 2
Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kota Bitung Tahun 2024



Sumber : BPS Kota Bitung 2025.

Kepadatan dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Dengan luas da ratan Kota Bitung yang sebesar 313,51 kilometer persegi, kepadatan penduduk di Kota Bitung pada tahun 2024 adalah sebesar 713 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 683 jiwa per kilometer persegi. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 3
Kepadatan Penduduk Kota Bitung Tahun 2024



Sumber : BPS Kota Bitung 2025

Tabel 38
Jumlah Penduduk Kota Bitung berdasarkan Usia per Kecamatan Tahun 2024

Usia	Kecamatan							
	Lembeh Selatan	Madidir	Ranowulu	Aertembaga	Matuari	Girian	Maesa	Lembeh Utara
0 – 4 Tahun	609	2063	1211	1887	2307	2370	2512	444
5 – 9 Tahun	787	2668	1643	2465	3123	3134	3278	693
10 – 14 Tahun	853	2988	1829	2453	3356	3381	3299	751
15 – 19 Tahun	889	3123	1901	2722	3673	3407	3301	852
20 – 24 Tahun	965	3203	1901	2731	3594	3468	3350	786
25 – 29 Tahun	811	2826	1754	2360	2956	3087	2825	676
30 – 34 Tahun	794	2582	1510	2178	2718	2827	2736	678
35 – 39 Tahun	699	2321	1409	1969	2484	2489	2359	631
40 – 44 Tahun	790	2536	1469	2079	2866	2743	2595	689
45 – 49 Tahun	883	2576	1560	2124	2959	2598	2444	810
50 – 54 Tahun	721	2442	1471	2007	2595	2457	2242	666
55 – 59 Tahun	551	1938	1128	1545	2002	1941	1784	550
60 – 64 Tahun	428	1443	761	1093	1305	1412	1261	422
65 – 69 Tahun	314	1070	599	808	804	964	936	341
70 – 74 Tahun	208	627	418	510	514	569	551	224
75+	165	486	416	417	443	442	484	181

Sumber : Data Konsolidasi semester II Tahun 2024 Dukcapil Kota Bitung

Data penduduk Kota Bitung berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan distribusi tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah, yang dipecah menjadi beberapa kategori pendidikan. Kategori terbesar adalah mereka yang tamat SMA, yang berjumlah 64.669 orang atau sekitar 29,94% dari total populasi, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk memiliki pendidikan setingkat SMA. Selanjutnya, jumlah penduduk yang berpendidikan SMP mencapai 35.730 orang, atau sekitar 16,54% dari total populasi, sementara jumlah penduduk yang tamat SD adalah 34.135 orang,



atau sekitar 15,80% dari total populasi, mengindikasikan bahwa sekitar sepertiga dari populasi telah menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Ada juga jumlah yang signifikan dari penduduk yang belum sekolah, yaitu sebanyak 42.338 orang atau 19,60%, menunjukkan bahwa hampir seperlima dari populasi berada di usia atau kondisi yang belum memungkinkan mereka untuk mulai bersekolah. Jumlah penduduk yang tidak atau belum tamat SD adalah 26.109 orang, atau sekitar 12,09%, menandakan adanya tantangan dalam penyelesaian pendidikan dasar di wilayah ini.

Untuk pendidikan tinggi, jumlah penduduk yang memiliki gelar Strata I (S1) adalah 9.359 orang, atau sekitar 4,33%, sementara penduduk yang memiliki gelar Strata II (S2) berjumlah 613 orang, atau sekitar 0,28%. Hanya ada 32 orang yang memiliki gelar Strata III (S3), atau sekitar 0,01% dari total populasi. Jumlah penduduk yang memiliki pendidikan Diploma II sebanyak 662 orang atau 0,31% dan Diploma III adalah sebanyak 2.379 orang atau 1,10%. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada di tingkat pendidikan menengah (SMP dan SMA), dengan persentase yang lebih kecil di tingkat pendidikan tinggi. Masih ada tantangan signifikan dalam meningkatkan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar dan mengakses pendidikan tinggi. Ini bisa menjadi fokus bagi kebijakan pendidikan di wilayah ini untuk meningkatkan akses dan penyelesaian pendidikan di semua jenjang.

Tabel 39
Profil Penduduk Kota Bitung berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Penduduk	%
1	Belum Sekolah	42.338	19,60
2	Tidak/Belum Tamat SD	26.109	12,09
3	Tamat SD	34.135	15,80
4	SMP	35.730	16,54
5	SMA	64.669	29,94
6	DIPLOMA II	662	0,31
7	DIPLOMA III	2.379	1,10
8	STRATA I	9.359	4,33
9	STRATA II	613	0,28
10	STRATA III	32	0,01

Sumber : Data Konsolidasi semester II Tahun 2024 Dukcapil Kota Bitung

Data jumlah penduduk berdasarkan status pernikahan dapat mencerminkan perbedaan sosial dan demografis antara kecamatan-



kecamatan tersebut. Perbedaan jumlah penduduk yang cerai hidup dan cerai mati di berbagai kecamatan juga memberikan gambaran mengenai stabilitas pernikahan di wilayah-wilayah tersebut. Di Kecamatan Lembeh Selatan, terdapat 4.992 orang yang belum kawin, 4.877 orang yang kawin, 95 orang yang berstatus cerai hidup, dan 503 orang yang berstatus cerai mati. Di Kecamatan Madidir, jumlah penduduk yang belum kawin mencapai 16.863 orang, yang kawin 15.780 orang, yang cerai hidup 439 orang, dan yang cerai mati 1.810 orang. Kecamatan Ranowulu memiliki 9.963 orang yang belum kawin, 9.848 orang yang kawin, 198 orang yang cerai hidup, dan 13.030 orang yang cerai mati.

Kecamatan Aertembaga menunjukkan 14.533 orang yang belum kawin, 13.030 orang yang kawin, 362 orang yang cerai hidup, dan 1.423 orang yang cerai mati. Di Kecamatan Matuari, terdapat 18.874 orang yang belum kawin, 16.378 orang yang kawin, 450 orang yang cerai hidup, dan 1.637 orang yang cerai mati. Kecamatan Girian memiliki 18.533 orang yang belum kawin, 16.522 orang yang kawin, 569 orang yang cerai hidup, dan 1.665 orang yang cerai mati.

Di Kecamatan Maesa, jumlah penduduk yang belum kawin adalah 18.345 orang, yang kawin 15.488 orang, yang cerai hidup 413 orang, dan yang cerai mati 1.711 orang. Kecamatan Lembeh Utara memiliki 4.269 orang yang belum kawin, 4.647 orang yang kawin, 40 orang yang cerai hidup, dan 438 orang yang cerai mati.

Secara total, jumlah penduduk yang belum kawin di semua kecamatan adalah 106.372 orang, yang kawin 96.930 orang, yang cerai hidup 2.566 orang, dan yang cerai mati 10.158 orang.

Analisis dari data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di semua kecamatan berstatus kawin, diikuti oleh penduduk yang belum kawin. Jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup dan cerai mati relatif lebih kecil. Kecamatan Matuari memiliki jumlah penduduk yang belum kawin tertinggi, sedangkan Kecamatan Lembeh Utara memiliki jumlah penduduk yang belum kawin terendah. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 40
**Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan
Tahun 2024**

NAMA KECAMATAN	BELUM KAWIN	KAWIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI
LEMBEH SELATAN	4.992	4.877	95	503



MADIDIR	16.863	15.780	439	1.810
RANOWULU	9.963	9.848	198	971
AERTEMBAGA	14.533	13.030	362	1.423
MATUARI	18.874	16.738	450	1.637
GIRIAN	18.533	16.522	569	1.665
MAESA	18.345	15.488	413	1.711
LEMBEH UTARA	4.269	4.647	40	438
TOTAL	106.372	96.930	2.566	10.158

Sumber : Data Konsolidasi semester II Tahun 2024 Dukcapil Kota Bitung

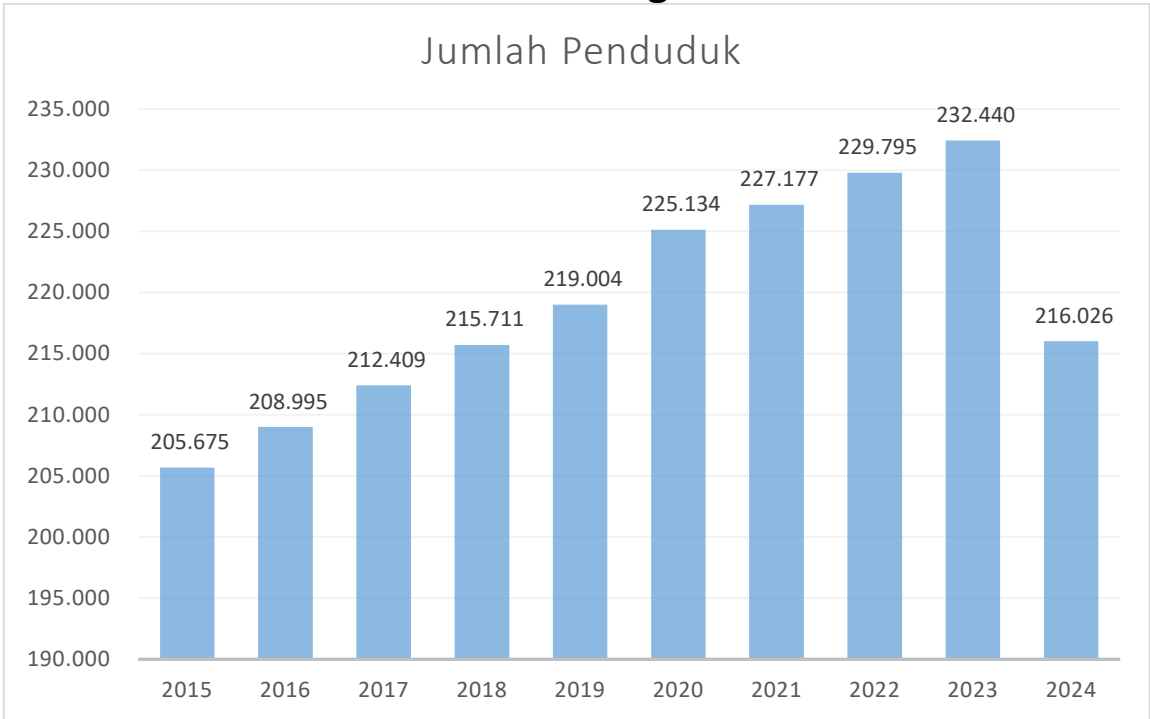
Data jumlah penduduk oleh Badan Pusat Statistik yang disajikan pada tabel di bawah ini, menunjukkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 hingga 2024. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 205.675 jiwa, dan meningkat lagi menjadi 208.995 jiwa pada tahun 2016. Pertumbuhan penduduk berlanjut dengan angka 212.409 jiwa pada tahun 2017, dan terus naik menjadi 215.711 jiwa pada tahun 2018. Pada tahun 2019, jumlah penduduk mencapai 219.004 jiwa dan terus meningkat menjadi 225.134 jiwa pada tahun 2020. Pertumbuhan penduduk yang stabil ini berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya, dengan jumlah 227.177 jiwa pada tahun 2021, dan mencapai 229.795 jiwa pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah penduduk mencapai 232.440 jiwa. Pada tahun 2024 turun pada angka 216.026 jiwa.

Analisis dari data ini menunjukkan bahwa terdapat tren peningkatan yang konsisten dalam laju pertumbuhan penduduk selama periode tersebut. Kenaikan jumlah penduduk yang stabil setiap tahun ini bisa diakibatkan oleh berbagai faktor seperti tingkat kelahiran yang tinggi, berkurangnya angka kematian, dan mungkin juga migrasi masuk yang signifikan. Pertumbuhan penduduk yang terus menerus ini memerlukan perhatian khusus dari pihak terkait untuk memastikan bahwa infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya dapat memenuhi permintaan populasi yang meningkat. Hal ini juga mengindikasikan perlunya perencanaan yang matang dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan untuk menjaga kualitas hidup yang baik bagi seluruh penduduk. Yang menyebabkan turunnya penduduk pada Tahun 2024 karena telah dilaksanakan update data berupa, penduduk yang umurnya sudah berumur 17 tahun, bila sudah 4 tahun atau sudah berumur 21 tahun dan tidak melakukan pembuatan KTP atau melapor,



maka data mereka dinonaktifkan. Untuk jumlah penduduk dari tahun 2015 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 4
Jumlah Penduduk Kota Bitung Tahun 2015 – 2024



Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Bitung,2025.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

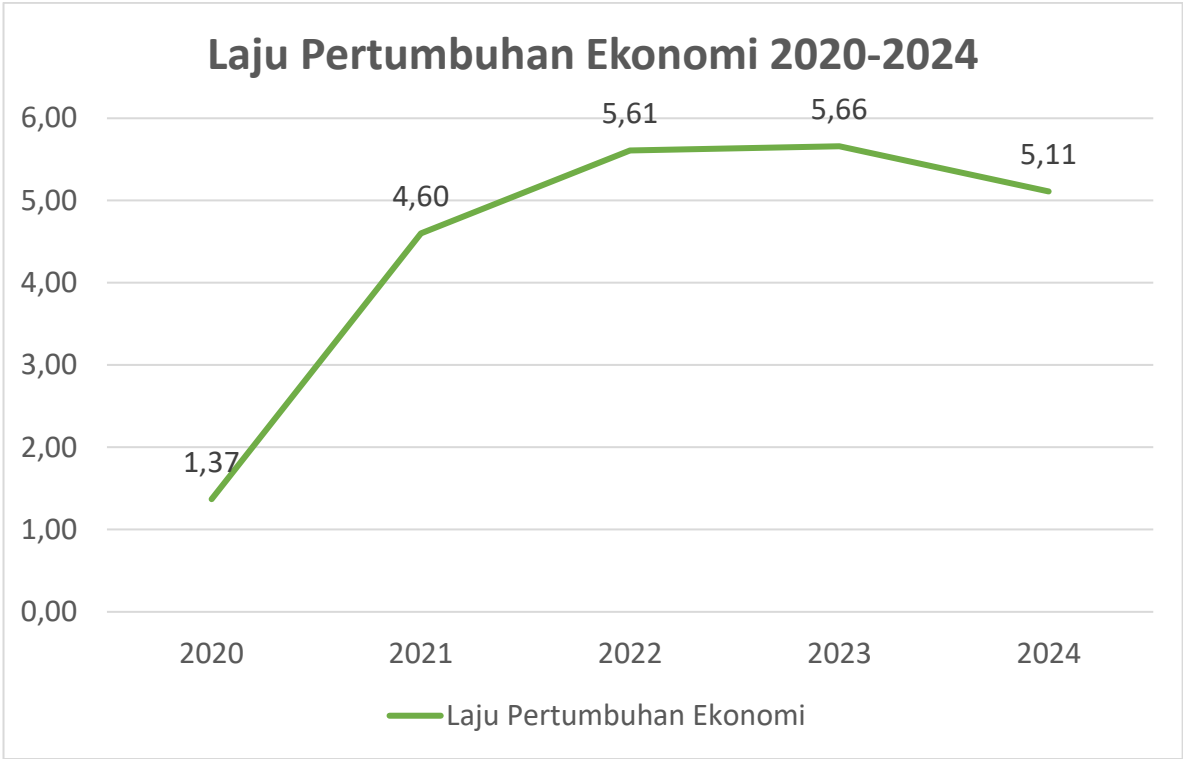
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi.

A. Pertumbuhan Ekonomi.

Secara umum, definisi pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama PDRB atas dasar harga konstan dan kedua PDRB atas dasar harga berlaku. PDRB yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDRB atas dasar harga konstan, yaitu total nilai barang dan jasa yang diproduksi dan dihitung berdasarkan tahun dasar.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitung dari tahun 2020–2024 selalu mengalami pertumbuhan positif, namun menurun pada tahun 2024. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitung 2020-2024



Sumber: BPS Kota Bitung, 2025.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,37%. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi meningkat cukup signifikan menjadi 4,60%. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi terus melonjak menjadi 5,61%. Dan pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sedikit naik lagi menjadi 5,66%. Pada tahun 2024 terjadi penurunan pada angka 5,11%.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bitung dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi relatif rendah, mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Namun, pada tahun 2021, terjadi lonjakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, mencapai 4,60%. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan konsumsi dan investasi domestik, serta pemulihan sektor-sektor ekonomi tertentu pasca-pandemi. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan peningkatan, mencapai 5,61%. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bitung semakin kuat dan tahan banting. Faktor-faktor seperti diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan permintaan domestik mungkin telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ini. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sedikit naik lagi menjadi 5,66%. Meskipun peningkatannya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, ini masih menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bitung terus tumbuh dan berkembang. Pada tahun ini, penguatan ekonomi dalam negeri melalui konsumsi dan investasi menjadi faktor utama yang mendorong



pertumbuhan perekonomian Kota Bitung. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bitung telah menunjukkan daya tahan dan adaptabilitas yang kuat dalam menghadapi tantangan, dan terus tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun.

C. Tingkat Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial serius yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah. Meskipun telah berjuang puluhan tahun untuk membebaskan diri dari kemiskinan, kenyataan memperlihatkan bahwa sampai saat ini kota Bitung belum bisa sepenuhnya melepaskan diri dari masalah kemiskinan.

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sementara itu, garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum makanan dan non-makanan. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Grafik 6
**Jumlah Penduduk Miskin
Kota Bitung Tahun 2020 – 2024**



Sumber: BPS Kota Bitung 2025.



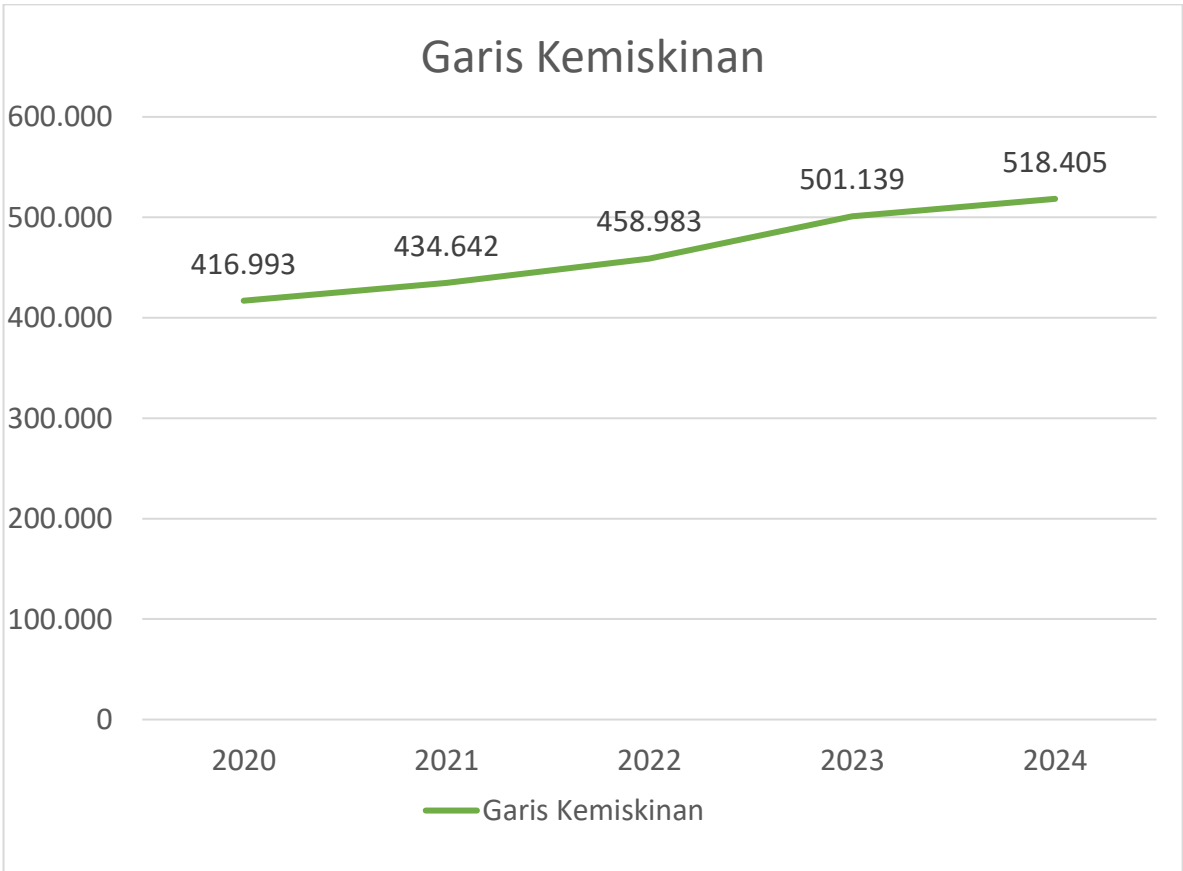
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dari tahun 2020–2024 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bitung mengalami fluktuasi. Selama periode 5 tahun tersebut, jumlah penduduk miskin terendah terdapat pada tahun 2022. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kota Bitung mengalami penurunan dari jumlah penduduk miskin semula 15.000 jiwa menjadi 14.500 jiwa.

Dari 2020–2024, Garis Kemiskinan di Kota Bitung terus mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga pokok kebutuhan dari tahun ke tahun serta meningkatnya biaya gaya hidup.

Pada tahun 2024, Garis Kemiskinan mengalami kenaikan dari Rp. 501.139,00 per kapita per bulan menjadi Rp. 518.405,00 per kapita per bulan.

Grafik 7
Garis Kemiskinan Kota Bitung Tahun 2020 – 2024

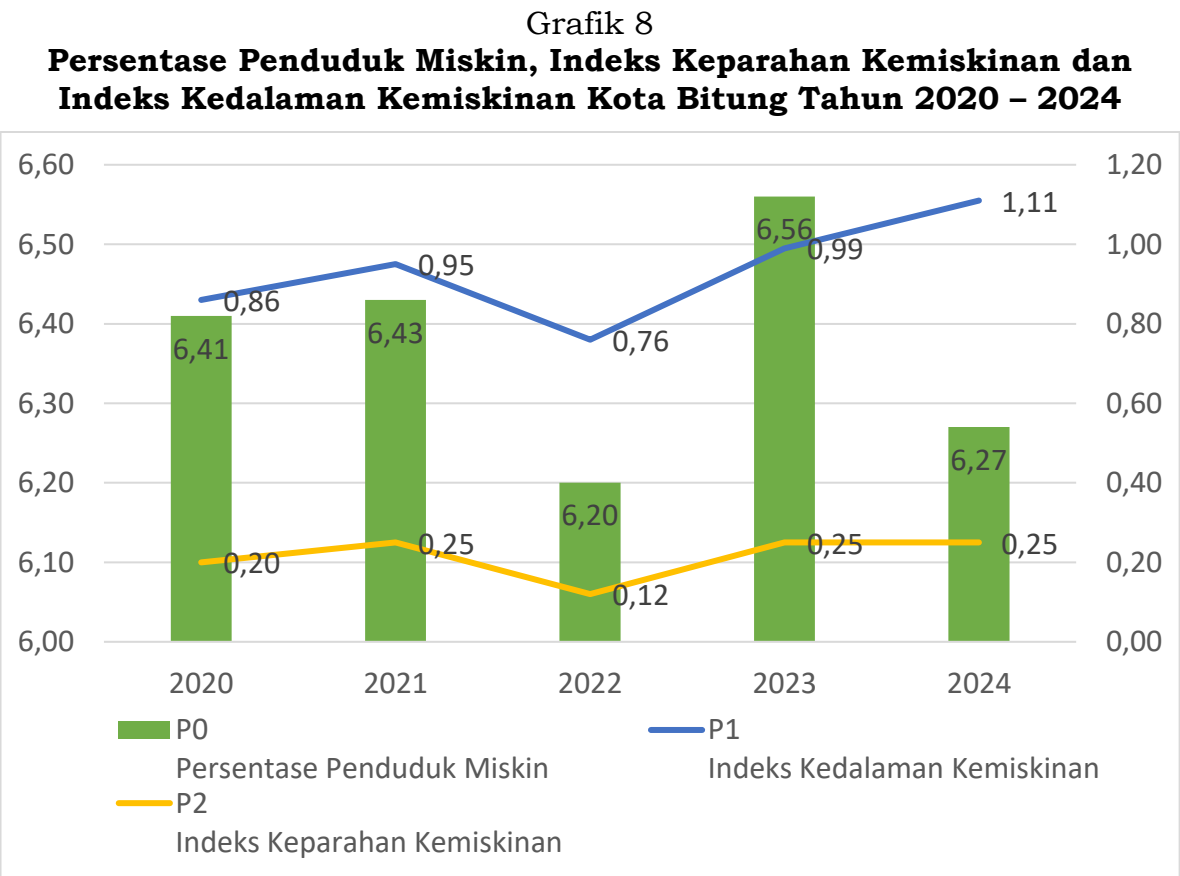


Sumber: BPS Kota Bitung 2025.



Dari tahun 2020–2024, fluktuasi Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di BPS Kota Bitung selalu beriringan, yaitu pada tahun 2022 mengalami penurunan, tahun 2023 meningkat, lalu turun kembali di tahun 2024. Fluktuasi di tiap indikator tersebut tidak terlalu signifikan.

Di tahun 2024, P0 Kota Bitung adalah sebesar 6,27%. P1 sebesar 1,11, meningkat dari 2023, artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh terhadap garis kemiskinan. Makin tinggi P1 makin sulit untuk terangkat dari Garis Kemiskinan. P2 sebesar 0,25, meningkat dari 2023, artinya penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin tidak merata atau makin heterogen. Makin heterogen akan memengaruhi kompleksitas program pengentasan kemiskinan. Seperti tergambar pada grafik dibawah ini:



Sumber: BPS Kota Bitung 2025.

Analisis ini menggambarkan bagaimana peningkatan garis kemiskinan beriringan dengan fluktuasi jumlah dan persentase penduduk miskin, yang menandakan bahwa meskipun ada usaha untuk menaikkan standar hidup, namun tantangan ekonomi tetap mempengaruhi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Sesuai dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengimplementasikan *System of National Accounts 2008* (SNA 2008) dalam penyusunan PDB melalui kerangka *Supply and Use Tables* (SUT), yang dilatarbelakangi oleh pengaruh perekonomian global terhadap struktur perekonomian nasional suatu negara dalam 10 tahun terakhir, dasar perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan PDRB untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. Implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDB dan PDRB karena perubahan struktur ekonomi yang awalnya 9 sektor menjadi 17 sektor lapangan usaha. Delapan sektor lapangan usaha baru itu mencakup pengadaan air; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; real estate; administrasi

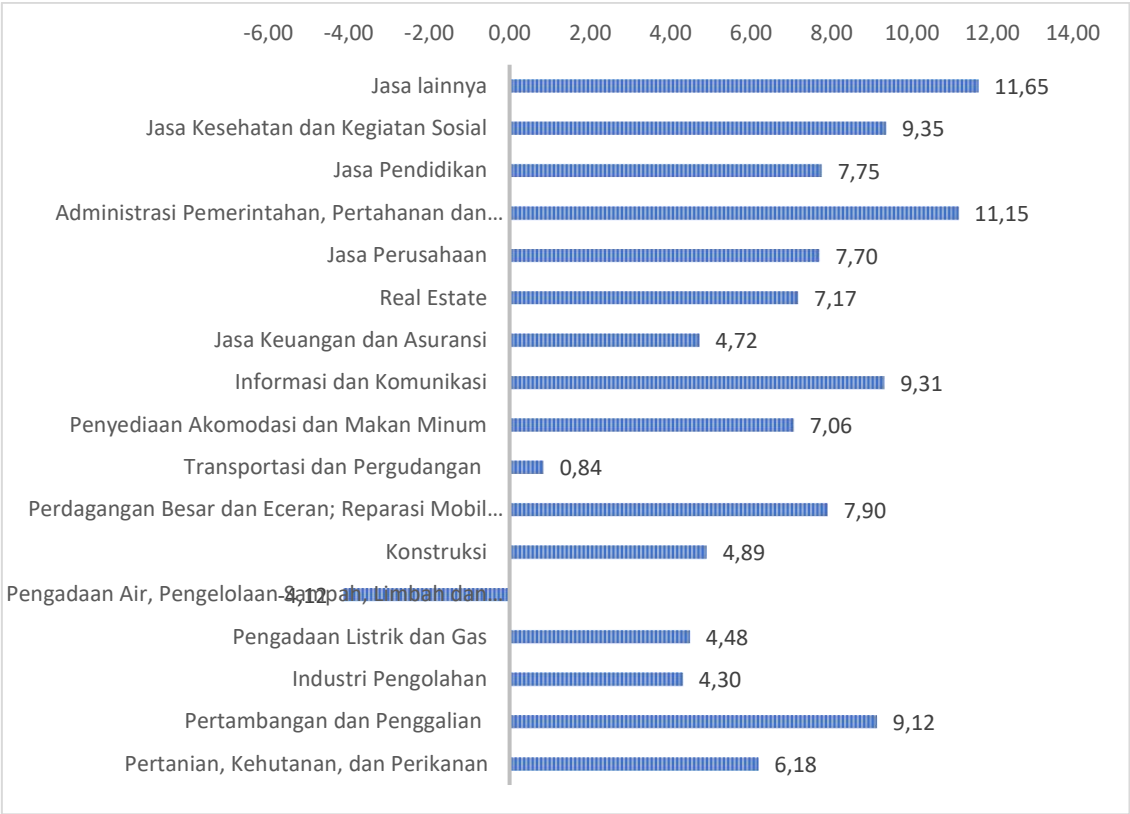


pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

Pertumbuhan tertinggi PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Bitung Tahun 2024 terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya di angka 11,65 diikuti oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib pada angka 11,15 selanjutnya pada Informasi dan Komunikasi pada angka 9,31, kemudian Pertambangan Penggalian pada angka 9,12.

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kota Bitung tahun 2024 seperti pada grafik 9.

Grafik 9
**Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha
Kota Bitung Tahun 2024**



Sumber: BPS Kota Bitung, 2025.

Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam bahasa Inggris disebut *Gross Domestic Product*, merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan, di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto/Gross Domestic Regional Product).

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, sebagai contoh perhitungan PDB dan PBRB di Indonesia menggunakan tahun dasarnya yaitu tahun 2000. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi.

Perhitungan PDB maupun PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: (1) pendekatan produksi, (2) pendekatan pengeluaran dan (3) pendekatan pendapatan.



1. Pendekatan Produksi:

Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi merupakan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomi sesuai dengan *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)*:

- 1) Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, meliputi:
 - a. Subsektor Tanaman bahan makanan.
 - b. Subsektor Tanaman perkebunan.
 - c. Subsektor Peternakan.
 - d. Subsektor Kehutanan.
 - e. Subsektor Perikanan.
- 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian, meliputi:
 - a. Subsektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
 - b. Subsektor Pertambangan Bukan Migas.
 - c. Subsektor Penggalian.
- 3) Sektor Industri Pengolahan, meliputi:
 - a. Subsektor Industri Migas.
 - Pengilangan Minyak Bumi.
 - Gas Alam Cair (LNG).
 - b. Subsektor Industri Bukan Migas
 - Makanan, Minuman dan Tembakau.
 - Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.
 - Barang Kayu dan Produk Lainnya.
 - Produk Kertas dan Percetakan.
 - Produk Pupuk, Kimia dan Karet.
 - Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam.
 - Logam Dasar Besi dan Baja.
 - Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Transportasi.
 - Produk Industri Pengolahan Lainnya.
- 4) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, meliputi:
 - a. Subsektor Listrik.
 - b. Subsektor Gas.
 - c. Subsektor Air Bersih.
- 5) Sektor Konstruksi, mencakup:



Konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan sejenisnya.

- 6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, meliputi:
 - a. Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran.
 - b. Subsektor Hotel.
 - c. Subsektor Restoran.
- 7) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Meliputi:
 - a. Subsektor Pengangkutan.
 - Angkutan Rel.
 - Angkutan Jalan Raya.
 - Angkutan Laut.
 - Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
 - Angkutan Udara.
 - Jasa Penunjang Angkutan.
 - b. Subsektor Komunikasi.
- 8) Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan, meliputi:
 - a. Subsektor Bank.
 - b. Subsektor Lembaga Keuangan Tanpa Bank.
 - c. Subsektor Jasa Penunjang Keuangan.
 - d. Subsektor Real Estate.
 - e. Subsektor Jasa Perusahaan.
- 9) Jasa-Jasa, meliputi:
 - a. Subsektor Pemerintahan Umum.
 - Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan.
 - Jasa Pemerintahan Lainnya.
 - b. Subsektor Swasta:
 - Jasa Sosial Kemasyarakatan.
 - Jasa Hiburan dan Rekreasi.
 - Jasa Perorangan dan Rumah Tangga.

2. Pendekatan Pengeluaran:

Perhitungan PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran/ penggunaan dikelompokkan dalam 6 komponen yaitu:

- 1). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang, dan jasa dikurangi dengan penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama setahun.
- 2). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang, baik pemerintah

- pusat dan daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Data yang dipakai adalah realisasi APBD.
- 3). Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal bekas atau baru dari luar negeri. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang.
 - 4). Perubahan Inventori. Perubahan stok dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya.
 - 5). Ekspor Barang dan Jasa. Ekspor barang dinilai menurut harga free on board (fob)
 - 6). Impor Barang dan Jasa. Impor barang dinilai menurut cost insurance freight (cif).

3. Pendekatan Pendapatan:

Perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Produk Nasional Bruto (PNB) adalah PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto luar negeri adalah pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia.

Pendapatan Nasional adalah PNB dikurangi dengan pajak tidak langsung (neto) dan penyusutan. Pajak tidak langsung neto adalah pajak tidak langsung dikurangi dengan subsidi pemerintah. Indeks implisit PDB merupakan rasio antara PDB harga Berlaku dengan PDB harga konstan. Deflator PDB adalah laju pertumbuhan indeks implisit PDB. Ekspor barang dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain.

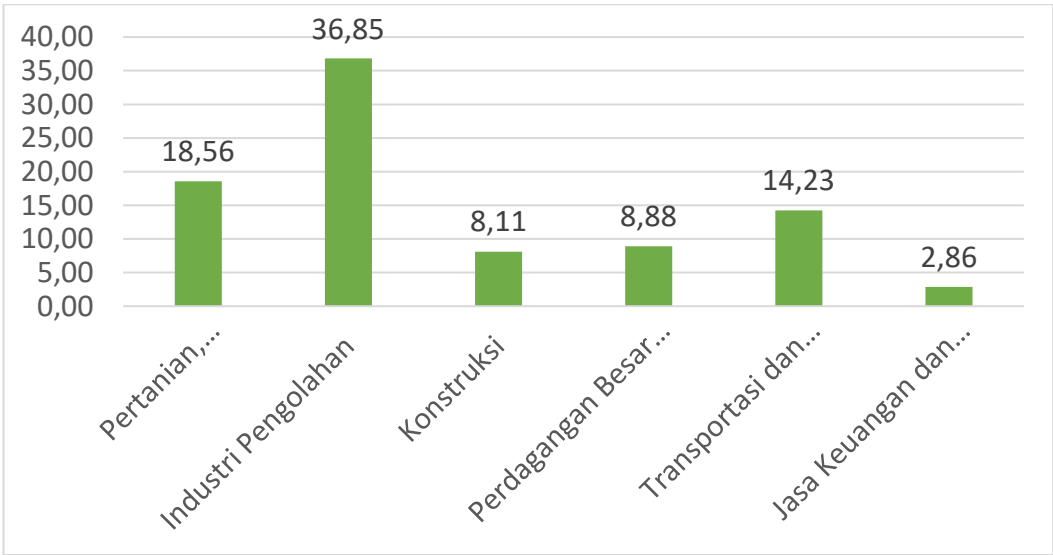
Nilai dan distribusi presentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kota Bitung tahun 2020-2024, sesuai data rilis Badan Pusat Statistik menunjukkan tren pertumbuhan yang positif selama



periode yang diamati. Pada tahun 2021, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bitung mencapai 76,09 Juta Rupiah, dan pada Tahun 2021 naik pada angka 82,19 Juta Rupiah. Kemudian, angka ini mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 8,99% pada tahun 2022 menjadi 89,70 Juta Rupiah. Tren pertumbuhan PDRB Kota Bitung terus berlanjut hingga tahun 2023 dengan capaian sebesar 97,54 Juta Rupiah, menunjukkan kenaikan sebesar 8,65% dari tahun sebelumnya, dan pada Tahun 2024 naik pada angka 105,34 Juta Rupiah. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Kota Bitung mengalami pertumbuhan yang konsisten selama periode tersebut, mencerminkan potensi dan stabilitas ekonomi yang kuat di wilayah tersebut. Diharapkan pertumbuhan ekonomi yang positif ini dapat berdampak baik pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bitung.

Pada tahun 2024, lapangan usaha yang paling berperan dalam perekonomian Kota Bitung adalah Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 36,85%, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 18,56%, Transportasi dan Pergudangan 14,23%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,88%, Konstruksi 8,11%, Jasa Keuangan dan Asuransi 2,86%. Distribusi PDRB menurut lapangan usaha di Kota Bitung tahun 2024 seperti pada grafik dibawah.

Grafik 10
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bitung Tahun 2024

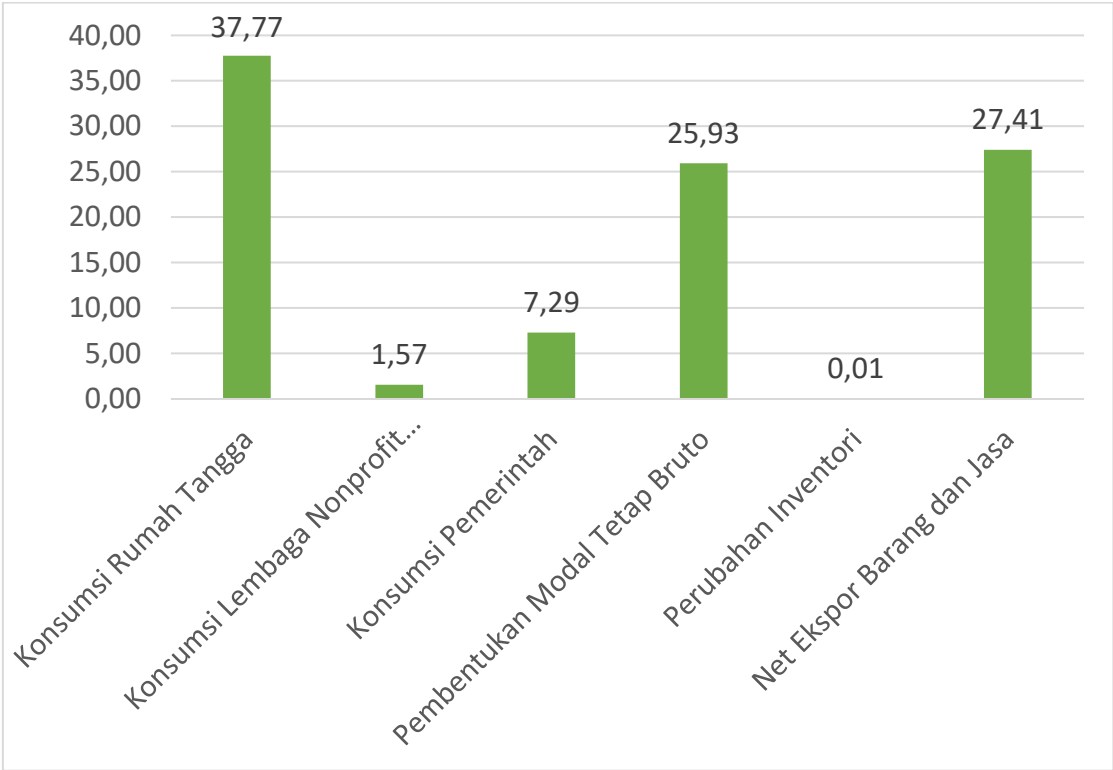


Sumber: BPS Kota Bitung, 2025.

Pada tahun 2024, distribusi Pengeluaran di Kota Bitung yang paling berperan adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 37,77%.



Grafik 11
**Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran
Kota Bitung Tahun 2024**



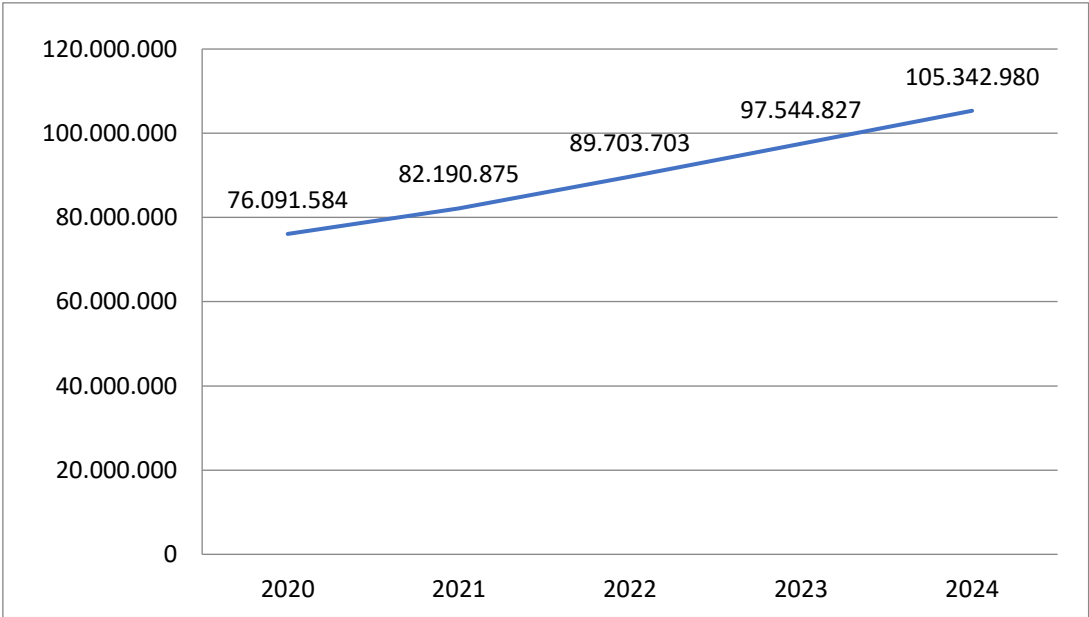
Sumber: BPS Kota Bitung, 2025

E.Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB Perkapita).

PDRB per kapita merupakan kinerja suatu wilayah yang menggambarkan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. Perkembangan nilai PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk, sehingga besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Semakin besar pendapatan per kapita suatu daerah, maka semakin makmur daerah tersebut.

PDRB perkapita Kota Bitung selang tahun 2020-2024 menunjukan trend kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pendapatan perkapita masyarakat Kota Bitung cenderung mengalami peningkatan selang tahun 2020-2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada graifik berikut ini.

Grafik 12
PDRB Per kapita ADHB Kota Bitung Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Bitung 2025.

F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting untuk mengukur capaian pembangunan. Menurut BPS, TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Artinya jika nilai TPT tinggi, maka ini menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tabel 41
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bitung
Tahun 2020-2024

Indikator (%)	2020	2021	2022	2023	2024
TPT	10,23	9,96	8,56	7,82	7,51

Sumber: BPS Kota Bitung, 2025.

TPT kota Bitung tahun 2020 sebesar 10,23 % dan turun di tahun 2021 pada angka 9,96%, tahun 2022 turun menjadi 8,56%, tahun 2023 pada angka 7,82% dan pada tahun 2024 turun lagi pada angka 7,51. Ini berarti, terjadi peningkatan angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja di Kota Bitung sampai tahun 2024.

G. Indeks GINI.

Data mengenai tingkat keparahan kemiskinan di Kota Bitung dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan beberapa tren dan perubahan penting yang perlu diperhatikan. Dua indeks utama digunakan untuk

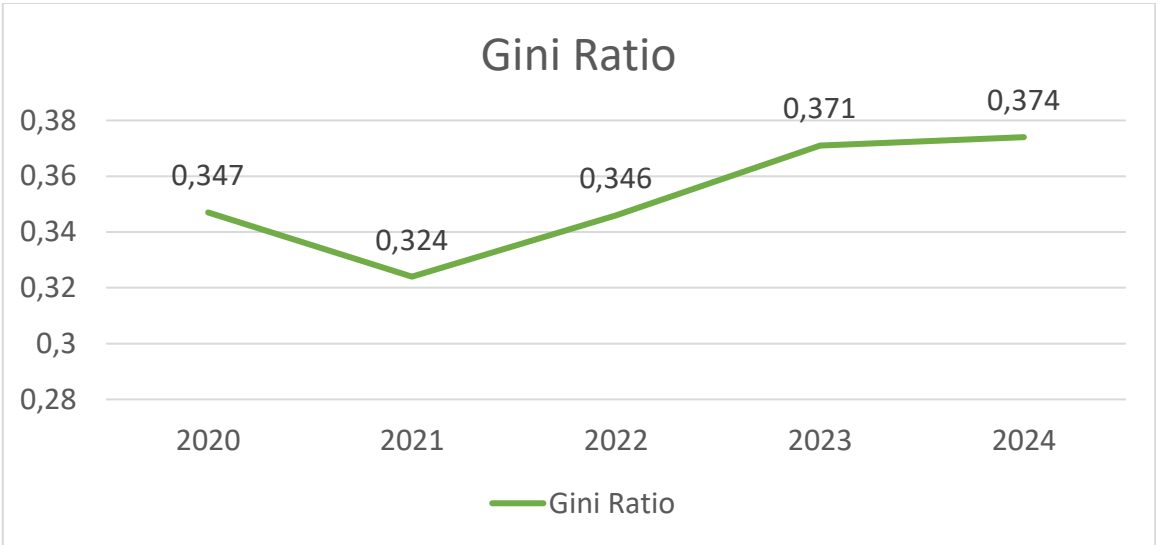
mengukur keparahan kemiskinan, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index atau P1) dan Indeks Keparahannya/Kemiskinan (Poverty Severity Index atau P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur kesenjangan rata-rata antara pendapatan penduduk miskin dan garis kemiskinan. Kenaikan pada indeks ini berarti jarak antara pendapatan penduduk miskin dan garis kemiskinan semakin besar.

Pada tahun 2020 hingga 2021, terdapat sedikit penurunan ke 0,023, menunjukkan perbaikan yang cukup besar dalam kesenjangan pendapatan. Kemudian pada tahun 2021 hingga 2022, terjadi kenaikan ke 0,022,. Namun, pada tahun 2022 hingga 2023, terjadi peningkatan kembali 0,025, demikian juga pada tahun 2023 hingga 2024, terjadi peningkatan kembali ke 0,003, mengindikasikan kenaikan dalam kesenjangan pendapatan.

Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengukur distribusi kesenjangan pendapatan di antara penduduk miskin. Indeks ini mempertimbangkan tidak hanya seberapa jauh pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan, tetapi juga seberapa lebar distribusi pendapatan tersebut di antara orang miskin. Pada tahun 2020 hingga 2021, terjadi kenaikan ke 0,25 yang kemungkinan mencerminkan dampak pandemi. Pada tahun 2021 hingga 2022, terjadi penurunan signifikan ke 0,12 yang menunjukkan perbaikan distribusi kesenjangan pendapatan. Namun, pada tahun 2022 hingga 2023, terjadi kenaikan kembali ke 0,25 yang menunjukkan peningkatan keparahan setelah penurunan yang signifikan di tahun sebelumnya.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa periode antara 2020 dan 2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dalam hal kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kota Bitung. Meskipun terdapat tren penurunan pada tahun 2022 dan menunjukkan puncak kenaikan baik untuk P1 maupun P2 di tahun 2023 dan tahun 2024, yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dan intervensi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan memperbaiki distribusi kemiskinan, beberapa tahun tetap mengalami tantangan yang signifikan. Keberhasilan dalam menurunkan kedua indeks di tahun 2022 adalah tanda yang positif, namun kerja keras masih diperlukan untuk memastikan keberlanjutan tren penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan penduduk, terutama dalam menghadapi dampak ekonomi yang bervariasi dari tahun ke tahun.

**Perkembangan Gini Ratio Kota Bitung
Tahun 2020 – 2024**



Sumber: BPS Kota Bitung, 2025

H. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami perubahan mulai tahun 2010, baik perubahan dari dimensi/indikator yang digunakan, maupun perubahan pada metode penghitungan agregasi indeks komposit. Sebelum tahun 2010, metode agregasi indeks komposit IPM menggunakan rata-rata hitung (aritmatik), sedangkan setelah itu metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata ukur (geometrik). Perubahan metode penghitungan dari rata-rata hitung menjadi rata-rata ukur adalah karena rata-rata hitung tidak respon terhadap adanya ketimpangan capaian pembangunan. Jika terdapat satu indikator yang rendah, maka indikator tersebut tertutupi oleh indikator yang lain yang memiliki nilai yang tinggi. Sebaliknya rata-rata ukur lebih responsif dengan adanya ketimpangan capaian pembangunan, dimana jika terdapat satu indikator yang rendah, maka indikator tersebut tidak akan tertutupi oleh indikator yang lain yang memiliki nilai yang tinggi. Adanya ketimpangan akan menyebabkan nilai IPM-nya menjadi lebih rendah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/ keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh angka harapan hidup saat lahir, yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Sementara itu, BPS mengelompokkan capaian IPM ke dalam empat kategori, yaitu: sangat tinggi (≥ 80), tinggi (70-80), sedang (60-70), dan rendah (< 60).

IPM digunakan untuk menggambarkan capaian kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin tinggi angka, semakin baik kualitas pembangunan manusia.

Dimensi penyusunan IPM terdiri dari:

1. Dimensi Pendidikan yaitu:

- **Harapan Lama Sekolah (HLS):** lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS):** jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

2. Dimensi Kesehatan yaitu:

- **Umur Harapan Hidup (UHH):** rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir

3. Dimensi Pengeluaran yaitu:

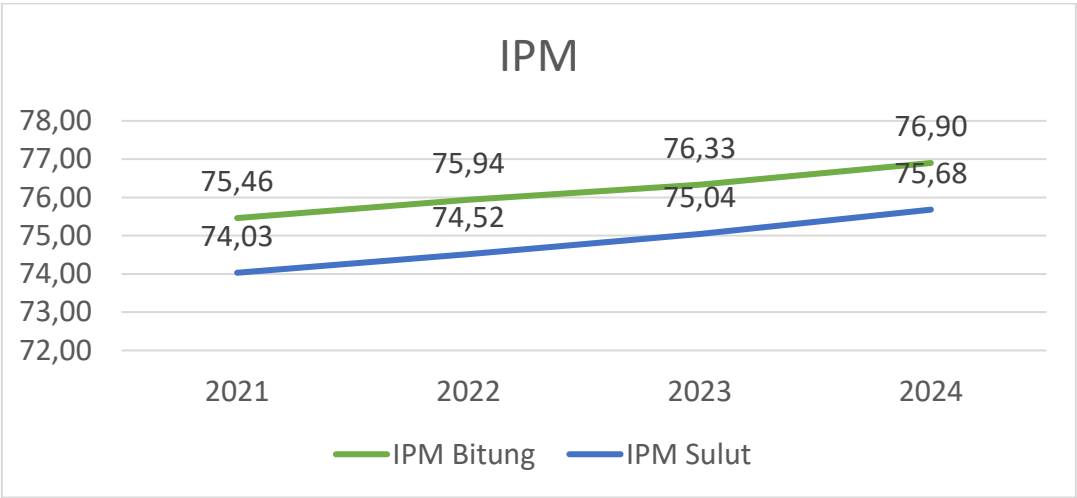
- **Pengeluaran per kapita disesuaikan:** ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita setahun dan paritas daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bitung dari tahun 2021–2024 selalu mengalami kenaikan namun angka Indeks selalu berada di kisaran 70. Hal ini berarti capaian kualitas Pembangunan Manusia di Kota Bitung selalu masuk kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi, IPM Kota Bitung tahun 2021–2024 selalu lebih tinggi.

Dalam empat tahun terakhir, Kota Bitung mengalami tren positif dalam berbagai indikator pendidikan. Berdasarkan data yang tersedia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan dari 75,46 pada tahun 2021 menjadi 75,94 pada tahun 2022 dan menjadi 76,33 pada tahun 2023 serta menjadi 79,90 di tahun 2024. Indikator IPM tersebut menggambarkan perbaikan signifikan dalam kualitas hidup yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Peningkatan IPM ini tidak terlepas dari kontribusi dimensi pendidikan yang terus

membaik. Jika dibandingkan dengan capaian IPM kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024, Kota Bitung berada pada posisi ke-5 setelah Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara.

Grafik 14
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Bitung Tahun 2020 – 2024**



Sumber: BPS Kota Bitung, 2025.

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua.

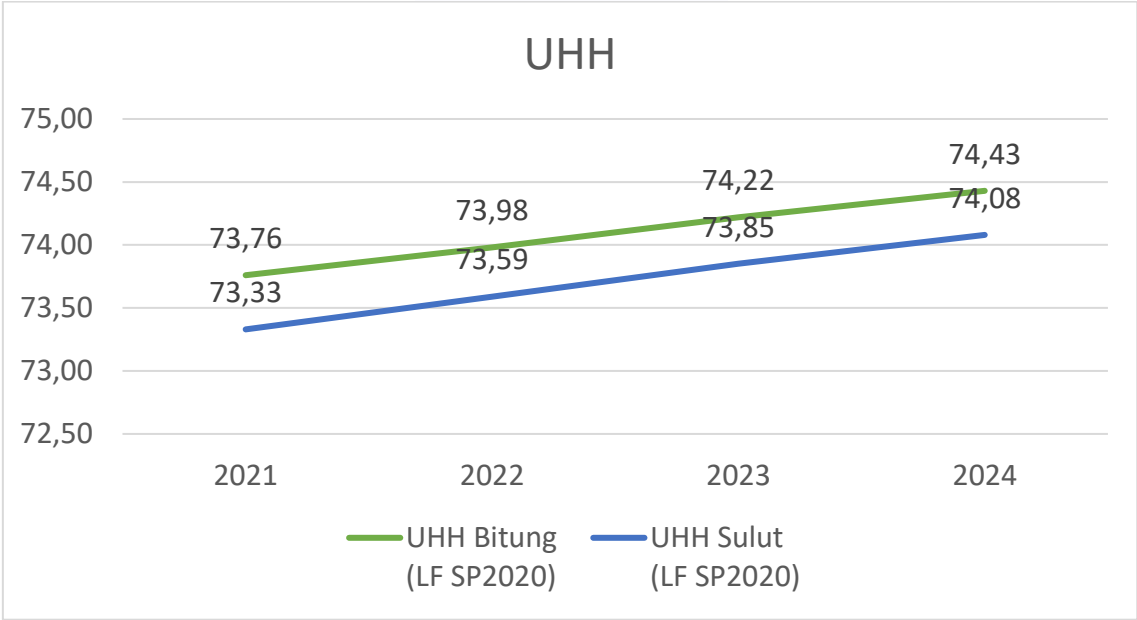
Pembangunan kesehatan juga merupakan salah satu dari tiga pondasi utama pembangunan manusia selain ekonomi dan pendidikan. Sama seperti pendidikan, indikator untuk melihat kemajuan pembangunan dan kondisi kesehatan masyarakat juga sangat luas. Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan angka harapan hidup, prevalensi balita gizi buruk, angka kematian ibu, dan angka kematian bayi.

A. Usia Harapan Hidup (UHH).

UHH adalah rata-rata perkiraan atau ekspektasi dari usia bayi yang baru lahir mencapai kematiannya. UHH dipakai sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya. Dengan evaluasi tersebut pemerintah dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi para penduduknya, apabila ditemukan UHH yang rendah di suatu daerah maka pemerintah harus mengadakan lebih banyak program pembangunan, kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan.

UHH di Kota Bitung dari tahun 2020–2024 selalu mengalami kenaikan. Artinya Tingkat Kesehatan di Kota Bitung dari tahun ke tahun selalu membaik, sejalan dengan UHH yang semakin panjang.

Grafik 15
**Usia Harapan Hidup Kota Bitung
Tahun 2021– 2024**



Sumber: BPS Kota Bitung, 2025.

Grafik 2.8 menunjukkan analisis data angka harapan hidup di Kota Bitung dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari satu tahun ke tahun berikutnya. Pada tahun 2021, usia harapan hidup penduduk Kota Bitung mencapai 73,76 tahun. Kemudian, terjadi kenaikan yang cukup stabil dengan usia harapan hidup mencapai 73,98 tahun di tahun 2022, mencerminkan kemajuan yang lebih besar dalam upaya kesehatan dan pelayanan masyarakat. Tren peningkatan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, usia harapan hidup di Kota Bitung meningkat menjadi 74,22 tahun. Demikian juga di tahun 2024 terjadi kenaikan yang cukup stabil di angka 74,43 tahun. Peningkatan ini memberikan gambaran bahwa kebijakan dan program-program kesehatan yang dilakukan di Kota Bitung berdampak positif. Dengan adanya peningkatan angka harapan hidup yang stabil dan terus meningkat, Kota Bitung berpotensi menjadi contoh kesuksesan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduknya.

B. Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI adalah jumlah kematian ibu yang diakibatkan oleh kehamilan, persalinan, dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan), per 100.000 kelahiran hidup.

Pemerintah Indonesia menargetkan AKI sebesar 183 kasus per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2024. Dari data pada tabel dibawah digambarkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 AKI berada pada 96 kasus, dan turun di angka 92 kasus di tahun 2022, dan naik lagi di angka 96



kasus di tahun 2023, kemudian turun lagi di angka 94 kasus di tahun 2024.

Tabel 42
**Angka Kematian Ibu (AKI)
Tahun 2021-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu	96	96	92	96	94

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bitung 2025

Data terkait kunjungan ibu hamil dan status gizi di Kota Bitung dari tahun 2014 hingga 2024 menunjukkan gambaran yang penting dalam pemantauan kesehatan masyarakat. Jumlah kunjungan ibu hamil cenderung stabil dari tahun ke tahun, meskipun terdapat fluktuasi kecil dalam angka tersebut. Selain itu, data mengenai kurang mendapat zat besi juga menunjukkan bahwa upaya untuk memastikan ibu hamil mendapatkan cukup zat besi telah dilakukan, meskipun masih terdapat kasus yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Pentingnya asupan energi dan zat besi terlihat dari data kunjungan ibu hamil dengan kondisi KEK (Kekurangan Energi Kronis) serta kurang mendapat zat besi. Pada beberapa tahun, tercatat adanya ibu hamil dengan kondisi KEK yang memiliki potensi risiko kesehatan lebih lanjut, sedangkan kurang mendapat zat besi dapat berdampak pada kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin.

Dari data tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan kasus KEK yang signifikan diikuti dengan kasus kurang mendapat zat besi yang perlu penanganan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian ekstra terhadap pemantauan kesehatan ibu hamil serta program-program gizi yang efektif guna meningkatkan kesejahteraan ibu dan pertumbuhan janin di Kota Bitung.

Dengan pemahaman mendalam tentang data kunjungan ibu hamil dan status gizi yang tercatat, diharapkan pihak terkait dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pemantauan kesehatan, pemenuhan gizi, dan akses layanan kesehatan bagi ibu hamil di Kota Bitung guna mendukung terciptanya generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.

Tabel 43
Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, KEK, dan Mendapat Tablet Zat Besi di Kota Bitung, 2014 - 2024

Tahun	Jumlah Ibu Hamil	Kunjungan		KEK	Mendapat Zat Besi	
		K1	K4		Fe1	Fe3
2014	4.294	4.236	3.954	-	4.228	3.954
2015	4.502	4.098	3.931	-	3.931	3.930
2016	4.501	4.220	4.000	-	4.220	4.062
2017	4.501	4.244	3.935	-	4.238	3.938
2018	4.500	4.338	3.905	26	3.867	3.803
2019	4.498	4.215	4.021	678	4.215	4.121
2020	4.393	4.253	4.164	368	4.253	4.164
2021	4.498	4.185	3.630	306	3.631	3.428
2022	4.498	4.294	3.591	504	4.294	3.591
2023	4.220	4.102	3.400	435	4.102	3.400
2024	4220	3.817	3046	425	3817	3069

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bitung 2025.

C. Angka Kematian Bayi (AKB).

Kematian bayi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh para pemangku kebijakan, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Angka Kematian Bayi (AKB) mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup dari masyarakat. Selain itu, *Sustainable Development Goals (SDGs)* bidang kesehatan dan kesejahteraan (SDGs ke-3), memiliki target yang akan dicapai pada tahun 2030 dimana target tersebut diantaranya mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan menurunkan angka kematian neonatal hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 44
Angka Kematian Bayi (AKB)
Tahun 2021-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Bayi	4,0	3,8	3,3	3,1	2,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bitung 2025



Seperti yang terlihat pada tabel di atas, upaya menurunkan Kematian Bayi di kota Bitung menunjukkan hasil yang baik. Pada tahun 2020 AKB berada pada angka 4,0. Tahun 2021, angka kematian bayi pada angka 3,8 turun pada tahun 2022 pada angka 3,3 kemudian 2023 turun lagi pada angka 3,1, dan turun lagi di tahun 2024 pada angka 2,5. AKI di Kota Bitung di tahun 2024 dapat dikatakan jauh dari target nasional di tahun 2024 yaitu pada angka 16.

D. Bayi Lahir, BBRL, dan Bergizi Buruk Kota Bitung.

Balita pendek (stunting) adalah balita dengan status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunted (pendek) dan severely stunted (sangat pendek). Masalah balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu dari saat masa janin, dan masa bayi/balita hingga remaja. Status gizi balita berdasarkan indikator tinggi badan menurut umur menggambarkan status gizi yang sifatnya kronis. hal ini muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama seperti kemiskinan, perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang karena hygiene dan sanitasi yang kurang baik.

Tabel 45
Jumlah Bayi Lahir, BBRL, dan Bergizi Buruk Kota Bitung Tahun 2014-2024

Tahun	Bayi Lahir	BBLR	Gizi Buruk
2014	3.570	40	-
2015	3.972	51	2
2016	3.582	50	-
2017	3.449	82	1
2018	3.540	2	1
2019	3.867	77	-
2020	3.494	65	6
2021	3.617	92	15
2022	3.235	79	6
2023	3.103	37	5
2024	3.177	41	8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bitung,2025

Data yang disajikan pada tabel tersebut di atas menunjukkan gambaran yang menarik. Dari data jumlah bayi lahir, terlihat bahwa angka

kelahiran di Kota Bitung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, tercatat 3.570 bayi lahir. Selanjutnya, terjadi peningkatan pada tahun 2015 dengan 3.972 bayi lahir sebelum kembali mengalami variasi angka kelahiran pada tahun-tahun berikutnya.

Pentingnya pemantauan kesehatan terlihat dari data berat badan rendah lahir (BBRL) dan kondisi gizi buruk di Kota Bitung. Dari data tersebut, terlihat bahwa terdapat kasus BBRL yang terjadi pada beberapa tahun tertentu, menunjukkan adanya tantangan dalam kesehatan ibu hamil dan pertumbuhan bayi di daerah tersebut. Selain itu, adanya kasus gizi buruk yang tercatat pada beberapa tahun juga menjadi perhatian serius, mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat di Kota Bitung.

Dari data tahunan yang tercatat, terlihat bahwa pada tahun 2021 dan 2022 terjadi lonjakan kasus BBRL dan gizi buruk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya dalam pemantauan kesehatan ibu hamil, perawatan selama kehamilan, serta pemenuhan gizi yang cukup bagi ibu dan bayi. Dengan pemahaman mendalam terhadap data ini, diharapkan pihak terkait dapat mengimplementasikan program-program kesehatan yang lebih efektif guna meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi di Kota Bitung.

E. Stunting.

Pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menysasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting.

Sebagai salah satu bentuk komitmen buat mempercepat penurunan stunting, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) dalam akselerasi Penurunan Stunting yg sudah diluncurkan dan dilaksanakan Sejak tahun 2018. Perpres ini juga ditujukan untuk memperkuat kerangka intervensi yang wajib dilakukan serta kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 % di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030



berdasarkan capaian pada tahun 2024. sesuai 5 Pilar akselerasi Penurunan Stunting, akan disusun rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko stunting.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Wakil Presiden menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya. Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana. Tim Percepatan Penurunan Stunting juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Di Kota Bitung sendiri, telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mulai dari tingkat Kota, Kecamatan hingga Kelurahan.

Dalam upaya penurunan stunting, Pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) yang bertujuan untuk mempercepat penurunan Stunting dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada. Terdapat 5 (lima) pilar dalam strategi nasional tersebut, yaitu: 1) komitmen dan visi kepemimpinan; 2) Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; 3) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa; 4) Gizi dan ketahanan pangan; dan 5) Pemantauan dan evaluasi. Strategi ini diselenggarakan di semua tingkatan pemerintah dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait maupun pihak non pemerintah seperti swasta, masyarakat, dan komunitas.

Tabel 46
**Data Kondisi Prevalensi Stunting
Kota Bitung Tahun 2020-2024**

Tahun	E-PPGBM	SKI/SGGI
2020	4,7 %	-
2021	3,8%	22,1%
2022	3,9%	23,1%
2023	5,5%	19,5%
2024	2,8%	25,1%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bitung,2025

Prevalensi Stunting Kota Bitung menurut data E-PPGBM, pada tahun 2020 pada angka 4,7 persen dan turun pada tahun 2021 pada angka 3,8 persen. tahun 2022 naik menjadi 3,9 persen kemudian naik menjadi 5,5 persen di tahun 2023 dan turun menjadi 2,8 persen di tahun 2024.

Untuk data SKI/SGGI di tahun 2021 berada pada angka 22,1% dan naik menjadi 23,1 persen tahun 2022 dan turun pada angka 19,5 persen di tahun 2023 dan Kembali naik pada angka 25,1% tahun 2024.

Pelaksanaan aksi konvergensi penurunan Stunting dilakukan melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi yakni (1) analisis situasi, (rencana kegiatan), (3) Rembuk Stunting, (4) Perwali/Perbup Peran Desa/Kelurahan, (5) Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, (6) Sistem Manajemen Data, (7) Pengukuran dan Publikasi Data Stunting, dan (8) Reviu Kinerja Tahunan. Delapan aksi konvergensi tersebut dilakukan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan. Pelaksanaan aksi konvergensi dilakukan melalui intervensi gizi spesifik (kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan) dan sensitif (upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara tidak langsung, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan) dengan sasaran Rumah Tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dapat mengakses layanan 20 indikator penurunan stunting secara lengkap (konvergen) di lokus stunting dengan menyelaraskan berbagai sumberdaya yang dimiliki. Saat ini pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting di Kota Bitung telah sampai pada tahapan ke-3, yaitu kegiatan rembuk stunting. Dimana, Pemerintah Kota Bitung dalam hal ini berupaya keras untuk melakukan percepatan penanganan stunting berdasarkan mekanisme akselerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting.

F. Keluarga Sehat Kota Bitung.

Data Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Bitung periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan positif dalam upaya pemantauan dan peningkatan status kesehatan keluarga. Selama lima tahun, terlihat peningkatan konsisten pada tiga aspek penting: jumlah keluarga yang dipantau, persentase pemantauan, dan nilai IKS, meskipun kategori IKS masih tetap pada level "Pra-



Sehat".

Tabel 47
**Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Bitung
periode 2020-2024**

Tahun	Jumlah Keluarga	Keluarga Dipantau	Persentase Dipantau (%)	Indeks Keluarga Sehat	Kategori
2020	65.874	39.524	60,00	0,512	Pra-Sehat
2021	67.215	43.690	65,00	0,548	Pra-Sehat
2022	68.523	47.966	70,00	0,596	Pra-Sehat
2023	70.152	52.614	75,00	0,637	Pra-Sehat
2024	73.450	58.760	80,00	0,685	Pra-Sehat

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bitung (Diolah)

Jumlah keluarga di Kota Bitung mengalami pertumbuhan dari 65.874 pada tahun 2020 menjadi 73.450 pada tahun 2024, dengan peningkatan sebesar 11,5%. Pada periode yang sama, jumlah keluarga yang dipantau meningkat signifikan dari 39.524 menjadi 58.760, atau pertumbuhan sebesar 48,7%. Peningkatan cakupan pemantauan yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah keluarga tercermin dalam kenaikan persentase keluarga yang dipantau dari 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024, menunjukkan penguatan sistem kesehatan keluarga di Kota Bitung.

Nilai IKS Kota Bitung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 0,512 pada tahun 2020 menjadi 0,685 pada tahun 2024, dengan total peningkatan sebesar 0,173 poin atau 33,8% dalam lima tahun. Meskipun mengalami peningkatan yang signifikan, IKS Kota Bitung masih berada dalam kategori "Pra-Sehat" (rentang 0,5-0,8) sepanjang periode tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi perbaikan dalam kondisi kesehatan keluarga, diperlukan upaya lebih intensif untuk mencapai kategori "Sehat" (IKS > 0,8).

Analisis data tahunan menunjukkan akselerasi peningkatan IKS yang relatif konsisten, dengan kenaikan antara 0,036-0,048 poin per tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada periode 2022-

2023 (0,041 poin) dan 2023-2024 (0,048 poin), yang menandakan adanya penguatan intervensi program kesehatan keluarga dalam dua tahun terakhir. Peningkatan signifikan ini sejalan dengan perluasan cakupan pemantauan yang mencapai 75% pada 2023 dan 80% pada 2024.

Dari perspektif kebijakan kesehatan, peningkatan IKS Kota Bitung yang belum mencapai kategori "Sehat" menunjukkan adanya tantangan struktural dalam memperbaiki determinan kesehatan keluarga. Meskipun cakupan pemantauan telah mencapai 80% pada 2024, masih terdapat 20% keluarga yang belum terpantau, yang kemungkinan merupakan kelompok yang lebih sulit dijangkau atau memiliki kerentanan sosial-ekonomi yang lebih tinggi.

Korelasi positif antara perluasan cakupan pemantauan dan peningkatan nilai IKS menunjukkan efektivitas intervensi program kesehatan keluarga. Setiap kenaikan 5% dalam cakupan pemantauan selama periode 2020-2024 rata-rata diikuti dengan peningkatan nilai IKS sebesar 0,0432 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan cakupan program kesehatan keluarga berdampak positif pada peningkatan status kesehatan keluarga di Kota Bitung.

Meskipun kategori IKS masih tetap "Pra-Sehat" selama lima tahun, nilai 0,685 pada tahun 2024 sudah cukup mendekati batas atas kategori ini (0,8). Jika tren peningkatan saat ini dapat dipertahankan atau dipercepat, Kota Bitung berpotensi mencapai kategori "Sehat" dalam beberapa tahun ke depan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penguatan intervensi pada 12 indikator keluarga sehat yang menjadi komponen pengukuran IKS, dengan prioritas pada indikator-indikator yang masih memiliki capaian rendah.

Secara keseluruhan, data IKS Kota Bitung 2020-2024 menggambarkan kemajuan yang konsisten dalam upaya peningkatan status kesehatan keluarga, meskipun masih terdapat ruang yang signifikan untuk perbaikan. Peningkatan cakupan pemantauan menjadi 80% merupakan pencapaian penting dalam memperkuat sistem kesehatan keluarga, namun perlu didukung dengan intervensi yang lebih terarah untuk mengakselerasi peningkatan IKS menuju kategori "Sehat" di masa mendatang.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas Yang Merata.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah.

A. Angka Partispasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam konteks Kota Bitung pada tahun 2022 dan 2023, data tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara APM dan APK berdasarkan jenjang pendidikan.

Pada tahun 2022, tingkat APM dan APK untuk SD/MI/Sederajat (Primary School) adalah 96,49 dan 108,04, sedangkan pada tahun 2023 menjadi 96,12 dan 106,91. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan tersebut.

Sementara itu, untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat (Lower Secondary School), terlihat bahwa pada tahun 2022 APM dan APK adalah 77,53 dan 91,73, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 77,16 dan 84,21. Ini menandakan adanya penurunan partisipasi pendidikan pada jenjang ini dalam rentang waktu tersebut.

Terakhir, untuk jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat (Upper Secondary School), terlihat adanya kenaikan yang signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. APM naik dari 62,88 menjadi 67,79, sementara APK dari 76,59 naik tajam menjadi 86,32. Hal ini menunjukkan peningkatan partisipasi pendidikan pada jenjang ini, yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pendidikan, kesadaran masyarakat, dan aksesibilitas pendidikan.

Secara keseluruhan, data APM dan APK untuk berbagai jenjang pendidikan di Kota Bitung menunjukkan dinamika yang berbeda-beda, yang memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut. Rekapitulasi data perkembangan APM Kota Bitung tahun 2022-2023 disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 48
**Angka Partisipasi Murni di Kota Bitung
Tahun 2022 – 2023**

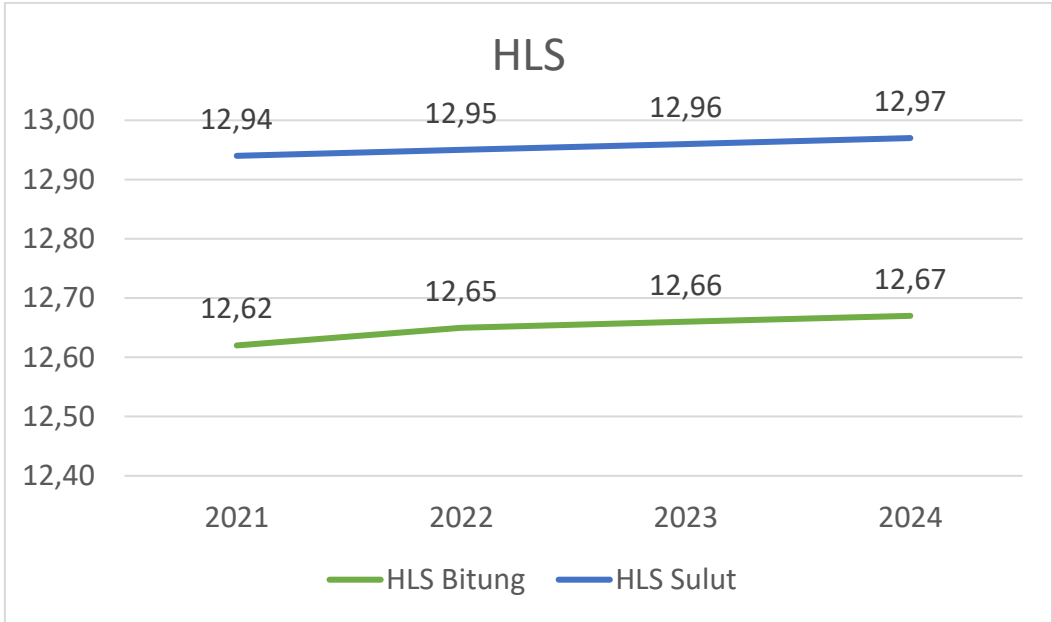
Jenjang Pendidikan Educational Level	Angka Partisipasi Murni (APM) Net Enrollment Rate		Angka Partisipasi Kasar (APK) Gross Enrollment Ratio	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Sederajat Primary School	96,49	96,12	108,04	106,91
SMP/MTs/ Sederajat Lower Secondary School	77,53	77,16	91,73	84,21
SMA/SMK/MA/Sederajat Upper Secondary School	62,88	67,79	76,59	86,32

Sumber: Kota Bitung Dalam Angka 2025.

B. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Harapan Lama Sekolah sampai tahun 2024 di Kota Bitung selalu berkisar di angka 12, itu menunjukkan bahwa di Kota Bitung anak umur 7 tahun yang mulai memasuki Sekolah Dasar diharapkan mampu bersekolah hingga 12 tahun ke depan atau tamat Pendidikan SMA/Sederajat. Harapan lama sekolah yang tinggi mencerminkan komitmen masyarakat dan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan memperbaiki kualitas layanan pendidikan.

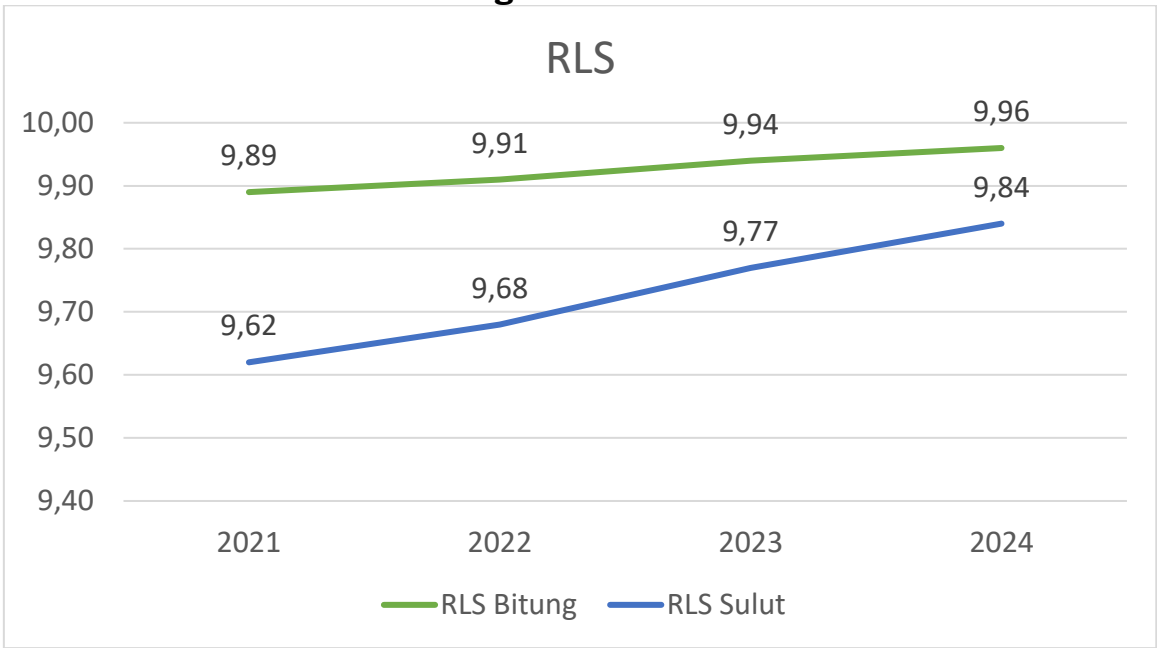
Grafik 16
**Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kota Bitung Tahun 2021 – 2024**



Sumber: BPS Kota Bitung, 2025.

Rata-rata lama sekolah, yang menunjukkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, mengalami peningkatan dari 9,89 tahun pada tahun 2021 menjadi 9,91 di tahun 2022, menjadi 9,94 tahun pada tahun 2023 dan di tahun 2024 ada pada angka 9,96. Meski peningkatan angka ini tampak kecil, hal ini menggambarkan konsistensi dalam peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan jangka panjang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin besar pula pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bitung.

Grafik 17
**Rata Rata Lama Sekolah (RLS)
Kota Bitung Tahun 2021 – 2024**



Sumber: BPS Kota Bitung, 2025.

Peningkatan dalam indikator-indikator ini tidak hanya menunjukkan kemajuan dalam sektor pendidikan, tetapi juga dapat menjadi refleksi keberhasilan program-program dan kebijakan pendidikan yang diterapkan di Kota Bitung. Berbagai upaya seperti penguatan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas guru, pemberian bantuan pendidikan, serta kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan, mungkin telah berkontribusi pada tren positif ini. Namun demikian, untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan, masih ada beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu adanya penguatan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kedua, peningkatan akses dan kualitas sarana prasarana pendidikan terutama di daerah yang belum terjangkau secara optimal. Ketiga, perlu dilakukan kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat secara terus-menerus mengenai pentingnya pendidikan formal bagi peningkatan kualitas hidup mereka.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa Kota Bitung mengalami peningkatan yang stabil dalam indikator pendidikan dalam empat tahun terakhir. Upaya berkelanjutan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tren positif ini terus berlanjut, demi mencapai IPM yang lebih tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh penduduk Kota Bitung di masa mendatang.

C. Indeks Literasi Digital.

Data Indeks Literasi Digital (ILD) berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Bitung menunjukkan korelasi positif yang jelas antara jenjang pendidikan dengan tingkat literasi digital. Terdapat pola peningkatan yang konsisten pada nilai ILD seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan, mulai dari 3,20 pada kelompok berpendidikan SD/Tidak Tamat SD hingga mencapai 4,55 pada kelompok berpendidikan S2/S3, dengan selisih 1,35 poin atau 42,2%.

Analisis per komponen menunjukkan bahwa Kemampuan Dasar Digital secara konsisten menjadi komponen dengan nilai tertinggi di semua jenjang pendidikan, berkisar dari 3,25 pada kelompok SD/Tidak Tamat SD hingga 4,75 pada kelompok S2/S3. Komponen ini menunjukkan rentang perbedaan sebesar 1,50 poin antar kelompok pendidikan terendah dan tertinggi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan formal berkontribusi signifikan terhadap penguasaan keterampilan teknis digital.

Tabel. 49

Indeks Literasi Digital berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tahun 2024

Tingkat Pendidikan	Kemampuan Dasar Digital	Etika Digital	Keamanan Digital	Kritis terhadap Informasi	ILD
SD/Tidak Tamat SD	3,25	3,45	3,15	2,95	3,20
SMP/MTs	3,85	3,75	3,45	3,25	3,58
SMA/SMK/MA	4,25	3,95	3,75	3,65	3,90
Diploma/S1	4,55	4,35	4,15	4,05	4,28
S2/S3	4,75	4,65	4,45	4,35	4,55
Rata-rata	4,10	3,95	3,72	3,58	3,84

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diolah).

Komponen Etika Digital menunjukkan pola unik dimana kelompok SD/Tidak Tamat SD memiliki nilai yang relatif lebih tinggi (3,45) dibandingkan dengan komponen lainnya pada tingkat pendidikan yang sama. Hal ini menarik karena menunjukkan bahwa kesadaran etis dalam penggunaan teknologi digital tidak selalu berkorelasi langsung dengan tingkat pendidikan formal, dan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam komunitas.

Keamanan Digital dan Kritis terhadap Informasi konsisten menjadi komponen dengan nilai lebih rendah dibandingkan komponen lainnya di setiap jenjang pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan untuk melindungi informasi pribadi dan mengevaluasi kredibilitas informasi merupakan aspek yang lebih kompleks dan memerlukan literasi yang lebih tinggi. Kesenjangan terbesar antara kelompok pendidikan terendah dan tertinggi terdapat pada komponen Kritis terhadap Informasi (1,40 poin), yang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan evaluatif terhadap informasi digital sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal.

Perbandingan antara nilai rata-rata keseluruhan dan nilai berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa rata-rata ILD Kota Bitung (3,84) berada sedikit di bawah nilai kelompok berpendidikan SMA/SMK/MA (3,90). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kontribusi terhadap literasi digital kota berasal dari kelompok dengan tingkat pendidikan menengah ke atas, dan mencerminkan struktur demografi pendidikan Kota Bitung.

Kesenjangan literasi digital berdasarkan tingkat pendidikan yang cukup signifikan (1,35 poin) mengindikasikan adanya potensi kesenjangan digital (digital divide) dalam masyarakat Kota Bitung. Kelompok dengan pendidikan rendah berisiko tertinggal dalam pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan kualitas hidup dan partisipasi ekonomi. Hal ini

memerlukan intervensi kebijakan yang ditargetkan untuk mempersempit kesenjangan tersebut melalui program pendidikan dan pelatihan literasi digital yang inklusif.

Secara keseluruhan, data ILD berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Bitung menggambarkan hubungan yang erat antara pendidikan formal dan literasi digital. Meskipun semua kelompok pendidikan menunjukkan nilai yang cukup baik (di atas 3,0), kesenjangan antar kelompok tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi. Strategi peningkatan literasi digital perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok pendidikan, dengan penekanan khusus pada penguatan kemampuan kritis terhadap informasi dan keamanan digital, terutama untuk kelompok dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif.

Mekanisme perlindungan sosial dirancang untuk merespons perubahan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis yang berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan risiko, serta mempromosikan ketahanan dan kesejahteraan sosial.

Ada beberapa aspek penting dalam konteks perlindungan sosial yang adaptif yang diperhatikan, diantaranya :

1. Aspek Fleksibilitas.

Sistem perlindungan sosial yang adaptif harus dapat merespons perubahan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi.

2. Aspek Partisipasi Masyarakat.

Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan implementasi perlindungan sosial untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi.

3. Penggunaan Teknologi.

Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perlindungan sosial, serta memfasilitasi akses ke layanan sosial dan informasi.

4. Kolaborasi.

Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan sosial yang adaptif dapat diimplementasikan secara efektif.

Untuk memastikan perlindungan sosial yang inklusif, efektif, responsif sekaligus adaptif oleh pemerintah daerah dibutuhkan tiga hal utama, meliputi integrasi data, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta terobosan.

Pemerintah Kota Bitung dalam menjalankan perlindungan sosial yang adaptif dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain:

A. Digitalisasi Daerah.

Pemerintah Kota Bitung berfokus pada digitalisasi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga dapat menjawab, ketidakpastian, ketidakadilan dan diskriminasi.

Kota Bitung telah melaksanakan berbagai inisiatif digitalisasi untuk mendukung perlindungan sosial dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah penting yang telah diambil:

- Gerakan Menuju Smart City: Bitung berkomitmen mengembangkan kota cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pada tahun 2022, kota ini menjadi salah satu peserta dalam program Gerakan Menuju Smart City, yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi dan kolaborasi dalam pelayanan publik.
- Digitalisasi Pasar: di Bitung telah diterapkan sistem digitalisasi yang mencakup penggunaan QRIS untuk transaksi dan layanan E-Retribusi. Inisiatif ini mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia, menunjukkan keberhasilan dalam memodernisasi pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi.
- Pendataan Penduduk Digital: Melalui digitalisasi data penduduk, pemerintah kota dapat mempercepat pengumpulan dan analisis data yang mendukung kebijakan publik. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Program Digitalisasi UMKM: Untuk memberdayakan pelaku usaha mikro, pemerintah telah meluncurkan program pelatihan digital marketing. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi untuk pemasaran produk mereka.

Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan komitmen Kota Bitung dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui digitalisasi.

B. Meningkatkan derajat kesehatan dan jiwa sosial.

Pemerintah Kota Bitung juga berupaya meningkatkan derajat kesehatan dan jiwa sosial masyarakat melalui berbagai program dan layanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial terhadap risiko yang mungkin dihadapi pekerja seperti kecelakaan

kerja, meninggal dunia, persiapan hari tua, pensiun dan pemutusan hubungan kerja yaitu melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) di Kota Bitung meliputi pekerja formal dan informal. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan Tahun 2021 diberikan kepada 25.000 pekerja rentan (informal) dan 5.200 pekerja penyelenggara negara non-ASN. Hal ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Manado.

C. Meningkatkan Perekonomian.

Pemerintah Kota Bitung juga berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Bitung telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan ekonomi dan mendukung perlindungan sosial yang adaptif. Berikut adalah beberapa inisiatif utama:

1. Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pemerintah Kota Bitung fokus pada pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui Sistem Informasi Kuliner dan Pariwisata, informasi tentang destinasi wisata dan produk lokal dapat diakses dengan mudah, mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan meningkatkan daya tarik pariwisata.

2. Penyaluran Bantuan Sosial.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi, pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, dan program sembako. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan membantu mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pembatasan sosial.

3. Peningkatan Infrastruktur.

Pengembangan Pelabuhan Bitung juga merupakan bagian dari strategi untuk mendukung kawasan ekonomi khusus. Dengan meningkatkan kapasitas pelabuhan, pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan ekspor dan impor, yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Kebijakan Ekonomi Makro.

Kota Bitung menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor transportasi dan komunikasi.



Pemerintah berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ini inklusif, dengan memperhatikan distribusi pendapatan agar tidak hanya menguntungkan segelintir orang.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah kota berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi sambil menjaga kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial yang adaptif.

D. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Data kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kota Bitung menunjukkan tren peningkatan signifikan selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, rata-rata kepesertaan jaminan sosial meningkat dari 39,0% pada tahun 2020 menjadi 59,0% pada tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 20 poin persentase atau 51,3% dalam lima tahun. Peningkatan ini mencerminkan penguatan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Kota Bitung.

Tabel 50
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Bitung 2020-2024

Jenis Jaminan Sosial	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
BPJS Ketenagakerjaan	42,6	48,3	55,7	63,5	68,2
BPJS Kesehatan (Pekerja)	65,8	72,3	79,5	85,7	89,2
Asuransi Komersial	12,4	15,6	19,8	22,5	26,1
Jaminan Pensiun	35,2	38,7	43,5	47,3	52,6
Rata-rata Kepesertaan	39,0	43,7	49,6	54,8	59,0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Cabang Bitung (Diolah).

Analisis per jenis jaminan sosial menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan untuk pekerja konsisten menjadi program dengan tingkat kepesertaan tertinggi, meningkat dari 65,8% pada tahun 2020 menjadi 89,2% pada tahun 2024. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga menunjukkan peningkatan substansial dari 42,6% menjadi 68,2% dalam periode yang sama. Jaminan Pensiun meningkat dari 35,2% menjadi 52,6%, sementara Asuransi Komersial, meskipun masih memiliki tingkat kepesertaan terendah, mengalami peningkatan dari 12,4%



menjadi 26,1%.

Tabel 51
Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2024

Sektor Ekonomi	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Peserta	Persentase (%)
Industri Pengolahan	28.456	23.452	82,4
Perdagangan & Jasa	36.274	20.845	57,5
Perikanan & Kelautan	15.638	8.246	52,7
Konstruksi	9.875	7.258	73,5
Transportasi & Logistik	7.632	5.172	67,8
Pertanian & Perkebunan	5.984	2.567	42,9
Pariwisata	4.452	2.325	52,2
Sektor Lainnya	12.578	7.254	57,7
Total	120.889	77.119	63,8

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bitung.

Laju peningkatan kepesertaan bervariasi antar jenis jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan tertinggi sebesar 25,6 poin persentase, diikuti oleh BPJS Kesehatan (23,4 poin), Jaminan Pensiun (17,4 poin), dan Asuransi Komersial (13,7 poin). Perbedaan laju peningkatan ini mencerminkan variasi dalam prioritas kebijakan, kesadaran masyarakat, dan daya tarik relatif masing-masing program jaminan sosial.

Analisis cakupan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan sektor ekonomi pada tahun 2024 menunjukkan variasi yang signifikan. Sektor Industri Pengolahan memiliki cakupan tertinggi sebesar 82,4%, diikuti oleh sektor Konstruksi (73,5%) dan Transportasi & Logistik (67,8%). Sektor dengan cakupan terendah adalah Pertanian & Perkebunan (42,9%), yang mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam menjangkau pekerja di sektor ini. Total cakupan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024 mencapai 63,8%, yang sedikit lebih rendah dari angka 68,2% pada tabel pertama, kemungkinan disebabkan oleh perbedaan dalam metodologi pengukuran atau cakupan populasi.

Distribusi tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi menunjukkan bahwa Perdagangan & Jasa menjadi sektor dengan jumlah tenaga kerja terbesar (36.274 pekerja), diikuti oleh

Industri Pengolahan (28.456 pekerja). Kedua sektor ini menyerap 53,5% dari total tenaga kerja di Kota Bitung. Perbedaan signifikan dalam tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan antara kedua sektor ini (82,4% untuk Industri Pengolahan versus 57,5% untuk Perdagangan & Jasa) menunjukkan adanya karakteristik struktural yang berbeda, seperti tingkat formalitas, ukuran perusahaan, dan efektivitas penegakan regulasi.

Cakupan jaminan sosial berdasarkan status pekerjaan pada tahun 2024 menunjukkan kesenjangan yang substansial. Pegawai Tetap memiliki tingkat kepesertaan tertinggi untuk semua jenis jaminan sosial, dengan BPJS Kesehatan mencapai 96,8% dan BPJS Ketenagakerjaan 92,5%. Sebaliknya, Pekerja Informal memiliki tingkat kepesertaan terendah untuk BPJS Ketenagakerjaan (22,4%) dan Asuransi Komersial (5,2%). Yang menarik, kepesertaan BPJS Kesehatan relatif tinggi di semua kategori status pekerjaan, termasuk Pekerja Informal (78,3%) dan Pekerja Harian (75,6%), yang menunjukkan efektivitas kebijakan universal health coverage dan berbagai skema subsidi premi.

Kesenjangan kepesertaan berdasarkan status pekerjaan sangat terlihat pada Jaminan Pensiun, dengan rentang dari 87,6% untuk Pegawai Tetap hingga hanya 12,7% untuk Pekerja Informal. Hal ini mencerminkan tantangan struktural dalam sistem pensiun yang masih dominan berorientasi pada pekerja formal. Wirausaha menunjukkan pola unik dengan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tinggi (82,5%) dan Asuransi Komersial yang relatif tinggi (32,8%) dibandingkan kategori lain, yang mencerminkan kombinasi kemandirian finansial dan kesadaran akan risiko.

Sebagai kota industri dan pelabuhan, struktur kepesertaan jaminan sosial di Bitung mencerminkan karakteristik ekonomi lokalnya. Tingkat kepesertaan yang tinggi di sektor Industri Pengolahan (82,4%) sejalan dengan dominasi industri perikanan dan pengolahan kelapa yang menjadi tulang punggung ekonomi kota ini. Sementara itu, sektor Perikanan & Kelautan yang merupakan identitas ekonomi Kota Bitung memiliki tingkat kepesertaan yang moderat (52,7%), mencerminkan kombinasi antara perusahaan perikanan skala besar yang formal dan



nelayan kecil yang informal.

Secara keseluruhan, data kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kota Bitung menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam perluasan perlindungan sosial, meskipun masih terdapat kesenjangan berdasarkan sektor ekonomi dan status pekerjaan. Tantangan utama terletak pada perluasan cakupan bagi pekerja informal, pekerja harian, dan sektor-sektor dengan tingkat formalitas rendah seperti pertanian dan perikanan skala kecil. Pencapaian kepesertaan BPJS Kesehatan yang relatif tinggi di semua kategori menunjukkan bahwa pendekatan universal dengan dukungan subsidi dapat menjadi model untuk perluasan program jaminan sosial lainnya.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.

Kondisi penguatan peran agama di Kota Bitung sebagai landasan spiritual, etika, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan sangat signifikan. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait hal tersebut:

A. Penguatan Moderasi Beragama.

Data Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kota Bitung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, IKUB Kota Bitung meningkat dari 74,5 pada tahun 2020 menjadi 82,9 pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar 8,4 poin atau 11,3% dalam lima tahun. Capaian ini mengindikasikan penguatan harmoni dan kerukunan antar umat beragama yang sudah berada pada level tinggi di awal periode pengukuran.

Tabel 52
Indeks Kerukunan Umat Beragama
Tahun 2020-2024

Dimensi	2020	2021	2022	2023	2024
Toleransi	74,5	76,2	78,3	80,5	82,7
Kesetaraan	72,8	74,5	76,8	79,2	81,5
Kerjasama	76,3	78,1	80,2	82,4	84,6
Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,5	76,3	78,4	80,7	82,9

Sumber: Kementerian Agama Kantor Kota Bitung dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bitung (Diolah).

Analisis per dimensi menunjukkan bahwa dimensi Kerjasama konsisten menjadi dimensi dengan nilai tertinggi, meningkat dari 76,3 pada tahun 2020 menjadi 84,6 pada tahun 2024. Keunggulan pada dimensi ini mencerminkan kuatnya tradisi gotong royong dan kolaborasi lintas agama dalam berbagai aktivitas sosial dan pembangunan di Kota Bitung. Sebagai kota pelabuhan dengan populasi yang heterogen, Bitung tampaknya telah mengembangkan mekanisme kerjasama antar komunitas agama yang efektif dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Dimensi Toleransi menunjukkan peningkatan dari 74,5 menjadi 82,7 selama lima tahun, yang mencerminkan penguatan sikap saling menghargai perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan di kalangan masyarakat Kota Bitung. Nilai yang cukup tinggi pada dimensi ini sejak tahun 2020 menunjukkan bahwa budaya toleransi sudah mengakar dalam masyarakat Bitung yang multikultur, yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama, termasuk Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Dimensi Kesetaraan, meskipun konsisten menjadi dimensi dengan nilai terendah di antara ketiga dimensi IKUB, juga menunjukkan peningkatan signifikan dari 72,8 menjadi 81,5 selama periode yang sama. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua kelompok agama dalam akses terhadap layanan publik, perlindungan hukum, dan partisipasi dalam pembangunan kota.

Laju peningkatan tahunan IKUB relatif konsisten, berkisar antara 1,8-2,3 poin per tahun, dengan akselerasi tertinggi terjadi pada periode 2022-2023 (2,3 poin). Konsistensi peningkatan ini menunjukkan adanya keberlanjutan dalam program dan kebijakan yang mendukung kerukunan umat beragama di Kota Bitung, bukan sekadar fluktuasi jangka pendek atau hasil dari intervensi sporadis.

Capaian IKUB Kota Bitung yang mencapai 82,9 pada tahun 2024 menempatkannya pada kategori tinggi dalam konteks nasional. Sebagai kota pelabuhan yang menjadi pintu gerbang ekonomi dan mobilitas penduduk di Sulawesi Utara, tingginya

nilai IKUB di Bitung memiliki signifikansi strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan ekonomi. Kerukunan antar umat beragama menjadi modal sosial penting yang mendukung aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan, industri, dan pariwisata di kota ini.

Keunggulan relatif pada dimensi Kerjasama (84,6) dibandingkan dimensi Toleransi (82,7) dan Kesetaraan (81,5) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di Kota Bitung tidak hanya bersifat pasif dalam bentuk sikap toleran, tetapi juga aktif dalam bentuk kolaborasi konkret antar komunitas agama. Pola ini mencerminkan karakteristik masyarakat pesisir yang pragmatis dan berorientasi pada kerjasama untuk mengatasi tantangan bersama, seperti yang umum ditemukan di kota-kota pelabuhan dengan diversitas populasi.

Sebagai kota dengan mayoritas penduduk beragama Kristen namun dengan komunitas Muslim yang signifikan, serta kelompok agama lain dalam jumlah lebih kecil, capaian IKUB Kota Bitung menunjukkan keberhasilan dalam membangun harmoni sosial di tengah keragaman. Hal ini kemungkinan didukung oleh karakteristik budaya Minahasa yang dikenal terbuka, nilai-nilai kekeluargaan "Mapalus" yang mengakar dalam masyarakat lokal, serta peran aktif forum-forum dialog antar agama dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi komunikasi dan penyelesaian potensi konflik secara damai.

Secara keseluruhan, data IKUB Kota Bitung 2020-2024 menggambarkan kondisi kerukunan umat beragama yang sudah baik dan terus menguat. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana mempertahankan dan lebih meningkatkan capaian ini, terutama dalam konteks dinamika sosial-politik nasional dan global yang dapat mempengaruhi relasi antar kelompok agama. Penguatan pada dimensi Kesetaraan tampaknya masih menjadi prioritas untuk memastikan bahwa semua kelompok agama memiliki akses dan perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan publik di Kota Bitung.

B. Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kota Bitung menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, IPK Kota Bitung meningkat dari 58,2 pada tahun 2020 menjadi 70,2 pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar 12,0 poin atau 20,6% dalam lima tahun. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan substansial dalam pembangunan dimensi kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan kota.

Tabel. 53
Indeks Pembangunan Kebudayaan

Dimensi	2020	2021	2022	2023	2024
Ekonomi Budaya	52,8	54,5	57,3	61,2	64,8
Pendidikan	58,4	60,2	63,5	67,2	70,5
Ketahanan Sosial Budaya	65,3	67,1	69,8	72,5	75,2
Warisan Budaya	63,2	65,8	68,4	71,7	74,5
Ekspresi Budaya	56,7	58,5	61,2	64,8	68,3
Budaya Literasi	51,2	53,8	57,5	62,3	66,8
Gender	59,5	61,2	64,3	67,8	71,2
<u>Indeks Pembangunan Kebudayaan</u>	<u>58,2</u>	<u>60,2</u>	<u>63,1</u>	<u>66,8</u>	<u>70,2</u>

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung (Diolah).

Analisis per dimensi menunjukkan bahwa Ketahanan Sosial Budaya konsisten menjadi dimensi dengan nilai tertinggi, meningkat dari 65,3 pada tahun 2020 menjadi 75,2 pada tahun 2024. Keunggulan dalam dimensi ini mencerminkan kuatnya kohesi sosial dan resiliensi budaya masyarakat Kota Bitung yang memiliki keragaman etnis seperti Minahasa, Sangihe, Talaud, dan pendatang dari berbagai daerah. Sebagai kota pelabuhan yang menjadi titik pertemuan berbagai budaya, Bitung tampaknya berhasil membangun harmoni sosial yang relatif baik.

Dimensi Warisan Budaya menempati posisi kedua tertinggi dengan peningkatan dari 63,2 menjadi 74,5 selama lima tahun. Capaian ini mencerminkan upaya preservasi dan revitalisasi warisan budaya material dan non-material di Kota Bitung, termasuk tradisi maritim dan kuliner khas seperti cakalang fufu yang menjadi identitas kota ini. Peningkatan signifikan pada dimensi ini kemungkinan terkait dengan program-program pelestarian warisan budaya dan pengembangan destinasi wisata budaya di kawasan pesisir dan Pulau Lembeh.

Dimensi Ekonomi Budaya dan Budaya Literasi, meskipun mengalami peningkatan signifikan, masih menjadi dimensi dengan nilai relatif rendah. Ekonomi Budaya meningkat dari 52,8 menjadi 64,8, sementara Budaya Literasi meningkat dari 51,2 menjadi 66,8. Menariknya, Budaya Literasi menunjukkan peningkatan tertinggi secara persentase (30,5%) di antara semua dimensi, yang mengindikasikan adanya penguatan upaya peningkatan minat baca dan akses terhadap sumber-sumber pengetahuan di Kota Bitung.

Dari perspektif laju peningkatan, semua dimensi menunjukkan tren positif yang konsisten, dengan akselerasi tertinggi terjadi pada periode 2022-2023 untuk hampir semua dimensi. Dimensi Ekonomi Budaya mengalami peningkatan tertajam pada periode ini (3,9 poin), diikuti oleh Budaya Literasi (4,8 poin). Hal ini mengindikasikan adanya intervensi kebijakan yang signifikan dalam pengembangan industri kreatif dan infrastruktur literasi pada periode tersebut.

Dimensi Gender menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 59,5 menjadi 71,2, yang mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan dan keadilan gender dalam konteks budaya. Capaian ini penting mengingat kesetaraan gender sering menjadi isu yang kompleks dalam konteks nilai-nilai budaya tradisional. Peningkatan pada dimensi ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di Kota Bitung berjalan selaras dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusivitas

Secara keseluruhan, pola peningkatan IPK Kota Bitung menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan telah menjadi bagian integral dari agenda pembangunan kota. Peningkatan yang relatif seimbang di semua dimensi mengindikasikan pendekatan yang holistik dalam pembangunan kebudayaan. Nilai IPK 70,2 pada tahun 2024 menempatkan Kota Bitung pada posisi yang cukup baik dalam konteks pembangunan kebudayaan nasional.

Tantangan ke depan tampaknya terletak pada penguatan dimensi Ekonomi Budaya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dari kekayaan budaya Kota Bitung. Dengan karakteristik sebagai kota pelabuhan dan kawasan industri, Bitung memiliki

peluang untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya maritim dan kuliner yang dapat menjadi penggerak ekonomi alternatif di samping sektor industri dan perikanan konvensional. Penguatan Budaya Literasi juga perlu dilanjutkan untuk mendukung pembangunan masyarakat berbasis pengetahuan yang merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

C. Program Layanan Keagamaan.

Pemerintah Kota Bitung juga meluncurkan beberapa program terkait layanan keagamaan, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Program ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan keadilan sosial dan memperkuat peran agama dalam membantu masyarakat. Walikota Bitung menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari budaya kerja yang harus diterapkan oleh semua pejabat.

Program layanan keagamaan di Kota Bitung meliputi beberapa inisiatif penting yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan Kementerian Agama setempat, antara lain:

- Rumah Diakonia: Program ini merupakan wujud keadilan sosial, di mana yang berkelebihan membantu yang berkekurangan, sebagai bagian dari pelayanan masyarakat yang berlandaskan kasih dan hikmat dalam pemerintahan Kota Bitung.
- Penyuluhan Agama Kristen untuk Pemuda dan Remaja: Kemenag Bitung aktif meningkatkan penyuluhan agama kepada kalangan muda untuk memberikan bimbingan moral dan spiritual, serta membantu mereka membedakan konten positif dan negatif di era digital.
- Penguatan Moderasi Beragama: Kota Bitung fokus pada moderasi beragama yang nyata di masyarakat, dengan Walikota Bitung didaulat sebagai Bapak Moderasi Beragama. Program ini melibatkan tokoh agama dan rumah ibadah sebagai pusat distribusi bantuan dan penguatan kerukunan antar umat beragama.
- Program Kampung Zakat: Sinergi antara Kemenag Kota Bitung dan Laznas BMH dalam program sosial keagamaan ini memberikan bantuan paket beras kepada warga kurang mampu sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui zakat.

- Pelayanan Calon Jamaah Haji (CJH): Pemerintah Kota dan Kemenag berkolaborasi untuk memberikan pelayanan maksimal bagi calon jamaah haji, termasuk akomodasi dan transportasi, serta program pendukung lainnya.
- Pendidikan Islam: Transformasi lembaga pendidikan Islam di Kota Bitung dari swasta menjadi negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan keagamaan di bidang pendidikan.

Selain itu, Kemenag Bitung juga menggelar kegiatan seperti bersih-bersih masjid dan rapat koordinasi untuk mengoptimalkan layanan keagamaan secara berintegritas.

Secara keseluruhan, program layanan keagamaan di Kota Bitung menitikberatkan pada pelayanan sosial, pembinaan umat, penguatan moderasi beragama, pendidikan, dan kolaborasi lintas lembaga untuk membangun masyarakat religius dan harmonis.

D. Pendidikan dan Pelibatan Generasi Muda.

Moderasi beragama juga ditekankan dalam konteks pendidikan, dengan fokus pada pelibatan generasi muda. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moderasi diharapkan dapat membentuk karakter siswa untuk menghargai perbedaan dan menjadi agen perubahan di masyarakat. Hal ini penting untuk memperkuat jati diri bangsa dalam konteks keberagaman.

Di Kota Bitung, pendidikan dan pelibatan generasi muda dalam beragama, masalahat, dan kebudayaan maju dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut:

- Pendidikan Berbasis Agama dan Modernisasi keberagamaan.
 - Lembaga pendidikan Islam di Bitung mengalami transformasi dari swasta ke negeri, dengan visi, kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana yang terus diperbaiki untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam secara kuat kepada generasi muda.
 - Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama mendorong inovasi pendidikan melalui program digitalisasi keagamaan yang memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran efektif dan menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar sebagai generasi penerus bangsa.
- Penyuluhan dan Pembinaan Agama untuk Pemuda.
 - Kemenag Bitung aktif meningkatkan penyuluhan agama, khususnya kepada pemuda dan remaja, untuk membekali mereka dengan

pemahaman agama yang moderat dan mampu menyaring pengaruh negatif dari konten digital.

- Penyuluh agama diberikan pembinaan rutin agar dapat memberikan bimbingan yang relevan dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Bitung.
- Penguatan Moderasi Beragama dan Kearifan Lokal.
 - Pemerintah dan Kemenag menekankan pentingnya moderasi beragama yang melibatkan generasi muda dan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan untuk membangun karakter toleran dan menghargai perbedaan di masyarakat plural seperti Bitung.
 - Kearifan lokal yang dilestarikan adalah tradisi adat Tulude, yang menjadi warisan budaya religi dan pesona unggulan Kota Bitung, sekaligus media pembelajaran budaya bagi generasi muda agar terus menjaga dan melestarikan tradisi tersebut.
- Pelibatan Generasi Muda dalam Kerukunan dan Kebudayaan.
 - Kota Bitung dikenal dengan keberagaman suku dan agama yang dikelola dengan baik, menjadikan generasi muda sebagai agen perubahan yang mampu memelihara kerukunan dan memajukan kebudayaan lokal melalui berbagai kegiatan lintas agama dan budaya.
 - Melalui pelatihan dan kegiatan budaya, generasi muda didorong untuk aktif dalam pembangunan sosial dan budaya yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Kota Bitung mengintegrasikan pendidikan agama yang modern dan moderat, pelibatan aktif generasi muda dalam penyuluhan dan kebudayaan, serta penguatan nilai-nilai kearifan lokal sebagai upaya memajukan maslahat beragama dan kebudayaan di kota tersebut.

E. Pelestarian Kebudayaan.

Pelestarian kebudayaan di Kota Bitung dilakukan melalui pengaktifan tradisi dan kearifan lokal, serta melibatkan tokoh agama dalam kegiatan sosial. Ini tidak hanya memperkuat identitas budaya tetapi juga menciptakan rasa saling menghormati di antara berbagai kelompok masyarakat.



Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Disamping itu pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya.

Dalam pengembangan urusan kebudayaan sangat perlu diperhatikan urgensi penerapannya lewat pokok pikiran kebudayaan daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 yang meliputi :

- a. Identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
- b. Identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
- c. Identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota;
- d. Identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. Analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat Kota Bitung terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah satu wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok/grup kesenian.

Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Bitung sampai dengan tahun 2024 ada 2 grup. Sedangkan, untuk gedung kesenian hingga tahun 2024 hanya 1 gedung yang berlokasi di Kelurahan Girian Weru Kecamatan Girian Kota Bitung.

Jumlah klub olahraga dari hingga tahun 2024 tidak berubah, sebanyak 120 klub. Sedangkan gedung olah raga mengalami peningkatan dari 4 gedung di tahun 2020 menjadi 5 gedung di tahun 2023. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Bitung dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 54
**Perkembangan Seni, budaya dan olahraga di Kota Bitung
Tahun 2022 – 2024**

No	Uraian	2022	2023	2024
Seni Budaya				



1. Jumlah Grup Kesenian	2	2	2
2. Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1
Olahraga			
1. Jumlah Klub Olahraga	120	120	120
2. Jumlah Gedung Olahraga	4	5	5

Sumber :Dinas Pariwisata Kota Bitung, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bitung

F. Sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat.

Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menguatkan peran agama sebagai modal dasar pembangunan. Dengan menjadikan rumah ibadah sebagai pusat distribusi bantuan dan kegiatan sosial, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Secara keseluruhan, penguatan peran agama di Kota Bitung tidak hanya berfungsi sebagai landasan spiritual dan moral tetapi juga sebagai pendorong dalam pembangunan sosial dan pelestarian kebudayaan yang kuat, yang pada gilirannya memperteguh karakter dan jati diri bangsa.

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung peran beragama dan kebudayaan maju, terwujud melalui beberapa aspek penting:

- Penguatan Moderasi Beragama: Pemerintah mendorong moderasi beragama sebagai upaya menciptakan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan toleran. Ini dilakukan dengan kebijakan seperti Perpres Nomor 58 Tahun 2023 yang memperkuat moderasi beragama untuk mencegah paham ekstrem dan mempromosikan dialog antaragama.
- Kolaborasi dengan Organisasi Keagamaan: Pemerintah bekerja sama dengan organisasi keagamaan di Kota Bitung yang memiliki peran besar dalam pelayanan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Sinergi ini memperkuat kemaslahatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Keagamaan: Pemerintah bersama lembaga agama menjalankan program pembinaan yang meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam membangun umat yang rukun dan toleran, serta menguatkan nilai moderasi beragama dan kebersamaan umat.
- Pelaksanaan Program Sosial dan Budaya: Bersama masyarakat, pemerintah menyelenggarakan program edukasi toleransi, dialog antaragama, kegiatan kebudayaan, dan pelatihan ekonomi yang



melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk memperkuat kerukunan dan kemajuan sosial ekonomi.

- o Pelestarian Kebudayaan: Sinergi ini juga mencakup pelestarian budaya lokal yang dipadukan dengan nilai agama, sehingga memperkuat jati diri bangsa dan mendukung kemajuan kebudayaan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, sinergi ini membentuk fondasi kuat untuk kemaslahatan beragama dan kemajuan kebudayaan yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan di Indonesia.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif.

Kondisi ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat di Kota Bitung sangat penting untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ketangguhan ini mencakup kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat.

A. Indeks Perlindungan Khusus Anak.

Kota Bitung sebagai kota layak anak mencerminkan kemajuan dalam memenuhi hak dan perlindungan anak melalui 24 indikator yang ditetapkan oleh Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Pencapaian tersebut dapat dilihat pada data indeks perlindungan Khusus Anak dari Tahun 2021-2023, sebagai berikut:

Tabel. 55
Indeks Perlindungan Khusus Anak Kota Bitung

Kab/ Kota	Indeks Perlindungan Khusus Anak		
	2021	2022	2023
Kota Bitung	86,94	82,59	81,06

Sumber : Kementerian PPPA

Kota Bitung telah mencapai prestasi signifikan dalam perlindungan anak, dengan meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) tertinggi di Sulawesi Utara. Pada tahun 2021, Bitung berhasil naik peringkat dari kategori Madya ke Nindya. Namun, meskipun mendapatkan penghargaan ini, terdapat tantangan dalam implementasi Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) di Bitung. Pada tahun 2023, IPKA Kota Bitung hanya mencapai 81,06 dari



target yang sudah ditetapkan, artinya nilai IPKA Tahun 2023 terus mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2021 dan 2022, hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kondisi anak, masih banyak yang perlu diperbaiki dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Program Sekolah Ramah Anak (SRA) juga menjadi fokus utama di Bitung, dengan hampir 100 sekolah yang dikembangkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Ini sejalan dengan prinsip Konvensi Hak Anak yang menekankan non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun demikian, masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak di daerah berpredikat KLA, seperti perundungan dan kekerasan dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa penghargaan KLA tidak selalu sejalan dengan realisasi perlindungan anak yang efektif. Oleh karena itu, evaluasi dan peningkatan program perlindungan anak tetap menjadi prioritas untuk memastikan bahwa semua anak di Kota Bitung dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh.

B. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga:

Pembangunan kualitas keluarga di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, harmonis, dan berdaya saing. Indeks Pembangunan Kuaitas Keluarga (iBangga) adalah alat ukur yang diggunakan untuk menilai kualitas keluarga di Indonesia. Indeks ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas, sejahtera dan mandiri serta menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Dimensi Indeks Pembangunan Keluarga terdiri dari tiga dimensi yaitu : Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Berikut disampaikan data terkait Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Tahun 2022 s/d 2024 :

Tabel 56
**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
Kota Bitung**

Kab/ Kota	Pembangunan Kualitas Keluarga		
	2022	2023	2024
Kota Bitung	74,70	75,11	75,71

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara.

Dari data yang disampaikan bahwa nilai Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dari Tahun 2022 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Hasil pengukuran iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga kedalam tiga kategori, Yaitu : nilai diatas 70 dalam kategori "Tangguh", nilai diantara 40 hingga 70 masuk dalam kategori "Berkembang", dan nilai dibawah 40 masuk dalam kategori "Rentan". Jika dilihat menurut klasifikasi maka Kota Bitung dalam urusan Pembangunan Kualitas Keluarga masuk dalam kategori "tangguh" secara berturut-turut dari Tahun 2022 sampai dengan 2024, artinya perhatian Pemerintah Kota Bitung terhadap pilar-pilar untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan harmonis terus diupayakan dan dilaksanakan dengan baik.

Indeks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai dasar bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan program-program yang mendukung pembangunan keluarga. Dengan adanya iBangga, diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap isu-isu mikro dalam keluarga yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

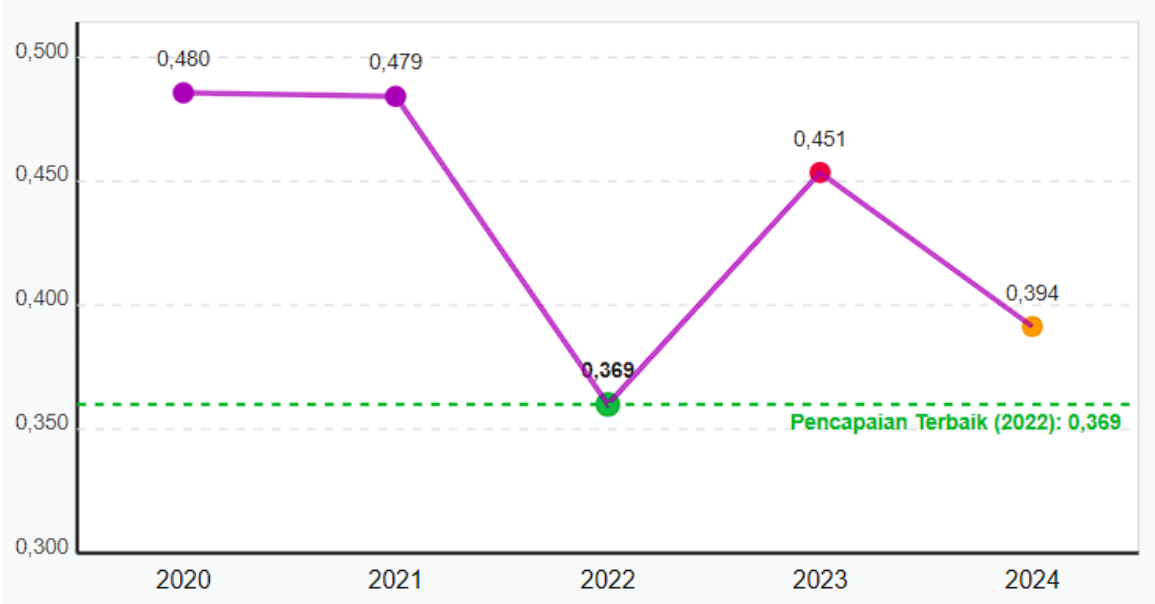
Melalui pengembangan iBangga, pemerintah Kota Bitung berharap dapat memenuhi hak-hak pengasuhan anak dan mendorong kesetaraan gender serta masyarakat inklusif menuju Indonesia Emas 2045.

C. Indeks Ketimpangan Gender:

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Bitung selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan, mencerminkan dinamika kompleks dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di wilayah ini. Data menunjukkan nilai IKG yang bergerak dari 0,480 pada tahun 2020, sedikit menurun menjadi 0,479 pada 2021, kemudian mengalami penurunan drastis menjadi 0,369 pada 2022, sebelum kembali naik menjadi 0,451 pada 2023, dan akhirnya turun lagi menjadi 0,394 pada 2024. Perlu dicatat bahwa semakin rendah nilai IKG, semakin baik kondisi kesetaraan gender di suatu wilayah, karena angka tersebut mencerminkan tingkat kesenjangan yang lebih kecil antara laki-laki dan perempuan.

Grafik 18

Indeks Ketimpangan Gender Kota Bitung



Sumber: BPS Kota Bitung 2024.

Penurunan signifikan IKG menjadi 0,369 pada tahun 2022 merupakan capaian terbaik selama periode lima tahun tersebut, mengindikasikan keberhasilan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan yang diimplementasikan pada periode tersebut. Pencapaian ini patut diapresiasi mengingat terjadi di masa pemulihan pasca-pandemi COVID-19, di mana banyak daerah justru mengalami kemunduran dalam aspek kesetaraan gender akibat dampak disproportional pandemi terhadap perempuan, terutama di sektor informal dan perawatan.

Namun, peningkatan IKG menjadi 0,451 pada tahun 2023 mengindikasikan adanya tantangan baru atau kemunduran dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Fenomena ini memerlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebabnya, yang dapat mencakup pergeseran kebijakan, realokasi anggaran, atau perubahan sosial-ekonomi yang berdampak tidak proporsional terhadap perempuan. Meski demikian, tren kembali menurun pada 2024 menjadi 0,394 menunjukkan adanya upaya korektif yang mulai membuahkan hasil, meskipun belum mencapai level terbaik yang pernah dicapai pada 2022.

Dari perspektif pembangunan, fluktuasi IKG Kota Bitung memberikan pembelajaran penting bahwa kesetaraan gender bukanlah capaian linear, melainkan memerlukan konsistensi kebijakan dan adaptasi terhadap dinamika sosial-ekonomi. Bila dibandingkan dengan IPM Kota Bitung yang konsisten meningkat



selama periode yang sama, fluktuasi IKG menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara umum tidak selalu berkorelasi positif dengan kesetaraan gender, kecuali jika disertai kebijakan yang secara spesifik ditargetkan untuk mengatasi kesenjangan gender.

Implikasi dari tren IKG ini sangat luas, mulai dari partisipasi perempuan dalam ekonomi, politik, hingga akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Ketika IKG membaik seperti pada 2022, hal ini biasanya mencerminkan peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja formal, representasi politik yang lebih baik, serta penurunan kesenjangan upah. Sebaliknya, ketika IKG memburuk seperti pada 2023, hal ini bisa mengindikasikan adanya hambatan struktural yang masih perlu diatasi.

Tantangan ke depan bagi Kota Bitung adalah memastikan konsistensi perbaikan IKG melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh aspek pembangunan. Hal ini mencakup penguatan kelembagaan yang berfokus pada kesetaraan gender, penganggaran responsif gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta edukasi masyarakat untuk mengubah norma sosial yang diskriminatif. Dengan pendekatan komprehensif tersebut, Kota Bitung berpeluang tidak hanya menurunkan IKG secara konsisten, tetapi juga menjadikan kesetaraan gender sebagai pengungkit pembangunan manusia secara keseluruhan.

D. Indeks Pembangunan Gender:

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Bitung mencerminkan upaya untuk mengevaluasi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan data terbaru, IPG Kota Bitung menunjukkan tren positif dengan nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut disampaikan data IPG Kota Bitung dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024:

Tabel 57
**Indeks Pembangunan Gender Kota Bitung
Tahun 2022 - 2024**

Kab/ Kota	Indeks Ketimpangan Gender		
	2022	2023	2024



Kota Bitung	94,57	94,71	94,81

Sumber : BPS Kota Bitung 2024.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di Kota Bitung mulai memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan perempuan.

o Dimensi Penilaian:

IPG diukur berdasarkan tiga dimensi utama:

- 1. Umur Panjang dan Hidup Sehat: Mengacu pada angka harapan hidup.
- 2. Pengetahuan: Diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
- 3. Standar Hidup Layak: Berdasarkan pendapatan per kapita.

Dengan nilai IPG yang mendekati 100, Kota Bitung menunjukkan kemajuan dalam mengurangi kesenjangan gender, meskipun tantangan masih ada. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa semua kelompok gender mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

Secara keseluruhan, ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat di Kota Bitung merupakan kunci untuk membentuk SDM yang berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan. Upaya kolaboratif dan pemberdayaan yang inklusif akan membantu mengatasi tantangan yang ada, termasuk ketimpangan gender.

E. Indeks Pembangunan Pemuda.

Data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Bitung menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, IPP Kota Bitung meningkat dari 61,0 pada tahun 2020 menjadi 73,1 pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar 12,1 poin atau 19,8% dalam lima tahun. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan substansial dalam pembangunan kapasitas dan kesejahteraan pemuda di Kota Bitung.

Analisis per dimensi menunjukkan bahwa Kesehatan konsisten menjadi dimensi dengan nilai tertinggi, meningkat dari 65,7 pada tahun 2020 menjadi 76,2 pada tahun 2024. Keunggulan pada dimensi ini mencerminkan efektivitas program



kesehatan bagi pemuda, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dasar, kesehatan reproduksi, dan upaya pencegahan perilaku berisiko seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Sebagai kota dengan akses yang relatif baik terhadap fasilitas kesehatan, Bitung tampaknya berhasil memastikan bahwa pemuda memiliki kondisi kesehatan yang mendukung produktivitas dan pengembangan diri mereka.

Dimensi Pendidikan menempati posisi kedua tertinggi dengan peningkatan dari 62,3 menjadi 74,5 selama lima tahun. Capaian ini mencerminkan perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan bagi pemuda di Kota Bitung, baik pendidikan formal maupun non-formal. Peningkatan signifikan sebesar 12,2 poin pada dimensi ini kemungkinan terkait dengan berbagai program pengembangan pendidikan, termasuk beasiswa, pelatihan keterampilan, dan peningkatan infrastruktur pendidikan di kota ini.

Tabel. 58
Indeks Pembangunan Pemuda

Dimensi	2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan	62,3	64,5	67,8	71,2	74,5
Kesehatan	65,7	67,8	70,4	73,6	76,2
Lapangan dan Kesempatan Kerja	58,2	60,5	63,7	67,5	71,3
Partisipasi dan Kepemimpinan	57,8	59,6	62,8	66,4	70,2
Indeks Pembangunan Pemuda	61,0	63,1	66,2	69,7	73,1

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bitung (Diolah).

Dimensi Lapangan dan Kesempatan Kerja mengalami peningkatan tertinggi secara persentase (22,5%) dari 58,2 menjadi 71,3 selama periode lima tahun. Peningkatan signifikan ini mengindikasikan adanya perluasan peluang ekonomi bagi pemuda di Kota Bitung, yang kemungkinan didorong oleh pengembangan sektor industri perikanan, pariwisata, dan ekonomi digital. Sebagai kota pelabuhan dan pusat industri di Sulawesi Utara, Bitung memiliki potensi signifikan dalam menyediakan lapangan kerja bagi pemuda, dan data menunjukkan bahwa potensi ini semakin terealisasi dalam beberapa tahun terakhir.

Dimensi Partisipasi dan Kepemimpinan, meskipun

mengalami peningkatan signifikan dari 57,8 menjadi 70,2 (peningkatan 21,5%), masih menjadi dimensi dengan nilai terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pelibatan pemuda dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan di berbagai sektor, masih terdapat ruang untuk peningkatan. Keterlibatan pemuda dalam organisasi kepemudaan, forum pengambilan kebijakan, dan posisi-posisi strategis di pemerintahan dan sektor swasta mungkin masih perlu diperkuat.

Laju peningkatan tahunan IPP menunjukkan akselerasi pada periode 2022-2023, dengan peningkatan sebesar 3,5 poin, dibandingkan dengan periode lainnya yang berkisar antara 2,1-3,1 poin. Akselerasi ini konsisten terlihat pada semua dimensi, dengan peningkatan tertajam pada dimensi Lapangan dan Kesempatan Kerja (3,8 poin) pada periode yang sama. Hal ini mungkin mencerminkan adanya intervensi kebijakan yang signifikan atau pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang membuka lebih banyak peluang bagi pemuda.

Jika dianalisis dari perspektif pembangunan kota, peningkatan IPP yang signifikan memberikan indikasi positif tentang kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi penggerak pembangunan Kota Bitung di masa depan. Sebagai kota dengan potensi pengembangan sebagai hub logistik dan industri di kawasan timur Indonesia, ketersediaan pemuda yang sehat, terdidik, dan memiliki keterampilan yang relevan menjadi faktor kunci dalam merealisasikan potensi ekonomi tersebut.

Peningkatan dalam dimensi Lapangan dan Kesempatan Kerja serta Pendidikan yang cukup signifikan menunjukkan adanya sinergi antara pengembangan kapasitas pemuda dan penyediaan peluang untuk mengaplikasikan kapasitas tersebut. Hal ini penting untuk mencegah fenomena brain drain atau migrasi keluar pemuda berbakat dari Kota Bitung ke kota-kota besar lainnya karena keterbatasan peluang di daerah asal.

Secara keseluruhan, data IPP Kota Bitung 2020-2024 menggambarkan kemajuan yang konsisten dalam pembangunan pemuda di semua dimensi. Capaian IPP sebesar 73,1 pada tahun 2024 menempatkan Bitung pada posisi yang cukup baik dalam konteks pembangunan pemuda di tingkat nasional. Tantangan ke depan terletak pada penguatan dimensi Partisipasi dan



Kepemimpinan untuk memastikan bahwa pemuda tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek aktif dalam pembangunan kota. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pengambilan keputusan dapat membawa perspektif inovatif dan energi baru yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks di era digital dan ekonomi global.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Tanpa tenaga kerja, faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal. Indonesia adalah salah satu negara yang jumlah penduduknya banyak. Namun tidak semua penduduk memiliki pekerjaan.

- a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

TPAK dan TPT merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting untuk mengukur capaian pembangunan. Menurut BPS, TPAK adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Artinya, jika nilai TPAK semakin tinggi, maka semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sementara itu, TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Artinya jika nilai TPT tinggi, maka ini menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tabel 59
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bitung Tahun 2020-2024

Indikator (%)	2020	2021	2022	2023	2024



TPAK	61,73	62,22	61,88	64,54	67,87
TPT	10,23	9,96	8,56	7,82	7,51

Sumber: BPS Kota Bitung, 2025

TPAK di kota Bitung tahun 2020 pada angka 61,73 dan naik menjadi 62,22 di tahun 2021, turun menjadi 61,88 pada tahun 2022 dan naik pada tahun 2023 pada angka 64,54, kemudian naik lagi menjadi 67,87 pada tahun 2024. Artinya, ketersediaan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa di kota Bitung juga meningkat 2,66 %.

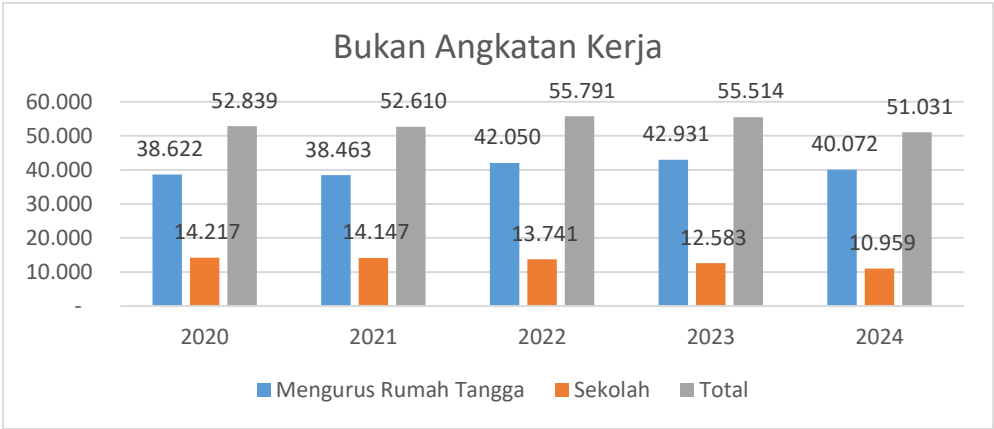
Sementara itu, TPT kota Bitung tahun 2020 sebesar 10,23 % dan turun di tahun 2021 pada angka 9,96%, tahun 2022 turun menjadi 8,56%, tahun 2023 pada angka 7,82% dan pada tahun 2024 turun lagi pada angka 7,51. Ini berarti, terjadi peningkatan angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja di Kota Bitung sampai tahun 2024.

b. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja terdiri dari penduduk Bukan Angkatan Kerja dan Angkatan Kerja. Penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya (kegiatan aktif selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga seperti ibadah, olahraga, kursus, piknik, serta kegiatan sosial). Sedangkan penduduk usia kerja angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja dan pengangguran.

Penduduk usia kerja bukan angkatan kerja di Kota Bitung pada tahun 2020 berada pada angka 52.839 orang dan turun sedikit diangka 52.610 orang di tahun 2021. Di tahun 2022 naik menjadi 55.791 orang, dan turun menjadi 55,514 orang di tahun 2023, dan di tahun 2024 turun lagi pada angka 51.031 orang, seperti pada grafik dibawah ini:

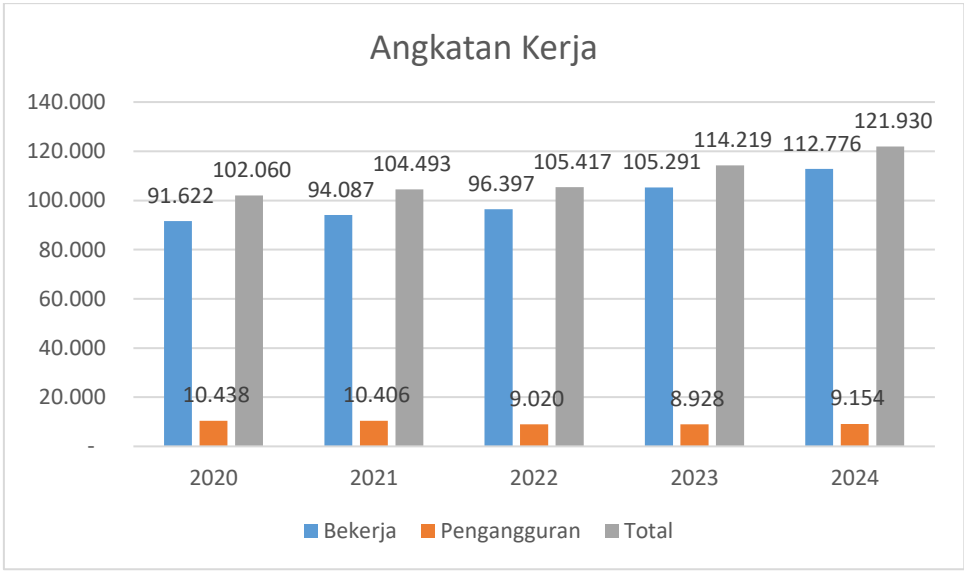
Grafik 19
**Penduduk Usia Kerja Bukan Angkatan Kerja
di Kota Bitung Tahun 2020-2024**



Sumber: Kota Bitung Dalam Angka 2024

Penduduk usia kerja angkatan kerja di Kota Bitung pada tahun 2020 berada pada angka 102.060 orang dan naik sedikit diangka 104.493 orang di tahun 2021. Di tahun 2022 naik menjadi 105.417 orang, dan turun menjadi 112.766 orang di tahun 2023, dan di tahun 2024 naik pada angka 121.930 orang, seperti pada grafik dibawah ini:

Grafik 20
Penduduk Usia Kerja Angkatan Kerja
di Kota Bitung Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Bitung Dalam Angka 2024

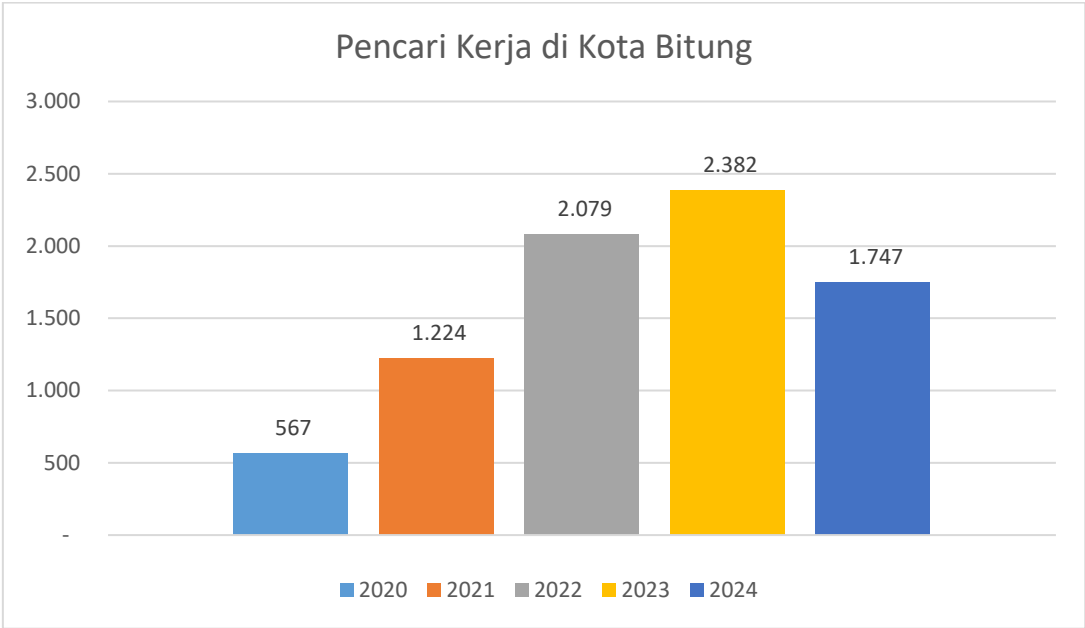
Dari tahun 2020–2024 penduduk yang bekerja di Kota Bitung terus mengalami kenaikan, sebaliknya jumlah pengangguran juga terus menurun.

c. Pencari Kerja di Kota Bitung

Tabel 2.22 dibawah ini menggambarkan bahwa terjadi peningkatan setiap tahunnya untuk pencari kerja yang ada di Kota Bitung. Secara signifikan terjadi di tahun 2020 pada angka 546 orang menjadi 1.224 orang di tahun 2021 begitu juga terjadi di tahun 2022 pada angka 2.079 orang dan di tahun 2023 bertambah 303 orang.



Grafik 21
Jumlah Pencari Kerja terdaftar di Kota Bitung
Tahun 2020-2024



Sumber Data : Bitung Dalam Angka, 2025

d. Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha.
Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Semakin besar ketersediaan lapangan pekerjaan, maka kesempatan kerja juga semakin luas yang akan berujung pada peningkatan penghasilan atau pendapatan masyarakat.

Tabel 60
Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan
usaha di Kota Bitung tahun 2022-2024

Lapangan Pekerjaan Utama	2022	2023	2024
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, Dan Perikanan	9.896	13.211	12.499
Industri (Pertambangan, Industri, Konstruksi, Listrik, Gas Dan Air)	27.221	24.418	29.021
Jasa (Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan, jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	59.280	67.662	71.256

Sumber: Kota Bitung Dalam Angka 2025

Untuk Kota Bitung, pada tahun 2023, jasa adalah sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar. Sebanyak 67.662 orang atau 64,26% penduduk kota Bitung yang berumur 15 tahun ke atas bekerja di sektor tersebut. Selanjutnya, ada sektor industri yang menyerap tenaga kerja



sebanyak 24,418 orang (23,19%). Sementara itu, pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan yang paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu sebanyak 13.211 orang (12,55%). Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka sektor industri adalah sektor yang paling terdampak dimana terjadi penurunan jumlah pekerja, dibandingkan dengan 2 sektor lainnya yang terjadi peningkatan jumlah pekerja.

Tabel 61
Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kota Bitung 2020-2024

Tahun	Penduduk Usia Tidak Produktif (0-14 dan 65+ tahun)	Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	Angka Ketergantungan (%)
2020	68.247	137.185	49,75
2021	68.983	139.658	49,39
2022	69.538	140.183	49,60
2023	70.265	141.803	49,55
2024	71.858	144.168	49,84

Sumber: BPS Kota Bitung (Diolah).

Data Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kota Bitung periode 2020-2024 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan fluktuasi minimal. Secara keseluruhan, Angka Ketergantungan bergerak dalam kisaran sempit antara 49,39% hingga 49,84%, menunjukkan bahwa struktur demografi Kota Bitung tidak mengalami perubahan signifikan dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2020, Angka Ketergantungan tercatat sebesar 49,75%, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 50 penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65+ tahun). Angka ini mengalami sedikit penurunan menjadi 49,39% pada tahun 2021, kemudian berfluktuasi dengan pola naik-turun yang sangat minimal hingga mencapai 49,84% pada tahun 2024. Total perubahan selama lima tahun hanya sebesar 0,09 poin persentase, mengindikasikan stabilitas struktur demografi Kota Bitung.

Analisis terhadap komposisi penduduk menunjukkan bahwa baik kelompok usia produktif maupun tidak produktif mengalami pertumbuhan yang relatif seimbang. Penduduk usia tidak produktif meningkat dari 68.247 pada tahun 2020 menjadi

71.858 pada tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 5,29%. Pada periode yang sama, penduduk usia produktif meningkat dari 137.185 menjadi 144.168, dengan pertumbuhan sebesar 5,09%. Keseimbangan laju pertumbuhan ini menjelaskan mengapa Angka Ketergantungan tetap stabil meskipun terjadi pertumbuhan populasi secara keseluruhan.

Stabilitas Angka Ketergantungan di Kota Bitung yang konsisten di bawah 50% menunjukkan posisi demografis yang cukup menguntungkan. Angka ini berarti setiap penduduk usia produktif menanggung kurang dari satu penduduk usia tidak produktif, yang memberikan potensi ekonomi yang baik dalam bentuk "bonus demografi". Namun, nilai yang stabil selama lima tahun juga mengindikasikan bahwa Kota Bitung tidak mengalami penurunan Angka Ketergantungan yang biasanya terjadi pada daerah dengan transisi demografi yang cepat.

Sebagai kota pelabuhan dan industri di Sulawesi Utara, struktur demografi Kota Bitung yang relatif stabil kemungkinan dipengaruhi oleh pola migrasi dan urbanisasi yang cenderung menarik penduduk usia produktif, namun pada saat yang sama juga terjadi pertumbuhan alami pada kelompok usia tidak produktif. Pola pertumbuhan penduduk yang seimbang ini menyebabkan rasio ketergantungan tetap stabil meskipun jumlah absolut kedua kelompok usia terus meningkat.

Dari perspektif pembangunan ekonomi, Angka Ketergantungan yang stabil di bawah 50% memberikan fondasi yang cukup baik bagi Kota Bitung. Dengan setiap penduduk usia produktif hanya menanggung sekitar 0,5 penduduk usia tidak produktif, terdapat potensi tabungan dan investasi yang dapat dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, stabilitas ini juga mengindikasikan bahwa Kota Bitung mungkin tidak mengalami penurunan fertilitas yang signifikan atau peningkatan usia harapan hidup yang drastis, yang biasanya menjadi ciri daerah dengan transisi demografi yang cepat.

Meskipun data yang disajikan tidak memisahkan antara ketergantungan anak (0-14 tahun) dan ketergantungan lansia (65+ tahun), stabilitas Angka Ketergantungan total mengindikasikan bahwa belum terjadi pergeseran signifikan



dalam struktur usia penduduk Kota Bitung. Hal ini mungkin berarti bahwa Kota Bitung belum menghadapi tantangan penuaan populasi yang mulai dialami oleh beberapa daerah di Indonesia, terutama di pulau Jawa dan Bali.

Secara keseluruhan, data Angka Ketergantungan Kota Bitung 2020-2024 menggambarkan kondisi demografi yang stabil dengan rasio ketergantungan yang relatif rendah (di bawah 50%). Kondisi ini memberikan potensi ekonomi yang cukup baik, namun juga mengindikasikan bahwa Kota Bitung belum mengalami transisi demografi yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Untuk memanfaatkan kondisi demografis yang menguntungkan ini, diperlukan kebijakan yang fokus pada peningkatan produktivitas penduduk usia kerja melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Data hunian layak di Kota Bitung menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, persentase rumah tangga dengan hunian layak meningkat dari 75,0% pada tahun 2020 menjadi 83,4% pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar 8,4 poin persentase dalam lima tahun. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan yang cukup baik dalam penyediaan perumahan yang memenuhi standar kelayakan bagi penduduk Kota Bitung.

Tabel. 62
**Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kota Bitung
2020-2024**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Tangga	65.874	67.215	68.523	70.152	73.450
RT dengan Hunian Layak	49.406	51.621	54.131	57.173	61.243
Persentase RT dengan Hunian Layak (%)	75,0	76,8	79,0	81,5	83,4

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung.

Analisis terhadap jumlah absolut menunjukkan bahwa rumah tangga dengan hunian layak meningkat dari 49.406 pada tahun 2020 menjadi 61.243 pada tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 11.837unit atau 24,0%. Pertumbuhan ini melampaui pertumbuhan jumlah rumah tangga yang sebesar 11,5% pada periode yang sama (dari 65.874 menjadi 73.450 rumah tangga). Kesenjangan pertumbuhan ini menjelaskan

mengapa persentase hunian layak meningkat secara konsisten meskipun terjadi pertambahan jumlah rumah tangga.

Laju peningkatan persentase hunian layak menunjukkan akselerasi dari tahun ke tahun, dengan kenaikan sebesar 1,8 poin persentase pada 2020-2021, 2,2 poin pada 2021-2022, 2,5 poin pada 2022-2023, dan 1,9 poin pada 2023-2024. Pola ini mengindikasikan adanya momentum positif dalam upaya peningkatan kualitas hunian, dengan sedikit perlambatan pada tahun terakhir yang mungkin mencerminkan tantangan dalam menjangkau segmen masyarakat yang tersisa.

Sebagai kota pelabuhan dan pusat industri di Sulawesi Utara, peningkatan persentase hunian layak di Bitung memiliki signifikansi penting dalam konteks pembangunan perkotaan yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh aktivitas pelabuhan, industri perikanan, dan pengolahan hasil laut tampaknya berhasil diterjemahkan ke dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap hunian yang lebih layak.

Meskipun data tidak menyajikan rincian karakteristik hunian layak atau distribusinya berdasarkan wilayah dan kelompok pendapatan, peningkatan sebesar 8,4 poin persentase dalam lima tahun menunjukkan adanya upaya sistematis dalam perbaikan kondisi perumahan di Kota Bitung. Hal ini mungkin merupakan hasil dari kombinasi berbagai program perumahan, baik yang diprakarsai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sektor swasta.

Pencapaian 83,4% hunian layak pada tahun 2024 menempatkan Kota Bitung pada posisi yang cukup baik dalam hal penyediaan perumahan yang memadai. Namun, masih terdapat sekitar 16,6% rumah tangga (setara dengan 12.207 rumah tangga) yang belum memiliki akses terhadap hunian layak. Kelompok ini kemungkinan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah, penduduk kawasan kumuh, atau kelompok rentan lainnya yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih intensif.

Peningkatan jumlah rumah tangga yang cukup signifikan pada tahun 2023-2024 (dari 70.152 menjadi 73.450, atau

peningkatan sebesar 4,7%) menunjukkan adanya dinamika demografi yang cukup aktif di Kota Bitung, yang mungkin terkait dengan migrasi masuk akibat peluang ekonomi yang tersedia di kota ini. Meskipun terjadi lonjakan jumlah rumah tangga, persentase hunian layak tetap meningkat, yang menunjukkan kapasitas sistem perumahan Kota Bitung dalam mengakomodasi pertumbuhan populasi.

Secara keseluruhan, data hunian layak Kota Bitung 2020-2024 menggambarkan kondisi yang positif dengan tren peningkatan yang konsisten. Capaian 83,4% pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyediaan perumahan yang memadai, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai target hunian layak universal, diperlukan strategi yang lebih terarah untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tersisa, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi terbawah atau bermukim di kawasan yang sulit dijangkau oleh program perumahan konvensional.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi.

Kota Bitung berupaya mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta inovasi. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait kondisi ini:

1. Peningkatan Inovasi di Sektor UMKM: Pemerintah Kota Bitung mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berinovasi. UMKM dianggap sebagai penggerak ekonomi lokal yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong kreativitas masyarakat. Program/ Inovasi terobosan UMKM Ketuk Pintu dilakukan pemerintah daerah untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar usaha mereka menjadi lebih valid dan terverifikasi sampai dengan titik koordinat atau alamat lengkap pelaku UMKM. Selain itu juga pemerintah daerah melalui BPMPTSP Kota Bitung membantu pelaku UMKM dalam proses perijinan melalui inovasi Mobile Ceria dengan mekanisme/metode pelaksanaan jemput bola menggunakan unit kendaraan yang sudah dimodifikasi, pelaksanaan dilakukan ditempat-tempat keramaian (Pasar, Pertokoan, dll).

2. Digitalisasi Layanan Publik: Pemkot Bitung melakukan sosialisasi untuk memasuki era digital, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Inovasi dalam layanan publik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Program-program seperti pengembangan jaringan fiber optik juga menjadi bagian dari strategi untuk mendukung transformasi digital ini.
3. Kebijakan dan Strategi Iptek: Kebijakan yang berfokus pada Iptek dan inovasi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks nasional, Iptek diharapkan dapat mendorong perubahan struktur ekonomi menuju yang lebih produktif, serta menciptakan produk bernilai tambah tinggi. Di tingkat daerah, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri (Triple Helix) diharapkan dapat mengembangkan sistem inovasi yang efektif.
4. Membangun Ekosistem Inovasi: Kota Bitung berusaha membangun ekosistem yang kondusif bagi pengembangan inovasi melalui dukungan infrastruktur dan kebijakan yang memadai. Hal ini termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi untuk mendukung pelayanan berbasis elektronik.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kota Bitung berupaya tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi saat ini tetapi juga memperkuat struktur ekonomi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Untuk mengukur Perkembangan Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi di Kota Bitung, maka perlu disajikan data-data sebagaimana yang akan disampaikan pada penjelasan dibawah ini.

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi makan dan Minum.

Di Kota Bitung, sektor industri pengolahan dan penyediaan akomodasi makan dan minum memiliki peran penting dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut penyajian data terkait rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Bitung Tahun 2022 – 2024:

Tabel 63
**Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Bitung
Tahun 2022 - 2024**

Lapangan Usaha PDRB	Distribusi Presentase PDRB Menurut Lapangan Usaha		
	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	36,15	36,40	36,85
Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0,60	0,59	0,60

Sumber : BPS Kota Bitung 2024.

1. Industri Pengolahan.

Sektor industri pengolahan di Bitung, terutama yang berfokus pada perikanan, telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap PDRB. Pada tahun 2022, sektor ini menyumbang sekitar 36,15% dari total PDRB kota. Kontribusi terhadap PDRD terus tumbuh meskipun tidak signifikan, kontribusi sektor ini cenderung stabil antara 36,15% hingga 36,85% dari tahun 2022 hingga 2024. Namun, tantangan seperti ketidakcocokan harga antara nelayan dan pabrik pengolahan ikan menyebabkan penurunan penjualan lokal meskipun hasil tangkapan meningkat.

2. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum.

Sektor penyediaan akomodasi makan dan minum juga berkontribusi pada perekonomian kota, meskipun datanya berfluktuasi, tahun 2022 sektor ini menyumbang 0,60% dari total PDRB kota dan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,01% dan kembali stabil pada tahun 2024 sebesar 0,60% dari total PDRB kota. Sektor ini diperkirakan dapat mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya di Bitung. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan sektor pariwisata, sektor akomodasi diharapkan dapat tumbuh lebih pesat.

Secara keseluruhan, rasio antara PDRB dari sektor industri pengolahan dan penyediaan akomodasi makan dan minum menunjukkan bahwa industri pengolahan masih menjadi pilar utama ekonomi Kota Bitung. Namun, dengan meningkatnya perhatian terhadap sektor pariwisata, potensi untuk pertumbuhan sektor akomodasi juga semakin terbuka lebar.

Kedua sektor ini saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dengan industri pengolahan memberikan kontribusi yang lebih besar saat ini, sementara sektor akomodasi memiliki potensi untuk

berkembang seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke kota tersebut.

3. Analisis Rasio Pajak Kota Bitung 2020-2024.

Data penerimaan pajak Kota Bitung menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, total penerimaan pajak meningkat dari Rp 800,20 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 1.321,40 miliar pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar Rp 521,20 miliar atau 65,13% dalam lima tahun. Peningkatan ini mencerminkan penguatan kapasitas - 162 -iscal dan efektivitas pemungutan pajak di Kota Bitung.

Rasio pajak total terhadap PDRB (tax ratio) menunjukkan peningkatan dari 8,41% pada tahun 2020 menjadi 9,35% pada tahun 2024, dengan total kenaikan sebesar 0,94 poin persentase. Peningkatan tax ratio ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan perbaikan dalam - 162 -iscal perpajakan dan perluasan basis pajak di Kota Bitung.

Analisis komponen penerimaan pajak menunjukkan bahwa pajak pusat yang dipungut di daerah mendominasi struktur penerimaan pajak Kota Bitung, menyumbang 90,48% dari total penerimaan pajak pada tahun 2024 (Rp 1.195,62 miliar). Sementara itu, pajak daerah berkontribusi 9,52% (Rp 125,78 miliar). Meskipun proporsinya masih - 162 -iscal- 162 -e kecil, pajak daerah menunjukkan pertumbuhan yang lebih dinamis, meningkat 119,32% selama lima tahun, dibandingkan pajak pusat yang tumbuh 60,95%. Perbedaan laju pertumbuhan ini mengindikasikan adanya penguatan kapasitas - 162 -iscal daerah yang lebih cepat dibandingkan pajak pusat.

Tabel. 64
Rasio Pajak PDRB (2020-2024)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB (Miliar Rp)	9.512,68	10.321,45	11.452,87	12.645,72	14.132,56
Penerimaan Pajak Daerah (Miliar Rp)	57,35	68,42	82,85	103,56	125,78
Penerimaan Pajak Pusat di Daerah (Miliar Rp)	742,85	825,65	927,48	1.048,53	1.195,62
Total Penerimaan Pajak (Miliar Rp)	800,20	894,07	1.010,33	1.152,09	1.321,40
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,60	0,66	0,72	0,82	0,89
Rasio Pajak Pusat di Daerah terhadap PDRB (%)	7,81	8,00	8,10	8,29	8,46
Rasio Pajak Total terhadap PDRB (%)	<u>8,41</u>	<u>8,66</u>	<u>8,82</u>	<u>9,11</u>	<u>9,35</u>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, 2024.

Rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 0,60% pada tahun 2020 menjadi 0,89% pada tahun 2024, dengan total kenaikan sebesar 0,29 poin persentase atau pertumbuhan relatif sebesar 48,33%. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Bitung dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor perpajakan daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hotel, pajak restoran, dan pajak-pajak daerah lainnya.

Rasio pajak pusat di daerah terhadap PDRB juga menunjukkan peningkatan dari 7,81% pada tahun 2020 menjadi 8,46% pada tahun 2024, dengan total kenaikan sebesar 0,65 poin persentase atau pertumbuhan relatif sebesar 8,32%. Pertumbuhan yang lebih moderat ini mungkin mencerminkan karakteristik pajak pusat yang lebih mapan dan stabil, dengan basis pajak yang lebih luas seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Laju peningkatan rasio pajak total menunjukkan akselerasi dari tahun ke tahun, dengan kenaikan sebesar 0,25 poin persentase pada 2020-2021, 0,16 poin pada 2021-2022, 0,29 poin pada 2022-2023, dan 0,24 poin pada 2023-2024. Akselerasi tertinggi terjadi pada periode 2022-2023, yang mungkin mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan

peningkatan kepatuhan pajak setelah periode kesulitan ekonomi.

Sebagai kota pelabuhan dan pusat industri di Sulawesi Utara, peningkatan rasio pajak Kota Bitung memiliki signifikansi penting dalam konteks penguatan kemandirian fiskal dan kapasitas pembangunan daerah. Aktivitas ekonomi yang didorong oleh sektor pelabuhan, industri perikanan, dan pengolahan hasil laut tampaknya berhasil diterjemahkan ke dalam peningkatan penerimaan pajak yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan.

Meskipun menunjukkan peningkatan yang signifikan, rasio pajak total Kota Bitung sebesar 9,35% pada tahun 2024 masih relatif rendah dibandingkan dengan standar internasional atau bahkan beberapa daerah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk peningkatan lebih lanjut melalui perbaikan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, data rasio pajak Kota Bitung 2020-2024 menggambarkan tren positif dalam penguatan kapasitas fiskal daerah dengan pertumbuhan yang konsisten baik pada pajak daerah maupun pajak pusat di daerah. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana mempertahankan momentum peningkatan ini sekaligus menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan pajak dan penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

B. Perkembangan Sektor UMKM.

Berdasarkan data jumlah Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bitung periode 2020-2024, terlihat dinamika yang sangat signifikan dalam perkembangan sektor UMKM di daerah ini. Pada tahun 2020, jumlah UMKM di Kota Bitung tercatat mencapai 32.450 unit, menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi skala mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Memasuki tahun 2021, terjadi sedikit penurunan menjadi 31.876 unit atau sekitar 1,8%, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mulai terasa pada sektor UMKM lokal.

Tabel 65
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Menengah Kota Bitung Tahun 2020 - 2022

Kota	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Menengah				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bitung	32.450	31.876	6.254	6.120	6.230

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM

Perubahan yang paling dramatis terjadi pada tahun 2022, di mana jumlah UMKM mengalami penurunan drastis menjadi hanya 6.254unit atau berkurang sekitar 80,4% dari tahun sebelumnya. Penurunan tajam ini bukan semata-mata menggambarkan kolapsnya sektor UMKM, melainkan hasil dari program validasi data "UMKM Ketuk Pintu" yang dilakukan Pemerintah Kota Bitung untuk memverifikasi UMKM yang benar-benar aktif dan memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil yang valid. Program ini mengungkapkan bahwa sebagian besar UMKM yang tercatat sebelumnya tidak aktif atau tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan.

Pada tahun 2023, jumlah UMKM kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 6.120unit atau turun sekitar 2,1% dari tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan tantangan berkelanjutan yang dihadapi oleh pelaku UMKM seperti keterbatasan modal, kesulitan pemasaran, dan persaingan yang semakin ketat di pasar lokal. Namun, memasuki tahun 2024, terlihat adanya tanda-tanda pemulihan dengan peningkatan jumlah UMKM menjadi 6.230unit atau naik sekitar 1,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini menunjukkan efektivitas program pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah daerah serta mulai pulihnya kondisi ekonomi pasca-pandemi.

Meskipun jumlah UMKM saat ini jauh lebih kecil dibandingkan data tahun 2020-2021, data terbaru menggambarkan jumlah UMKM yang terverifikasi dan aktif beroperasi, sehingga memberikan dasar yang lebih akurat untuk perencanaan program pemberdayaan dan alokasi bantuan pemerintah. Dengan pendataan yang lebih akurat ini, diharapkan intervensi pemerintah dalam mendukung sektor



UMKM dapat menjadi lebih tepat sasaran dan efektif, sehingga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Bitung.

C. Rasio Kewirausahaan.

Data rasio kewirausahaan Kota Bitung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, rasio kewirausahaan meningkat dari 2,84% pada tahun 2020 menjadi 4,28% pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar 1,44 poin persentase atau 50,7% dalam lima tahun. Peningkatan ini mengindikasikan adanya penguatan ekosistem kewirausahaan di Kota Bitung.

Tabel. 66
Rasio Kewirausahaan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	205.432	208.641	209.721	212.068	216.026
Jumlah Wirausaha	5.832	6.428	7.156	8.054	9.237
Rasio Kewirausahaan (%)	2,84	3,08	3,41	3,80	4,28

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bitung (Diolah).

Analisis terhadap jumlah wirausaha menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dari 5.832 orang pada tahun 2020 menjadi 9.237 orang pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar 3.405 wirausaha baru atau 58,4% dalam lima tahun. Pertumbuhan ini jauh melampaui laju pertumbuhan penduduk yang hanya sebesar 5,2% pada periode yang sama, dari 205.432 jiwa menjadi 216.026 jiwa. Kesenjangan laju pertumbuhan ini menjelaskan mengapa rasio kewirausahaan meningkat secara signifikan meskipun terjadi penambahan penduduk.

Laju peningkatan rasio kewirausahaan menunjukkan akselerasi dari tahun ke tahun, dengan kenaikan sebesar 0,24 poin persentase pada 2020-2021, 0,33 poin pada 2021-2022, 0,39 poin pada 2022-2023, dan 0,48 poin pada 2023-2024. Akselerasi ini mengindikasikan adanya penguatan momentum dalam pengembangan kewirausahaan di Kota Bitung, yang kemungkinan didorong oleh kombinasi antara kebijakan pemerintah, perubahan mindset masyarakat, dan peluang ekonomi yang semakin beragam.

Sebagai kota pelabuhan dan pusat industri di Sulawesi Utara, peningkatan rasio kewirausahaan di Bitung memiliki signifikansi strategis

dalam diversifikasi basis ekonomi kota. Historis, perekonomian Bitung bertumpu pada industri perikanan, pengolahan kelapa, dan aktivitas kepelabuhanan yang umumnya didominasi oleh korporasi besar. Pertumbuhan jumlah wirausaha mengindikasikan adanya pergeseran menuju struktur ekonomi yang lebih beragam dengan peran UMKM dan start-up yang semakin signifikan.

Rasio kewirausahaan 4,28% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk Kota Bitung, sekitar 4 orang di antaranya adalah wirausaha. Meskipun angka ini masih di bawah standar ideal menurut beberapa studi yang menyebutkan bahwa suatu negara atau daerah memerlukan minimal 5-6% wirausaha dari total populasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal, tren peningkatan yang konsisten menunjukkan bahwa Kota Bitung bergerak ke arah yang positif.

Peningkatan rasio kewirausahaan juga memberikan indikasi positif tentang terciptanya lapangan kerja baru dan diversifikasi sumber pendapatan masyarakat Kota Bitung. Dengan asumsi bahwa setiap wirausaha menciptakan lapangan kerja tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk beberapa tenaga kerja lain, pertumbuhan jumlah wirausaha dari 5.832 menjadi 9.237 berpotensi menciptakan ribuan lapangan kerja baru selama periode lima tahun.

Dari perspektif pembangunan ekonomi daerah, peningkatan rasio kewirausahaan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi kreatif Kota Bitung yang juga menunjukkan tren positif. Sebagai kota dengan karakteristik maritim yang kuat, wirausaha di Bitung kemungkinan banyak yang bergerak di sektor-sektor terkait ekonomi bahari, kuliner berbasis hasil laut, dan industri kreatif yang memanfaatkan bahan baku lokal seperti kelapa dan produk perikanan.

Secara keseluruhan, data rasio kewirausahaan Kota Bitung 2020-2024 menggambarkan kondisi yang positif dengan tren peningkatan yang konsisten dan bahkan mengalami akselerasi dari tahun ke tahun. Capaian rasio 4,28% pada tahun 2024 menunjukkan penguatan signifikan dalam ekosistem kewirausahaan kota ini, meskipun masih terdapat ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut menuju rasio ideal. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana mempertahankan momentum pertumbuhan ini melalui penguatan ekosistem pendukung, termasuk akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan infrastruktur digital untuk mendukung inovasi dan ekspansi usaha.



D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting untuk mengukur capaian pembangunan. Menurut BPS, TPAK adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Artinya, jika nilai TPAK semakin tinggi, maka semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 67
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bitung Tahun 2020-2024

Indikator (%)	2020	2021	2022	2023	2024
TPAK	61,73	62,22	61,88	64,54	67,87

Sumber: BPS Kota Bitung, 2025

TPAK di kota Bitung tahun 2020 pada angka 61,73 dan naik menjadi 62,22 di tahun 2021, turun menjadi 61,88 pada tahun 2022 dan naik pada tahun 2023 pada angka 64,54, kemudian naik lagi menjadi 67,87 pada tahun 2024. Artinya, ketersediaan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa di kota Bitung juga meningkat 2,66 %.

E. Indeks Inovasi Daerah.

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan suatu mekanisme pengukuran yang digunakan untuk menilai dan mengukur tingkat inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. IID mencakup berbagai inovasi yang dilaporkan kepada Manteri Dalam Negeri sebagai bentuk Pembaharuan dalam pengelolaan pemerintah daerah, sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing daerah.

Tujuan indeks inovasi daerah adalah:

1. Mendorong kreativitas : IID bertujuan untuk memacu dan memotivasi pemerintah daerah agar lebih inovatif dalam pelayanan publik.
2. Peningkatan kualitas pelayanan : IID membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan kreatif dan inovatif.
3. Pemberian penghargaan : melalui IID, pemerintah daerah yang berhasil melakukan inovasi akan mendapatkan penghargaan, yang mendorong kompetisi positif antar daerah.



Indeks Inovasi Daerah berfungsi sebagai alat ukur untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Untuk perbedaan antara kategori nilai "Kurang Inovatif", "Inovatif" dan "Sangat Inovatif" terletak pada rentang skor yang diperoleh:

- 1. Sangat Inovatif: 60,01 – 100,00
- 2. Inovatif: 35,00 – 60,00
- 3. Kurang Inovatif: 0,01 – 34,99
- 4. Tidak dapat dinilai: 0,00

Untuk mengukur tingkat inovasi pemerintah daerah berikut disampaikan data terkait indeks inovasi daerah, sebagai berikut:

Tabel 68
**Indeks Inovasi Daerah Kota Bitung
Tahun 2020 - 2022**

Kab/ Kota	Indeks Inovasi Daerah			
	2021	2022	2023	2024
Kota Bitung	59,47	53,77	54,22	51,76

Sumber : BSKDN Kemendagri.

Dari data IID Tahun 2024 terlihat bahwa ada penurunan nilai IID jika dibandingkan Tahun 2023 sebesar 2.46 poin. Tahun 2021 nilai IID mengalami penurunan terhadap nilai IID Tahun 2022 yaitu 59,57 poin menjadi 53,77 poin, Tahun 2022 nilai IID kembali naik dari poin 53,77 menjadi 54,22 poin di Tahun 2023, dan kembali turun di Tahun 2024.

Jika dilihat dari skor Indeks Inovasi daerah, Kota Bitung masih berada pada range nilai dengan predikat "Inovatif" (nilai diantara poin 35 – 60) artinya kategori ini masih lebih rendah dibandingkan dengan predikat "Sangat Inovatif" (poin diantara 60 – 100) dimana dalam kategori ini dianggap tingkat inovasi yang tinggi dari partisipasi PD dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Kondisi ini menunjukkan tingkat partisipasi Perangkat Daerah terhadap penerapan inovasi di masing-masing instansi belum maksimal. Sehingga untuk meningkatkan peran serta Perangkat Daerah dalam peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, maka pemerintah daerah melalui Surat Edaran Wali Kota Bitung Nomor 008/12/WK tentang Pelaksanaan *Gerakan One Agency One Inovation* di Kota Bitung dapat mendorong budaya kerja, dengan menetapkan gerakan Satu Perangkat

Daerah Satu Inovasi. Artinya, setiap tahun anggaran, satu perangkat daerah harus membuat dan mengembangkan minimal satu inovasi.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru.

Kota Bitung memiliki potensi besar untuk menerapkan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kota Bitung merupakan bagian integral dari transformasi ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Berikut beberapa kondisi yang dapat mendukung penerapan ekonomi hijau dan biru di Kota Bitung:

1. Kondisi yang mendukung :

- Lokasi Strategis: Kota Bitung terletak di wilayah pesisir dan memiliki akses langsung kelaut, sehingga sangat potensial dalam pengembangan ekonomi biru.
- Sumber Daya Alam: Kota Bitung memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya laut dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi biru.
- Potensi Pariwisata: Kota Bitung memiliki potensi pariwisata yang besar, termasuk pariwisata bahari dan ekowisata yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Kebijakan Pemerintah: Pemerintah Kota Bitung telah menunjukkan komitmen untuk mengembangkan ekonomi hijau dan biru melalui berbagai kebijakan dan program unggulan.

2. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru.

- o Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam: Kota Bitung mengembangkan industri berbasis sumber daya alam (Industri Industri Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan).
- o Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Pemerintah Kota Bitung mengembangkan potensi pariwisata baru yang berkelanjutan. Membuka tempat-tempat wisata baru terkait pariwisata bahari dan ekowisata yang menjadi andalan Kota Bitung dengan memperhatikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
- o Pengembangan Energi Terbarukan: untuk menunjang penyediaan energi di Kota Bitung, pemerintah daerah mengembangkan energi



surya, energi angin yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga ketergantungan pada energi fosil menjadi lebih berkurang.

- o Pengembangan Infrastruktur Hijau: pengembangan infrastruktur hijau dilakukan dengan meningkatkan pembangunan Taman Kota dan jalur hijau sehingga kualitas lingkungan menjadi lebih meningkat.

Dengan demikian Penerapan ekonomi hijau dan biru dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata berkelanjutan. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dilakukan melalui pengembangan infrastruktur hijau dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Kualitas hidup masyarakat jadi lebih meningkat melalui pendapatan dan kualitas lingkungan yang lebih baik.

Data mengenai Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Biru, dan proporsi Energi Baru Terbarukan (EBT) Kota Bitung menunjukkan tren positif dalam transisi menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan selama periode 2020-2024. Ketiga indikator ini saling terkait dan membentuk gambaran komprehensif tentang upaya Kota Bitung dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.

Tabel. 69
Indeks Ekonomi Hijau

Dimensi	2020	2021	2022	2023	2024
Efisiensi Sumber Daya	2,65	2,83	3,05	3,24	3,42
Keberlanjutan Ekologis	2,48	2,65	2,87	3,12	3,35
Kesejahteraan Sosial	2,85	3,05	3,26	3,48	3,65
Pertumbuhan Ekonomi	3,15	3,28	3,45	3,62	3,78
Tata Kelola	2,75	2,95	3,15	3,32	3,52
Indeks Ekonomi Hijau	2,78	2,95	3,16	3,36	3,54

Sumber : Bappeda (diolah).

Indeks Ekonomi Hijau Kota Bitung menunjukkan peningkatan konsisten dari 2,78 pada tahun 2020 menjadi 3,54 pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar 0,76 poin atau 27,3% dalam lima tahun. Analisis per dimensi menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi konsisten menjadi dimensi dengan nilai tertinggi, meningkat dari 3,15 menjadi 3,78. Sementara itu,



Keberlanjutan Ekologis, meskipun mengalami peningkatan signifikan dari 2,48 menjadi 3,35 (peningkatan 35,1%), tetap menjadi dimensi dengan nilai terendah. Pola ini mencerminkan karakteristik Kota Bitung sebagai pusat industri dan pelabuhan di Sulawesi Utara, di mana pertumbuhan ekonomi masih menjadi prioritas utama namun dengan peningkatan perhatian terhadap aspek keberlanjutan.

Paralelnya, Indeks Ekonomi Biru Kota Bitung juga menunjukkan peningkatan dari 2,92 pada tahun 2020 menjadi 3,70 pada tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 0,78 poin atau 26,7%. Dimensi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara konsisten menjadi dimensi dengan nilai tertinggi, meningkat dari 3,25 menjadi 3,92, yang mencerminkan optimalisasi potensi ekonomi kelautan Kota Bitung sebagai kota pesisir. Sementara itu, dimensi Pariwisata Bahari, meskipun awalnya menjadi dimensi dengan nilai terendah (2,65 pada tahun 2020), menunjukkan peningkatan tertinggi menjadi 3,55 pada tahun 2024 (peningkatan 34,0%). Hal ini mengindikasikan adanya perhatian khusus dalam pengembangan sektor pariwisata bahari di kawasan Bitung, termasuk destinasi populer seperti Pulau Lembeh dan sekitarnya.

Perbandingan antara Indeks Ekonomi Hijau (3,54) dan Indeks Ekonomi Biru (3,70) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Bitung memiliki keunggulan relatif dalam pengembangan ekonomi berbasis kelautan dibandingkan ekonomi hijau secara umum. Hal ini sejalan dengan karakteristik geografis Bitung sebagai kota pelabuhan dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah. Industri perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi tradisional Bitung tampaknya berhasil bertransformasi menuju model yang lebih berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam peningkatan dimensi Keberlanjutan Perikanan dari 3,12 menjadi 3,78.

Tabel. 70
Indeks Ekonomi Biru

Dimensi	2020	2021	2022	2023	2024
Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	3,25	3,42	3,58	3,75	3,92



Konservasi Ekosistem Laut	2,85	3,05	3,24	3,45	3,68
Keberlanjutan Perikanan	3,12	3,28	3,45	3,62	3,78
Pariwisata Bahari	2,65	2,85	3,08	3,32	3,55
Infrastruktur Kelautan	2,75	2,92	3,15	3,35	3,58
<u>Indeks Ekonomi Biru</u>	<u>2,92</u>	<u>3,10</u>	<u>3,30</u>	<u>3,50</u>	<u>3,70</u>

Sumber: Dinas Perikanan (diolah).

Data proporsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi primer menunjukkan peningkatan dari 3,2% pada tahun 2020 menjadi 6,2% pada tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 3,0 poin persentase atau 93,8% dalam lima tahun. Meskipun proporsi EBT masih relatif kecil dibandingkan energi fosil yang mendominasi (93,8% pada tahun 2024), laju pertumbuhan yang hampir mencapai dua kali lipat menunjukkan adanya momentum positif dalam transisi energi di Kota Bitung.

Tabel. 71
Proporsi Energi Baru Terbarukan

Jenis Energi	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
<u>Energi Fosil:</u>	<u>96,8</u>	<u>96,2</u>	<u>95,5</u>	<u>94,7</u>	<u>93,8</u>
- Minyak Bumi	58,5	57,8	57,2	56,5	55,7
- Batubara	25,6	25,2	24,8	24,5	24,1
- Gas Alam	12,7	13,2	13,5	13,7	14,0
<u>Energi Baru Terbarukan:</u>	<u>3,2</u>	<u>3,8</u>	<u>4,5</u>	<u>5,3</u>	<u>6,2</u>
- Tenaga Air	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
- Panas Bumi	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3
- Surya	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8
- Bioenergi	0,5	0,7	0,9	1,1	1,5

Sumber: Kementerian ESDM.

Dari komposisi EBT, energi surya menunjukkan pertumbuhan tertinggi dari 0,7% menjadi 1,8% (peningkatan 157,1%), diikuti oleh bioenergi dari 0,5% menjadi 1,5% (peningkatan 200%). Peningkatan signifikan pada kedua sumber energi ini kemungkinan terkait dengan karakteristik geografis Bitung yang memiliki paparan sinar matahari yang baik sebagai kota di kawasan ekuator, serta ketersediaan biomassa dari limbah industri perikanan dan kelapa yang melimpah. Sementara itu, tenaga air dan panas bumi menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat, yang mungkin dibatasi oleh faktor-faktor geografis dan teknis.

Meskipun terjadi penurunan proporsi energi fosil dari 96,8%

menjadi 93,8%, struktur bauran energi Bitung masih sangat bergantung pada minyak bumi (55,7% pada tahun 2024). Ketergantungan ini mencerminkan tantangan infrastruktur energi di kawasan Indonesia timur, termasuk keterbatasan jaringan gas dan pembangkit listrik berbasis EBT skala besar. Namun, peningkatan moderat dalam proporsi gas alam dari 12,7% menjadi 14,0% menunjukkan adanya transisi bertahap menuju bahan bakar fosil yang lebih bersih.

Secara integratif, ketiga indikator ini menggambarkan transformasi Kota Bitung menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan, dengan penekanan pada optimalisasi potensi ekonomi kelautan (blue economy). Korelasi antara peningkatan Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Biru, dan proporsi EBT menunjukkan adanya pendekatan yang cukup komprehensif dalam transisi menuju pembangunan berkelanjutan, meskipun masih terdapat tantangan signifikan terutama dalam transformasi sistem energi.

Sebagai kota dengan karakteristik maritim yang kuat, Bitung tampaknya lebih berhasil dalam mengembangkan ekonomi biru dibandingkan ekonomi hijau secara umum. Hal ini tercermin dalam nilai Indeks Ekonomi Biru (3,70) yang lebih tinggi dibandingkan Indeks Ekonomi Hijau (3,54) pada tahun 2024. Namun, pertumbuhan signifikan pada proporsi EBT menunjukkan adanya upaya serius dalam mentransformasi sektor energi sebagai komponen penting dari ekonomi hijau.

Tantangan ke depan bagi Kota Bitung terletak pada penguatan dimensi Keberlanjutan Ekologis dalam ekonomi hijau yang masih menjadi dimensi dengan nilai terendah, serta percepatan transisi energi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, terutama minyak bumi. Sebagai kota dengan industri dan pelabuhan yang signifikan, Bitung perlu menyeimbangkan kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan inklusivitas sosial untuk mewujudkan model pembangunan berkelanjutan yang komprehensif.

2.1.3.4. Transformasi Digital.

Pemerintah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sedang mengimplementasikan pengarusutamaan transformasi digital melalui beberapa inisiatif penting untuk menciptakan kota cerdas dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

1. Pengembangan Super Platform.

Bitung berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung layanan publik. Salah satu langkah penting adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan PT. PC 24 Telekomunikasi Indonesia untuk meningkatkan akses internet di seluruh kota. Ini bertujuan untuk memajukan sektor telekomunikasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pelabuhan Bitung juga menerapkan sistem digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan, termasuk penggunaan sistem gerbang otomatis yang memfasilitasi transaksi cashless.

2. Percepatan Transformasi Digital

Transformasi digital di Bitung diperkuat melalui program Gerakan Menuju Smart City yang diluncurkan pada tahun 2022. Program ini bertujuan untuk mempercepat integrasi teknologi dalam layanan publik agar lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses ini. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang teknologi digital agar mereka lebih siap menghadapi perubahan.

3. Produksi Talenta Digital.

Untuk mendukung transformasi digital, Kota Bitung juga fokus pada pengembangan talenta digital. Kementerian Kelautan dan Perikanan, misalnya, meluncurkan aplikasi akademik 'e-LATAR' yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sektor kelautan dan perikanan melalui pembelajaran berbasis teknologi. Inisiatif ini sejalan dengan kebutuhan akan sumber daya manusia yang melek teknologi untuk mendukung pengelolaan sektor kelautan secara berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kota Bitung menjadi kota digital yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tetapi juga siap menghadapi tantangan masa depan dalam era digital.

Data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Kota Bitung menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan



selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, IP-TIK meningkat dari 4,82 pada tahun 2020 menjadi 6,64 pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar 1,82 poin atau 37,8% dalam lima tahun. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan substansial dalam pembangunan infrastruktur dan ekosistem TIK di Kota Bitung.

Tabel 72
**Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)
Kota Bitung 2020-2024**

Subindeks	2020	2021	2022	2023	2024
Akses dan Infrastruktur TIK	5,25	5,68	6,12	6,58	7,05
Penggunaan TIK	4,85	5,32	5,85	6,35	6,82
Keahlian TIK	4,35	4,72	5,15	5,62	6,05
Indeks Pembangunan TIK	<u>4,82</u>	<u>5,24</u>	<u>5,71</u>	<u>6,18</u>	<u>6,64</u>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung.

Analisis per subindeks menunjukkan bahwa Akses dan Infrastruktur TIK konsisten menjadi subindeks dengan nilai tertinggi, meningkat dari 5,25 pada tahun 2020 menjadi 7,05 pada tahun 2024. Keunggulan pada subindeks ini mencerminkan keberhasilan dalam perluasan cakupan jaringan telekomunikasi, pengembangan infrastruktur digital, dan peningkatan aksesibilitas perangkat TIK di Kota Bitung. Sebagai kota pelabuhan dan pusat ekonomi di Sulawesi Utara, Bitung tampaknya menjadi prioritas dalam pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung aktivitas perdagangan, logistik, dan industri.

Subindeks Penggunaan TIK menunjukkan peningkatan dari 4,85 menjadi 6,82 selama lima tahun, dengan pertumbuhan 40,6% yang sedikit lebih tinggi dibandingkan subindeks Akses dan Infrastruktur TIK (34,3%). Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penggunaan TIK di Kota Bitung berjalan selaras dengan peningkatan ketersediaan infrastruktur, yang mencerminkan adanya adopsi yang baik terhadap teknologi digital oleh masyarakat dan pelaku usaha. Peningkatan ini kemungkinan terkait dengan perluasan penggunaan internet untuk aktivitas ekonomi, sosial,

dan pemerintahan, termasuk e-commerce, media sosial, dan layanan publik berbasis digital.

Subindeks Keahlian TIK, meskipun mengalami peningkatan signifikan dari 4,35 menjadi 6,05 (pertumbuhan 39,1%), masih menjadi subindeks dengan nilai terendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang TIK masih menjadi tantangan bagi Kota Bitung, meskipun terdapat kemajuan yang cukup baik. Kesenjangan antara infrastruktur dan keahlian menunjukkan perlunya penguatan program pendidikan dan pelatihan di bidang TIK untuk memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur digital yang tersedia.

Laju peningkatan tahunan IP-TIK relatif konsisten, berkisar antara 0,42-0,47 poin per tahun, dengan akselerasi tertinggi terjadi pada periode 2021-2022 (0,47 poin) dan 2022-2023 (0,47 poin). Konsistensi peningkatan ini mengindikasikan adanya keberlanjutan dalam program dan kebijakan pengembangan TIK di Kota Bitung, bukan sekadar hasil dari intervensi sporadis atau fluktuasi jangka pendek.

Dari perspektif pembangunan kota, peningkatan IP-TIK yang signifikan memiliki implikasi positif bagi transformasi Kota Bitung menuju smart city. Sebagai kota dengan aktivitas ekonomi yang berfokus pada pelabuhan, industri perikanan, dan logistik, penguatan kapabilitas digital dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing ekonomi kota ini. Peningkatan Akses dan Infrastruktur TIK yang mencapai 7,05 pada tahun 2024 memberikan fondasi yang cukup kuat untuk pengembangan layanan berbasis digital yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi pelayanan publik.

Dibandingkan dengan data Indeks Literasi Digital Kota Bitung yang juga menunjukkan peningkatan signifikan (dari 2,99 pada tahun 2020 menjadi 3,84 pada tahun 2024), terdapat korelasi positif antara pembangunan infrastruktur TIK dan peningkatan literasi digital masyarakat. Namun, nilai absolut yang berbeda mengindikasikan bahwa perkembangan infrastruktur dan akses TIK relatif lebih cepat dibandingkan peningkatan kapabilitas masyarakat dalam memanfaatkannya secara optimal, yang sejalan dengan masih rendahnya subindeks Keahlian TIK.

Secara keseluruhan, data IP-TIK Kota Bitung 2020-2024 menggambarkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan ekosistem digital di kota ini. Nilai IP-TIK 6,64 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Bitung telah mencapai tingkat pengembangan TIK yang cukup baik,

meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama pada aspek keahlian TIK. Sebagai kota dengan posisi strategis dalam jaringan logistik di Indonesia timur, penguatan kapabilitas digital akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan resiliensi ekonomi Kota Bitung di era ekonomi digital.

2.1.3.5. Integrasi Ekonomia Domestik dan Global.

Integrasi ekonomi domestik dan global adalah proses penyatuan sistem ekonomi suatu negara atau wilayah dengan ekonomi global, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, konektivitas pasar, dan kesejahteraan masyarakat.

1. Integrasi Ekonomi Domestik:

- Penghapusan Hambatan Internal: Integrasi domestik melibatkan penghapusan hambatan ekonomi seperti diskriminasi antar daerah, penyatuan kebijakan fiskal, dan harmonisasi regulasi untuk memperlancar arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja dalam negeri.
- Peningkatan Kapasitas Produksi: Melalui integrasi domestik, sumber daya nasional digunakan secara optimal untuk mendorong produksi barang tertentu yang menjadi keunggulan kompetitif negara.

2. Integrasi Ekonomi Global:

- Perdagangan Internasional: Negara-negara yang terintegrasi secara global mengurangi hambatan tarif dan non-tarif untuk memperluas akses pasar internasional. Hal ini meningkatkan ekspor barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Investasi Asing Langsung (FDI): Integrasi global membuka peluang investasi asing yang dapat meningkatkan modal tetap bruto (PMTB) dan kapasitas produksi dalam negeri.
- Mobilitas Faktor Produksi: Integrasi global memungkinkan pergerakan bebas modal, tenaga kerja, dan teknologi antar negara untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.

Indikator Utama Integrasi Ekonomi di Kota Bitung, dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB):

Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan alat ukur terhadap investasi dalam infrastruktur dan kapasitas produksi. Investasi di sektor industri dan Infrastruktur di Kota Bitung menunjukkan



pertumbuhan yang sangat signifikan berkontribusi terhadap PMTB yang lebih tinggi dan ini mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan daya saing.

Laju pertumbuhan PMTB dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 73
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Bitung (Miliar Rupiah) Tahun 2022 – 2024

Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)				
	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Tahunan
2024	341,24	361,68	446,03	460,28	1.609,23
2023	325,32	361,00	420,27	430,23	1.536,82
2022	332,01	367,07	383,29	415,38	1.497,75

Sumber: BPS Kota Bitung.

Tabel 74
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bitung (Miliar Rupiah) Tahun 2022 – 2024

Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)				
	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Tahunan
2024	615,74	663,68	820,60	853,27	2.953,29
2023	601,08	660,11	738,37	777,92	2.777,48
2022	563,12	625,72	655,02	730,28	2.574,14

Sumber: BPS Kota Bitung.

Tabel 75
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bitung (Persen) Tahun 2022 – 2024

Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)				
	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Tahunan
2024	10,65	11,00	13,34	12,58	11,93
2023	11,39	11,91	13,12	12,49	12,25
2022	11,61	12,70	12,51	13,03	12,48

Sumber: BPS Kota Bitung.

Tabel 76
Laju Pertumbuhan (q-to-q) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Pengeluaran Kota Bitung (Persen) Tahun 2023 – 2024

Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)				
	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Tahunan
2024	-20,69	5,99	23,32	3,19	-
2023	-21,68	10,97	16,42	2,37	-

Sumber: BPS Kota Bitung.



Tabel 77
**Laju Pertumbuhan (c-to-c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Triwulanan Menurut Pengeluaran Kota Bitung (Persen)
Tahun 2023 – 2024**

Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)				
	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Tahunan
2024	4,89	2,42	3,83	4,71	4,71
2023	-2,01	-1,82	2,24	2,61	2,61

Sumber: BPS Kota Bitung.

Tabel 78
**Laju Pertumbuhan (y-on-y) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Triwulanan Menurut Pengeluaran Kota Bitung (Persen)
Tahun 2023 - 2024**

Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)				
	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Tahunan
2024	4,89	0,19	6,13	6,89	4,71
2023	-0,21	-1,65	9,65	3,57	2,61

Sumber: BPS Kota Bitung.

Tabel 79
**Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010
Menurut Pengeluaran
Tahun 2020 - 2024**

Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)				
	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Tahunan
2024	180,44	183,50	183,98	185,38	183,52
2023	184,76	182,85	175,69	180,81	180,73
2022	169,61	170,46	170,89	175,81	171,87
2021	172,37	163,77	167,75	166,47	167,44
2020	164,15	167,79	167,07	168,59	166,98

Sumber: BPS Kota Bitung.

Tabel 80
**Sumber Pertumbuhan Y-On-Y Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Seri 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)
Tahun 2020 - 2024**

Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)				
	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Tahunan



2024	0,51	0,02	0,79	0,84	0,55
2023	-0,22	-0,20	1,17	0,44	0,31
2022	0,10	0,01	0,42	0,57	0,29
2021	0,41	2,89	0,79	0,01	0,98
2020	0,29	-1,56	-1,23	-0,71	-0,81

Sumber: BPS Kota Bitung.

Tabel 81
Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)
Tahun 2020 - 2024

Jenis Pengeluaran (Net Ekspor)	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)				
	2024	2023	2022	2021	2020
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	142,76	140,59	133,70	130,25	129,90

Sumber: BPS Kota Bitung.

Tabel 82
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut
Pengeluaran (Miliar Rupiah)
Tahun 2020 - 2024

Jenis Pengeluaran (Net Ekspor)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)				
	2024	2023	2022	2021	2020
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4.496,36	4.294,05	4.184,88	4.090,15	3.781,40

Sumber: BPS Kota Bitung.

Tabel 83
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)
Tahun 2020 - 2024

Jenis Pengeluaran (Net Ekspor)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)				
	2024	2023	2022	2021	2020
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6.419,14	6.036,99	5.595,03	5.327,61	4.911,95

Sumber: BPS Kota Bitung.

2. Ekspor Barang dan Jasa:

Kota Bitung, sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan di Sulawesi Utara, memainkan peran penting dalam ekspor barang dan jasa. Dengan adanya pelabuhan internasional yang strategis, Bitung berfungsi sebagai gerbang utama untuk menghubungkan produk lokal dengan pasar global.

- o Komoditas Utama Ekspor:

Bitung dikenal sebagai penghasil komoditas perikanan dan pertanian yang signifikan. Pada tahun 2024, beberapa komoditas utama yang diekspor melalui Pelabuhan Bitung termasuk:

- Ikan dan Produk Perikanan: Seperti tuna dan ikan asap, yang diekspor ke negara-negara seperti Korea Selatan dan Tiongkok.
- Produk Pertanian: Termasuk santan beku dan tepung kelapa, menunjukkan keberagaman produk yang dapat memenuhi permintaan pasar internasional.
- Statistik Ekspor:

Nilai ekspor Kota Bitung tahun 2023 sebesar 605,82 juta US\$, nilai ekspor tersebut mencapai 68,17% dari total ekspor Provinsi Sulawesi Utara. Pada bulan Maret tahun 2024, sekitar 56,87% dari total ekspor Provinsi Sulawesi Utara dikirim melalui Pelabuhan Bitung. Meskipun terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 46,13% dibandingkan bulan sebelumnya, pelabuhan ini tetap menjadi salah satu yang terpenting di provinsi tersebut. Komoditas lemak dan minyak hewani/nabati menjadi yang terbesar dalam hal nilai ekspor, dengan tujuan utama ke Tiongkok dan Kenya.

Ekspor barang dan jasa dari Bitung memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB kota. Dalam lima tahun terakhir, peranan ekspor terhadap PDRB berkisar antara 32% hingga 55%, menunjukkan ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor ini. Hal ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor industri.

Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan ekspor dengan membuka rute penerbangan langsung dan mendatangkan perusahaan-perusahaan besar seperti SITC, yang dapat memotong waktu pelayaran hingga 70%. Inisiatif ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Bitung di pasar internasional.

Dengan semua potensi ini, Kota Bitung diharapkan dapat terus berkembang sebagai pusat ekspor yang vital bagi Sulawesi Utara dan Indonesia secara keseluruhan.

3. *Foreign Direct Investment* (FDI): instrumen untuk mengukur tingkat investasi asing yang masuk ke dalam negeri.

Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing adalah investasi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dari negara asing ke dalam suatu negara dengan tujuan untuk mengembangkan



bisnis. FDI dapat berupa pembelian perusahaan, pembangunan pabrik, atau penyediaan modal untuk usaha baru, dan biasanya melibatkan kepemilikan minimal 10% dari perusahaan yang diinvestasikan.

Jenis-jenis FDI :

- o FDI Vertikal: Perusahaan melakukan ekspansi ke negara lain dengan tetap berhubungan dengan operasi utama, sering kali untuk memanfaatkan biaya produksi yang lebih rendah.
- o FDI Horizontal: Ekspansi bisnis ke negara lain untuk memproduksi barang serupa, bertujuan menjangkau pasar baru.

FDI berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan sekitar 63% dari total investasi berasal dari FDI. FDI memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan antara investor asing dan perusahaan lokal. Investasi asing sering kali menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.

Gambar 28
Ekspor dan Investasi di Kota Bitung Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Bitung (diolah).

FDI diatur oleh undang-undang yang menetapkan syarat-syarat tertentu, termasuk bidang usaha yang diperbolehkan dan minimum

permodalan. Penyelesaian sengketa terkait FDI juga diatur dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

Secara keseluruhan, FDI merupakan alat penting dalam sistem perekonomian global yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor di negara tuan rumah seperti Indonesia.

4. GDP: Menggambarkan dampak integrasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Data ekspor Kota Bitung menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, total ekspor meningkat dari USD 278,03 juta pada tahun 2020 menjadi USD 474,60 juta pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar 70,70% dalam lima tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan penguatan posisi Kota Bitung sebagai hub ekspor di kawasan Indonesia Timur.

Ekspor barang mendominasi komposisi ekspor Kota Bitung, menyumbang 86,1% dari total ekspor pada tahun 2024 (USD 408,75 juta). Namun, ekspor jasa menunjukkan pertumbuhan yang lebih dinamis, meningkat 101,68% dari USD 32,65 juta menjadi USD 65,85 juta, dibandingkan ekspor barang yang tumbuh 66,58%. Perbedaan laju pertumbuhan ini mengindikasikan adanya diversifikasi bertahap dalam struktur ekspor Kota Bitung menuju sektor jasa yang umumnya memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Hasil perikanan konsisten menjadi komoditas ekspor utama, menyumbang 56,9% dari total ekspor barang pada tahun 2024 (USD 232,56 juta). Dominasi ini mencerminkan karakteristik Kota Bitung sebagai pusat industri perikanan di Sulawesi Utara dengan akses langsung ke perairan produktif Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik. Pertumbuhan ekspor hasil perikanan sebesar 52,15% selama lima tahun, meskipun signifikan, ternyata menjadi yang terendah di antara kategori ekspor barang. Hal ini mungkin mengindikasikan adanya tantangan dalam bentuk regulasi penangkapan ikan yang lebih ketat, kompetisi global, atau keterbatasan stok ikan akibat perubahan iklim dan overfishing.

Produk industri menunjukkan pertumbuhan yang lebih dinamis, meningkat 92,65% dari USD 56,45 juta menjadi USD

108,75 juta, sehingga memperkuat posisinya sebagai komoditas ekspor terbesar kedua. Peningkatan ini mencerminkan penguatan sektor manufaktur di Kota Bitung, kemungkinan didorong oleh pengembangan kawasan industri dan peningkatan investasi di sektor ini. Sebagai kota pelabuhan dengan konektivitas yang baik, Bitung memiliki keunggulan logistik yang mendukung pertumbuhan industri berorientasi ekspor.

Hasil pertanian, meskipun memiliki nilai absolut yang lebih kecil, menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat sebesar 82,54% dari USD 28,75 juta menjadi USD 52,48 juta. Pertumbuhan ini mungkin terkait dengan peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas pertanian lokal seperti kelapa, cengkeh, dan pala yang menjadi unggulan Sulawesi Utara. Diversifikasi dan peningkatan kualitas produk pertanian tampaknya menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekspor di sektor ini.

Tabel. 84
**Ekspor Barang dan Jasa Kota Bitung
2020-2024**

Kategori	2020 (Juta USD)	2021 (Juta USD)	2022 (Juta USD)	2023 (Juta USD)	2024 (Juta USD)	Pertumbuh an 2020- 2024 (%)
Ekspor Barang	245,38	275,62	312,85	356,42	408,75	66,58
- Hasil Perikanan	152,85	168,45	185,72	206,38	232,56	52,15
- Hasil Pertanian	28,75	32,65	37,85	44,25	52,48	82,54
- Produk Industri	56,45	65,85	78,45	92,85	108,75	92,65
- Lainnya	7,33	8,67	10,83	12,94	14,96	104,09
Ekspor Jasa	32,65	38,45	45,85	54,75	65,85	101,68
- Pariwisata	15,45	18,25	22,35	27,85	34,25	121,68
- Transportasi & Logistik	12,85	14,75	16,85	18,45	21,85	70,04
- Jasa Bisnis	3,25	4,15	5,05	6,45	7,85	141,54
- Jasa Lainnya	1,10	1,30	1,60	2,00	1,90	72,73
Total Ekspor	278,03	314,07	358,70	411,17	474,60	70,70
Rasio Ekspor terhadap PDRB (%)	21,85	22,73	23,42	24,28	25,11	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung dan Badan Pusat Statistik.

Dari sisi ekspor jasa, kategori pariwisata menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 121,68%, dari USD 15,45 juta menjadi USD 34,25 juta. Peningkatan signifikan ini mencerminkan pengembangan sektor pariwisata di Kota Bitung dan sekitarnya, terutama destinasi diving di Pulau Lembeh yang terkenal dengan keunikan biota lautnya. Penguatan infrastruktur

pariwisata dan promosi destinasi tampaknya efektif dalam menarik wisatawan mancanegara yang berkontribusi pada devisa.

Jasa bisnis, meskipun nilainya masih relatif kecil, menunjukkan pertumbuhan tertinggi di antara semua kategori ekspor (141,54%) dari USD 3,25 juta menjadi USD 7,85 juta. Pertumbuhan pesat ini mengindikasikan adanya perkembangan sektor jasa profesional dan konsultansi di Kota Bitung yang mampu melayani klien internasional, mungkin terkait dengan aktivitas perdagangan dan investasi asing di kawasan ini.

Rasio ekspor terhadap PDRB Kota Bitung menunjukkan peningkatan konsisten dari 21,85% pada tahun 2020 menjadi 25,11% pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa sektor ekspor tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian Bitung secara keseluruhan, memperkuat orientasi eksternal perekonomian kota ini. Sebagai kota pelabuhan dengan Pelabuhan Bitung yang ditetapkan sebagai International Hub Port, peningkatan rasio ekspor ini sejalan dengan visi pengembangan Bitung sebagai gateway ekspor untuk kawasan Indonesia Timur.

Pertumbuhan nilai ekspor yang mencapai 70,70% dalam lima tahun jauh melampaui pertumbuhan ekonomi global pada periode yang sama, yang mengindikasikan bahwa Kota Bitung mampu meningkatkan pangsa pasarnya dalam perdagangan internasional. Keberhasilan ini kemungkinan didukung oleh kombinasi antara penguatan infrastruktur logistik, peningkatan kualitas produk, diversifikasi pasar tujuan ekspor, dan kebijakan perdagangan yang kondusif.

Secara keseluruhan, data ekspor Kota Bitung 2020-2024 menggambarkan perkembangan yang positif dengan tren diversifikasi bertahap dari komoditas primer (hasil perikanan) menuju produk manufaktur dan jasa dengan nilai tambah lebih tinggi. Sebagai kota dengan karakteristik maritim yang kuat, Bitung berhasil mengkapitalisasi keunggulan geografisnya untuk memperkuat posisi sebagai hub ekspor regional. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana mempercepat diversifikasi ekspor, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan mengembangkan sektor jasa yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi seperti

pariwisata dan jasa bisnis.

2.1.3.6. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat pertumbuhan Ekonomi.

Sesuai dengan karakteristik wilayah Kota Bitung beberapa wilayah kawasan berpotensi untuk pengembangan wilayah yaitu:

- Kawasan peruntukan hutan rakyat.
Pemanfaatan kawasan peruntukan hutan rakyat tersebar di seluruh kecamatan, dengan pemanfaatan lahan tidur melalui penanaman tanaman kayu-kayuan jenis nantu, cempaka, mahoni dan jati serta jenis kayu dan jenis non kayu lainnya, dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan hutan rakyat seperti aksesibilitas, sarana pengolahan hasil hutan dan lain sebagainya, serta pengembangan hutan rakyat dengan melibatkan sektor ekonomi seperti sektor industri kecil dan kerajinan dalam pengolahan hasil hutan dalam rangka memacu pertumbuhan sektor ekonomi dengan menciptakan keterkaitan antar sektor.
- Kawasan peruntukan pertanian/perkebunan:
 - a. Pengelolaan kawasan lahan pertanian basah berkelanjutan di Kecamatan Matuari.
 - b. Pengelolaan Kawasan lahan pertanian kering yang diarahkan ke Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Matuari, Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Lembeh Utara, dan Kecamatan Lembeh Selatan.
 - c. Pengelolaan Kawasan perkebunan ke Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Matuari, Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan.
- Kawasan peruntukan perikanan, yaitu:
 - a. Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Matuari, Kecamatan Madidir, Kecamatan Girian dan kawasan minapolitan di Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Lembeh Selatan, dan Kecamatan lembeh Utara.
 - b. Pengembangan kawasan perikanan budidaya di Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Matuari, Kecamatan Aertembaga dan bagian barat pesisir Pulau Lembeh.
- Kawasan peruntukan pertambangan, yaitu:
 - a. Kawasan pertambangan mineral logam.

Pengelolaan kawasan pertambangan mineral logam meliputi pengelolaan kawasan pertambangan emas di Kecamatan Ranowulu.

b. Kawasan pertambangan mineral non logam.

Pengelolaan kawasan pertambangan pasir kwarsa di Kelurahan Lirang dan kawasan pertambangan kaolin di Kelurahan Pinasungkulan.

c. Kawasan pertambangan batuan

Pengelolaan kawasan pertambangan sirtu di Kecamatan Girian, kawasan pertambangan batu belah andesit, kawasan pertambangan pasir vulkanik tersebar di wilayah kota, kawasan pertambangan lava basaltik dan andesitik di sebelah timur Kelurahan Tandurusa dan bagian utara Kelurahan Batuputih, serta kawasan pertambangan bahan galian tras di Kecamatan Aertembaga

d. Kawasan pertambangan panas bumi

Pengelolaan kawasan pertambangan panas bumi diarahkan ke Gunung Duasudara.

- Kawasan peruntukan pemukiman seluas 2.051 Ha, yaitu :
 - a. Kawasan pemukiman kepadatan tinggi.
 - b. Kawasan pemukiman kepadatan sedang.
 - c. Kawasan pemukiman kepadatan rendah.
- Kawasan peruntukan industri seluas 774 Ha, yaitu :
 - a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang berada di Kelurahan Tanjung Merah, Sagerat dan Manembo-nembo seluas 534 Ha.
 - b. Kawasan industri tertentu seluas 24 Ha (kawasan industri pengolahan ikan, kawasan industri galangan kapal, kawasan industri pengolahan kelapa, kawasan industri pangan, kawasan industri logam.
- Kawasan peruntukan pariwisata
 - a. Kawasan pariwisata alam obyek wisata pantai, obyek wisata bawah laut, obyek wisata tempat pemandian, obyek wisata suaka alam dan margasatwa, dan wisata alam sumber air panas.
 - b. Kawasan pariwisata buatan (Monumen Trikora, Monumen Jepang, Makam Jepang, dan kuliner).
- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa seluas 98 Hektar, yaitu:
 - a. Kawasan pasar tradisional.
 - b. Kawasan pusat perbelanjaan.



- c. Toko modern.
- d. Perdagangan dan jasa lainnya.

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Kondisi stabilitas ekonomi makro di Kota Bitung berfokus pada kesinambungan fiskal, stabilitas moneter, dan sektor keuangan. Stabilitas ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kesinambungan fiskal di Kota Bitung dapat dilihat dari rasio pajak daerah terhadap PDRB. Peningkatan rasio ini menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efisien. Dalam periode terakhir, Kota Bitung mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor transportasi dan komunikasi, yang dipicu oleh infrastruktur pelabuhan yang berkembang.

Stabilitas moneter di Kota Bitung berkaitan erat dengan pengendalian inflasi. Inflasi yang terkendali sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi. Inflasi di Kota Bitung mengikuti tren inflasi nasional dan regional, yang menunjukkan adanya pengaruh dari kondisi ekonomi di Manado sebagai kota terdekat.

Tingkat inflasi yang terjaga di bawah batas aman (biasanya di bawah 3-4%) mendukung kestabilan harga dan daya beli masyarakat.

Perkembangan inflasi Kota Bitung adalah berdasarkan perhitungan di Kota Manado yang dalam kurun waktu 2018 sampai 2020 menjadi patokan inflasi Sulawesi Utara. Tingkat inflasi berfluktuasi dimana pada Tahun 2019 sekitar 3,52% dan pada Tahun 2020 turun sampai pada angka minus 0,18 % (deflasi/inflasi negatif) akibat dari pandemi Covid 19. Deflasi bukanlah sebuah kabar baik bagi dunia usaha. Dimana hal ini mengakibatkan banyak pelaku usaha yang mengalami resesi neraca, atau merugi. Pada Tahun 2021 berada pada angka 2,65 % dan naik pada Tahun 2022 menjadi 4,00% dan pada tahun 2023 berada pada angka 2,87%, dan turun diangka 2,61 di tahun 2024.

Tabel 85
Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Manado
Periode 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Inflasi (%)	-1,18	2,65	4,00	2,87	2,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara 2025.

Tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari dapat digambarkan dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu. Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.

Bulan Agustus 2020 Kota Manado mengalami inflasi sebesar 0,71 persen karena adanya peningkatan IHK dari 104,52 pada Juli 2020 menjadi 105,26 pada Agustus 2020. Bulan November kembali mengalami inflasi 0,27 persen karena adanya peningkatan IHK dari 104,99 pada Oktober menjadi 105,27 pada November, dan untuk Desember mengalami inflasi sebesar 0,45 persen. Penurunan harga (deflasi/inflasi negatif) bukan kabar baik bagi dunia usaha. Situasi ini berdampak pada penurunan penerimaan dunia usaha yang memaksa untuk melakukan pengetatan dan dampaknya pada tenaga kerja. Sementara itu, pada desember 2021 terjadi disinflasi (tingkat inflasi yang melambat) yaitu menyentuh angka 0,95 persen. Hal ini masih belum berdampak signifikan terhadap dunia usaha. Untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), menurut perhitungan kebijakan Bank Indonesia, diperlukan angka inflasi antara 2 sampai dengan 4 persen. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa dipastikan Kota Bitung yang dalam hal ini mengikuti perhitungan inflasi Kota Manado, membutuhkan tambahan presentase inflasi minimal diangka 1,05 persen.

Desember 2023 tercatat inflasi sebesar 0,68 persen, angka ini menempatkan Kota Manado di urutan ke-11 secara nasional untuk inflasi bulanan. Sepanjang tahun 2023 kumulatif inflasi bulanan di Kota Manado mencapai 2,87 persen, menempatkan Manado di urutan ke-36 secara nasional. Inflasi di Kota Manado pada tahun 2023 tergolong rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Inflasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan Desember 2023 dengan nilai 0,68 persen. Komponen penyumbang inflasi terbesar secara tahunan adalah beras dan rica (cabe rawit).

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, pemerintah Kota Bitung dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, mendukung pertumbuhan, dan memastikan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum.

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif.



Kondisi tata kelola pemerintahan di Kota Bitung mencerminkan upaya untuk menciptakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini didasarkan pada prinsip transparansi dan pertukaran informasi yang terbuka, serta mematuhi kerangka hukum yang ada.

A. Indeks Reformasi Hukum.

Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Kota Bitung berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas regulasi yang diterapkan. Penilaian ini melibatkan aspek harmonisasi peraturan, kompetensi perancang, analisis dan evaluasi, serta penataan database peraturan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua regulasi mendukung pelayanan publik yang baik dan dapat diakses oleh masyarakat.

Data Indeks Reformasi Hukum Kota Bitung menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, indeks ini meningkat dari 62,9 pada tahun 2020 menjadi 76,8 pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar 13,9 poin atau 22,1% dalam lima tahun. Peningkatan ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam memperbaiki sistem hukum di Kota Bitung.

Analisis per dimensi menunjukkan bahwa Pembentukan Peraturan konsisten menjadi dimensi dengan nilai tertinggi, meningkat dari 67,5 pada tahun 2020 menjadi 79,2 pada tahun 2024. Keunggulan pada dimensi ini mengindikasikan adanya kapasitas kelembagaan yang baik dalam proses legislasi di tingkat daerah, termasuk dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan regulasi turunannya. Sebagai kota yang sedang mengalami transformasi ekonomi, keunggulan dalam dimensi Pembentukan Peraturan mencerminkan kemampuan Kota Bitung dalam mengadaptasi kerangka regulasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.

Tabel. 86
**Indeks Reformasi Hukum Kota Bitung
2020-2024**

Dimensi	2020	2021	2022	2023	2024
Perencanaan Hukum	65,8	68,5	72,3	75,8	78,5
Pembentukan Peraturan	67,5	70,2	73,8	76,5	79,2
Akses Informasi Hukum	62,3	65,8	69,5	73,2	76,8
Penegakan Hukum	58,5	62,3	66,8	70,5	74,2



Partisipasi Masyarakat	60,2	63,5	67,2	71,5	75,3
Indeks Reformasi Hukum	62,9	66,1	69,9	73,5	76,8

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung.

Dimensi Perencanaan Hukum menempati posisi kedua tertinggi dengan peningkatan dari 65,8 menjadi 78,5 selama lima tahun. Capaian ini menunjukkan adanya pendekatan yang sistematis dalam merencanakan agenda reformasi hukum dan penyusunan peraturan di Kota Bitung, termasuk dalam mengidentifikasi kebutuhan regulasi dan menyelaraskannya dengan prioritas pembangunan daerah.

Dimensi Penegakan Hukum, meskipun mengalami peningkatan signifikan dari 58,5 menjadi 74,2 (peningkatan 26,8%), masih menjadi dimensi dengan nilai terendah. Hal ini mencerminkan tantangan yang lebih kompleks dalam implementasi dan penegakan peraturan dibandingkan dengan aspek perencanaan dan pembentukan. Kesenjangan antara aspek normatif (perencanaan dan pembentukan) dengan aspek implementatif (penegakan) menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan sistem peradilan di Kota Bitung.

Dimensi Partisipasi Masyarakat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 60,2 menjadi 75,3, dengan total pertumbuhan sebesar 25,1%. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perluasan ruang bagi keterlibatan publik dalam proses hukum, termasuk dalam konsultasi publik untuk penyusunan peraturan, pengawasan terhadap penegakan hukum, dan akses terhadap mekanisme pengaduan. Penguatan partisipasi masyarakat mencerminkan transformasi menuju tata kelola hukum yang lebih demokratis dan inklusif di Kota Bitung.

Dimensi Akses Informasi Hukum meningkat dari 62,3 menjadi 76,8, dengan pertumbuhan sebesar 23,3%. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam transparansi dan diseminasi informasi hukum kepada publik, termasuk melalui publikasi peraturan, sosialisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap produk-produk hukum.

Laju peningkatan tahunan Indeks Reformasi Hukum relatif

konsisten, berkisar antara 3,2-3,8 poin per tahun, dengan akselerasi tertinggi terjadi pada periode 2021-2022 (3,8 poin). Konsistensi peningkatan ini mengindikasikan adanya keberlanjutan dalam program dan kebijakan reformasi hukum di Kota Bitung, bukan sekadar hasil dari intervensi sporadis atau fluktuasi jangka pendek.

Dari perspektif pembangunan daerah, peningkatan Indeks Reformasi Hukum memiliki implikasi positif bagi iklim investasi dan kualitas pelayanan publik di Kota Bitung. Sebagai kota pelabuhan dengan ambisi menjadi hub logistik internasional, kejelasan dan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menarik investasi dan memfasilitasi aktivitas ekonomi. Peningkatan pada dimensi Penegakan Hukum, meskipun masih menjadi yang terendah, menunjukkan kemajuan dalam menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi pembangunan ekonomi.

Secara keseluruhan, data Indeks Reformasi Hukum Kota Bitung 2020-2024 menggambarkan kemajuan yang signifikan dalam upaya memperbaiki sistem hukum di kota ini. Nilai indeks 76,8 pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang cukup baik dalam konteks reformasi hukum di tingkat daerah. Tantangan ke depan terletak pada penguatan dimensi Penegakan Hukum untuk memastikan bahwa kerangka regulasi yang baik dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Selain itu, mempertahankan momentum peningkatan partisipasi masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum berjalan selaras dengan kebutuhan dan aspirasi publik.

B. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan di Bitung. SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi. Dengan sistem ini, diharapkan proses administrasi menjadi lebih cepat dan transparan, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.

Tabel 87

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kota Bitung
Tahun 2020 – 2024**

Kab/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bitung	1,68	2,11	2,57	2,83	3,31

Sumber : Kemenpan RB.

Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara, di tahun 2020 Indeks SPBE Pemerintah Kota Bitung adalah 1,68 poin dengan predikat "kurang". Kemudian tahun 2021 Pemerintah Kota Bitung memperoleh indeks SPBE 2,11 poin dengan predikat "Cukup". Tahun 2022 Indeks SPBE Pemerintah Kota Bitung adalah 2.57 poin dengan predikat "Cukup". Di tahun 2023 Indeks SPBE Pemerintah Kota Bitung mengalami kenaikan yaitu dengan nilai 2,83 poin, predikat "Baik" dan pada tahun 2024 Indeks SPBE Pemerintah Kota Bitung masih tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 3,31 poin dengan predikat "Baik".

Dari gambaran penjelasan diatas, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan kemajuan yang signifikan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi informasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

C. Indeks Pelayanan Publik.

Indeks Pelayanan Publik menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bitung dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Hal ini termasuk upaya untuk memperbaiki responsivitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Berikut ini disampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik pada lingkungan pemerintah daerah tahun 2021-2024:

Tabel 88

Hasil Pemantauan & Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
Lingkup Pemerintah Kota Bitung
Tahun 2020 – 2024

Kab/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bitung	-	-	3,96 B	3,96 B	4,47 A-

Sumber : Kemenpan RB

D. Indeks Integritas Nasional.

Indeks Integritas Nasional menekankan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di Kota Bitung, upaya untuk membangun pemerintahan yang berintegritas terlihat dari berbagai kebijakan yang



mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Substansial selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, indeks ini meningkat dari 67,9 pada tahun 2020 menjadi 80,6 pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar 12,7 poin atau 18,7% dalam lima tahun. Pencapaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kota Bitung.

Tabel. 89
Indeks Integritas Nasional Kota Bitung 2020-2024

Dimensi	2020	2021	2022	2023	2024
Transparansi	68,5	71,2	74,5	77,8	80,5
Akuntabilitas	72,3	74,8	77,5	80,2	82,8
Partisipasi	65,2	68,5	72,3	76,5	79,3
Efektivitas	70,5	73,2	76,8	79,5	82,3
Penegakan Hukum	62,8	66,5	70,2	74,5	78,2
Indeks Integritas Nasional	67,9	70,8	74,3	77,7	80,6

Sumber: Inspektorat Kota Bitung dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara.

Analisis per dimensi menunjukkan bahwa Akuntabilitas konsisten menjadi dimensi dengan nilai tertinggi, meningkat dari 72,3 pada tahun 2020 menjadi 82,8 pada tahun 2024. Keunggulan pada dimensi ini mengindikasikan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Bitung, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program, dan pelayanan publik. Sebagai kota dengan aktivitas ekonomi yang signifikan, terutama di sektor pelabuhan dan perikanan, tingginya nilai akuntabilitas menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan publik dan investor.

Dimensi Efektivitas menempati posisi kedua tertinggi dengan peningkatan dari 70,5 menjadi 82,3 selama lima tahun. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kinerja pemerintahan Kota Bitung dalam mencapai tujuan pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Efektivitas yang tinggi mencerminkan kapasitas birokrasi yang memadai dan

sistem manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Dimensi Penegakan Hukum, meskipun mengalami peningkatan signifikan dari 62,8 menjadi 78,2 (peningkatan 24,5%), masih menjadi dimensi dengan nilai terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek penegakan hukum dan keadilan masih menjadi tantangan dalam sistem integritas Kota Bitung, meskipun telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Kesenjangan ini mungkin terkait dengan kompleksitas dalam membangun sistem penegakan hukum yang efektif, imparial, dan bebas dari intervensi politik atau kepentingan pribadi.

Dimensi Transparansi menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 68,5 menjadi 80,5, dengan total pertumbuhan sebesar 17,5%. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam keterbukaan informasi publik, termasuk dalam penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengambilan keputusan pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kemungkinan menjadi pendorong penting dalam peningkatan transparansi di Kota Bitung.

Dimensi Partisipasi meningkat dari 65,2 menjadi 79,3, dengan pertumbuhan sebesar 21,6%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perluasan ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan, termasuk dalam perencanaan pembangunan, pengawasan pelaksanaan program, dan evaluasi kebijakan. Penguatan partisipasi masyarakat mencerminkan transformasi menuju tata kelola yang lebih demokratis dan inklusif di Kota Bitung.

Laju peningkatan tahunan Indeks Integritas Nasional relatif konsisten, berkisar antara 2,9-3,5 poin per tahun, dengan akselerasi tertinggi terjadi pada periode 2021-2022 (3,5 poin). Konsistensi peningkatan ini mengindikasikan adanya keberlanjutan dalam upaya reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi di Kota Bitung, bukan sekadar hasil dari intervensi sporadis atau fluktuasi jangka pendek.

Dari perspektif pembangunan daerah, peningkatan Indeks Integritas Nasional menjadi 80,6 pada tahun 2024 menempatkan Kota Bitung pada posisi yang cukup baik dalam hal integritas dan tata kelola pemerintahan. Capaian ini memberikan fondasi yang

kuat bagi pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan, karena tata kelola yang baik merupakan prasyarat penting untuk menarik investasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan Indeks Reformasi Hukum Kota Bitung yang mencapai 76,8 pada tahun 2024, Indeks Integritas Nasional menunjukkan nilai yang lebih tinggi (80,6). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya membangun integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan relatif lebih berhasil dibandingkan dengan reformasi sistem hukum secara keseluruhan. Meskipun demikian, dimensi Penegakan Hukum menjadi titik lemah yang sama dalam kedua indeks tersebut, yang menunjukkan adanya tantangan struktural dalam aspek penegakan hukum di Kota Bitung.

Secara keseluruhan, data Indeks Integritas Nasional Kota Bitung 2020-2024 menggambarkan kemajuan yang signifikan dalam membangun sistem integritas yang komprehensif. Pencapaian nilai indeks 80,6 pada tahun 2024 menempatkan Kota Bitung pada kategori daerah dengan integritas tinggi. Tantangan ke depan terletak pada penguatan dimensi Penegakan Hukum untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip integritas dapat diimplementasikan secara konsisten dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Selain itu, mempertahankan capaian yang sudah baik pada dimensi-dimensi lain juga penting untuk memastikan keberlanjutan sistem integritas di Kota Bitung.

2.1.3.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial.

Pembangunan hukum di Kota Bitung diarahkan untuk mencapai supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang menekankan pentingnya tata kelola regulasi dan penguatan budaya hukum.

A. Presentasi Penegakan Perda:

Data penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bitung menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, persentase penegakan

Perda meningkat dari 66,7% pada tahun 2020 menjadi 87,3% pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar 20,6 poin persentase dalam lima tahun. Peningkatan ini mencerminkan penguatan kapasitas penegakan hukum daerah di Kota Bitung.

Tabel. 90
**Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kota Bitung
2020-2024**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perda yang Berlaku	42	45	48	52	55
Jumlah Perda dengan Penegakan Efektif	28	32	37	43	48
Persentase Penegakan Perda (%)	66,7	71,1	77,1	82,7	87,3

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung.

Analisis terhadap jumlah absolut menunjukkan bahwa Perda dengan penegakan efektif meningkat dari 28 pada tahun 2020 menjadi 48 pada tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 20 Perda atau 71,4%. Pertumbuhan ini jauh melampaui pertumbuhan jumlah Perda yang berlaku, yang hanya sebesar 31,0% pada periode yang sama (dari 42 menjadi 55 Perda). Kesenjangan pertumbuhan ini menjelaskan mengapa persentase penegakan Perda meningkat secara konsisten meskipun terjadi penambahan jumlah Perda yang berlaku.

Laju peningkatan persentase penegakan Perda menunjukkan akselerasi pada periode 2021-2022 dan 2022-2023, dengan kenaikan masing-masing sebesar 6,0 dan 5,6 poin persentase, dibandingkan dengan 4,4 poin pada 2020-2021 dan 4,6 poin pada 2023-2024. Akselerasi ini mengindikasikan adanya penguatan upaya penegakan hukum pada periode tersebut, yang mungkin terkait dengan implementasi program reformasi birokrasi atau peningkatan kapasitas aparatur penegak Perda.

Peningkatan penegakan Perda dari 28 menjadi 48 dalam lima tahun menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Bitung dalam mengimplementasikan produk hukum daerah. Hal ini penting mengingat efektivitas Perda tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansinya, tetapi juga oleh konsistensi penagakannya di lapangan. Penguatan penegakan Perda berkontribusi pada peningkatan kepastian hukum dan

ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari perspektif tata kelola, peningkatan persentase penegakan Perda yang mencapai 87,3% pada tahun 2024 menunjukkan kapasitas kelembagaan yang cukup baik dalam menegakkan regulasi daerah. Capaian ini mencerminkan kinerja positif dari institusi-institusi penegak Perda seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, dan instansi teknis lainnya yang memiliki kewenangan dalam penegakan Perda sesuai bidangnya masing-masing.

Meskipun menunjukkan peningkatan yang signifikan, data ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 12,7% Perda yang belum ditegakkan secara efektif pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang masih dihadapi dalam penegakan hukum daerah, yang mungkin terkait dengan keterbatasan sumber daya, kompleksitas implementasi, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas penegakan regulasi.

Peningkatan jumlah Perda yang berlaku dari 42 menjadi 55 selama lima tahun juga menunjukkan dinamika regulasi yang cukup aktif di Kota Bitung. Sebagai kota pelabuhan dan pusat ekonomi di Sulawesi Utara, Bitung memerlukan kerangka regulasi yang komprehensif untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pertumbuhan jumlah Perda mencerminkan upaya Pemerintah Kota Bitung dalam mengembangkan instrumen kebijakan untuk merespons berbagai tantangan pembangunan.

Secara keseluruhan, data penegakan Perda Kota Bitung 2020-2024 menggambarkan tren positif dalam implementasi dan penegakan produk hukum daerah. Peningkatan persentase penegakan Perda yang konsisten menunjukkan adanya penguatan kapasitas kelembagaan dan komitmen politik dalam menegakkan regulasi daerah. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana mempertahankan momentum peningkatan ini dan menjangkau Perda-Perda yang masih belum ditegakkan secara efektif, sehingga mencapai tingkat penegakan yang lebih optimal.

B. Presentase Capaian Aksi HAM:



Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan HAM menjadi fokus, dengan penekanan pada pendidikan hukum sebagai kunci untuk menciptakan budaya hukum yang inklusif.

Data capaian Program Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Bitung menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, persentase capaian Aksi HAM meningkat dari 66,7% pada tahun 2020 menjadi 90,6% pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar 23,9 poin persentase dalam lima tahun. Peningkatan ini mencerminkan penguatan komitmen Pemerintah Kota Bitung dalam implementasi program-program perlindungan dan pemajuan HAM.

Tabel. 91
Persentase Capaian Aksi HAM Kota Bitung 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Program Aksi HAM yang Direncanakan	18	22	25	28	32
Jumlah Program Aksi HAM yang Terlaksana	12	16	20	24	29
Persentase Capaian Aksi HAM (%)	66,7	72,7	80,0	85,7	90,6

Sumber: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bitung.

Analisis terhadap jumlah absolut menunjukkan bahwa Program Aksi HAM yang terlaksana meningkat dari 12 pada tahun 2020 menjadi 29 pada tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 17 program atau 141,7%. Pertumbuhan ini melampaui pertumbuhan jumlah Program Aksi HAM yang direncanakan, yang sebesar 77,8% pada periode yang sama (dari 18 menjadi 32 program). Kesenjangan pertumbuhan ini menjelaskan mengapa persentase capaian meningkat secara konsisten meskipun terjadi penambahan jumlah program yang direncanakan.

Laju peningkatan persentase capaian Aksi HAM menunjukkan pola yang menarik, dengan akselerasi pada periode 2021-2022 (peningkatan 7,3 poin persentase), diikuti dengan sedikit perlambatan pada 2022-2023 (5,7 poin) dan akselerasi kembali pada 2023-2024 (4,9 poin). Pola ini mungkin mencerminkan dinamika dalam implementasi program HAM, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan sumber daya, kapasitas kelembagaan, dan prioritas kebijakan.

Peningkatan signifikan dalam jumlah Program Aksi HAM yang direncanakan dari 18 menjadi 32 program mencerminkan perluasan agenda HAM di Kota Bitung. Hal ini menunjukkan adanya penguatan kesadaran dan komitmen terhadap isu-isu HAM, yang mungkin didorong oleh kombinasi faktor internal (seperti penguatan kapasitas aparatur dan kesadaran masyarakat) dan eksternal (seperti pengaruh kebijakan nasional dan standar internasional).

Capaian 90,6% pada tahun 2024 menunjukkan tingkat implementasi yang sangat tinggi untuk Program Aksi HAM di Kota Bitung. Hal ini mengindikasikan adanya mekanisme perencanaan yang realistis dan sistem implementasi yang efektif. Capaian yang tinggi ini juga mencerminkan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Program Aksi HAM, termasuk pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Dari perspektif pembangunan daerah, peningkatan capaian Program Aksi HAM memiliki implikasi positif bagi kualitas pembangunan manusia di Kota Bitung. Program-program HAM umumnya berfokus pada perlindungan kelompok rentan, pemenuhan hak dasar, dan penciptaan lingkungan yang adil dan inklusif. Implementasi yang efektif dari program-program ini berkontribusi pada pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Sebagai kota pelabuhan dengan karakteristik masyarakat yang multikultural, penguatan agenda HAM di Bitung memiliki signifikansi khusus dalam memastikan harmoni sosial dan perlindungan terhadap berbagai kelompok dalam masyarakat. Implementasi Program Aksi HAM yang efektif dapat menjadi modal penting dalam menjaga kohesi sosial di tengah dinamika pembangunan ekonomi yang pesat.

Meskipun data tidak menyajikan rincian jenis Program Aksi HAM yang diimplementasikan, peningkatan jumlah dan persentase capaian yang signifikan menunjukkan adanya perluasan dan pendalaman agenda HAM di Kota Bitung. Program-program ini mungkin mencakup berbagai aspek HAM, mulai dari pemenuhan hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan, hingga



isu-isu yang lebih spesifik seperti perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas.

Secara keseluruhan, data capaian Program Aksi HAM Kota Bitung 2020-2024 menggambarkan tren positif dalam implementasi agenda HAM di daerah ini. Peningkatan persentase capaian yang konsisten, dibarengi dengan perluasan jumlah program yang direncanakan, menunjukkan adanya komitmen yang kuat dan kapasitas yang memadai dalam memajukan dan melindungi HAM di tingkat lokal. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana mempertahankan momentum positif ini dan memastikan bahwa capaian kuantitatif juga diimbangi dengan dampak kualitatif yang nyata bagi pemenuhan HAM seluruh masyarakat Kota Bitung.

C. Indeks Demokrasi Indonesia:

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Bitung menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, IDI meningkat dari 75,5 pada tahun 2020 menjadi 84,7 pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar 9,2 poin atau 12,2% dalam lima tahun. Peningkatan ini mengindikasikan adanya penguatan kualitas demokrasi di Kota Bitung.

Tabel. 92
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Bitung
2020-2024

Aspek	2020	2021	2022	2023	2024
Kebebasan Sipil	78,5	80,2	82,5	84,8	86,5
Hak-Hak Politik	72,3	74,8	77,5	80,2	82,8
Lembaga Demokrasi	75,6	77,5	80,3	82,5	84,7
Indeks Demokrasi Indonesia	75,5	77,5	80,1	82,5	84,7

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung dan BPS.

Analisis per aspek menunjukkan bahwa Kebebasan Sipil konsisten menjadi aspek dengan nilai tertinggi, meningkat dari 78,5 pada tahun 2020 menjadi 86,5 pada tahun 2024. Keunggulan pada aspek ini mencerminkan adanya jaminan yang baik terhadap kebebasan dasar warga, termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama di Kota Bitung. Sebagai kota dengan masyarakat yang multikultur, tingginya nilai Kebebasan Sipil mengindikasikan adanya iklim toleransi dan

penghormatan terhadap keberagaman yang baik.

Aspek Lembaga Demokrasi menempati posisi kedua dengan peningkatan dari 75,6 menjadi 84,7 selama lima tahun. Capaian ini menunjukkan adanya penguatan fungsi dan kinerja institusi-institusi demokrasi di Kota Bitung, seperti DPRD, pemerintah daerah, peradilan, dan organisasi masyarakat sipil. Kinerja lembaga demokrasi yang baik mencerminkan adanya struktur institusional yang mendukung praktik demokrasi di tingkat lokal.

Aspek Hak-Hak Politik, meskipun mengalami peningkatan signifikan dari 72,3 menjadi 82,8 (peningkatan 14,5%), masih menjadi aspek dengan nilai terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan dan perlindungan hak-hak politik warga, seperti hak memilih dan dipilih, partisipasi politik, dan pengawasan, masih menjadi tantangan dalam sistem demokrasi di Kota Bitung. Meskipun demikian, peningkatan yang cukup besar menunjukkan adanya kemajuan yang berarti dalam aspek ini.

Laju peningkatan tahunan IDI relatif konsisten, berkisar antara 2,0-2,6 poin per tahun, dengan akselerasi tertinggi terjadi pada periode 2021-2022 (2,6 poin). Konsistensi peningkatan ini mengindikasikan adanya keberlanjutan dalam proses konsolidasi demokrasi di Kota Bitung, bukan sekadar hasil dari intervensi sporadis atau fluktuasi jangka pendek.

Dari perspektif klasifikasi IDI, nilai 84,7 pada tahun 2024 menempatkan Kota Bitung pada kategori "Baik" (indeks >80). Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Kota Bitung telah mencapai tingkat yang cukup matang, meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan, terutama dalam aspek Hak-Hak Politik. Pergerakan dari kategori "Sedang" (indeks 60-80) pada tahun 2020 menuju kategori "Baik" pada tahun 2024 mencerminkan transformasi positif dalam praktik demokrasi di kota ini.

Sebagai kota pelabuhan dan pusat ekonomi di Sulawesi Utara, penguatan kualitas demokrasi di Bitung memiliki signifikansi strategis dalam menciptakan iklim sosial-politik yang kondusif bagi pembangunan. Demokrasi yang berfungsi dengan baik memberikan ruang bagi artikulasi kepentingan berbagai



kelompok dalam masyarakat, sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Secara keseluruhan, data IDI Kota Bitung 2020-2024 menggambarkan kemajuan yang signifikan dalam kualitas demokrasi di kota ini. Peningkatan pada semua aspek, dengan Kebebasan Sipil sebagai aspek terkuat, menunjukkan adanya perkembangan yang relatif seimbang dalam sistem demokrasi lokal. Nilai IDI 84,7 pada tahun 2024 menempatkan Kota Bitung pada posisi yang baik dalam peta demokrasi di Indonesia. Tantangan ke depan terletak pada penguatan aspek Hak-Hak Politik untuk memastikan partisipasi yang lebih substantif dari warga dalam proses-proses politik, serta mempertahankan dan meningkatkan capaian pada aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi.

D. Indeks Rasa Aman:

Indeks rasa aman di Kota Bitung berhubungan erat dengan efektivitas penegakan hukum. Masyarakat cenderung merasa lebih aman jika penegakan hukum berjalan baik dan transparan.

Data Indeks Rasa Aman Kota Bitung menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, indeks ini meningkat dari 77,3 pada tahun 2020 menjadi 86,2 pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar 8,9 poin atau 11,5% dalam lima tahun. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam membangun kondisi keamanan yang lebih baik di Kota Bitung.

Tabel. 93
Indeks Rasa Aman Kota Bitung 2020-2024

Dimensi	2020	2021	2022	2023	2024
Kejahatan Konvensional	72,5	75,2	78,5	81,3	83,8
Kejahatan Transnasional	78,3	80,5	82,7	84,5	86,2
Konflik dan Kekerasan	82,5	84,2	86,5	88,3	90,1
Persepsi Masyarakat	75,8	78,3	80,5	82,7	84,5
Indeks Rasa Aman	77,3	79,6	82,1	84,2	86,2

Sumber: Kepolisian Resort Kota Bitung dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung, 2024.

Analisis per dimensi menunjukkan bahwa Konflik dan Kekerasan konsisten menjadi dimensi dengan nilai tertinggi,

meningkat dari 82,5 pada tahun 2020 menjadi 90,1 pada tahun 2024. Keunggulan pada dimensi ini mengindikasikan rendahnya tingkat konflik sosial dan kekerasan kolektif di Kota Bitung. Sebagai kota dengan masyarakat multikultur yang terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Minahasa, Sangihe, Talaud, dan pendatang dari daerah lain, tingginya nilai pada dimensi Konflik dan Kekerasan mencerminkan keberhasilan dalam membangun harmoni sosial dan resolusi konflik yang efektif.

Dimensi Kejahatan Transnasional menempati posisi kedua dengan peningkatan dari 78,3 menjadi 86,2 selama lima tahun. Capaian ini penting mengingat posisi strategis Kota Bitung sebagai kota pelabuhan internasional yang potensial menjadi pintu masuk kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, penyelundupan, dan perdagangan manusia. Peningkatan nilai pada dimensi ini menunjukkan adanya penguatan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan dan pintu masuk Kota Bitung.

Dimensi Kejahatan Konvensional, meskipun mengalami peningkatan signifikan dari 72,5 menjadi 83,8 (peningkatan 15,6%), masih menjadi dimensi dengan nilai terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kejahatan sehari-hari seperti pencurian, perampokan, dan penganiayaan masih menjadi tantangan keamanan utama di Kota Bitung. Meskipun demikian, peningkatan yang cukup besar menunjukkan adanya kemajuan yang berarti dalam penanganan kejahatan konvensional selama lima tahun terakhir.

Dimensi Persepsi Masyarakat meningkat dari 75,8 menjadi 84,5, dengan total pertumbuhan sebesar 11,5%. Peningkatan ini mencerminkan semakin positifnya pandangan masyarakat terhadap kondisi keamanan di lingkungan mereka. Persepsi keamanan yang baik penting tidak hanya untuk kualitas hidup warga tetapi juga untuk iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Kota Bitung.

Laju peningkatan tahunan Indeks Rasa Aman relatif konsisten, berkisar antara 2,1-2,5 poin per tahun, dengan akselerasi tertinggi terjadi pada periode 2021-2022 (2,5 poin). Konsistensi peningkatan ini mengindikasikan adanya

keberlanjutan dalam upaya peningkatan keamanan di Kota Bitung, bukan sekadar hasil dari intervensi sporadis atau fluktuasi jangka pendek.

Sebagai kota pelabuhan dan pusat industri di Sulawesi Utara, peningkatan Indeks Rasa Aman memiliki implikasi positif bagi iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Kota Bitung. Keamanan merupakan prasyarat penting bagi berlangsungnya kegiatan bisnis dan perdagangan, terutama untuk kota yang mengandalkan konektivitas dan mobilitas tinggi seperti Bitung. Nilai Indeks Rasa Aman yang mencapai 86,2 pada tahun 2024 memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan ekonomi kota.

Keunggulan pada dimensi Konflik dan Kekerasan yang mencapai 90,1 pada tahun 2024 juga menjadi modal sosial penting bagi Kota Bitung. Rendahnya tingkat konflik sosial menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kohesi sosial dan gotong royong, yang merupakan nilai-nilai penting dalam pembangunan komunitas yang resilient. Sebagai kota dengan karakteristik maritim yang kuat, keamanan juga berimplikasi pada aktivitas perikanan dan pelayaran yang menjadi penghidupan sebagian masyarakat Bitung.

Secara keseluruhan, data Indeks Rasa Aman Kota Bitung 2020-2024 menggambarkan kemajuan yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Nilai indeks 86,2 pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang cukup tinggi dalam konteks keamanan daerah. Tantangan ke depan terletak pada penguatan dimensi Kejahatan Konvensional untuk mengatasi kejahatan sehari-hari yang masih menjadi kekhawatiran masyarakat, serta mempertahankan capaian tinggi pada dimensi Konflik dan Kekerasan serta Kejahatan Transnasional. Dengan posisinya sebagai kota pelabuhan yang strategis, Bitung perlu terus memperkuat sistem keamanan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, kepolisian, masyarakat, dan sektor swasta.

E. Indeks Ketentraman dan Ketertiban:



Ketentraman dan ketertiban di Kota Bitung dapat diukur melalui tingkat kejahatan dan respons masyarakat terhadap pelanggaran hukum. Penegakan hukum yang tegas dan adil berkontribusi pada peningkatan indeks ini.

Dengan demikian, pembangunan hukum di Kota Bitung bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya.

Data Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Bitung menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, indeks ini meningkat dari 69,1 pada tahun 2020 menjadi 81,3 pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar 12,2 poin atau 17,7% dalam lima tahun. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam membangun ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Bitung.

Tabel. 94
**Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Bitung
2020-2024**

Dimensi	2020	2021	2022	2023	2024
Kepatuhan pada Peraturan	68,5	71,2	74,5	77,8	80,5
Ketaatan Berkendara	65,2	68,5	72,3	75,8	78,5
Keamanan Lingkungan	72,5	75,3	78,5	81,2	83,7
Penanganan Pelanggaran	70,2	73,5	76,8	79,5	82,3
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	69,1	72,1	75,5	78,6	81,3

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung dan Kepolisian Resort Kota Bitung.

Analisis per dimensi menunjukkan bahwa Keamanan Lingkungan konsisten menjadi dimensi dengan nilai tertinggi, meningkat dari 72,5 pada tahun 2020 menjadi 83,7 pada tahun 2024. Keunggulan pada dimensi ini mengindikasikan adanya kondisi lingkungan yang relatif aman dan tertib di Kota Bitung, termasuk dalam aspek ketertiban umum di ruang publik, lingkungan permukiman, dan kawasan komersial. Sebagai kota pelabuhan dengan aktivitas ekonomi yang dinamis, tingginya nilai Keamanan Lingkungan menjadi modal penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pelaku usaha.

Dimensi Penanganan Pelanggaran menempati posisi kedua dengan peningkatan dari 70,2 menjadi 82,3 selama lima tahun. Capaian ini mencerminkan efektivitas aparat ketentraman dan ketertiban, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),

dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran peraturan daerah dan ketertiban umum. Penanganan yang efektif terhadap pelanggaran menjadi faktor penting dalam membangun budaya kepatuhan pada peraturan di masyarakat.

Dimensi Kepatuhan pada Peraturan meningkat dari 68,5 menjadi 80,5, dengan total pertumbuhan sebesar 17,5%. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan yang berlaku, baik peraturan daerah maupun peraturan nasional yang diimplementasikan di tingkat lokal. Penguatan pada dimensi ini mencerminkan keberhasilan dalam membangun budaya taat hukum di kalangan masyarakat Kota Bitung.

Dimensi Ketaatan Berkendara, meskipun mengalami peningkatan signifikan dari 65,2 menjadi 78,5 (peningkatan 20,4%), masih menjadi dimensi dengan nilai terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku berkendara masih menjadi tantangan dalam ketertiban lalu lintas di Kota Bitung. Meskipun demikian, peningkatan yang cukup besar menunjukkan adanya kemajuan yang berarti dalam membangun budaya berlalu lintas yang tertib selama lima tahun terakhir.

Laju peningkatan tahunan Indeks Ketentraman dan Ketertiban relatif konsisten, berkisar antara 3,0-3,4 poin per tahun, dengan akselerasi tertinggi terjadi pada periode 2021-2022 (3,4 poin). Konsistensi peningkatan ini mengindikasikan adanya keberlanjutan dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di Kota Bitung, bukan sekadar hasil dari intervensi sporadis atau fluktuasi jangka pendek.

Dari perspektif pembangunan kota, peningkatan Indeks Ketentraman dan Ketertiban memiliki implikasi positif bagi kualitas hidup masyarakat dan iklim investasi di Kota Bitung. Ketentraman dan ketertiban merupakan prasyarat penting bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk aktivitas sosial-ekonomi dan pembangunan. Nilai indeks yang mencapai 81,3 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Bitung telah mencapai tingkat ketentraman dan ketertiban yang cukup baik.

Korelasi antara peningkatan Indeks Ketentraman dan Ketertiban dengan Indeks Rasa Aman (yang mencapai 86,2 pada

tahun 2024) menunjukkan adanya hubungan yang saling memperkuat antara kedua aspek ini. Ketertiban yang baik berkontribusi pada peningkatan keamanan, dan sebaliknya, rasa aman yang tinggi mendukung terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Keselarasan antara kedua indeks ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam pembangunan lingkungan kota yang aman dan tertib di Bitung.

Sebagai kota dengan karakteristik maritim yang kuat, ketentraman dan ketertiban di Kota Bitung memiliki konteks khusus yang terkait dengan aktivitas pelabuhan, industri perikanan, dan perdagangan. Kawasan pelabuhan dan zona industri memerlukan tingkat ketertiban yang tinggi untuk memastikan kelancaran operasional dan minimalisasi risiko. Peningkatan pada semua dimensi Indeks Ketentraman dan Ketertiban menunjukkan bahwa Kota Bitung berhasil mengelola tantangan ketertiban yang spesifik sesuai karakteristik kotanya.

Secara keseluruhan, data Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Bitung 2020-2024 menggambarkan kemajuan yang signifikan dalam membangun lingkungan kota yang tertib dan tentram. Nilai indeks 81,3 pada tahun 2024 menempatkan Kota Bitung pada posisi yang cukup baik dalam aspek ketentraman dan ketertiban. Tantangan ke depan terletak pada penguatan dimensi Ketaatan Berkendara untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas, serta mempertahankan dan meningkatkan capaian pada dimensi-dimensi lainnya. Dengan posisinya sebagai kota pelabuhan yang strategis, Bitung perlu terus membangun budaya ketertiban yang mendukung visinya sebagai kota pelabuhan internasional dan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

2.1.3.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di berbagai bidang, termasuk penguatan hubungan antarnegara yang konstruktif serta peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan seperti Bitung. Strategi ini melibatkan:

- Diplomasi Pertahanan:

- Mengatasi tantangan seperti sengketa perbatasan, ancaman maritim, dan rivalitas kekuatan besar melalui pendekatan diplomasi yang mengintegrasikan soft power dan hard power.
- Memanfaatkan diplomasi militer untuk mendukung posisi tawar Indonesia di tingkat internasional, termasuk melalui misi perdamaian dunia.
- o Geopolitik Progresif:
 - Indonesia mengedepankan Pancasila sebagai landasan untuk membangun solidaritas global dan tata dunia yang adil serta bebas dari kolonialisme.
 - Menggalang kekuatan regional melalui kerja sama multilateral seperti Gerakan Non-Blok dan Konferensi Asia-Afrika.
- o Indeks Daya Saing Daerah:

Indikator ini mencakup Infrastruktur fisik dan digital yang mendukung aktivitas ekonomi, Kualitas sumber daya manusia, Stabilitas keamanan dan kebijakan daerah yang kondusif untuk investasi.

Data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Bitung menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, IDSD meningkat dari 3,70 pada tahun 2020 menjadi 4,67 pada tahun 2024, dengan total pertumbuhan sebesar 0,97 poin atau 26,2% dalam lima tahun. Peningkatan ini mencerminkan penguatan fundamental ekonomi dan daya saing Kota Bitung dalam konteks regional maupun nasional.

Tabel. 95
**Indeks Daya Saing Daerah Kota Bitung
2020-2024**

Pilar	2020	2021	2022	2023	2024
Ekonomi Daerah	3,85	4,05	4,28	4,52	4,75
Infrastruktur	3,62	3,85	4,12	4,38	4,65
Sumber Daya Manusia	3,75	3,95	4,18	4,45	4,70
Kelembagaan	3,58	3,82	4,05	4,32	4,58
<u>Indeks Daya Saing Daerah</u>	<u>3,70</u>	<u>3,92</u>	<u>4,16</u>	<u>4,42</u>	<u>4,67</u>

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung (Diolah).

Analisis per pilar menunjukkan bahwa Ekonomi Daerah konsisten menjadi pilar dengan nilai tertinggi, meningkat dari 3,85 pada tahun 2020 menjadi 4,75 pada tahun 2024. Keunggulan pada pilar ini mengindikasikan adanya kekuatan ekonomi yang relatif baik di Kota Bitung, termasuk dalam aspek

produktivitas, nilai tambah ekonomi, dan kemampuan daya saing produk lokal. Sebagai kota pelabuhan dengan status Pelabuhan Internasional Bitung, keunggulan ekonomi ini mencerminkan peran strategis Bitung sebagai hub perdagangan dan logistik di kawasan timur Indonesia.

Pilar Sumber Daya Manusia menempati posisi kedua dengan peningkatan dari 3,75 menjadi 4,70 selama lima tahun. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di Kota Bitung, yang menjadi faktor kunci dalam mendukung daya saing daerah. Peningkatan pada pilar ini kemungkinan terkait dengan berbagai program pengembangan kapasitas, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta perbaikan layanan kesehatan yang berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia.

Pilar Infrastruktur meningkat dari 3,62 menjadi 4,65, dengan total pertumbuhan sebesar 28,5%. Peningkatan ini mencerminkan adanya pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur di Kota Bitung, termasuk infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, dan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi lainnya. Sebagai kota pelabuhan, pengembangan infrastruktur menjadi krusial untuk mendukung konektivitas dan efisiensi logistik yang menjadi keunggulan kompetitif Kota Bitung.

Pilar Kelembagaan, meskipun mengalami peningkatan signifikan dari 3,58 menjadi 4,58 (peningkatan 27,9%), masih menjadi pilar dengan nilai terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek kelembagaan, termasuk kualitas birokrasi, regulasi, dan tata kelola pemerintahan, masih menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing Kota Bitung. Meskipun demikian, peningkatan yang cukup besar menunjukkan adanya reformasi kelembagaan yang signifikan selama lima tahun terakhir.

Laju peningkatan tahunan IDSD relatif konsisten, berkisar antara 0,22-0,26 poin per tahun, dengan akselerasi tertinggi terjadi pada periode 2021-2022 (0,24 poin) dan 2022-2023 (0,26 poin). Konsistensi peningkatan ini mengindikasikan adanya keberlanjutan dalam upaya penguatan daya saing di Kota Bitung, bukan sekadar hasil dari intervensi sporadis atau fluktuasi jangka pendek.

Dari perspektif pembangunan ekonomi daerah, peningkatan IDSD Kota Bitung yang mencapai 4,67 pada tahun 2024 menempatkannya pada posisi yang cukup kompetitif dalam konteks daerah di Indonesia. Sebagai kota dengan karakteristik maritim yang kuat, penguatan daya saing Bitung memiliki implikasi strategis bagi pengembangan ekonomi di kawasan timur Indonesia, terutama dalam aspek konektivitas dan perdagangan antar pulau dan internasional.

Keunggulan pada pilar Ekonomi Daerah dan peningkatan signifikan pada pilar Infrastruktur menunjukkan adanya sinergi antara penguatan basis ekonomi lokal dan pengembangan infrastruktur pendukung. Hal ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang cukup komprehensif di Kota Bitung, yang memperhatikan baik aspek hard infrastructure maupun soft infrastructure dalam meningkatkan daya saing daerah.

Sebagai kota dengan potensi pengembangan sebagai hub logistik internasional dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penguatan daya saing Kota Bitung memiliki signifikansi yang lebih luas dalam konteks pengembangan kawasan timur Indonesia. Peningkatan nilai pada semua pilar IDSD menunjukkan bahwa Bitung bergerak ke arah yang tepat dalam membangun fondasi untuk merealisasikan potensi strategisnya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa.

Secara keseluruhan, data IDSD Kota Bitung 2020-2024 menggambarkan kemajuan yang signifikan dalam penguatan daya saing daerah. Nilai IDSD 4,67 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Bitung telah mencapai tingkat daya saing yang cukup baik. Tantangan ke depan terletak pada penguatan pilar Kelembagaan untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan, serta mempertahankan dan meningkatkan capaian pada pilar-pilar lainnya, terutama dalam konteks persaingan global yang semakin ketat.

Bitung sebagai kota strategis dapat memanfaatkan posisi geografisnya untuk meningkatkan daya saing melalui diplomasi ekonomi, pengembangan pelabuhan internasional, serta kerja sama regional.

2.1.3.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah.



Pemerintah sebagai aparat pelayanan masyarakat wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat berujud pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik dicerminkan dari tercapainya indikator-indikator pada urusan wajib dan urusan pilihan sebagai bentuk profesionalisme.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan:

1. Pendidikan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pendidikan Pemerintah Kota Bitung tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 96
**Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan
Tahun 2019-2023**

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan Anak Usia Dini					
	a. Jumlah siswa TK /RA	2,634	2,665	2,820	3,648	3,883
	b. APK PAUD	94,47	98,47	85,81	35,65	35,62
2	Pendidikan Dasar					
	a. Angka Partisipasi					
	- APK SD/MI/Paket A	105,08	111,09	102,58	95,91	90,85
	- APM SD/MI/Paket A	94,64	95,06	92,00	92,40	88,12
	- APK SMP/MTs/ Paket B	105,49	109,06	86,00	90,29	90,00
	- APM SMP/MTs/ Paket B	94,98	94,98	76,00	84,54	88,00
	b. Rasio guru : murid					
	- SD	1:94,27	1:87,9	1:31,82	1:33,75	1:39,50
	- SMP	1:49,23	1:49,11	1:44,65	1:46,6	1:44,65
	c. Rasio guru (PNS) : murid					
	- SD	1:42,17	3:16,7	1:29,08	1:28,34	1:51,45

	- SMP	1:25,17	3:95,2	1:25,34	1:26,25	1:27,53
	d. Rasio murid per kelas rata-rata					
	- SD	1:27,07	1:27,07	1:27,00	1:26,00	1:21,75
	- SMP	1:26,20	1:26,20	1:29,86	1:29,86	1:29,40
	- SDN	1:27,21	1:27,21	1:27,86	1:26,00	1:21,75
	- SMPN	1:31,42	1:31,42	1:29,86	1:29,86	1:29,90
3	Fasilitas Pendidikan					
	Sekolah SD dalam kondisi baik	94%	94,07%	81,00%	83,00%	85,00%
	Sekolah SMP dalam kondisi baik	90%	91%	85,00%	87,00%	90,00%
4	Angka putus sekolah					
	a. SD/MI	22	21	183	75	70
	b. SMP/MTs	23	21	152	62	55
5	Angka kelulusan					
	a. SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
	b. SMP/MTS	99,96	99,42%	99,44%	100%	100%
6	Angka melanjutkan					
	a. dari SD/MI ke SMP/MTs	3,541	101,16%	10,91%	100,79%	100%
7	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	86,56	66,29	614 772	630 764	600 747

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pada aspek pendidikan anak usia dini, jumlah siswa TK/RA di Kota Bitung mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan Angka Partisipasi Kasar PAUD yang meningkat setiap tahunnya

2. Pendidikan Dasar

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Capaian indikator kinerja angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A Kota Bitung tahun 2019 – 2023 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2019 APK SD/MI/Paket A di Kota Bitung sebesar 105,08% dan meningkat menjadi 111,09% di tahun 2020. Pada tahun 2021 APK SD/MI/Paket A menurun menjadi 102,58% dan kembali menurun menjadi 95,91% dan 90,85% di tahun 2022 dan 2023. APK SD/MI/Paket A Kota Bitung tahun 2019 sampai dengan 2021 berada di atas angka 100% yang menunjukkan bahwa banyak siswa dari luar Kota Bitung yang menjadi peserta didik di Kota Bitung,

APK SMP/MTs/Paket B Kota Bitung tahun 2019-2023 juga mengalami kondisi yang fluktuatif. Tahun 2019 APK SMP/MTs/Paket B di Kota Bitung sebesar 105,49% kemudian

meningkat menjadi 109,06% di tahun 2020. Pada tahun 2021, APK SMP/MTs/Paket B Kota Bitung menurun menjadi 86,00% dan kembali naik menjadi 90,29% pada tahun 2022 dan 90,00% pada tahun 2023.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada usia yang sama. Capaian indikator kinerja APM SD/MI/Paket A di Kota Bitung tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif sebagaimana capaian APK pada periode yang sama. APM SD/MI/Paket A Kota Bitung tahun 2019 mencapai angka 94,64% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 95,06%. Selanjutnya di tahun 2021 APM SD/MI/Paket A mengalami penurunan yaitu menjadi 92,00% dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 92,40% di tahun 2022. APM SD/MI/Paket A Kota Bitung mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu 88,12%.

Capaian indikator kinerja APM SMP/MTs/Paket B di Kota Bitung tahun 2019-2023 juga mengalami kondisi yang fluktuatif. Tahun 2019 dan 2020 APM SMP/MTs/Paket B di Kota Bitung mencapai angka 94,98% untuk kemudian mengalami penurunan ditahun 2021 yaitu 76%. Pada tahun 2022 dan 2023, APM SMP/MTs/Paket B Kota Bitung kembali meningkat menjadi masing-masing 84,54% dan 88,00%.

Rasio guru murid untuk SD dan SMP di Kota Bitung menunjukkan peningkatan. Untuk SD jika di tahun 2019, rasio guru-murid masih pada angka 1:94,27 maka di tahun 2023, rasio guru murid sudah berada di angka 1:39,50. Pada tingkat SMP, Rasio guru-murid di tahun 2019 yaitu 1:49,23 dan pada tahun 2023 rasio menjadi 1:44,65.

3. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas sekolah SD dan SMP di Kota Bitung sebagian besar tergolong masih dalam kondisi baik. Sampai dengan tahun 2023 Fasilitas SD dalam kondisi baik di Kota Bitung sebanyak 85%, sementara untuk tingkat SMP, sekolah dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2023 sebanyak 90%. Baiknya kondisi fasilitas sekolah

akan turut pula mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bitung.

4. Angka Putus Sekolah.

Angka putus sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Kota Bitung sangat fluktuatif. Tahun 2019 angka putus sekolah SD sebesar 22 sementara tingkat SMP sebesar 23. Di tahun 2020, angka putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs masing-masing sebesar 21. Angka putus sekolah di Kota Bitung pada tahun 2021 sebesar 183 untuk SD/MI dan 152 untuk SMP/MTs. Di tahun 2022 dan 2023 angka putus sekolah tingkat SD/MI masing-masing sebesar 75 dan 70, sementara untuk tingkat SMP/MTs masing-masing sebesar 70 dan 55.

5. Angka Kelulusan.

Angka kelulusan SD/MI di Kota Bitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebesar 100%. Adapun Angka Kelulusan SMP/MTs tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar 99%, sementara mulai tahun 2022 sampai dengan 2023 Angka Kelulusan SMP/MTs Kota Bitung mencatat angka 100%. Angka Kelulusan yang mencapai angka 100% ini menunjukkan baiknya kualitas pendidikan di Kota Bitung dan harus dipertahankan kedepannya.

2. Kesehatan

Perkembangan indikator kinerja aspek pelayanan umum pada bidang urusan kesehatan Pemerintah Kota Bitung tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 97
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Posyandu per satuan Balita	N/A	N/A	N/A	1,78	N/A
2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu per satuan penduduk	N/A	N/A	N/A	4,3	N/A
3	Rasio RS per satuan penduduk	0,013	0,004	N/A	0,011	0,011
4	Rasio Dokter per satuan penduduk	71,63	22,77	N/A	46	57,58
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	N/A	N/A	N/A	103	143

6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	98,00	N/A	N/A	82,43	86,5
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	91	N/A	N/A	73,4	79,3
8	Cakupan Kelurahan UCI	97,00	97,1	N/A	63,8	82,6
9	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	0	N/A	0	100
10	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	99,55	99,39	N/A	93%	95%
11	Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	N/A	N/A	99,9%	100%
12	cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	92,05%	N/A	N/A	100%	97,05%
13	cakupan kunjungan bayi	96,65	N/A	N/A	84,7	75,39
14	cakupan puskesmas	N/A	N/A	N/A	69,6	68,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bitung

Dari tabel di atas, beberapa indikator kesehatan yang menjadi tolak ukur diantaranya adalah:

1. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* yang menurun persentasenya, dari 97,00% di tahun 2019 menjadi 82,6% di tahun 2023.
2. Penemuan dan penanganan penderita TBC dan DBD sudah sangat baik dengan angka persentase masing-masing mencapai 99,9% dan 100%.
3. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 97,05% pada tahun 2023.

Pandemi Covid-19 menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kewaspadaan atas kondisi kegawatdaruratan kesehatan melalui Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan (health security & resilience), menjamin akses supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif.

Perencanaan dan penganggaran pada Major Project Reformasi Sistem Kesehatan difokuskan pada delapan area reformasi, yaitu pendidikan dan

penempatan tenaga kesehatan, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, peningkatan RS dan pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK), kemandirian farmasi dan alat kesehatan, penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, inovasi pembiayaan kesehatan, dan optimalisasi teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

- Infrastruktur Bina Marga.

a. Jalan

Capaian indikator kinerja presentase jalan dalam kondisi baik selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2019 s/d 2023 mengalami perkembangan yang cukup baik hal itu dapat dilihat pada tabel diatas. Pada tahun 2019 capaian proposi jalan dalam kondisi baik sebesar 82,75%. Capaian 2020 mengalami peningkatan dibandingkan 2019 sebesar 85,23%. Tahun 2021 capaian presentase jalan dalam kondisi baik sebesar 85,85%. Tahun 2022 capaian presentase jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 85,93%. Pada tahun terakhir RPJMD presentase jalan masih dalam kondisi baik walaupun turun pada angka 85,25%.

b. Jembatan.

Capaian indikator kinerja jumlah jembatan dalam kondisi baik selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2019 s/d 2023 mengalami perkembangan yang baik, dimana sampai tahun 2019 jumlah jembatan 3 unit dan tahun 2020 mengalami penambahan sebesar 1 unit jembatan yang berada di Kelurahan Duasudara dan sampai dengan tahun 2023 jumlah jembatan sebanyak 4unit dengan kondisi baik.

- Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi.

Perkembangan infrastruktur sumber daya air dan irigasi meliputi:

a. Jaringan Irigasi.

Pada tahun 2019 capaian indikator irigasi dalam kondisi baik Kota Bitung sebesar 210. Pada tahun 2020 capaian indikator irigasi dalam kondisi baik Kota Bitung mengalami peningkatan sebesar 228. Pada tahun 2021 capaian indikator irigasi dalam kondisi baik Kota Bitung sebesar 238. Capaian pada tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Pada

tahun 2022 capaian indikator irigasi dalam kondisi baik Kota Bitung sebesar 239. Artinya bahwa capaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2023 capaian indikator irigasi dalam kondisi baik Kota Bitung sebesar 241. Kondisi ini ditopang oleh kinerja yang baik dari Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Bitung.

b. Drainase.

Dapat diketahui drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat persentasenya mengalami peningkatan. Tahun 2019 persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tersumbat sebesar 38%. Tahun 2020 persentase mengalami kenaikan pada angka 46%. Tahun 2021 persentase sebesar 62%. tahun 2022 persentase sebesar 65% dan tahun 2023 persentase mengalami peningkatan sebesar 73%. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bitung dalam hal ini telah mengambil peran dalam rehabilitasi dan perbaikan drainase outlet untuk mengatasi permasalahan genangan air walaupun itu belum signifikan. Sedangkan drainase sekunder dan primer menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bitung. Telah dilakukan pembersihan dan perbaikan-perbaikan untuk mengatasi permasalahan drainase dikawasan pemukiman yang sering mengalami sumbatan karena kerusakan pada drainase dan tumpukan sedimen tanah dan pasir pada saluran drainase.

- Infrastruktur Cipta Karya.

- ❖ Sanitasi.

Salah satu yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah rumah berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi sebagai berikut: 1) fasilitas air bersih, 2) pembuangan air besar/tinja, 3) pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah.

Perkembangan cakupan persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Bitung pada tahun 2019 sebesar 94,72%. Pada tahun 2020 cakupan persentase rumah tinggal bersanitasi mengalami penurunan secara signifikan sebesar 17,77% pada angka 76,95%, hal ini



disebabkan karena tingkat kebutuhan hunian baru pada kawasan kumuh menjadi bertambah sementara akses sanitasi untuk hunian baru tersebut belum memadai. Pada tahun 2022 cakupan persentase rumah tinggal bersanitasi mulai mengalami perkembangan pada angka 79,64%, Pemerintah Kota Bitung telah menyediakan anggaran untuk membantu penambahan dan perbaikan kualitas sanitasi hunian baru pada kawasan kumuh serta kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi mengalami peningkatan. Ditahun 2023 cakupan tersebut meningkat menjadi 81,35% rumah tinggal bersanitasi layak.

❖ Air Limbah

Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, menyiapkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) skala komunal dan permukiman yang terdiri dari pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Jaringan Perpipaan.

Pembangunan SPALD skala komunal dan permukiman dinilai menjadi solusi untuk menjawab persoalan pencemaran air di tengah pertumbuhan penduduk di Kota Bitung. keberadaan IPAL dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah, perbaikan kualitas lingkungan pada air permukaan dan air tanah serta menjadi sumber alternatif air baku sebagai sumber air bersih di lingkungan masyarakat. Sistem itu nantinya terdiri dari pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan jaringan perpipaan.

Tabel 98
Akses Sanitasi Layak Kota Bitung Tahun 2022-2023

No	Kecamatan	Akses Layak							
		Tahun 2022				Tahun 2023			
		SPALD Setempat		SPALD Terpusat		SPALD Setempat		SPALD Terpusat	
		Skala Individual	Skala Komunal	IPALD Permukiman	IPALD Kawasan Tertentu	Skala Individual	Skala Komunal	IPALD Permukiman	IPALD Kawasan Tertentu
1	Madidir	5853	210	250	288	5853	210	250	288
2	Matuari	8548	125	660	384	8675	125	660	384
3	Girian	6373	404	205	46	6433	404	205	46
4	Lembah Selatan	1433	329	30	0	1433	329	30	0

5	Lembbeh Utara	959	298	150	0	959	298	150	0
6	Aertembaga	2809	935	200	0	2809	935	200	0
7	Maesa	6354	1031	450	0	6354	1031	450	0
8	Ranowulu	4769	177	70	0	4769	177	270	0
Total		36688	3509	2015	718	37285	3509	2215	718
		42804				43727			

Sumber: Dinas PUTR Kota Bitung.

Akses Sanitasi Layak Kota Bitung pada Tahun 2022-2023 mengalami peningkatan. Sebagaimana terlihat pada tabel 2.25, terjadi peningkatan terhadap akses layak sanitasi dari 42.804 menjadi 43.727 rumah tangga.

c. Sarana Air Bersih.

Capaian Jumlah rumah tangga pengguna air bersih / jumlah seluruh rumah tangga x 100% pada tahun 2019 sebesar 72,25%. Pada tahun 2020 Jumlah rumah tangga pengguna air bersih / jumlah seluruh rumah tangga x 100% mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 22,18% pada angka 94,43%, hal ini disebabkan rumah tangga baru pengguna air bersih bertambah dibarengi dengan penambahan fasilitas sarana dan prasarana air bersih. Tahun 2021 Jumlah rumah tangga pengguna air bersih / jumlah seluruh rumah tangga x 100% sebesar 96,20% mengalami perkembangan hal ini disebabkan karena Pemerintah telah menyediakan akses fasilitas air bersih. Pada tahun 2022 capaian jumlah rumah tangga pengguna air bersih / jumlah seluruh rumah tangga x 100% sebesar 98,25%. Pada tahun 2023 Jumlah rumah tangga pengguna air bersih / jumlah seluruh rumah tangga x 100% sebesar 98,60%, mengalami peningkatan, hal ini disebabkan Pemerintah Kota Bitung telah menyediakan akses fasilitas air bersih secara masif.

b. Penataan Ruang.

Cakupan pencapaian indikator kinerja penataan ruang di Kota Bitung, meliputi:

a. Evaluasi Terhadap Rencana Tata Ruang, Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Perkembangan Kota Bitung yang pesat dan dinamis disemua aspek berdampak pada penataan kawasan tata ruang, hal ini membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang



yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rincinya. Kota Bitung telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 11 tahun 2013 tentang RTRW Kota Bitung tahun 2013-2033 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dalam rangka peningkatan kualitas Perencanaan Ruang, dibutuhkan pelaksanaan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya serta meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Bitung. untuk peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, telah diggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS.

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang kota peningkatannya dapat diindikasikan dengan semakin berkurangnya jumlah persil yang melanggar izin di tahun 2019. Meski demikian, sampai dengan pertengahan tahun 2020, dengan meningkatnya jumlah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan, maka usaha penertiban yang lebih baik telah dilaksanakan, dibuktikan dengan adanya 32 persil yang dikenakan sanksi administrasi. Karena bagaimanapun, seiring dengan penerbitan izin tersebut harus diikuti oleh pengawasan agar sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota.

Tabel 99
**Rekapitulasi Pengurusan SKRK Kota Bitung
Tahun 2023**

No	Peruntukan	Luas Tanah	
		M ²	Ha
1	Perumahan dan Pemukiman	529,351	52.9351
2	Industri	142,961	1.42961
3	Pariwisata	112,343	11.2343
4	Perdagangan dan Jasa	49,019	4.9019
5	Pertanian dan Perkebunan	132,872	13.2872

6	Pelabuhan	81	0.0081
7	Kawasan Ekonomi Khusus	162,005	16.2005
8	Pertambangan	14,211	1.4211
9	Sempadan Pantai	7,320	0,7320
10	Cagar Alam	771	0.0771
11	Rencana Jalan 46	153	0.0153
12	Total	1,151,134	115.1134

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bitung.

b. Pemenuhan Terhadap Standar Pelayanan Perkotaan.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemenuhan pelayanan perkotaan bagi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah diperlukan Standar Pelayanan Perkotaan, terutama bagi Pemerintah Kota suatu hal yang mutlak harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan agar lebih mampu memberikan layanan prima bagi pengguna layanan.

Oleh karena itu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah sudah harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), maupun sudah harus terkoneksi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Hal ini tidak saja, agar tercipta harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan tetapi lebih memberi jaminan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup menjadi alternatif penyelesaian terhadap permasalahan pembangunan selama ini.

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, salah satu butir tujuan adalah keinginan untuk Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan dengan sasaran diantaranya: 1) Menjamin akses perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh; 2) Mempromosikan dan menjaga warisan budaya; dan 3) Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau oleh semua. Hal ini sejalan

dengan apa yang sudah dirintis sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Perkotaan, dimana Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan klasik yang selalu dialami Pemerintah Kota Bitung adalah permasalahan perumahan dan pemukiman, hal ini diakibatkan terjadi peningkatan urbanisasi sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian dan pemukiman kumuh perkotaan. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan kawasan dan pemukiman suatu kota, diantaranya kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bitung dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung salah satu pencapaian target RPJMN IV 2021-2026.

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bitung dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung salah satu pencapaian target RPJMN 2025-2029.

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Luas Kawasan Permukiman kumuh	122,53 Ha	121,93 Ha	48,62 Ha	22,0 Ha	16,84 Ha
2.	Jumlah rumah layak huni / Jumlah seluruh rumah x 100%	73%	79%	80,39%	80,71%	80,51%
3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	94,72%	76,95%	79,64%	80,45%	81,46%
4.	Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk	15/1000	15/1000	50/1000	49/1000	49/1000
5.	Jumlah lampu jalan dalam kondisi baik	1.438	1.642	2.648	3.241	3.387

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung.

a. Lingkungan Pemukiman Kumuh.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bitung dalam penanganan permukiman kumuh melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman.

Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Bitung memperlihatkan kinerja yang baik. Di tahun 2023 kawasan permukiman kumuh tinggal sebesar 16,84 Ha, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 22 Ha serta di tahun 2021 sebesar 48,63 Ha.

b. Rumah Layak Huni.

Capaian indikator rasio rumah layak huni di Kota Bitung pada tahun 2020 sebesar 32.438/37.718. Pada tahun 2021 Capaian indikator rasio rumah layak huni sebesar 42.085/53.203, mengalami penurunan rasio dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Capaian indikator rasio rumah layak huni pada tahun 2022 sebesar 42.770/53.203 telah mengalami peningkatan. Tahun 2023 Capaian indikator rasio rumah layak huni sebesar 42.940/53.203.

Penurunan rasio rumah layak huni tahun 2020 ke tahun 2021 disebabkan pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan yang secara drastis, urbanisasi dari daerah lain juga menjadi penyumbang pertumbuhan penduduk Kota Bitung, hal ini berdampak pada tingginya kebutuhan rumah tinggal.

Terkait dengan upaya peningkatan/perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada kawasan prioritas.

c. Prasarana Utilitas Pemukiman.

Capaian indikator prasarana utilitas pemukiman umum dari tahun 2019 s/d 2023 dapat dicapai dengan baik, Pemerintah Kota Bitung berusaha menyediakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait prasarana, sarana utilitas umum yang terdiri dari:

1. Jalan

Jalan berupa jalan lingkungan dengan lebar jalan 3 - 4 m

2. Ruang terbuka non hijau

Ruang terbuka non-hijau berfungsi sebagai tempat berkumpul warga perumahan dan sebagai tempat evakuasi

3. Sanitasi

Sanitasi berupa tempat pengelolaan sampah (*reuse, reduce, recycle*) TPS3R

4. Jaringan air minum berupa penyediaan Jaringan Air Minum, baik yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum atau bersumber dari air tanah (air tanah dangkal maupun air tanah dalam), yang dilakukan secara langsung atau komunal dengan penampungan, (penampungan air di bawah tanah atau penampungan air di atas tanah).

5. Rumah Ibadah

6. Jaringan Listrik

7. Penerangan Jalan Umum

Penerangan jalan umum berupa pemasangan penerangan jalan umum didepan rumah pada lingkungan perumahan, dengan menggunakan tenaga surya atau sambungan PLN.

d. Penataan Lampu Jalan Kota.

Capaian indikator jumlah lampu jalan pada tahun 2019 sebesar 1.438 titik. Tahun 2020 capaian indikator jumlah lampu jalan menjadi 1.642 titik. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah titik sebesar 2.648. Pada tahun 2022 capaian indikator jumlah lampu jalan mengalami peningkatan sebesar 3.241 titik. Capaian indikator jumlah lampu jalan pada tahun 2022 sebesar 3.387 titik.

e. Tempat Pemakaman Umum.

Capaian indikator Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk tahun 2022 sebesar 15/1000. Pada tahun 2023 Capaian indikator Rasio



TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk tetap sama ketersediaan TPU sebesar 15/1000.

f. Produksi Air Minum.

Produksi air minum di Kota Bitung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2021 air minum yang di produksi oleh PERUMDA. AM sebanyak 6.654.197,52 m³ dan naik menjadi 7.723.953,54 m³ di Tahun 2022, serta naik menjadi 8.275.954,32 m³ di Tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 101

Produksi Air Minum di Kota Bitung Tahun 2021-2023

Tahun	Produksi (m ³)
2021	6.654.197,52
2022	7.723.953,54
2023	8.275.954,32

Sumber : Perumda AM Kota Bitung

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Kota Bitung tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 102

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	71,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota	26,71%	25,37%	25,39%	25,76%	38,02%
4.	Tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Jumlah Polisi Pamong Praja	302	361	332	350	348

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kinerja dalam aspek pelayanan umum sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) dari tahun 2019 sudah mencapai 71,44%. Sementara tahun 2020, petugas linmas harus ditetapkan melalui SK Walikota sebagaimana amanat Permendagri 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat sehingga tahun 2020 Satpol PP Kota Bitung terlebih dahulu melakukan calon petugas Linmas di Kelurahan.

Selanjutnya, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 telah mencapai 100%, yang berarti setiap pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk Persentase Penegakan Perda yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung juga telah mencapai 100% sejak tahun 2019 sampai dengan 2023. Perbaikan persentase penegakan Perda dibarengi dengan peningkatan jumlah Polisi Pamong Praja Kota Bitung yang meningkat dari 302 orang di tahun 2019 menjadi 348 orang di tahun 2023.

Pada indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran meningkat dari 26,71% di tahun 2019 menjadi 38,02% ditahun 2023. Demikian pula, indikator tingkat tanggap waktu (*response rate time*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran yang telah mencapai 100% sejak tahun 2019, artinya setiap kejadian kebakaran, petugas pemadam kebakaran selalu merespon dengan cepat di bawah 15 menit.

Tabel 103
**Rekapan Data Kebakaran di Kota Bitung
Tahun 2021-2023**

TAHUN	RUMAH TINGGAL	BANGUNAN USAHA	ALANG- ALANG/SAMPAH	LAIN- LAIN
2021	18	12	24	3
2022	13	6	7	6
2023	18	12	16	6
Total	52	30	47	15



Sumber: Dinas Kebakaran Kota Bitung

6. Sosial

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Sosial Pemerintah Kota Bitung tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 104
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	5	6	6	6	6
2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	40,62	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	85,60%	40,62%	91,83%	91,76%	N/A

Sumber: Dinas Sosial Kota Bitung.

Dari tabel perkembangan di atas dapat dilihat bahwa sarana sosial di kota Bitung seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi sudah cukup memadai. Kemudian, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 mencapai 91,76%. Hal ini menunjukkan bahwa penyandang masalah sosial mendapatkan perhatian dan prioritas dari pemerintah kota.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.

1. Tenaga Kerja.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

Jumlah pekerja di Kota Bitung tahun 2021 sebanyak 158.154 orang yang terdiri dari pekerja perempuan 80.894 orang dan pekerja laki-laki 77.260 orang. Dimana terlihat jelas bahwa terdapat lebih banyak pekerja

perempuan daripada pekerja laki-laki. Hal yang sama terjadi di tahun 2022. Terlihat bahwa jumlah pekerja perempuan mencapai 82.554 lebih banyak dari pekerja laki-laki yang hanya berjumlah 78.647 orang. Akan tetapi di tahun 2023 terjadi perubahan, dimana jumlah pekerja laki-laki lebih banyak dari pekerja perempuan yaitu 84. 326 orang untuk pekerja laki-laki, dan 81.008 orang pekerja perempuan. Selebihnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 105
**Jumlah Pekerja di Kota Bitung
Tahun 2021-2023**

No	Uraian	2021	2022	2023
1.	Pekerja Perempuan	32.604	33.704	32.264
2.	Pekerja Laki-laki	61.483	62.693	73.027
Total		94.087	96.397	105.291

Sumber: Kota Bitung Dalam Angka 2023 dan 2024.

a. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3), dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja.

Pada tahun 2021 perusahaan yang menerapkan sistem K3 terdapat 7 perusahaan dari 4.369 perusahaan yang ada di Kota Bitung, yaitu sebesar 0,016 persen. Pada tahun 2022 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 7 perusahaan atau 0,34 persen dari jumlah perusahaan. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 10 perusahaan atau 0,48 persen dari jumlah perusahaan masih terlalu minim perusahaan yang menerapkan K3 di Kota Bitung. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 106
**Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja
Tahun 2021-2023**

No	Uraian	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	7	7	10
2.	Jumlah Perusahaan	4,369	2,048	2,048
3.	Presentase Perusahaan yang menerapkan K3 (persen)	0,016	0,34	0,48

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung.



b. Pencari Kerja yang terdaftar.

Dari tahun ke tahun jumlah pencari kerja di Kota Bitung yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja mengalami peningkatan tahun 2021 sebanyak 1.224 orang yang terdiri dari 1.030 laki-laki dan 194 perempuan, meningkat menjadi 2.079 orang ditahun 2022 dengan pencari kerja laki-laki sebanyak 1.500 orang dan perempuan sebanyak 579 orang, dan bertambah lagi di tahun 2023 menjadi 2.382 orang dengan 1.749 laki-laki dan 633 perempuan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 107
Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung Tahun 2020-2024

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2020	407	138	546
2021	1.030	194	1.224
2022	1.500	579	2.079
2023	1.749	633	2.382
2024	1.301	446	1747

Sumber: Bitung Dalam Angka 2025.

Jumlah angkatan kerja yang terlatih di Balai Latihan Kerja (BLK) pada tahun 2023 sebanyak 304 orang yang terbagi dalam beberapa jenis ketrampilan. Jenis ketrampilan yang paling banyak diminati yaitu computer, Las dan admin perkantoran sebanyak 48 orang, kemudianotomotif, Listrik, pariwisata dan garmen masing-masing 32 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 108
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Bitung, 2024

Status Pekerjaan Utara	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	15.952	11.142	27.094
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	4.617	4.239	8.856

Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2.019	820	2.839
Buruh/karyawan/pegawai	41.596	21.621	63.217
Pekerja bebas	3.165	825	3.990
Pekerja keluarga/tak dibayar	2.486	4.294	6.780
Total	69.835	42.941	112.776

Sumber: Bitung Dalam Angka 2025.

2. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Perkembangan kinerja aspek pelayanan umum urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemerintah Kota Bitung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 109

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2,86	8,6	2,05	N/A	N/A
2.	Jumlah KDRT	N/A	3	22	26	49
3.	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK/Tk. Partisipasi Angkatan Kerja	69,20	78,97	67,45	17,46	N/A

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perempuan yang berpartisipasi di lembaga pemerintah di Kota Bitung secara persentase masih cukup kecil. Sementara partisipasi angkatan kerja perempuan belum terlalu signifikan, bahkan cenderung turun di tahun 2021. Di sisi lain jumlah kekerasan dalam rumah tangga cenderung meningkat setiap tahunnya. Data-data di atas menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam urusan ini harus terus meningkatkan peran dan kinerjanya.

3. **Pangan.**

Ketahanan pangan merupakan aspek krusial dalam



pembangunan Kota Bitung yang tercermin dalam dua indikator utama, yaitu regulasi ketahanan pangan dan ketersediaan pangan pokok alternatif. Selama periode 2020-2024, Pemerintah Kota Bitung belum memiliki regulasi khusus yang mengatur ketahanan pangan, menunjukkan kesenjangan dalam kerangka hukum yang seharusnya menjadi landasan implementasi program ketahanan pangan. Ketiadaan regulasi ini berpotensi menghambat koordinasi lintas sektor, alokasi anggaran, dan implementasi program secara terarah, sehingga upaya peningkatan ketahanan pangan tidak terkoordinasi dengan baik dan sulit mencapai target yang diharapkan.

Tabel 110
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Regulasi Ketahanan Pangan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2.	Ketersediaan Pangan Padi Jagung Ubi kayu dan Ubi jalar	185.327,8	184.960	120,33	186.825	190.500

Sumber: Dinas ketahanan pangan dan pertanian Kota Bitung

Ketersediaan pangan berupa padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar di Kota Bitung menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, ketersediaan pangan mencapai 185.327,8 ton, menunjukkan angka yang sangat tinggi. Tahun 2021 terjadi sedikit penurunan menjadi 184.960 ton, namun masih pada level yang relatif tinggi. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2022 dengan ketersediaan pangan hanya mencapai 120,33 ton, mengindikasikan adanya tantangan serius dalam produksi atau ketersediaan pangan. Namun, situasi membaik pada tahun 2023 dengan peningkatan signifikan menjadi 186.825 ton, mencapai level tertinggi dalam periode lima tahun tersebut. Tren positif berlanjut pada tahun 2024 dengan ketersediaan pangan mencapai 190.500 ton, mencerminkan efektivitas program intensifikasi pertanian yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Fluktuasi data ini mencerminkan dinamika kompleks dalam sektor pertanian Kota Bitung. Penurunan tajam pada tahun 2022 disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi cuaca ekstrem,

serangan hama, atau perubahan pola tanam. Namun, peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan resiliensi sektor pertanian dan keberhasilan program pemulihan yang diimplementasikan. Meskipun tren positif dalam ketersediaan pangan terlihat dalam dua tahun terakhir, ketiadaan regulasi ketahanan pangan tetap menjadi kelemahan mendasar dalam sistem ketahanan pangan Kota Bitung. Tanpa landasan hukum yang kuat, keberlangsungan program dan konsistensi kebijakan menjadi rentan terhadap perubahan prioritas atau kepemimpinan.

Peningkatan ketersediaan pangan pada tahun 2023-2024 menunjukkan potensi besar Kota Bitung dalam produksi tanaman pangan, yang dapat menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dan berkontribusi pada ketahanan pangan regional. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan pendekatan sistematis yang didukung oleh regulasi komprehensif. Ke depan, Pemerintah Kota Bitung perlu memprioritaskan penyusunan regulasi ketahanan pangan yang mencakup aspek produksi, distribusi, dan akses terhadap pangan, serta mengintegrasikan adaptasi terhadap perubahan iklim mengingat fluktuasi produksi yang terjadi. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan didukung regulasi yang kuat, Kota Bitung dapat memperkuat ketahanan pangannya dan berkontribusi pada terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

4. Pertanian.

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Bitung, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Bitung yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel 111
Jumlah Aset Pemerintah Kota Bitung
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah asset Pemerintah Kota Bitung yang telah bersertifikat	113	146	172	218	249
2	Jumlah asset Pemerintah Kota Bitung yang belum bersertifikat	87	87	87	87	90
3	Total asset pemerintah (Rp)	118.945.437.376	142.474.474.823	173.695.694.914	189.291.539.979	224.095.158.010

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bitung.

Jumlah Aset Pemerintah Kota Bitung dari tahun 2019 sampai tahun 2023 meningkat jumlahnya, dari 113 di tahun 2019, kemudian 146, 172, 218, dan 249 ditahun 2023. Jumlah asset Pemerintah Kota Bitung yang sudah bersertifikat sebanyak 87 aset dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dan menjadi 90 aset ditahun 2023 dengan total aset senilai Rp 224.095.158.010. di tahun 2023.

Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Bitung sampai tahun 2023 menurut jenis hak atas tanah yaitu hak milik 2.313 sertifikat, hak guna bangunan 604 sertifikat, hak pakai ada 35 sertifikat, dan 10 wakaf . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 112
Jumlah Sertifikat yang diterbitkan menurut jenis hak atas tanah
di Kota Bitung Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1.	Hak Milik	2.740	3.042	1.564	2 313
2.	Hak Guna Bangunan	303	862	251	604
3.	Hak Guna Usaha				-
4.	Hak Pakai	19	16	36	35
5.	Wakaf	1	3	2	10
6.	Hak Pengelolaan	1			
Total		3.064	3.923	1.853	2.962

Sumber : Kota Bitung Dalam Angka 2024.

5. Lingkungan Hidup.

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Bitung, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air,

sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Volume produksi sampah Kota Bitung didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Bitung tahun 2019 sebanyak 55.955,52 ton, tahun 2020 turun menjadi 49.304,35 ton, tahun 2021 meningkat lagi menjadi 57.874,58 ton, tahun 2022 sebanyak 58,055,22 ton sama dengan tahun 2023. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 113
Volume Produksi Sampah dan banyaknya sampah terangkut Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Produksi Sampah (ton)	55.955,52	49.304,35	57.874,58	58.055,22	58.055,22
2.	Banyaknya sampah terangkut (ton)	41.975,00	26.040,16	41.281,50	41.245,00	41.245,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung.

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan lingkungan hidup Pemerintah Daerah Kota Bitung tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 114
Indikator dalam Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase penanganan sampah (%)	75.01	52.82	71.33	71.04	71.04
2.	Persentase tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	-	0,0013	0,0013	0,0017	0,0017
3.	Jumlah Perusahaan yang memiliki rekomendasi TPS LB3	20	32	46	49	52
4.	Persentase cakupan penghijauan sumber mata air (%)	16	16	33	33	33
5.	Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	76	45	70	71	71

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung.

1. Persampahan.

Capaian indikator presentase penanganan sampah pada tahun 2019 pada angka 75,1% dan turun drastis ditahun 2020 pada angka 52,82% dan di tahun 2021 berada pada angka 71,33%, tahun 2022 berada pada angka



71,04%, sama di tahun 2023. Jadi dapat dikatakan bahwa penanganan sampah di Kota Bitung belum terlaksana secara baik.

2. Pengelolaan Limbah.

Berdasarkan angka pada tabel diatas, dari tahun 2019 s/d tahun 2023 perusahaan yang memenuhi persyaratan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Bitung semakin bertambah tiap tahunnya. Jumlah Perusahaan yang memiliki rekomendasi TPS LB3 tahun 2019 sebanyak 20 perusahaan, tahun 2020 sebanyak 32 perusahaan, tahun 2021 sebanyak 46 perusahaan, tahun 2022 sebanyak 49 perusahaan dan ditahun 2023 sebanyak 52 perusahaan.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dapat dikatakan baik karena dari tahun 2019 s/d 2023 berada pada angka diatas 70 %, hanya ditahun 2020 yang tidak terlaksana dengan baik.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik.

Tahun 2023 jumlah penduduk Kota Bitung yang memiliki KTP sebanyak 154.905 orang dari 165.933 penduduk yang wajib KTP, dan yang belum miliki KTP sebanyak 19.393 orang atau 88% pemilikan KTP. Penduduk yang memiliki KTP tersebar di 8 kecamatan, kecamatan lembeh selatan 7.945 orang, kecamatan madidir 26.129 orang, kecamatan ranowulu 14.586 orang, kecamatan aertembaga 21.970 orang, kecamatan matuari 24.996 orang, kecamatan girian 25.372 orang, kecamatan maesa 26.552 orang, kecamatan lembeh utara 7.355 orang.

Tabel 115
Jumlah Penduduk Kota Bitung yang memiliki KTP berbasis NIK
Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP



2021	163.233	143.840
2022	164.040	149.520
2023	165.933	154.905

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Hal mendasar yang harus dipahami, Kartu Identitas Anak terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

- 1. Kartu identitas anak (KIA) untuk anak yang berusia nol sampai dengan lima tahun
- 2. Kartu identitas anak (KIA) untuk anak yang berusia lima sampai dengan 17 tahun kurang satu hari.

Tahun 2023 jumlah penduduk wajib Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 58.884 orang anak yang terdiri atas 15.145 orang sudah memiliki KIA dan 43.739 orang belum memiliki KIA.

Dari 8 kecamatan di kota Bitung, kecamatan Matuari terbanyak anak yang sudah memiliki KIA, yaitu 2.956 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah kecamatan Lembeh Selatan yaitu 583 orang.

Tabel 116
Jumlah Penduduk Wajib Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bitung Tahun 2023

No	Kecamatan	Wajib KIA	Sudah ada KIA	Belum ada KIA
1.	Lembeh Selatan	2.714	583	2,131
2.	Madidir	9.437	2.340	7,097
3.	Ranowulu	5.284	1.140	4,144
4.	Aertembaga	7.900	1.978	5,922
5.	Matuari	10.435	2.956	7,479
6.	Girian	10.032	2.554	7,478
7.	Maesa	10.703	2.931	7,772
8.	Lembeh Utara	2.379	663	1,716
Total		58.884	15.145	43.739

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Perkembangan kinerja aspek pelayanan umum pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pemerintah Kota Bitung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 117
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2
2.	Prevalensi (peserta KB/PUS)	83	80	84	84	84
3.	Jumlah peserta KB aktif	47,465	37,843	41,077	36,431	34.244
4.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	34.780	34.780	34.780	34.780	34.780

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Bitung.

Kinerja pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama tahun 2019-2023 sudah sangat baik. Sejak tahun 2019, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Bitung adalah 2 anak, dengan jumlah peserta KB aktif mencapai 34.244 orang pada tahun 2023.

8. Perhubungan.

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perhubungan Kota Bitung tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 118
Indikator Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	679,12	592,212	687,14	625,12	301,15
2.	Rasio izin trayek	0,66	0,0018	0,0020	0,0012	0,0017
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	1050	836	567	278	89
4.	Jumlah Terminal Bis	1	1	1	1	1
5.	Jumlah Angkutan Darat/ Jumlah Penumpang	0,97	3,014	0,12	0,10	0,8



	angkutan darat x 100%					
6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	820	824	750	715	689
7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rupiah)	Mikro: 40.000 Bus: 75.000	Mikro: 40.000 Bus: 75.000	Mikro: 40.000 Bus: 75.000	Mikro: 40.000 Bus: 75.000	Mikro: 40.000 Bus: 75.000
9.	Persentase Pemasangan rambu-rambu	51	51	Tidak ada penambahan rambu-rambu		

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bitung.

- a. Jumlah arus penumpang angkutan umum.
- Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kota Bitung pada tahun 2019 sebesar 679,12, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 592,212. Pada tahun 2021 jumlah arus penumpang angkutan umum sebesar 687,14. Capaian jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2022 sebesar 625,12. Tahun 2023 mengalami penurunan capaian jumlah arus penumpang angkutan umum sebesar 301,15.
- b. Rasio izin trayek.
- Capaian indikator rasio izin trayek di Kota Bitung pada tahun 2019 sebesar 0,66. Mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 sebesar 0,0018. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,0020 dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 0,0012. Tahun 2023 capaian indikator rasio izin trayek di Kota Bitung sebesar 0,0017.
- c. Jumlah uji kir angkutan umum.
- Capaian indikator jumlah uji kir angkutan umum di Kota Bitung mengalami penurunan, yaitu: pada tahun 2019 sebesar 679,12 sedangkan tahun 2020 sebesar 592,212. Pada tahun 2021 sebesar 567. Sedangkan tahun 2022 sebesar 278. Pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian Jumlah uji kir angkutan umum sebesar 89.
- d. Jumlah Terminal Bis.
- Terminal bis di Kota Bitung berjumlah 1 (satu) Terminal Bis Type A. Terminal ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan).

- e. Jumlah Angkutan Darat / Jumlah Penumpang angkutan darat x 100%.

Capaian indikator Jumlah Angkutan Darat / Jumlah Penumpang angkutan darat x 100% pada tahun 2019 adalah sebesar 0,97. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan capaian indikator Jumlah Angkutan Darat / Jumlah Penumpang angkutan darat x 100% sebesar 3,014. Tahun 2021 Capaian indikator Jumlah Angkutan Darat / Jumlah Penumpang angkutan darat x 100% sebesar 0,12. Tahun 2022 capaian indikator Jumlah Angkutan Darat / Jumlah Penumpang angkutan darat x 100% sebesar 0,10. Sedangkan tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan dimana capaian indikator jumlah Angkutan Darat / Jumlah Penumpang angkutan darat x 100% sebesar 0.8.

- f. Kepemilikan KIR angkutan umum.

Kepemilikan KIR angkutan umum tahun 2019 adalah sebesar 820 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 824. Tahun 2021 capaian indikator Kepemilikan KIR angkutan umum mengalami penurunan sebesar 750. Tahun 2022 capaian indikator Kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 715. Tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar 689.

- g. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR).

Sudah merupakan bagian dari SOP Dinas Perhubungan Kota Bitung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kota Bitung menerapkan Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) selama 15 menit, secara konsisten sesuai tabel dari tahun 2019 s/d 2023 capaian lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) dengan durasi waktu selama 15 menit.

- h. Biaya pengujian.

Biaya pengujian adalah angkutan umum mikro sebesar Rp. 40.000,00, angkutan umum bus sebesar Rp. 75.000,00.

- i. Persentase Pemasangan rambu-rambu.

Capaian indikator presentase pemasangan rambu-rambu pada tahun 2019 sama seperti tahun 2020, yaitu sebesar 51. Tahun 2021 s/d 2023 tidak ada penambahan rambu-rambu.

Untuk trayek mikrolet di Kota Bitung di bagi menurut Kode Trayek. Dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa jumlah mikrolet menurut kode trayek menurun setiap tahunnya. Tahun 2021 sebanyak 340 armada,



tahun 2022 sebanyak 173 armada, tahun 2023 jumlah armada sebanyak 141. Untuk jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 119
**Jumlah Mikrolet menurut kode trayek di Kota Bitung
Tahun 2021-2023**

Kode Trayek	2021	2022	2023
C1	34	48	34
C2	10	14	18
C3	9	15	39
A	37	39	12
B	21	26	11
D	18	23	19
E	2	1	4
F	-	1	1
G	1	4	2
H	-	-	-
R	-	2	1
R1	-	-	-
AKDP	193	-	-
J	15	-	-
Jumlah	340	173	141

Sumber: Kota Bitung Dalam Angka 2024.

9. Komunikasi dan Informatika.

Perkembangan kinerja aspek pelayanan umum urusan komunikasi dan informatika Pemerintah Kota Bitung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 120
Indikator Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah surat kabar lokal	12	11	11	11	11
2.	Jumlah penyiaran radio / TV lokal	7/0	7/0	7/2	7/2	7/2
3.	Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Media Online	-	-	18	18	18

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung.

Ketersediaan layanan informasi publik menjadi hal penting dalam aspek pelayanan bidang komunikasi dan informatika. Keberadaan media cetak, elektronik dan media online menjadi indikator aspek pelayanan umum dalam bidang komunikasi dan informatika.

Jumlah surat kabar lokal yang ada di Kota Bitung hingga tahun 2023 berjumlah 11 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 12. Jumlah penyiaran radio di Kota Bitung berjumlah 7 unit



sementara untuk TV Lokal pada tahun 2023 telah ada 2 unit. Website milik pemerintah daerah tersedia dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Media online yang beroperasi di Kota Bitung sebanyak 18 media.

10. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Bitung tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 121
Indikator Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Koperasi	560	445	452	327	296
2.	Persentase Koperasi Aktif	71,07	43	51	88,68	90,88
3.	Jumlah Seluruh UKM	17.800	4.522	4.851	6.422	32.624

Sumber: Dinas Koperasi, dan UMKM Kota Bitung.

- a. Jumlah Koperasi.
- Capaian indikator presentase Jumlah Koperasi setiap tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2019 Capaian indikator presentase Jumlah Koperasi sebesar 560. Tahun 2020 Capaian indikator presentase Jumlah Koperasi sebesar 445. Capaian indikator presentase Jumlah Koperasi tahun 2021 sebesar 452 dan pada tahun 2022 Capaian indikator presentase Jumlah Koperasi sebesar 327. Tahun 2023 Capaian indikator presentase Jumlah Koperasi terjadi penurunan lagi sebesar 296.
- b. Persentase Koperasi Aktif.
- Capaian indikator presentase koperasi aktif sesuai tabel diatas, yaitu pada tahun 2019 sebesar 71,07%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan dimana Persentase Koperasi Aktif sebesar 43%. Tahun 2021 terjadi kenaikan walaupun tidak signifikan capaian Persentase Koperasi Aktif sebesar 51%. Tahun 2022 capaian Persentase Koperasi Aktif terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar 88,68% dan tahun 2023 capaian Persentase Koperasi Aktif terjadi kenaikan lagi sebesar 90,88%.
- c. Jumlah Seluruh UKM.
- Capaian indikator Jumlah Seluruh UKM pada tahun 2019 sebesar 17.800 UKM. Tahun 2020 Capaian indikator Jumlah Seluruh UKM

mengalami penurunan tajam sebesar 4.522 UKM. Tahun 2021 Capaian indikator Jumlah Seluruh UKM terjadi kenaikan sebesar 4.851 UKM. Tahun 2022 Capaian indikator Jumlah Seluruh UKM sebesar 6.422 UKM dan tahun 2023 Capaian indikator Jumlah Seluruh UKM terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar 32.624 UKM.

11. **Penanaman Modal.**

Indikator kinerja aspek pelayanan umum bidang penanaman modal selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 122
**Indikator Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal
Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah perusahaan PMA	27	32	32	33	34
2.	Jumlah perusahaan PMDN	370	394	448	459	497
3.	Realisasi investasi PMA (Rupiah)	2.271.888.211.331	687.806.461.443	421.596.950.349	259.833.970.827	403.748.016.484
4.	Realisasi investasi PMDN (Rupiah)	1.312.160.014.222	150.071.079.046	80.297.200.000	45.065.400.000	238.593.600.000

Sumber: DPMPTSP Kota Bitung.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah PMA mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2019 s/d 2023, dari angka 27 perusahaan menjadi 32, 32, 33 dan 34 perusahaan di tahun 2023. Begitu juga dengan PMDN dari tahun 2019 sebanyak 370 perusahaan bertambah setiap tahunnya menjadi 394, 448, 459 dan 497 perusahaan di tahun 2023.

Realisasi investasi PMA di Kota Bitung berfluktuasi setiap tahunnya. Angka investasi tertinggi dicapai pada tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp. 2.271.888.211.331, dan nilai investasi terendah di tahun 2023 pada angka Rp. 403.748.016.484. Begitu juga untuk realisasi investasi PMDN mencapai angka tertinggi di tahun 2019 dengan nilai Rp. 1.312.160.014.222, dan terendah di tahun 2022 pada angka Rp. 45.065.400.000,

Dalam rangka mempermudah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan serta Pelayanan Publik Lainnya Pemerintah Kota Bitung telah membuka Mal Pelayanan Publik.

Adapun jenis-jenis pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kota Bitung, mencakup 117 layanan, yakni :

1. Pendaftaran Penanaman Modal.
2. Pendaftaran Penanaman Modal Alih Status.
3. Pendaftaran Penanaman Modal Perubahan.
4. Izin Usaha Penanaman Modal.
5. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
7. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal.
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
9. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB).
10. Izin Trayek (IT).
11. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
13. Tanda Daftar Gudang (TDG).
14. Izin Usaha Industri (IUI).
15. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
16. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
17. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).
18. Surat Izin Dokter Umum.
19. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis.
20. Surat Izin Praktek Dokter Gigi.
21. Surat Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
22. Surat Izin Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D (SIRS).
23. Surat Izin Klinik (SIK).
24. Surat Izin Klinik Kesehatan Ibu Dan Anak.
25. Surat Izin Klinik Kecantikan.
26. Surat Izin Apotik (SIK.SIA).
27. Surat Izin Toko Obat.
28. Surat Izin Penyelenggaraan.
29. Surat Izin Refraksionis Opticsien (SIK.SIPRO).
30. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.
31. Surat Izin Praktek Bidan (SIK.SIPB).
32. Surat Izin Praktek Perawat (SIK.SIPP).
33. Surat Izin Tenaga Akupuntur (SIK.SIPTA).
34. Surat Izin Laboratorium.
35. Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIK.SIPF).



36. Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIK.SIPPG).
37. Surat Izin Praktek Gizi.
38. Surat Izin Praktek Kesehatan Masyarakat.
39. Surat Izin Praktek Analisis.
40. Tanda Daftar Industri (TDI).
41. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
42. Surat Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (SITPSLB3).
43. Izin Pembuangan Air Limbah.
44. Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi.
45. Rekomendasi Jasa Warung Internet.
46. Rekomendasi Kelayakan Administrasi Penyiaran.
47. Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika setiap hari melalui tampilan di Laptop/monitor.
48. Informasi Peringatan Dini Gelombang.
49. Informasi Cuaca Wilayah Pelayanan.
50. Informasi Cuaca Jalur Penyeberangan.
51. Informasi Cuaca Pelabuhan Bitung.
52. Informasi Cuaca Pelabuhan (9 Pelabuhan).
53. Pelayanan Rekomendasi Izin Trayek.
54. Pelayanan RTTJ.
55. Pelayanan Muatan Barang dan Dokumen Perjalanan.
56. Pelayanan Keterangan Mobil Barang Mengangkut Orang .
57. Pelayanan Rekomendasi Pemakaian Ruas Jalan.
58. Pelayanan Rekomendasi Andalalin .
59. Izin Izidentil.
60. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
61. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
62. Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Terkait Pelayanan Keimigrasi.
63. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP).
64. Tanda pencatatan usaha pembudayaan ikan (TPUPI).
65. Kartu Pelaku Usaha Kegiatan Kelautan Dan Perikanan(KUSUKA).
66. Surat Keterangan Asal Ikan (SKA).
67. Surat Keterangan Fiskal Daerah.
68. Izin Operasional Sekolah SD dan SMP.
69. Izin Operasional Lembaga PAUD dan Diknas.

70. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK).
71. Layanan Informasi Kepabeanan dari Cukai.
72. Pelayanan Pengesahan STNK.
73. Pembayaran Pajak.
74. Pembayaran Jasa Raharja.
75. Perpanjangan SIM.
76. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
77. Pelayanan Informasi BPJS Ketenagakerjaan.
78. Pengajuan Kredit Mikro (BPKB).
79. Penjualan Emas Batangan.
80. Tabungan Emas.
81. Agen Pegadaian.
82. Kartu Keluarga.
83. KTP Elektronik.
84. Akta Kelahiran.
85. Akta Kematian.
86. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).
87. Memberikan Informasi Tentang Perkembangan Pariwisata.
88. Memberikan informasi tentang Destinasi Objek Wisata dan Berbagai Calendar Of Event yang ada di Kota Bitung.
89. Pendaftaran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan.
90. Rekomendasi Perizinan BPJS Kesehatan.
91. Pemberian Informasi BPJS Kesehatan.
92. Rekomendasi Kegiatan.
93. Rekomendasi Penelitian.
94. Rekomendasi Usaha Hiburan.
95. Pelayanan KB Gratis untuk Keluarga Miskin.
96. Informasi tentang KB.
97. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Praktek (SIP) Dokter.
98. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Praktek (SIP) Perawat.
99. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Praktek (SIP) Bidan.
100. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Praktek (SIP) Kesling.
101. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Praktek (SIP) Analisis Kesehatan.
102. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Praktek Analisis Apoteker (SIPA).
103. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Kerja Tenaga Teknis



Kesehatan (SIK-TTK) Asisten Apoteker (D3 dan S1 Farmasi).

- 104. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Klinik.
- 105. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Toko Obat.
- 106. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Apotik.
- 107. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Puskesmas.
- 108. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Rumah Sakit.
- 109. Pelayanan Informasi Pertanahan.
- 110. Tambah Daya Listrik.
- 111. Loker pembayaran Listrik.
- 112. Penyambungan Listrik Baru.
- 113. Pengaduan Air.
- 114. Bank Mandiri.
- 115. Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- 116. Bank Negara Indonesia (BNI).
- 117. Bank Sulut Go.

12. Kepemudaan dan Olahraga.

Perkembangan kinerja aspek pelayanan umum urusan kepemudaan dan olahraga Pemerintah Kota Bitung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 123
Indikator Aspek Pelayanan umum dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah organisasi kepemudaan	214	214	214	214	214
2.	Jumlah organisasi olahraga	25	25	25	25	25
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	10	10	10	10	10
4.	Jumlah Kegiatan olahraga	10	10	10	10	10
5.	Jumlah lapangan olahraga	84	84	84	84	84

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bitung.

Di bidang pemuda dan olahraga, Kota Bitung juga terus berbenah. Jumlah organisasi pemuda yang terdaftar hingga tahun 2023 adalah sebanyak 214 organisasi, dengan 84 lapangan olahraga.

13. Statistik.



PDRB Kota Bitung Menurut Lapangan Usaha dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bitung sebagai bagian penyelenggaraan statistik atas urusan statistik tersebut menggambarkan bahwa dokumen bidang statistik tetap tersedia dan di masa depan data statistik tersebut dapat lebih lengkap dan akurat.

Tabel 124
Ketersediaan Dokumen Data Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kota Bitung Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Kecamatan Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	PDRB Kota Bitung	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Statistik Kesejahteraan Rakyat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Kota Bitung.

14. Persandian.

Perkembangan kinerja aspek pelayanan umum urusan persandian Pemerintah Kota Bitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 125
Indikator Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Persandian Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung.

Dapat dikatakan bahwa perangkat daerah di Kota Bitung telah menggunakan sandi dalam komunikasi kedinasan.

15. Kebudayaan.

Perkembangan kinerja aspek pelayanan umum urusan kebudayaan Pemerintah Kota Bitung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 126
Indikator Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sanggar kesenian	20	20	20	20	20
2.	Situs Bersejarah	11	11	11	11	11

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung.

Indikator bidang kebudayaan dapat dilihat pada perkembangan sanggar kesenian dan pemeliharaan situs bersejarah yang ada di Kota Bitung. Sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Sanggar Kesenian di Kota Bitung berjumlah 20 sanggar dan situs bersejarah sebanyak 11 situs.

16. Perpustakaan.

Perkembangan kinerja aspek pelayanan umum urusan perpustakaan Pemerintah Kota Bitung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 127
Indikator Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan Tahun 2019-2023

NO	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ruang Perpustakaan Umum Kota	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan Umum Kecamatan	8	8	8	8	8
3.	Jumlah Perpustakaan Umum Kelurahan	5	6	6	6	6
4.	Jumlah Perpustakaan Keliling	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Bitung.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Bitung telah menyiapkan sarana perpustakaan di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan tingkat Kota. Layanan perpustakaan juga telah didukung oleh ketersediaan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling perlu dilakukan penambahan kendaraan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

17. Kearsipan.

Perkembangan kinerja aspek pelayanan umum urusan kearsipan Pemerintah Kota Bitung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 128
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pengelolaan arsip secara baik	48	48	48	48	48
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	3	1	1	1

Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Bitung.

Kinerja pelayanan dalam bidang kearsipan dapat dilihat dari indikator pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Perangkat daerah telah melakukan pengelolaan arsip secara baku.



Sementara untuk SDM pengelola kearsipan setiap tahunnya dilakukan kegiatan peningkatan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam pelatihan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan.

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

1. Kelautan dan Perikanan.

- a. Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB.

Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Bitung meningkat setiap tahunnya dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Pada tahun 2021 sebesar Rp 3.601.377,86 (juta rupiah). Sedangkan, untuk tahun 2022, kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Bitung sebesar Rp. 3.909.151,88 (juta rupiah). Sementara itu, di tahun 2023, kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB Rp. 4.70.623,32 (juta rupiah). Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Bitung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 129
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Di Kota Bitung Tahun 2021-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.601.377,86	3.909.151,88	4.70.623,32

Sumber: BPS Kota Bitung 2024.

- b. Produksi perikanan darat (ton).

Adapun capaian kinerja indikator produksi perikanan darat di Kota Bitung pada tahun 2019-2023, mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2019-2020 jumlah nilai produksi hasil perikanan di Kota Bitung sebesar 1.1160,30 ton dan 1,171,90 Ton. Pada tahun 2021 jumlah nilai produksi hasil perikanan di Kota Bitung sebesar 1.144,90. Pada tahun 2022 jumlah nilai produksi hasil perikanan di Kota Bitung mengalami penurunan pada angka 1.067,1. Pada tahun 2023 jumlah nilai produksi



hasil perikanan di Kota Bitung mengalami peningkatan kembali sebesar 1.493,94.

c. Komsumsi Ikan.

Adapun capaian kinerja indikator Konsumsi Ikan di Kota Bitung pada tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang konstan, yaitu pada angka 68,00 perkapita/tahun.

Tabel 130
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan
Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Produksi perikanan darat (ton)	1,160,30	1,171,90	1.144,90	1.067,10	1.493,94
2.	Konsumsi Ikan (per kapita/ tahun)	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00

Sumber: Dinas Perikanan Kota Bitung.

2. Pariwisata.

Bitung memiliki keunggulan kompetitif dari kaki Gunung Duasudara yang kaya akan flora dan fauna unik. Selain itu, Bitung juga memiliki potensi laut yang sangat besar antara lain:

- 1. Wisata bawah air dengan 95 titik selam, dihidupi oleh 300 jenis critters unik dan merupakan Muck Diving terbaik dunia.
- 2. Karang yang masih hidup yang terdapat di Batu Angus.
- 3. Wisata pantai yang sangat indah dan memukau.
- 4. Ekowisata Mangrove.
- 5. Lokasi Snorkling.
- 6. Pelabuhan perikanan samudera Bitung.
- 7. Kawasan minapolitan Bitung.
- 8. Industri perkapalan dan pengolahan hasil laut.

Di Kota Bitung, sampai dengan tahun 2019, terdapat 17 pusat penyelaman yang terdaftar yaitu 1 pusat penyelaman di kecamatan Madidir, 2 pusat penyelaman di kecamatan Lembeh Selatan, 7 pusat penyelaman di kecamatan lembeh utara, dan 7 di kecamatan Aertembaga.

Tahun 2021, jumlah wisatawan yang datang di kota Bitung tercatat sebanyak 41.235, terdiri atas 55 orang wisatawan mancanegara dan 41.182 orang wisatawan domestic. Tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan meningkat menjadi 207.630 orang, terdiri atas 1.287 orang wisatawan mancanegara dan 206.343 orang wisatawan domestic. Tahun 2023,

kunjungan wisatawan di kota Bitung meningkat lagi menjadi 417.998 orang yang terdiri atas 12.166 orang wisatawan mancanegara dan 405.832 orang wisatawan domestic. Perkembangan kunjungan Wisatawan yang berkunjung di Kota Bitung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 131

Perkembangan Kunjungan Wisatawan Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	55	1.287	12.166
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	41.182	206.343	405.832
Jumlah		41.235	207.630	417.998

Sumber: Kota Bitung Dalam Angka 2024.

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Bitung, meliputi :

- a. Kawasan Pulau Lembeh.
- b. Kawasan Cagar Alam (Cagar Alam Dua Sudara, Taman Wisata Alam Batuputih dan Taman Wisata Alam Batuangus).
- c. Kawasan Wisata Tanjung Merah.
- d. Kawasan Wisata Ranowulu.
- e. Kawasan Wisata Aertembaga.
- f. Kawasan Wisata Kuliner di Kecamatan Aertembaga.

Tahun 2021 ada 51 objek wisata, lama kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kota Bitung 3-4 hari untuk wisatawan mancanegara. Dan untuk jumlah pemandu wisata yang telah memiliki sertifikat sebanyak 10 orang dan belum memiliki sertifikat sebanyak 65 orang.

Tabel 132

Jumlah Objek Wisata, Lama Kunjungan Wisatawan, Jumlah Pemandu Wisata, Pusat Penjualan Cenderamata Tahun 2021-2023

No	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Jumlah Objek Wisata	51	51	51
2.	Lama Kunjungan Wisatawan			
	Wisatawan Domestik	1 Hari	1 Hari	1 Hari
	Wisatawan Mancanegara	3-4 Hari	3-4 Hari	3-4 Hari
3.	Jumlah Pemandu Wisata			
	- Bersertifikat	10	10	10
	- Tidak Bersertifikat	65	65	65



4.	Pusat Penjualan Cenderamata			
	Toko Cenderamata	14	14	14

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bitung.

3. Pertanian.

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Pertanian di Kota Bitung tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 133
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Produksi Padi	4,1	4,3	4,5	4,7	4,9
2.	Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan pangan) Terhadap PDRB	1.378,52	1.552,8	1.692	1.880	1.890
3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman perkebunan rakyat) Terhadap PDRB	26,57	29,52	32,80	36,45	40,5
4.	Kontribusi sektor pertanian (peternakan dan hasilnya) Terhadap PDRB	1541,83	1541,83	1713,15	1903,5	2115

Sumber: BPS Kota Bitung 2024.

a. Produksi Padi.

Adapun capaian kinerja indikator jumlah nilai produksi hasil pertanian di Kota Bitung pada tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah nilai produksi hasil pertanian di Kota Bitung sebesar 4,1. Pada tahun 2020 jumlah nilai produksi hasil pertanian di Kota Bitung sebesar 4,3. Pada tahun 2021 jumlah nilai produksi hasil pertanian di Kota Bitung sebesar 4,5. Capaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 4,7. Pada tahun 2023 jumlah nilai produksi hasil pertanian di Kota Bitung sebesar 4,9.

b. Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan pangan) Terhadap PDRB.

Adapun capaian kinerja indikator Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan pangan) Terhadap PDRB di Kota Bitung pada tahun 2019-2023 terjadi peningkatan. Tahun 2019 capaian kinerja indikator Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan pangan) Terhadap PDRB di Kota Bitung sebesar 1.378,52. Pada tahun 2020 capaian kinerja indikator Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan pangan) Terhadap PDRB di Kota Bitung sebesar 1.552,8. Tahun 2021 capaian kinerja indikator Kontribusi sektor

pertanian (tanaman bahan pangan) Terhadap PDRB di Kota Bitung sebesar 1.692. Dibandingkan tahun sebelumnya capaian kinerja indikator Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan pangan) Terhadap PDRB di Kota Bitung tahun 2022 sebesar 1.880. Dan tahun 2023 capaian kinerja indikator Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan pangan) Terhadap PDRB di Kota Bitung mengalami kenaikan sebesar 1.890.

c. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman perkebunan rakyat) Terhadap PDRB.

Pada tahun 2019 capaian indikator Kontribusi sektor perkebunan (tanaman perkebunan rakyat) Terhadap PDRB di Kota Bitung sebesar 26,57. Pada tahun 2020 capaian indikator Kontribusi sektor perkebunan (tanaman perkebunan rakyat) Terhadap PDRB di Kota Bitung sebesar 29,52. Pada tahun 2021 capaian indikator Kontribusi sektor perkebunan (tanaman perkebunan rakyat) Terhadap PDRB di Kota Bitung sebesar 32,80. Pada tahun 2022 capaian indikator Kontribusi sektor perkebunan (tanaman perkebunan rakyat) Terhadap PDRB di Kota Bitung sebesar 36,45. Sedangkan pada tahun 2023 capaian indikator Kontribusi sektor perkebunan (tanaman perkebunan rakyat) Terhadap PDRB di Kota Bitung mengalami peningkatan sebesar 40,5.

d. Kontribusi sektor pertanian (peternakan dan hasilnya) Terhadap PDRB.

Pada tahun 2019 capaian indikator Kontribusi sektor pertanian (peternakan dan hasilnya) Terhadap PDRB di Kota Bitung 1541,83. Pada tahun 2020 capaian indikator Kontribusi sektor pertanian (peternakan dan hasilnya) Terhadap PDRB di Kota Bitung sebesar 1541,83. Pada tahun 2021 capaian indikator Kontribusi sektor pertanian (peternakan dan hasilnya) Terhadap PDRB di Kota Bitung sebesar 1713,15. Pada tahun 2022 capaian indikator Kontribusi sektor pertanian (peternakan dan hasilnya) Terhadap PDRB di Kota Bitung. Sedangkan pada tahun 2023 capaian indikator Kontribusi sektor pertanian (peternakan dan hasilnya) Terhadap PDRB di Kota Bitung mengalami peningkatan sebesar 2115.

4. Perdagangan.

Perkembangan nilai produksi sektor industri Kota Bitung tahun 2021 pada angka 37.412.635 dan pada tahun 2022 naik pada angka 37.412.985 dan pada tahun 2023 turun sedikit pada angka 37.413.693.



Tabel 134
Perkembangan Nilai Produksi Sektor Industri di Kota Bitung
Tahun 2021-2023

Tahun	Industri Kecil dan Menengah	Industri Agro, Logam dan Kimia	Jumlah
2021	17.252.080	20.160.555	37.412.635
2022	17.252.395	20.160.590	37.412.985
2023	17.253.100	20.160.593	37.413.693

Sumber : Kota Bitung Dalam Angka 2024.

Secara global, Kota Bitung ditetapkan sebagai pusat perekonomian baru di Sulawesi Utara dan Kawasan Timur Indonesia. Kota Bitung dijadikan sebagai daerah perdagangan dunia, memanfaatkan potensi dari semenanjung Sulawesi, Kepulauan Ambon, Maluku dan sekitarnya serta menjadi pusat industri pengolahan berbagai komoditas siap ekspor. Tabel di bawah ini menunjukkan Realisasi ekspor menggunakan SKA dan Jumlah perusahaan perdagangan di Kota Bitung tahun 2019-2023

Tabel 135
Realisasi ekspor menggunakan SKA dan Jumlah perusahaan
perdagangan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Realisasi ekspor menggunakan SKA FOB (\$)	643.201.078,62	414.400.460,15	415.722.342,67	415.801.470,85	415.922.243,52
2	Jumlah perusahaan perdagangan	282	227	177	179	215

Sumber: BPS Kota Bitung, Dinas Perdagangan Kota Bitung.

a. Realisasi ekspor menggunakan SKA.

Adapun capaian indikator kinerja Realisasi ekspor menggunakan SKA di Kota Bitung pada tahun 2019 sebesar 643.201.078,62. Capaian indikator kinerja Realisasi ekspor menggunakan SKA di Kota Bitung tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 414.400.460,15. Sedangkan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan capaian indikator kinerja Realisasi



ekspor menggunakan SKA di Kota Bitung sebesar 415.722.342,67. Tahun 2022 Capaian indikator kinerja kinerja Realisasi ekspor menggunakan SKA di Kota Bitung mengalami peningkatan sebesar 415.801.470,85 dan tahun 2023 capaian indikator kinerja Realisasi ekspor menggunakan SKA di Kota Bitung sebesar 415.922.243,52.

b. Jumlah perusahaan perdagangan.

Perkembangan Capaian indikator kinerja Jumlah perusahaan perdagangan tahun 2019 sebesar 282. Tahun 2020 apaian indikator kinerja Jumlah perusahaan perdagangan sebesar 227. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja sebesar 177. sedangkan pada tahun 2022 capaiannya 179. dan untuk tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 215.

5. Perindustrian.

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perindustrian Pemerintah Kota Kota Bitung tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 136
Indikator dalam Bidang Perindustrian
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2021	2022
1.	Industri Formal	180	190	199	199	199
2.	Industri NonFormal	920	2.070	2.185	2.185	2.185
3.	Cakupan bina kelompok pengrajin	10	15	15	15	15

Sumber: BPS Kota Bitung, Dinas Perdagangan Kota Bitung.

a. Industri Formal.

Adapun capaian indikator kinerja jumlah Industri Formal yang di Kota Bitung tahun 2019 sebesar 180. Tahun 2020 capaian indikator kinerja jumlah Industri Formal yang di Kota Bitung sebesar 190. Tahun 2021 capaian indikator kinerja jumlah Industri Formal yang di Kota Bitung terjadi kenaikan sebesar 199, dan konstan hingga tahun 2023.

b. Industri NonFormal.

Adapun capaian indikator kinerja jumlah Industri NonFormal yang di Kota Bitung tahun 2019 sebesar 920. Tahun 2020 capaian indikator kinerja jumlah Industri NonFormal yang di Kota Bitung naik pada angka 2.070. Tahun 2021 capaian indikator kinerja jumlah Industri NonFormal yang di



Kota Bitung mengalami peningkatan sebesar 2.185. dan angka tersebut bertahan hingga tahun 2023.

c. Cakupan bina kelompok pengrajin.

Pada tahun 2019 cakupan bina kelompok pengrajin di Kota Bitung sebesar 10 kelompok pengrajin. Pada tahun 2020 cakupan bina kelompok pengrajin di Kota Bitung bertambah menjadi 15 kelompok pengrajin dan bertahan hingga tahun 2023.

D. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar.

1. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

a. *Perencanaan Pembangunan.*

Perkembangan kinerja aspek pelayanan umum perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Bitung Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 137
**Indikator Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan PERDA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3.	TERSEDIANYA Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung.

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota dalam aspek pelayanan umum sepanjang tahun 2019-2023 telah terpenuhi yaitu dengan tersedianya dokumen perencanaan baik itu tahunan (RKPD), lima tahunan (RPJMD) maupun rencana pembangunan jangka panjang RPJPD (20 tahunan).

b. *Penelitian dan Pengembangan.*



Perkembangan kinerja aspek pelayanan umum bidang penelitian dan pengembangan Pemerintah Kota Bitung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 138
**Indikator Bidang Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung.

Rencana kelitbangan dalam RPJMD yang berhasil diimplementasikan dalam RKPD diantaranya adalah Survei Kepuasan Masyarakat dan penerapan Low Carbon Model Town di Kota Bitung. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setiap tahun untuk sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan investasi. Untuk Low Carbon Model Town tahun 2018 merupakan tahap sosialisasi, tahun 2019 merupakan tahap institusionalisasi, tahun 2020 adalah tahap penyusunan regulasi, dan tahun 2021 merupakan tahapan penetapan regulasi. Pemanfaatan hasil kelitbangan berupa inovasi daerah di tahun 2020 dan 2021 telah menghasilkan penghargaan Daerah Sangat Inovatif bagi kota Bitung.

2. **Keuangan.**

Perkembangan kinerja aspek pelayanan umum bidang keuangan Pemerintah Kota Bitung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 139
**Indikator Bidang Keuangan
Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
2.	Persentase SILPA terhadap APBD	5,68	8,26	5,91	3,28	



3.	Persentase belanja pendidikan (20%)	19,45	20,10	20,18	19,48	
4.	Persentase belanja kesehatan 10%	16,58	22,78	14,43	15,50	
5.	Penetapan APBD	Des '16	Des '17	Des '18	Des '19	

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung.

3. Kepegawaian

Perkembangan kinerja aspek pelayanan bidang kepegawaian Pemerintah Kota Bitung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada - 260 -able berikut:

Tabel 140
Indikator Bidang Kepegawaian
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	36	36	36	36	36
2.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	148	148	148	155	155
3.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.564	1.526	1.588	1.447	1.447

Sumber: Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung.

Jumlah jabatan pimpinan tinggi yang tersedia di Pemerintah Kota Bitung sebanyak 36, yang mana jumlah ini tidak berubah sejak tahun 2019. Sementara untuk jabatan administrasi bertambah menjadi 155 ditahun 2023 setelah tahun-tahun sebelumnya berjumlah 148 jabatan. Jabatan fungsional tertentu di Kota Bitung jumlahnya fluktuatif namun cenderung menurun selama tahun 2019 sampai dengan 2023. Jika pada tahun 2019 ada sebanyak 1.564 orang dengan jabatan fungsional tertentu, di tahun 2023 turun menjadi 1.447 orang fungsional tertentu.

4. Pendidikan dan Pelatihan.

Perkembangan kinerja aspek pelayanan umum bidang pendidikan dan pelatihan Pemerintah Kota Bitung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 141
Indikator Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30	20	19	15	12
2.	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	43	45	-	42	-

Sumber: Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung

Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kota Bitung cenderung masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah ASN yang ada. Hal ini disebabkan keterbatasan penyediaan anggaran untuk diklat ASN. Sementara untuk pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural cenderung sudah sesuai dengan jumlah jabatan yang tersedia karena anggaran untuk diklat struktural telah tertata dalam pagu anggaran Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM Daerah.

E. Urusan Pengawasan.

Inspektorat

Perkembangan kinerja aspek pelayanan umum bidang pengawasan Pemerintah Kota Bitung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 142
**Indikator dalam Bidang Pengawasan
Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase tindak lanjut temuan	71,83%	73,67%	82,06%	86,34%	86,60%
2.	Jumlah temuan BPK	29	23	20	16	10

Sumber: Inspektorat Kota Bitung

Persentase tindak lanjut temuan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bitung setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2019 temuan yang ditindaklanjuti sebesar 71,83% dan di tahun 2023 meningkat menjadi 86,60%. Sementara untuk jumlah temuan BPK setiap tahunnya semakin menurun, dimana tahun 2023 hanya ada 10 temuan BPK yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bitung.

F. Urusan Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik



Perkembangan kinerja aspek pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik Pemerintah Kota Bitung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 143
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM)	29	31	31	1	1
2.	Jumlah organisasi profesi	8	9	9	3	-
3.	Jumlah Ormas	43	45	45	13	7

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memfasilitasi pendaftaran LSM, organisasi profesi dan ormas.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi elemen yang sangat penting yang harus diperhatikan secara cermat dalam penyusunan RPJMD Kota Bitung Tahun 2025 – 2029. Pengelolaan ini tidak hanya terfokus pada efisiensi alokasi sumber daya dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus memperhitungkan kondisi fiskal daerah yang stabil dan berkelanjutan. Kondisi fiskal merujuk pada keadaan keuangan daerah, yang mencakup penerimaan, pengeluaran, serta struktur utang dan aset daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah Kota Bitung, kondisi fiskal yang sehat menjadi landasan untuk memastikan keberlanjutan keuangan dan kemampuan daerah dalam mendanai program-program pembangunan yang dijalankan selama periode RPJMD. Pengelolaan keuangan daerah Kota Bitung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menekankan pentingnya keteraturan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi

Kota Bitung untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta mengelola utang dengan bijaksana demi memastikan keberlanjutan keuangan jangka panjang.

Analisis kondisi fiskal daerah Kota Bitung akan mencakup evaluasi terhadap kinerja keuangan masa lalu, termasuk perkembangan pendapatan, pengeluaran, dan struktur utang. Data ini menjadi dasar untuk merencanakan penyesuaian strategis dalam pengelolaan keuangan untuk lima tahun ke depan, dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Dengan memperhatikan kondisi fiskal yang kuat dan terkelola dengan baik, Kota Bitung akan mampu mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Untuk penyajian data pada Sub Bab ini adalah kinerja pelaksanaan APBD Kota Bitung untuk Tahun Anggaran 2020 - 2024. Di mana pada tahun 2020 - 2024 menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang digunakan untuk menilai efektivitas pembangunan daerah dalam mencapai target indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bitung. Pengelolaan keuangan daerah selama periode ini menggunakan pendekatan berbasis kinerja, dengan fokus pada belanja yang terukur. Analisis kinerja ini mencakup evaluasi terhadap pendapatan dan pembiayaan daerah, memberikan gambaran tentang bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir.

Kondisi perkembangan pendapatan daerah sejak 2020 - 2024 Kota Bitung dapat diikuti pada Tabel 2.1. Total pendapatan pada tahun 2020 sebesar 755,20 miliar Rupiah dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 927,22 miliar Rupiah kemudian pada tahun 2022 meningkat 955,74 miliar Rupiah dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 873,12 miliar Rupiah dan pada tahun 2024 menurun sebesar 852,29 miliar Rupiah.



2025

Tabel 144
Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir Kota Bitung
Pendapatan Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	44.358.891.964	51.201.717.358	61.632.405.141	62.060.680.488	61.208.049.596
4	Pendapatan Retribusi Daerah	9.185.511.299	10.333.404.603	3.533.102.900	4.659.089.760	4.035.475.656
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.791.696.245	3.268.125.144	2.819.722.964	5.192.182.568	4.540.125.324
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.127.489.096	6.913.560.080	9.931.116.345	9.395.816.111	3.211.164.478
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	70.463.588.605	71.716.807.185	77.916.347.349	81.307.768.927	72.994.815.054
8		-				
9	PENDAPATAN TRANSFER					
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT					
11	Dana Bagi Hasil	49.952.353.107	185.290.564.599	172.015.655.328	113.273.062.531	56.382.292.000
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	473.502.344.000	464.686.698.000	463.721.367.716	483.353.331.000	507.854.817.308
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	52.742.868.744	109.894.596.163	63.107.531.230	27.038.872.350	56.679.291.833
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik	49.843.252.268	40.153.498.832	41.006.622.544	79.180.796.500	76.624.184.817
15	Dana Insentif Daerah (DID)	17.473.669.000	20.697.243.000	46.371.207.000	24.376.556.000	2.998.696.000
16	Dana Otonomi Khusus & Tambahan Infrastruktur	-	-	-	-	-
17	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-
18	Dana Desa	-	-	-	-	-
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.514.487.119	820.722.600.594	786.222.383.818	727.222.618.381	700.539.281.958
20						
21	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
22	Pendapatan Bagi Hasil	25.109.579.781	34.782.373.703	51.818.742.578	51.150.598.028	65.024.598.191
23	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
24	Jumlah Transfer Antar Pemerintah Daerah	25.109.579.781	34.782.373.703	51.818.742.578	51.150.598.028	65.024.598.191
25						
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
27	PENDAPATAN HIBAH	16.113.930.000	-	-	-	-
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-	39.788.339.355	13.442.293.462	13.737.200.864
29	Jumlah Lain - lain Pendapatan yang Sah	16.113.930.000	-	39.788.339.355	13.442.293.462	13.737.200.864
30	JUMLAH PENDAPATAN	755.201.585.505	927.221.781.482	955.745.813.100	873.123.278.798	852.295.896.067

Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025.

Perkembangan belanja daerah sejak 2020 - 2024 Kota Bitung dapat diikuti pada Tabel 2.2 Total Belanja pada tahun 2020 sebesar 763,69 miliar Rupiah dan Tahun 2021 meningkat 808,61 miliar Rupiah dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 1.131,65 milliar Rupiah dan pada tahun



2023 menurun sebesar 1.081,00 miliar Rupiah dan pada tahun 2024 menurun menjadi sebesar 805,28 miliar Rupiah.

Tabel 145
Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir Kota Bitung
Belanja Tahun 2020 – 2024



NO	URAIAN	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
32	BELANJA					
33	BELANJA OPERASI					
34	Belanja Pegawai	333.222.296.774	350.763.480.122	360.320.065.988	364.003.370.189	380.260.763.407
35	Belanja Barang dan Jasa	210.478.087.768	280.479.869.560	383.816.770.839	402.805.156.285	246.749.628.316
36	Belanja Bunga	-	462.500.000	11.780.606.676	11.449.777.493	14.517.433.917
37	Belanja Hibah	56.565.960.533	15.490.050.808	42.639.394.211	51.880.598.569	67.949.307.402
38	Belanja Bantuan Sosial	8.440.600.000	4.346.800.000	14.375.267.584	11.128.755.000	3.380.990.000
39	Jumlah Belanja Operasi	608.706.945.075	651.542.700.490	812.932.105.298	841.267.657.536	712.858.123.042
40						
41	BELANJA MODAL					
42	Belanja Tanah	5.000.000.000	3.489.900.000	27.093.028.985	6.267.612.600	4.000.000.000
43	Belanja Peralatan dan Mesin	10.677.996.006	46.088.567.215	46.440.998.830	29.042.282.884	29.197.040.797
44	Belanja Gedung dan Bangunan	19.717.478.260	48.551.241.278	144.426.547.995	134.885.489.483	32.176.475.784
45	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	37.531.874.014	45.387.603.672	89.658.711.668	64.511.084.157	21.795.777.818
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.940.183.300	1.755.145.600	2.409.693.880	2.160.626.360	2.724.705.600
47	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-
48	Jumlah Belanja Modal	74.867.531.580	145.272.457.765	310.028.981.358	236.867.095.484	89.893.999.999
49						
50	BELANJA TAK TERDUGA					
51	Belanja Tak Terduga	79.813.506.745	11.799.606.101	8.688.456.905	2.866.871.702	2.526.070.117
52	Jumlah Belanja Tak Terduga	79.813.506.745	11.799.606.101	8.688.456.905	2.866.871.702	2.526.070.117
53						
54	BELANJA TRANSFER					
55	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
56	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
57	Jumlah Belanja Transfer	-	-	-	-	-
58	JUMLAH BELANJA	763.387.983.400	808.614.764.356	1.131.649.543.561	1.081.001.624.722	805.278.193.158
59	SURPLUS/DEFISIT	(8.186.397.895)	118.607.017.126	(175.903.730.461)	(207.878.345.924)	47.017.702.909

Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025.

Perkembangan pembiayaan daerah sejak 2020 - 2024 Kota Bitung dapat diikuti pada Tabel 2.3 Total Pembiayaan pada tahun 2020 sebesar 19,58 miliar Rupiah kemudian pada tahun 2021 meningkat 66,77 miliar Rupiah dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 393,48 milliar Rupiah dan pada tahun 2023 menurun sebesar 215,70 miliar Rupiah.

Tabel 146
Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir Kota Bitung
Pembiayaan Tahun 2020 - 2024



NO	URAIAN	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
61	PEMBIAYAAN					
62	PENERIMA PEMBIAYAAN					
63	Penggunaan SILPA	26.495.206.938	7.752.828.613	212.308.283.358	215.704.494.248	(1.289.662.362)
64	Penerimaan dari Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
65	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
66	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
67	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	62.500.000.000	184.095.390.000	-	16.546.098
68	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	46.468.675	79.579.341	73.574.544	58.053.560	16.546.098
69	Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
70	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	26.541.675.613	70.332.407.954	396.477.247.902	215.762.547.808	(1.256.570.166)
71						
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
73	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
74	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000	2.619.000.000	2.000.000.000	-	-
75	Pembayaran Pokok Utang Jatuh Tempo	-	-	-	3.424.936.246	41.099.234.952
76	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
77	Pengembalian kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
78	Pemberian Pinjaman Daerah	974.500.000	943.000.000	1.000.000.000	-	-
79	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
80	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.974.500.000	3.562.000.000	3.000.000.000	3.424.936.246	41.099.234.952
81	PEMBIAYAAN NETTO	19.567.175.613	66.770.407.954	393.477.247.902	212.337.611.562	(42.355.805.118)
82						
83	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran					
84	Saldo Anggaran Lebih Awal	-	-	-	-	-
85	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	-	-	-	-	-
86	Sub Total	-	-	-	-	-
87						
88	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	11.380.777.718	212.308.283.358	217.573.517.441	4.459.265.638	4.645.351.693
89	Sub Total	11.380.777.718	212.308.283.358	217.573.517.441	4.459.265.638	4.645.351.693
90						
91	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-	-	-	-
92	Lain-lain	-	-	-	-	-
93	Saldo Anggaran Lebih Akhir	11.380.777.718	212.308.283.358	217.573.517.441	4.459.265.638	4.645.351.693

Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025.

Perkembangan sisa lebih pembiayaan anggaran sejak 2020 - 2024 Kota Bitung pada tahun 2020 sebesar 11,38 miliar Rupiah kemudian pada tahun 2021 meningkat 212,31 miliar Rupiah dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 217,57 miliar Rupiah dan pada tahun 2023 menurun sebesar 4,46 miliar Rupiah pada tahun 2024 meningkat sebesar 4,645 miliar Rupiah.

2.2.1.1. Pendapatan Daerah



Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 285 ayat 1 menyatakan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi:
 - 1. Pajak Daerah;
 - 2. Retribusi Daerah;
 - 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- b. Pendapatan transfer;
 - 1. Transfer Pemerintah Pusat
 - 2. Transfer Antar Daerah
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Perkembangan pendapatan asli daerah sejak 2020 - 2024 Kota Bitung dapat diikuti pada tabel berikut ini.

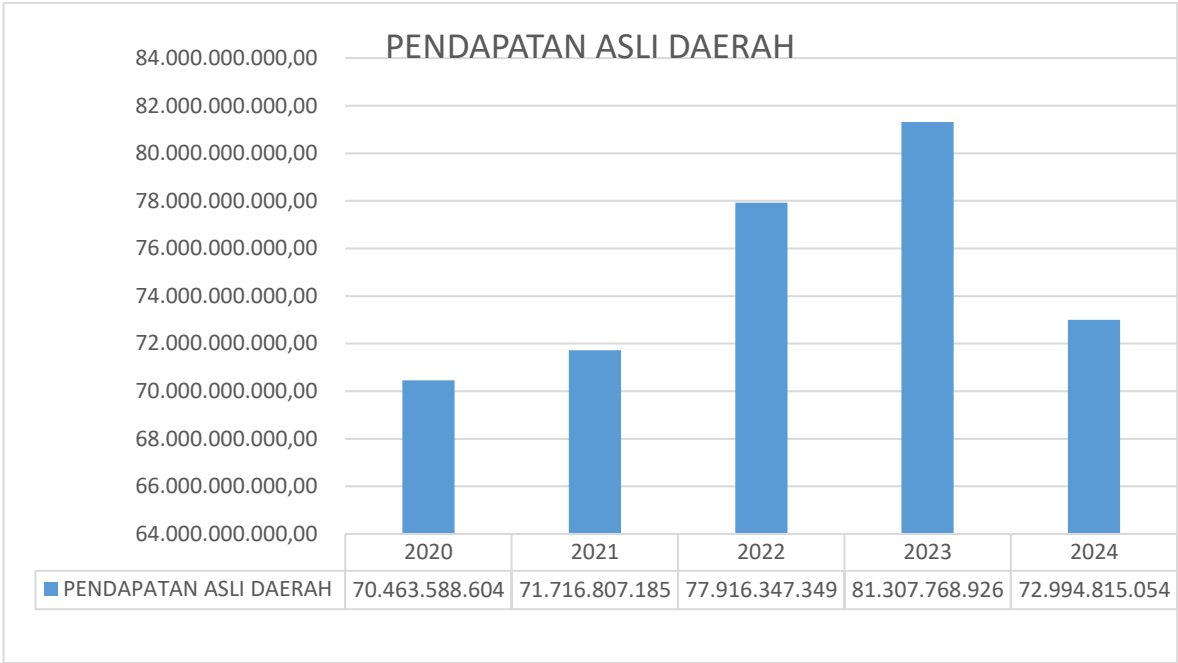
Tabel 147
**Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung
Tahun 2020 – 2024**

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2020	70.463.588.604,55
2021	71.716.807.185,36
2022	77.916.347.349,31
2023	81.307.768.926,89
2024	72.994.815.054,07
TOTAL	374.399.327.120,18

Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025.



Grafik 22
Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung
Tahun 2020 - 2024



Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025.

Total pendapatan asli daerah pada tahun 2020 sebesar 70,46 miliar Rupiah kemudian pada tahun 2021 meningkat 71,72 miliar Rupiah dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 77,92 milliar Rupiah dan pada tahun 2023 meningkat 81,307 Miliar Rupiah dan pada Tahun 2024 menurun 72,99 Miliar, penurunan ini terbesar dari penurunan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang mengalami penurunan dari 9,39 miliar menjadi 3,211 miliar.

Perkembangan pendapatan transfer Antar Pemerintah Pusat sejak 2020 - 2024 Kota Bitung dapat diikuti pada berikut ini.

Tabel 148
Pendapat Transfer Pemerintah Pusat
Kota Bitung Tahun 2020 – 2024

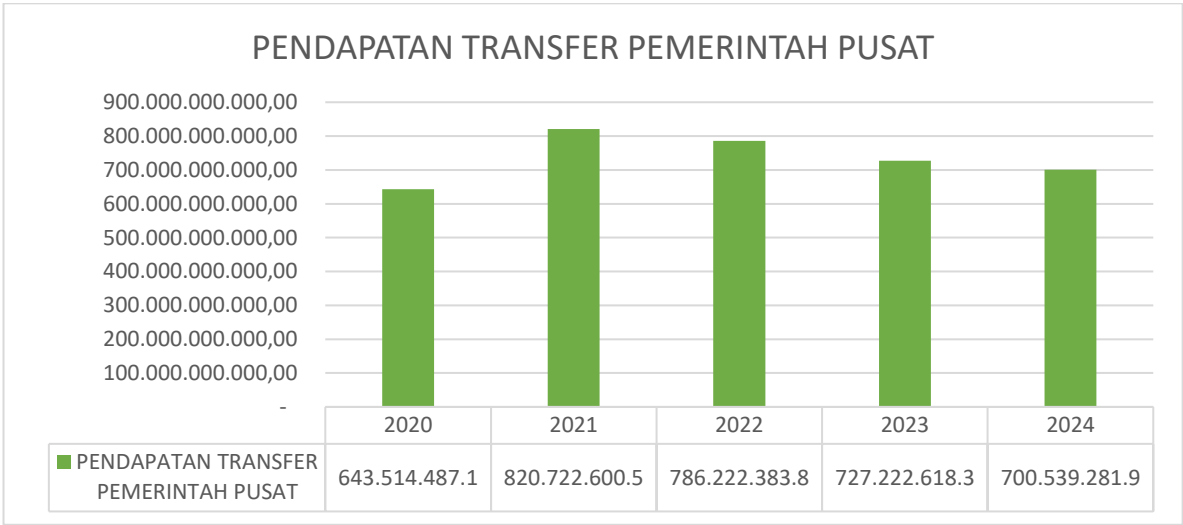
TAHUN	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
2020	643.514.487.119,00
2021	820.722.600.594,00
2022	786.222.383.818,00
2023	727.222.618.381,00
2024	700.539.281.958,00
TOTAL	3.678.221.371.870,00

Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025.



Total pendapatan transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2020 sebesar 643,51 miliar Rupiah kemudian pada tahun 2021 meningkat 820,72 miliar Rupiah dan pada tahun 2022 menurun menjadi sebesar 786,22 miliar Rupiah dan pada tahun 2023 menurun 727,22 Miliar Rupiah dan pada Tahun 2024 menurun menjadi sebesar 700,54 Miliar.

Grafik 23
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Kota Bitung Tahun 2020 – 2024



Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025.

Perkembangan pendapatan transfer Antar pemerintah Daerah sejak 2020 - 2024 Kota Bitung dapat diikuti pada tabel berikut ini.

Tabel 149
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah
Kota Bitung Tahun 2020 – 2024

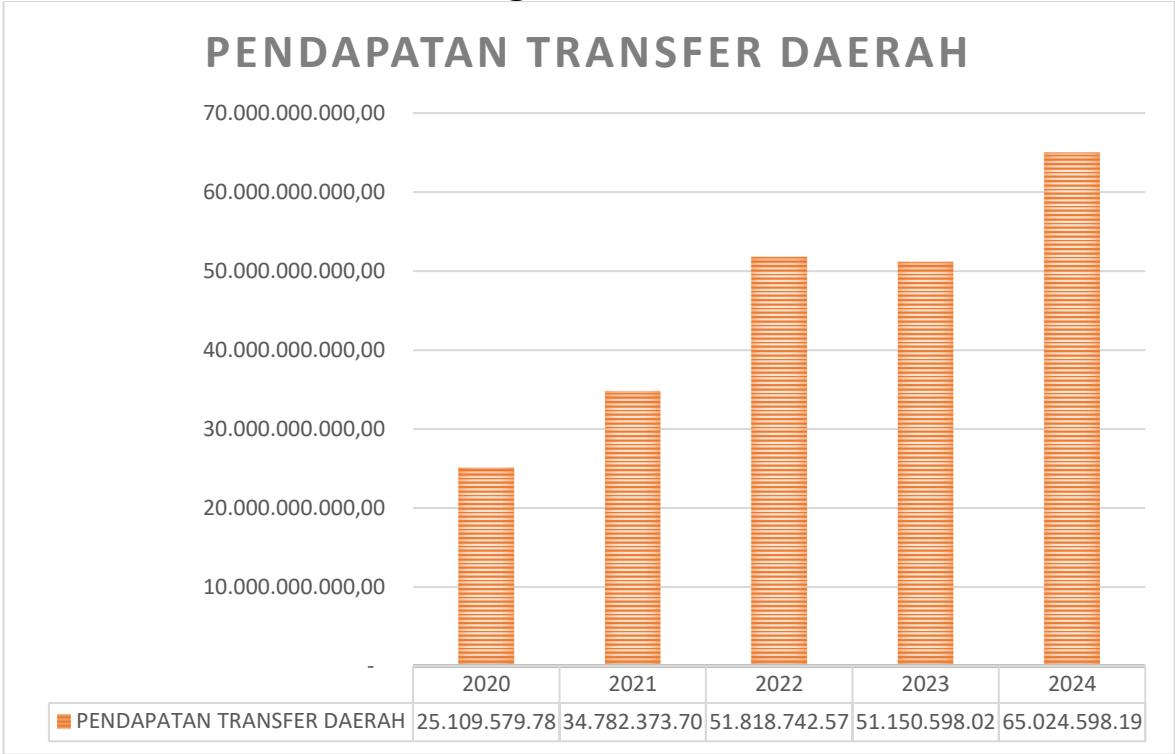
TAHUN	PENDAPATAN TRANSFER DAERAH
2020	25.109.579.781,00
2021	34.782.373.703,00
2022	51.818.742.578,00
2023	51.150.598.028,00
2024	65.024.598.191,00
TOTAL	227.885.892.281,00

Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025.

Total pendapatan transfer antar Daerah pada tahun 2020 sebesar 25,11 miliar Rupiah kemudian pada tahun 2021 meningkat 34,78 miliar Rupiah dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 51,82 miliar Rupiah dan pada tahun 2023 menurun 51,15 Miliar Rupiah dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 65,02 Miliar.



Grafik 24
Pendapatan Transfer Antar daerah
Kota Bitung Tahun 2020 – 2024



Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025.

2.1.1.2. Belanja Daerah

Perkembangan belanja dan penggunaannya Pemerintah Kota Bitung selang 2020 sampai dengan 2024 dapat diikuti pada tabel berikut ini.

Tabel 150
Belanja Operasional Kota Bitung
Tahun 2020 – 2024

TAHUN	BELANJA OPERASIONAL
2020	608.706.945.075,00
2021	651.542.700.490,00
2022	812.932.105.298,44
2023	841.267.657.536,00
2024	712.858.123.042,00
TOTAL	3.627.307.531.441,44

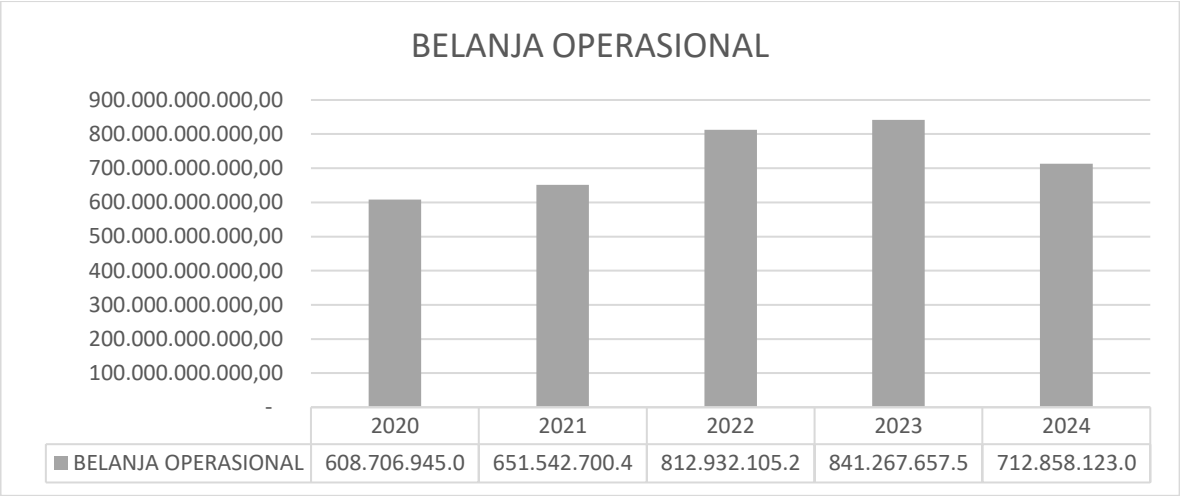
Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025.

Perkembangan belanja operasional Kota Bitung pada tahun 2020 sebesar 608,70 miliar Rupiah kemudian pada tahun 2021 meningkat 651,54 miliar Rupiah dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar



812,93 miliar Rupiah dan pada tahun 2023 meningkat 841,27 Miliar Rupiah dan pada Tahun 2024 menurun menjadi 712,86 Miliar.

Grafik 25
Belanja Operasional
Kota Bitung Tahun 2020 – 2024



Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025.

Tabel 151
Perkembangan Belanja Modal
Kota Bitung 2020 – 2024

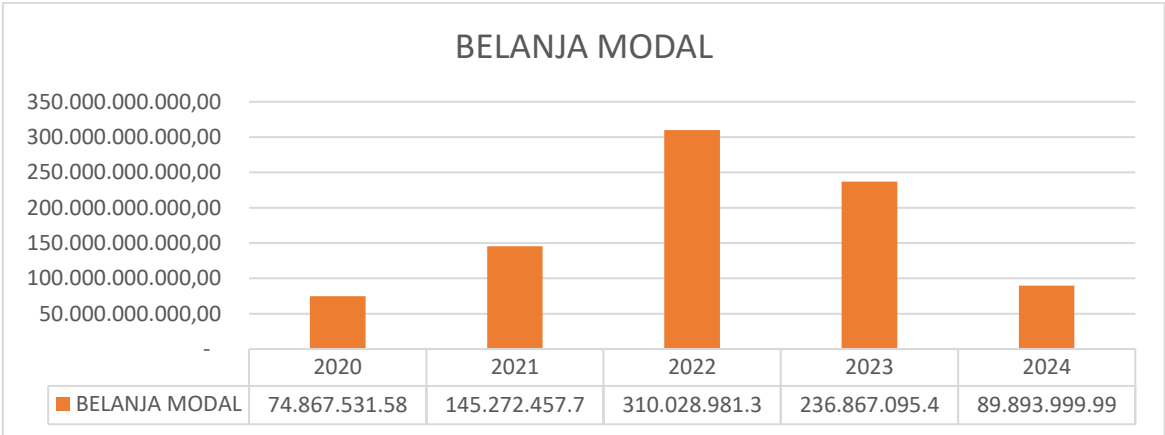
TAHUN	BELANJA MODAL
2020	74.867.531.580,00
2021	145.272.457.765,19
2022	310.028.981.358,00
2023	236.867.095.484,00
2024	89.893.999.999,00
TOTAL	856.930.066.186,19

Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025.

Perkembangan belanja modal Kota Bitung selang tahun 2020 sebesar 74,87 miliar Rupiah, kemudian pada tahun 2021 meningkat 145,27 miliar Rupiah dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 310,03 miliar Rupiah dan pada tahun 2023 menurun 236,87 Miliar Rupiah dan tahun 2024 menurun 89,89 Miliar.



Grafik 26
Perkembangan Belanja Modal Kota
Bitung 2020 – 2024



Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025.

Pada Tabel 2.152 Untuk Belanja Tak Terduga Kota Bitung selang tahun 2020 sebesar 79,81 miliar Rupiah, kemudian pada tahun 2021 menurun 11,79 miliar Rupiah dan pada tahun 2022 menurun menjadi sebesar 8,69 milliar Rupiah dan pada tahun 2023 menurun 2,87 Miliar Rupiah dan pada tahun 2024 menurun menjadi 2,53 Miliar.

Tabel 152
Perkembangan Belanja Tak Terduga
Kota Bitung 2020 – 2024

TAHUN	BELANJA TAK TERDUGA
2020	79.813.506.745,00
2021	11.799.606.101,00
2022	8.688.456.905,00
2023	2.866.871.702,00
2024	2.526.070.117,00
TOTAL	105.694.511.570,00

Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025.



Grafik 27
Perkembangan Belanja Tak Terduga
Kota Bitung 2020 – 2024



Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025.

2.1.1.3. Pembiayaan Daerah.

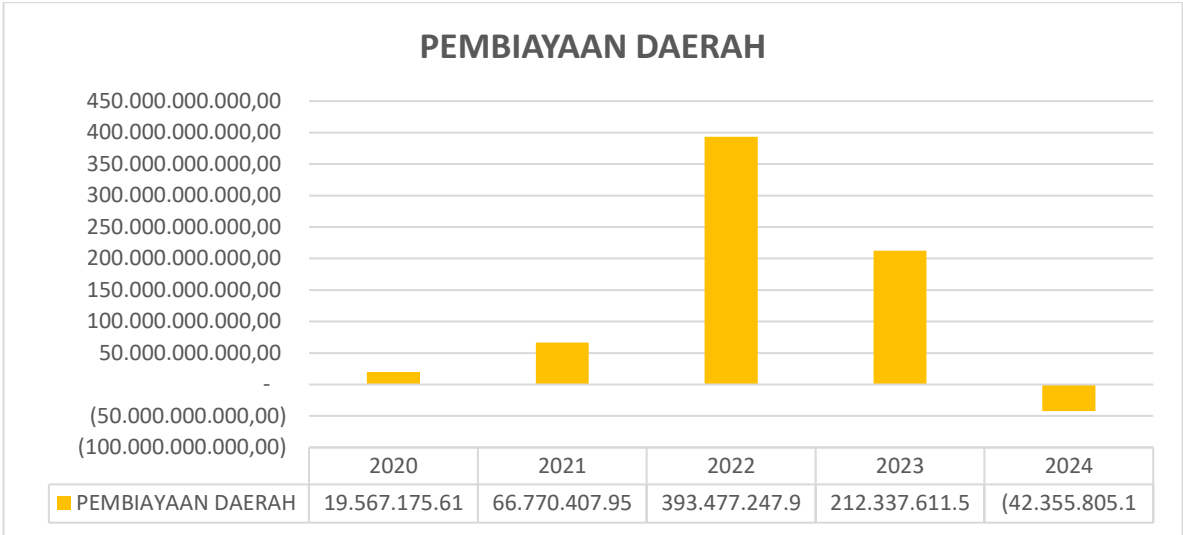
Tabel 153
Perkembangan Pembiayaan Daerah
Kota Bitung 2020 – 2024

TAHUN	PEMBIAYAAN DAERAH
2020	19.567.175.613,42
2021	66.770.407.953,97
2022	393.477.247.902,14
2023	212.337.611.562,01
2024	- 42.355.805.118,10
TOTAL	649.796.637.913,44

Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025.



Grafik 28
Perkembangan Pembiayaan Daerah
Kota Bitung 2020 – 2024



Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025.

Untuk Pembiayaan Daerah Kota Bitung pada tahun 2020 sebesar 19,58 miliar Rupiah, kemudian pada Tahun 2021 meningkat 66,77 miliar Rupiah dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 393,48 milliar Rupiah dan pada tahun 2023 menurun 212,33 Miliar Rupiah dan pada Tahun 2024 Minus 42,36 Miliar Rupiah.



2.1.1.4. Analisis Fiskal Daerah.

Tabel 154
Rasio Keuangan Daerah
Kota Bitung 2020 – 2024

	Rasio Keuangan Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
a	Kinerja Keuangan Daerah					
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/Otonomi Fiskal (PAD : Pendapatan Transfer)	11%	8%	9%	10%	10%
	Hasil	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah	Sedang
	Pola Hubungan	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
2	Rasio Ketergantungan Daerah (Pendapatan Transfer : Total Pendapatan)	89%	92%	88%	89%	90%
	Hasil	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	Rasio Desentralisasi (PAD : Jumlah Pendapatan)	9%	8%	8%	9%	9%
	Hasil 10% - 20% = Kurang					
4	Rasio Efektifitas Pendapatan/EKD (Realisasi Penerimaan Pendapatan : Target Penerimaan Pendapatan)	88,1%	81,8%	80,9%	76,8%	62,6%
	Hasil	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
5	Rasio Efisiensi Pendapatan (Total Belanja : Total Pendapatan)	101%	87%	118%	124%	94%
	Hasil	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Efisien
6a	Rasio Pertumbuhan PAD (PAD tahun n : PAD tahun n-1)	-83%	1,8%	9%	4%	-10%
6b	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	-56%	22,8%	3%	-9%	-2%
6c	Rasio Pertumbuhan Belanja	-55%	5,9%	40%	-4%	-26%
7	Rasio Aktifitas/Rasio Keserasian (Belanja Rutin : APBD)	80%	80,58%	71,84%	77,82%	88,52%
	Rasio Aktifitas/Rasio Keserasian (Belanja Modal : APBD)	10%	17,97%	27,40%	21,91%	11,16%
	Keserasian dari sisi Belanja Rutin	Kurang Serasi	Tidak Serasi	Kurang Serasi	Kurang Serasi	Tidak Serasi
	Keserasian dari sisi Belanja Modal	Kurang Serasi	Tidak Serasi	Kurang Serasi	Kurang Serasi	Tidak Serasi
8	Surplus/Defisit Anggaran (Surplus/Defisit Anggaran : Jumlah Pendapatan)	-1,1%	12,8%	-18,4%	-23,8%	5,5%
9	Indeks Kapasitas Fiskal Kab/Kota (IKFD)	0,641	0,681	1,481	1,622	1,254
	Kategori KFD	Sangat Rendah	Sangat Rendah	rendah	Tinggi	Sedang
b	Kemampuan Keuangan Daerah					
1	Share & Growth					
	Share	16%	32%	22%	18%	16%
	Rata-Rata Share					21%
	Growth	-49%	1,35%	2%	0%	1%
	Rata-Rata Growth					-8,8%
2	Rasio DSCR/Debt Service Coverage Ratio	-	802,0	30,0	21,1	4,6
	DSCR = (Pendapatan Asli Daerah + (Dana Bagi Hasil Pajak + Dana Bagi					
	DSCR = (Pendapatan Asli Daerah + (Dana Bagi Hasil Pajak + Dana Bagi	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu
3	Indeks Kemampuan Keuangan Daerah: Pendapatan Umum Daerah (PAD + DAU + DBH) - Belanja Pegawai	260.695.988.938	370.930.589.662	353.333.304.405	313.930.792.269	256.971.160.955
	Hasil	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
4	Pemetaan Kemampuan Keuangan Daerah	Kuadran IV	Kuadran IV	Kuadran IV	Kuadran IV	Kuadran IV

Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025 (diolah).



Rasio Kemandirian Keuangan Daerah atau Otonomi Fiskal pada tahun 2020 sebesar 11%, pada tahun 2021 menurun sebesar 8%, pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar 9%, pada tahun 2023 kembali meningkat sebesar 10% dan pada tahun 2024 sebesar 10%. Range antar tahun 2020 sampai 2024 berkisar 8% - 11% dimana jika Rasio Kemandirian dibawah 25 % dinilai rendah sekali dengan Pola Hubungan Instruktif yang artinya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah masih rendah (pendapatan daerah Kota Bitung didominasi oleh pendapatan transfer) berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Grafik 29
**Rasio Kemandirian
Kota Bitung Tahun 2020 – 2024**



Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025 (diolah).

Untuk rasio ketergantungan daerah (pendapatan transfer terhadap total pendapatan) pada tahun tahun 2020 89%, pada tahun 2021 meningkat 90%, dan pada tahun 2022 menurun menjadi 88% dan pada tahun 2023 sebesar 89% dan pada tahun 2024 meningkat 90%. Rasio ketergantungan Kota Bitung Tahun 2020 – 2024 pada range 88% - 90%. Rasio Ketergantungan range antara 75% - 100% masuk dalam kategori tinggi, dengan kategori nilai tinggi yang berarti pendapatan Kota Bitung masih mengandalkan dari pendapatan transfer.

Grafik 30
**Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bitung
Tahun 2020 – 2024**

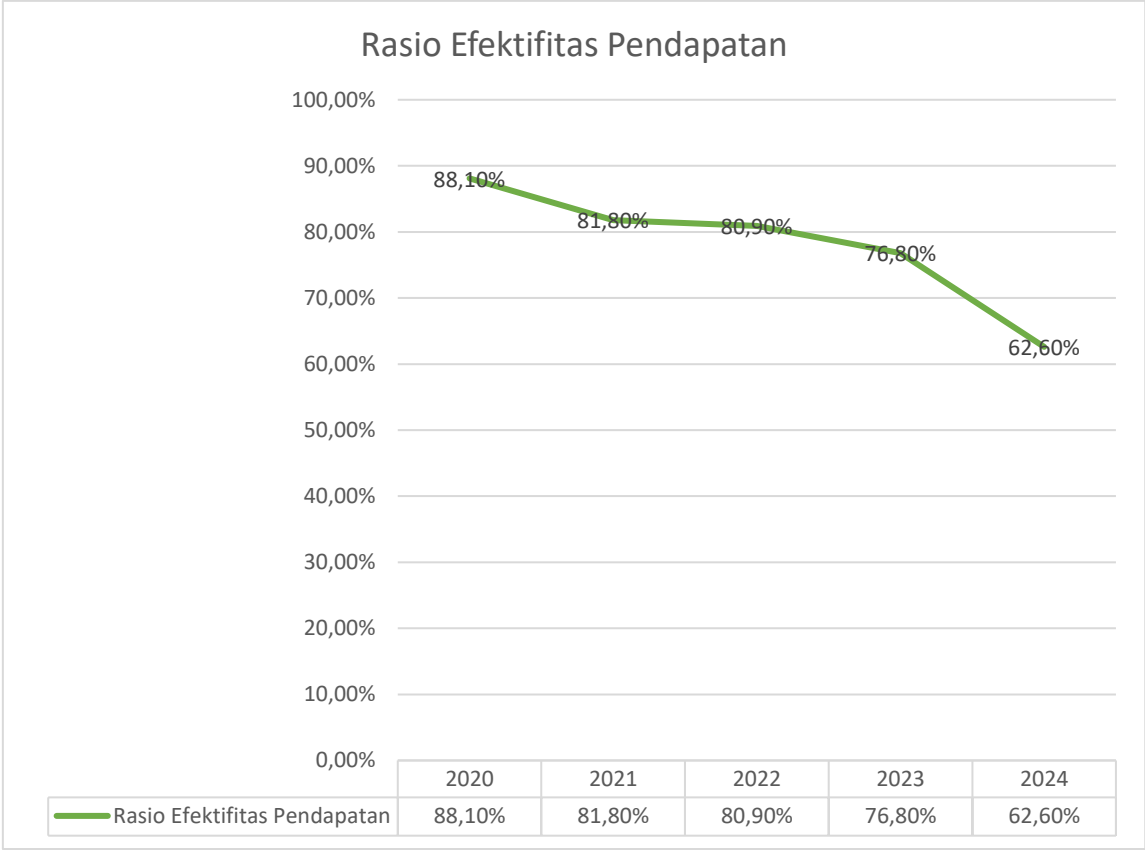


Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025 (diolah).

Untuk Rasio Efektifitas Pendapatan (yaitu realisasi pendapatan daerah dibandingkan dengan target penerimaan pendapatan) mengalami kecenderungan menurun dimana pada tahun 2020 sebesar 88,10%, selanjutnya pada tahun 2021 menurun kembali sebesar 81,80%, pada tahun 2022 sebesar 80,90% dan pada tahun 2023 menurun kembali sebesar 76,80% dan pada tahun 2024 menurun menjadi 62,60%.

Rasio Efektifitas Kota Bitung dari tahun 2020 – 2024 cenderung menurun dan dibawah 100%. Rasio Efektifitas dibawah 100% masuk kategori tidak efektif, dengan hasil tidak efektif yang artinya realisasi pendapatan yang dihasilkan tidak sesuai dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan.

Grafik 31
**Rasio Efektifitas Pendapatan
Kota Bitung Tahun 2020 – 2024**



Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025 (diolah).

C. Kondisi Pendapatan Daerah.

Tabel 155
Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2020 – 2024



03

Kode	URAIAN	REALISASI	% proporsi thd Total Pendapatan	REALISASI	% proporsi thd Total Pendapata n	REALISASI	% proporsi thd Total Pendapatan	REALISASI	% proporsi thd Total Pendapatan	Realisasi (Un-Audited)	% thd Total Pendapatan
		2020		2021		2022		2023		2024	
4	PENDAPATAN										
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH										
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	44.358.891.964,28	5,87%	51.201.717.358,35	5,37%	61.632.405.140,77	6,45%	62.060.680.487,60	7,11%	61.208.049.595,67	7,18%
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.185.511.299,00	1%	10.333.404.603,00	1%	3.533.102.900,00	0%	4.659.089.760,00	1%	4.035.475.656,00	0%
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.791.696.245,00	0%	3.268.125.144,00	0%	2.819.722.964,00	0%	5.192.182.568,00	1%	4.540.125.324,00	1%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.127.489.096,27	2%	6.913.560.080,01	1%	9.931.116.344,54	1%	9.395.816.111,29	1%	3.211.164.478,40	0%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	70.463.588.604,55	9,33%	71.716.807.185,36	7,52%	77.916.347.349,31	8,15%	81.307.768.926,89	9,31%	72.994.815.054,07	8,56%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER										
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT										
4.2.1.01	Dana Perimbangan										
4.2.1.01.01	Dana Bagi Hasil	49.952.353.107,00	7%	185.290.564.599,00	19,4%	172.015.655.328,00	18%	113.273.062.531,00	13%	56.382.292.000,00	7%
4.2.1.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	473.502.344.000,00	63%	464.686.698.000,00	49%	463.721.367.716,00	49%	483.353.331.000,00	55%	507.854.817.308,00	60%
4.2.1.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	52.742.868.744,00	7%	109.894.596.163,00	12%	63.107.531.230,00	7%	27.038.872.350,00	3%	56.679.291.833,00	7%
4.2.1.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik	49.843.252.268,00	7%	40.153.498.832,00	4%	41.006.622.544,00	4%	79.180.796.500,00	9%	76.624.184.817,00	9%
4.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	17.473.669.000,00	2%	20.697.243.000,00	2%	46.371.207.000,00	5%	24.376.556.000,00	3%	2.998.696.000,00	0%
4.2.1.03	Dana Otonomi Khusus & Tambahan	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		0%
4.2.1.04	Dana Keistimewaan	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		0%
4.2.1.05	Dana Desa	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		0%
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.514.487.119,00	85,21%	820.722.600.594,00	86,02%	786.222.383.818,00	82,26%	727.222.618.381,00	83,29%	700.539.281.958,00	82,19%
4.2.2	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH										
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	25.109.579.781,00	3%	34.782.373.703,00	4%	51.818.742.578,00	5%	51.150.598.028,00	6%	65.024.598.191,00	8%
4.2.2.02	Bantuan Keuangan	-	0%	-	0%		0%	-	0%		0%
	Jumlah Transfer Antar Pemerintah Daerah	25.109.579.781,00	3,32%	34.782.373.703,00	3,65%	51.818.742.578,00	5%	51.150.598.028,00	6%	65.024.598.191,00	8%
		-									
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			26.930.858.278,00							
4.3.1	PENDAPATAN HIBAH	16.113.930.000,00	2%		0%		0%	-	0%	-	0%
4.3.2	DANA DARURAT	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		0%
4.3.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN	-	0%		0%	39.788.339.355,00	4%	13.442.293.462,00	2%	13.737.200.864,00	2%
	Jumlah Lain - lain Pendapatan yang Sah	16.113.930.000,00	2,13%	26.930.858.278,00	0%	39.788.339.355,00	4%	13.442.293.462,00	2%	13.737.200.864,00	2%
	JUMLAH PENDAPATAN	755.201.585.504,55	100%	954.152.639.760,36	97%	955.745.813.100,31	100%	873.123.278.797,89	100%	852.295.896.067,07	100%

Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025 (Data Diolah).

Pendapatan daerah Kota Bitung sampai pada 2020 dinominasi oleh Pendapatan Transfer pemerintah Pusat sebesar 85.21 %, di mana untuk Pendapatan Asli Daerah hanya berkisar 9,33%. Dari segi Pendapatan Asli

Daerah tampaknya pajak daerah memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,87%. Untuk Tahun 2021 Pendapatan Transfer pemerintah Pusat sebesar 86,02% dan dari segi pendapatan asli daerah proporsi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 5,37%. Untuk Tahun 2022 Pendapatan Transfer pemerintah Pusat sebesar 82,26% dan dari segi pendapatan asli daerah proporsi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 6,45%. Untuk Tahun 2023 Pendapatan Transfer pemerintah Pusat sebesar 83,29% dan dari segi pendapatan asli daerah proporsi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 7,11%. Untuk Tahun 2024 Pendapatan Transfer pemerintah Pusat sebesar 82,19% dan dari segi pendapatan asli daerah proporsi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 7,18%.

Perkembangan Pajak daerah sepanjang 5 tahun terakhir memperlihatkan pertumbuhan yang relatif baik yakni rata-rata sebesar 6,40 %/tahun, dan persentase proporsi terhadap total pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 7,18%. Untuk pendapatan retribusi daerah rata - rata prosentase proporsi terhadap total pendapatan hanya 0,74%. Pada sisi lain, walaupun relatif kecil tapi perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rata-rata 0,43 %/tahun.

Pada Pendapatan Transfer tahun 2020 tampaknya dinominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai sebesar 62,70 % dan terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 1,81 %. Kemudian sepanjang 5 tahun terakhir juga peningkatan terjadi pada Dana Bagi Hasil bukan pajak dan terjadi rata – rata pertumbuhan pertahun sebesar 44,85 %. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) berfluktuasi relatif dengan rata-rata pertahun sebesar 29.56%/Tahun.

D. Analisis Belanja Daerah.

Proporsi penggunaan anggaran perlu dijaga masing-masing komponennya, namun yang perlu diperhitungkan secara cermat adalah pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Lebih jelasnya proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah Kota Bitung dapat diikuti pada Tabel 2.156.

Tabel 156
**Analisis Proporsi Belanja Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Kota Bitung 2020 – 2024**



No	TAHUN ANGGARAN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (KHUSUSNYA BELANJA PEGAWAI) (RP)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (RP)	PROSENTASE (%)
1	2020	333.222.296.774,00	770.362.483.400,00	43,26
2	2021	350.763.480.122,00	812.176.764.356,19	43,19
3	2022	360.320.065.988,00	1.134.649.543.561,44	31,76
4	2023	364.003.370.189,00	1.084.426.560.968,00	33,57
5	2024	380.260.763.407,00	846.377.428.110,00	44,93

Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025 (Data Diolah).

Secara keseluruhan belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, dimana rata-rata belanja operasi terhadap keseluruhan belanja daerah sebesar 80,14 %, sedangkan belanja modal memiliki kontribusi sebesar 19,05% terhadap keseluruhan total belanja daerah, sedangkan Belanja Tidak Terduga memiliki kontribusi sebesar 2,67%. Porsi belanja modal tampaknya sudah mengikuti ketentuan penggunaan belanja bahkan melebihi, namun jumlah tersebut idealnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi mengingat kebutuhan belanja ini relatif besar karena menyangkut infrastruktur yang sangat menentukan kinerja sosial ekonomi dan lainnya.

Dilihat dari belanja operasional, maka yang mendominasi adalah belanja pegawai yakni sebesar 39,81 % terhadap total pendapatan. Kemudian jika diikuti dari perkembangan belanja total sepanjang 5 tahun terakhir rasio pertumbuhan belanja pada tahun pada tahun 2020 sebesar -14,9%, dan pada tahun 2021 sebesar 5,9%, selanjutnya pada tahun 2022 sebesar 40% dan pada tahun 2023 sebesar -4%, dan pada tahun 2024 sebesar -63%.



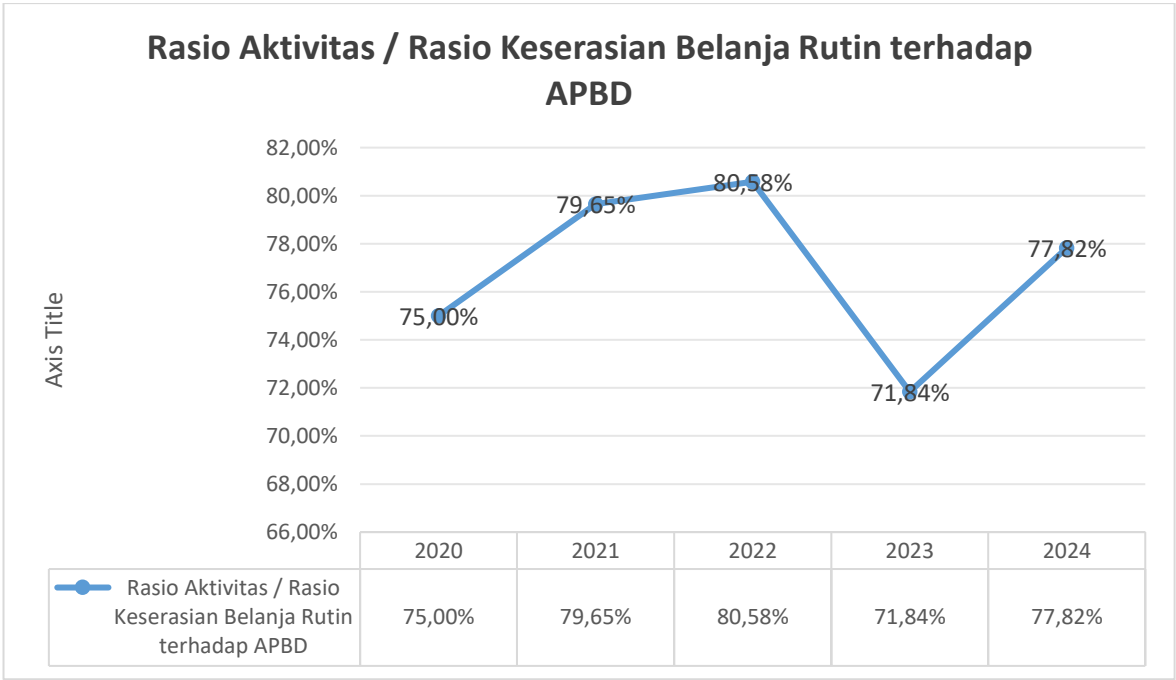
Grafik 32
**Rasio Pertumbuhan Belanja
Kota Bitung Tahun 2020 – 2024**



Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025 (Data Diolah).

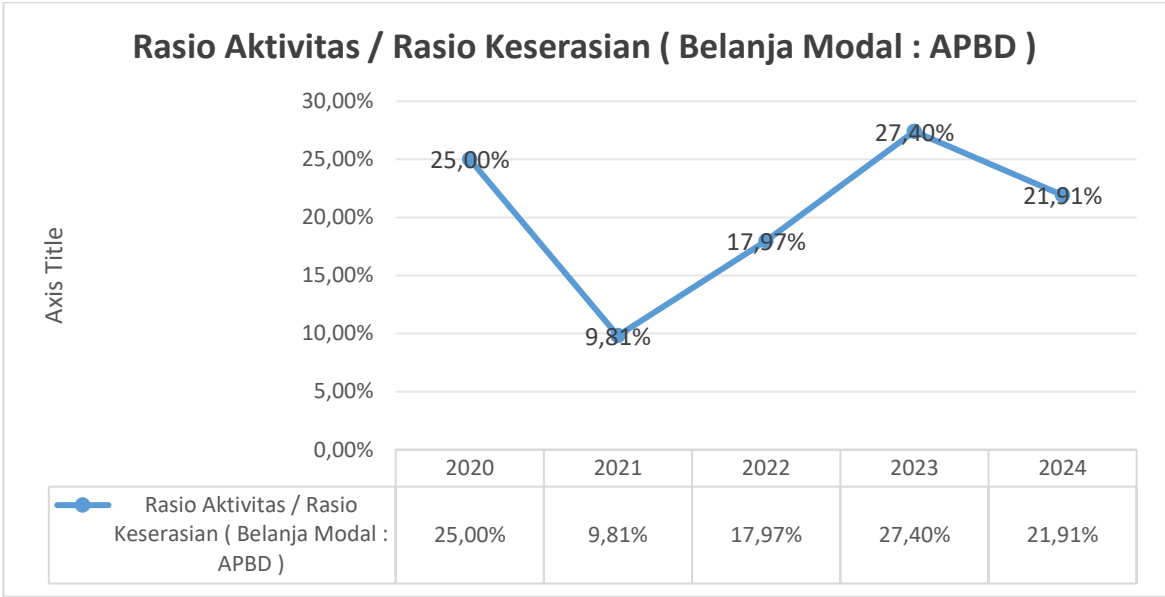
Sedangkan untuk Rasio Aktivitas / Rasio Kesperasian yaitu belanja rutin terhadap APBD Kota Bitung, pada tahun 2020 sebesar 75 %, pada tahun 2021 meningkat menjadi 79,65 %, dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 80,58 %, selanjutnya pada tahun 2023 menurun menjadi 71,84 % dan pada tahun 2024 meningkat kembali sebesar 77,82 %.

Grafik 33
**Rasio Aktivitas / rasio keserasian Belanja Rutin terhadap APBD
Kota Bitung Tahun 2020 – 2024**



Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025 (Data Diolah).

Grafik 34
Rasio Aktivitas / rasio keserasian dari sisi Belanja Modal
Kota Bitung Tahun 2020 – 2024



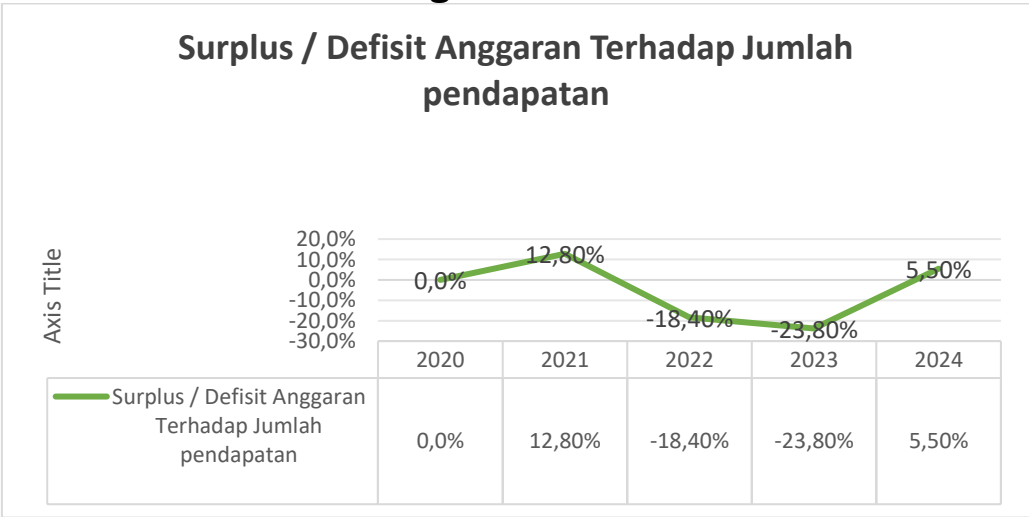
Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025 (Data Diolah).

E. Analisis Pembiayaan.

Kinerja keuangan daerah selang 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan 4 (empat) tahun terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang relatif besar yakni pada tahun 2022 - 2023, namun pada 2021 tampaknya keuangan daerah dapat dikelola dengan SILPA yang wajar.

Berdasarkan surplus / defisit anggaran terhadap pendapatan pada tahun 2020 terjadi defisit anggaran sebesar - 1,1 % dan pada tahun 2021 terjadi surplus anggaran sebesar 12,8 % terhadap pendapatan dan pada tahun 2022 kembali mengalami defisit sebesar -18,4% dan pada tahun 2023 kembali defisit meningkat sebesar 23,8 % dan pada tahun 2024 terjadi surplus 5,5%.

Grafik 35
Surplus / Defisit Anggaran Terhadap Jumlah pendapatan
Kota Bitung Tahun 2020 – 2024

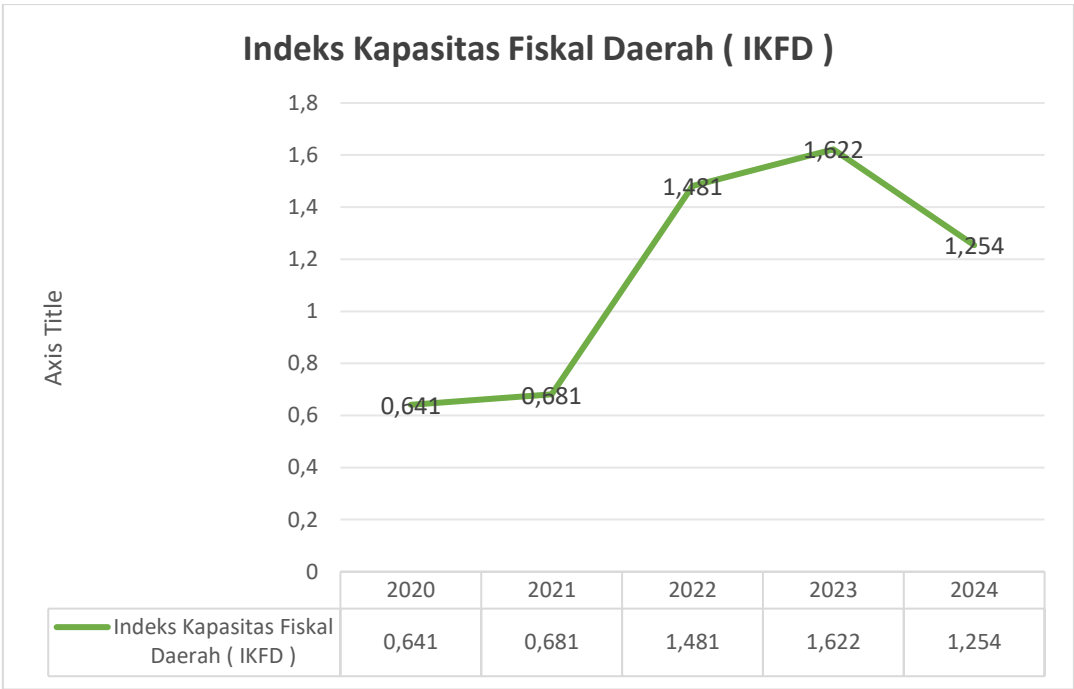




Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025 (Data Diolah).

Berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah maka pada tahun 2020 indeks kapasitas Kota Bitung sebesar 0,641 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,681 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,481 pada tahun 2023 meningkat menjadi 1,622 dan pada tahun 2024 menurun menjadi 1,254.

Grafik 36
Indeks Kapasitas Fiskal
Kota Bitung



Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025 (Data Diolah).

2.1.1.5. Neraca Daerah.

Analisis Neraca Daerah daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

Pertama, rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

- Rasio lancar = aktiva lancar: kewajiban jangka pendek
- Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan): kewajiban jangka pendek

Kedua, rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka



panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

- Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang: total aset
- Rasio hutang terhadap modal = total hutang: total ekuitas

Ketiga, rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

- Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut.
- Rata-rata umur piutang = perputaran piutang Di-mana Perputaran piutang = pendapatan daerah/rata-rata piutang pendapatan daerah. Sedangkan,
- Rata-rata piutang pendapatan daerah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang): Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut.
- Rata-rata umur persediaan = perputaran persediaan Dimana: Perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun: rata-rata nilai persediaan. Sedangkan,
- rata-rata nilai persediaan = (saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan)



Handwritten signature or mark in blue ink.

Tabel 157
Tabel Perkembangan Neraca Kota Bitung 2020 - 2024



URAIAN		2020	2021	2022	2023	2024
ASET						
ASET LANCAR						
	Kas di Kas Daerah	5.465.286.758,44	211.402.996.814,87	217.428.422.043,92	711.297.169,81	3.460.566.132,55
	Kas di Bendahara Penerimaan	2.066.195,00	242,00	724.730,00	2.458.935,00	1.355.000,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	99.846.030,44	60.550.202,18	116.883.189,00	77.583.895,00	2.618,00
	Kas di BLUD	-	-	-	-	-
	Kas Lainnya	-	-	-	603.560.500,00	29.802.500,00
	Setara Kas	-	-	-	-	-
	Kas di Bendahara FKTP	840.458.850,00	960.592.942,00	560.622.162,00	387.075.938,00	76.761.174,00
	Kas di Bendahara BOS	2.748.204.905,00	165.360.042,00	270.288.179,00	125.936.093,00	86.542.564,00
	Kas Di Bendahara BOK Puskesmas	-	-	-	3.390.836.037,00	1.708.219.154,00
	Kas Di Bendahara JKN	-	-	-	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
	Piutang Pendapatan	40.602.386.810,26	50.756.147.648,66	49.020.756.320,09	47.611.352.076,02	56.460.866.231,99
	Piutang Lainnya	948.711.860,09	948.711.860,09	948.711.860,09	1.000.461.860,09	1.000.461.860,09
	Penyisihan Piutang	(12.950.975.385,23)	(14.631.220.782,56)	(16.052.311.874,71)	(16.387.427.887,09)	(18.372.719.044,64)
	Beban Dibayar Dimuka	-	-	3.168.260.223,00	-	-
	Persediaan	8.026.145.656,29	7.841.949.438,16	11.104.607.514,67	11.643.994.034,25	7.540.096.156,34
	JUMLAH ASET LANCAR	45.782.131.680,29	257.505.088.407,40	266.566.964.347,06	49.167.128.651,08	51.991.954.346,33
INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lain	-	-	-	-	-
	Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-
	Dana Bergulir	-	-	-	-	-
	Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	Investasi Non Permanen Lainnya	12.347.644.719,00	13.211.065.378,00	14.137.490.834,00	14.079.437.274,00	14.057.335.626,00
	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(4.693.454.505,50)	(4.976.240.730,50)	(6.151.940.297,00)	(7.336.069.124,50)	(8.604.617.261,25)
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non	7.654.190.213,50	8.234.824.647,50	7.985.550.537,00	6.743.368.149,50	5.452.718.364,75
	Investasi Jangka Panjang Permanen					
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	150.778.348.749,39	155.076.682.675,80	155.930.439.866,00	157.970.275.389,00	163.108.546.126,00
	Properti Investasi - Gedung Bangunan	-	-	-	1.092.700.000,00	1.092.700.000,00
	Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi	-	-	-	(189.401.333,00)	(211.255.333,00)
	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	150.778.348.749,39	155.076.682.675,80	155.930.439.866,00	158.873.574.056,00	163.989.990.793,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	158.432.538.962,89	163.311.507.323,30	163.915.990.403,00	165.616.942.205,50	169.442.709.157,75

	ASET TETAP	2020	2021	2022	2023	2024
	Tanah	353.648.430.699,50	356.677.301.364,50	527.471.663.364,50	558.737.303.455,50	621.639.297.914,13
	Peralatan dan Mesin	345.198.700.259,00	392.548.990.367,00	444.925.193.884,00	484.572.267.187,00	510.677.268.196,00
	Gedung dan Bangunan	506.123.260.636,18	547.038.849.322,18	654.168.074.245,18	908.455.504.468,93	930.830.857.555,93
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.318.266.500.535,74	1.353.910.015.535,74	1.508.440.802.538,34	1.610.961.471.175,34	1.629.349.128.036,34
	Aset Tetap Lainnya	20.151.581.903,39	21.536.259.893,39	24.045.475.433,39	26.225.723.190,39	28.942.098.790,39
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.580.625.052,98	15.885.637.602,17	76.602.759.754,75	10.290.737.798,00	26.663.727.203,00
	Akumulasi Penyusutan	(966.601.418.484,29)	(1.107.540.919.100,15)	(1.268.456.437.272,29)	(1.421.759.555.798,25)	(1.566.465.740.317,92)
	JUMLAH ASET TETAP	1.579.367.680.602,50	1.580.056.134.984,83	1.967.197.531.947,87	2.177.483.451.476,91	2.181.636.637.377,87
	DANA CADANGAN					
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	JUMLAH DANA CADANGAN	0	0	0	0	0
	ASET LAINNYA					
	Tagihan Jangka Panjang	3.520.806.064,00	3.291.201.463,00	3.291.201.463,00	3.338.838.452,00	3.338.838.452,00
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	2.399.992.000,00	4.617.992.000,00	4.617.992.000,00
	Aset Tidak Berwujud	-	399.992.000,00	15.042.357.748,45	15.680.904.977,45	15.429.869.772,45
	Aset Lain-lain	35.545.702.920,45	35.545.702.920,45	69.033.454.531,00	11.944.823.000,00	1.916.066.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	39.066.508.984,45	39.236.896.383,45	89.767.005.742,45	35.582.558.429,45	25.302.766.224,45
	JUMLAH ASET	1.822.648.860.230,13	2.040.109.627.098,98	2.487.447.492.440,38	2.427.850.080.762,94	2.428.374.067.106,40
	KEWAJIBAN					
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	193.489.595,91	281.216.884,91	803.422.862,91	839.482.929,91	698.418.449,68
	Utang Bunga	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	6.849.872.492,00	41.099.234.952,00	41.099.234.952,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	388.619.713,33	279.654.632,00	46.666.666,00	131.067.362,18	1.664.596.579,18
	Utang Beban	18.871.821.256,00	15.884.165.984,00	8.986.929.175,00	27.577.196.580,00	58.645.342.829,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	12.160.221.728,00	7.751.497.528,00	1.623.605.619,00	46.330.219.421,00	211.225.110.065,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31.614.152.293,24	24.196.535.028,91	18.310.496.814,91	115.977.201.245,09	313.332.702.874,86
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
	Utang Dalam Negeri	-	62.500.000.000	239.745.517.508,00	202.071.218.802,00	160.971.983.850,00
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	62.500.000.000,00	239.745.517.508,00	202.071.218.802,00	160.971.983.850,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	31.614.152.293,24	86.696.535.028,91	258.056.014.322,91	318.048.420.047,09	474.304.686.724,86
	EKUITAS					
	EKUITAS	1.791.034.707.936,89	1.953.413.092.070,07	2.229.391.478.117,47	2.109.801.660.715,85	1.954.069.380.381,54
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.822.648.860.230,13	2.040.109.627.098,98	2.487.447.492.440,38	2.427.850.080.762,94	2.428.374.067.106,40

Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025 (Data Diolah).

2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Ke Depan.

2.2.2.1 Kebijakan Alokasi Anggaran.

Kebijakan alokasi anggaran merupakan kebijakan yang ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur persentase minimal dan maksimal belanja untuk sektor-sektor strategis. Berikut analisis kepatuhan belanja Kota Bitung terhadap regulasi tersebut:

1. Belanja Pegawai.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan maksimal 30% dari total APBD untuk daerah yang masih bergantung pada transfer pusat.

Pemerintah Kota Bitung mulai Tahun 2027 merencanakan alokasi belanja Pegawai sebesar 30%, sehingga hal ini tentunya akan berakibat pada besaran belanja-belanja lainnya serta proyeksi pendapatan juga mengalami proyeksi pada angka yang paling optimis.

2. Belanja Pendidikan dan Kesehatan.

Berdasarkan alokasi setiap tahun alokasi belanja Pendidikan dan Kesehatan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada, dan kedepan untuk lima tahunnya akan tetap direncanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. Belanja Infrastruktur Publik.

Untuk belanja Infrastruktur Publik dalam lima tahun kedepan akan direncanakan sesuai dengan besaran yang ada sebagaimana yang diatur dalam regulasi dan ketentuan yang ada yaitu sebesar 40%, dan hal ini dalam proyeksi perhitungan alokasi anggaran dalam RPJMD Kota Bitung tahun 2025-2029 telah mempertihungkannya.

Berdasarkan hal-hal di atas yang menjadi pertimbangan, serta berdasarkan proyeksi yang berada pada kondisi optimis terhadap kapasitas kemampuan keuangan daerah, maka kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok Prioritas. Metode kerangka *Capital Investment Planning* (CIP) National Urban Development Project (NUDP) merupakan metode pendekatan yang



dipertimbangkan untuk diterapkan dalam penyusunan dokumen perencanaan melalui tahapan metode prioritis, analisis dampak (sosial lingkungan, ekonomi, anggaran) serta pertimbangan kebencanaan khususnya program/ kegiatan/ sub kegiatan infrastruktur (belanja modal).

Dengan diterapkannya metode pendekatan kerangka kerja melalui Aplikasi CIP akan mempermudah dan membantu dalam program/kegiatan/sub kegiatan infrastruktur prioritas yang akan dilaksanakan. Berkaitan dengan hal tersebut alokasi kerangka pendanaan berdasarkan prioritas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 158
**Tabel Perkembangan Proyeksi Pendapatan dan belanja
Daerah Kota Bitung
Tahun 2025 – 2030**

KODE	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120.833.483.532	137.795.942.607	195.272.371.292	203.892.238.750	212.925.164.685	222.391.443.321
4.1,01	Pajak Daerah	94.935.355.795	107.946.238.388	160.440.751.294	168.462.788.858	176.885.928.301	185.730.224.716
4.1,02	Retribusi Daerah	15.922.805.257	19.107.366.308	22.928.839.570	23.387.416.361	23.855.164.689	24.332.267.982
4.1,03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.940.125.324	4.940.125.324	4.940.125.324	4.940.125.324	4.940.125.324	4.940.125.324
4.1,04	Lain-lain PAD yang Sah	4.835.177.156	5.802.212.587	6.962.655.105	7.101.908.207	7.243.946.371	7.388.825.298
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	729.435.450.251	916.786.013.221	1.152.387.191.745	1.185.382.401.270	1.209.090.049.296	1.233.271.850.282
4.2,01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	691.057.882.000	870.732.931.320	1.097.123.493.463	1.119.065.963.332	1.141.447.282.599	1.164.276.228.251
4.2,02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.377.568.251	46.053.081.901	55.263.698.281	66.316.437.938	67.642.766.696	68.995.622.030
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.757.888.750	16.233.677.625	17.857.045.388	18.214.186.295	18.578.470.021	18.950.039.422
4.3,03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.757.888.750	16.233.677.625	17.857.045.388	18.214.186.295	18.578.470.021	18.950.039.422
	Jumlah Pendapatan	864.826.802.533	1.070.815.633.453	1.365.516.608.424	1.407.488.826.316	1.440.593.684.001	1.474.613.333.024
5	BELANJA						
5.1	BELANJA OPERASI	734.272.181.232	889.952.386.268	1.115.853.900.875	1.156.669.584.027	1.199.209.594.960	1.245.116.168.402
5.1,01	Belanja Pegawai	415.002.900.690	427.452.987.711	440.276.577.342	457.887.640.436	476.203.146.053	495.251.271.895
5.1,02	Belanja Barang dan Jasa	288.323.160.324	426.718.277.279	631.543.050.373	656.804.772.388	683.076.963.283	710.400.041.814
5.1,03	Belanja Bunga	11.602.319.410	8.699.800.147	6.120.423.577	3.553.413.876	988.759.936	-
5.1,05	Belanja Hibah	13.343.800.808	18.681.321.131	26.153.849.584	26.546.157.327	26.944.349.687	27.348.514.933
5.1,06	Belanja Bantuan Sosial	6.000.000.000	8.400.000.000	11.760.000.000	11.877.600.000	11.996.376.000	12.116.339.760
5.2	BELANJA MODAL	89.627.924.161	134.670.176.935	203.911.987.193	210.109.482.131	216.508.496.020	223.116.785.450
5.2,01	Belanja Modal Tanah	7.185.000.000	8.239.750.000	9.475.712.500	9.685.226.750	9.858.531.285	10.055.701.911
5.2,02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.894.267.671	29.841.401.506	44.762.102.260	46.104.965.327	47.488.114.287	48.912.757.716
5.2,03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.884.020.052	37.326.030.078	55.989.045.117	57.668.716.471	59.398.777.965	61.180.741.304
5.2,04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.619.790.538	56.991.664.861	91.186.663.777	93.922.263.691	96.739.931.601	99.642.129.549
5.2,05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.084.845.900	2.271.330.490	2.498.463.539	2.748.309.893	3.023.140.882	3.325.454.970
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.327.462.189	5.593.835.298	5.873.527.063	6.167.203.417	6.475.563.587	6.799.341.767
5.3,01	Belanja Tidak Terduga	5.327.462.189	5.593.835.298	5.873.527.063	6.167.203.417	6.475.563.587	6.799.341.767
	Jumlah Belanja	829.227.567.581	1.030.216.398.501	1.325.639.415.132	1.372.946.269.575	1.422.193.654.567	1.475.032.295.619
	Total Surplus/(Defisit)	35.599.234.952	40.599.234.952	39.877.193.293	34.542.556.741	18.400.029.434	(418.962.595)



KODE	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.500.000.000	500.000.000	1.222.041.659	8.056.678.211	17.349.313.314	1.918.962.595
6.1,01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000	-	722.041.659	7.556.678.211	16.849.313.314	1.418.962.595
6.1,06	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	69.193.207.058	69.193.207.058	69.193.207.058	69.193.207.058	69.193.207.058	69.193.207.058
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41.099.234.952	41.099.234.952	41.099.234.952	42.599.234.952	35.749.342.748	1.500.000.000
6.2,02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
6.2,03	Pembayaran Cicilan Pokok Hutang	41.099.234.952	41.099.234.952	41.099.234.952	41.099.234.952	34.249.342.748	-
6.2,04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	41.099.234.952	41.099.234.952	41.099.234.952	42.599.234.952	35.749.342.748	1.500.000.000
	Pembiayaan Netto	(35.599.234.952)	(40.599.234.952)	(39.877.193.293)	(34.542.556.741)	(18.400.029.434)	418.962.595
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)	0	0	0	0	0

Sumber data: data Diolah.

Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan digunakan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk belanja dalam kurun waktu 2026 - 2030. Penghitungan kerangka pendanaan setidaknya memperhatikan beberapa hal diantaranya besaran penerimaan yang mungkin didapat dan besaran pengeluaran daerah yang mungkin terjadi. Penerimaan yang terdiri dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran yang terdiri dari belanja wajib dan mengikat dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran tersebut yang nantinya akan menjadi kapasitas riil keuangan daerah.

Kapasitas riil keuangan daerah Kota Bitung dari tahun 2026 hingga 2030 diproyeksi mengalami trend peningkatan, sekalipun ada kemungkinan mengalami fluktuasi karena dipengaruhi oleh dinamika perekonomian secara nasional, dimana perekonomian menghadapi banyak tantangan khususnya sebagai dampak dari ketidakpastian ekonomi global. Hal ini dapat mempengaruhi penerimaan negara yang memiliki efek terhadap besaran transfer ke daerah.

Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah tentunya di dasari pada proyeksi pendapatan yang sangat optimis, sehingga angka proyeksi pendapatannya sangat tinggi. Hal ini dilakukan karena pada saat penyusunan RPJMD Kota Bitung tahun 2025-2029 digunakan proyeksi

dengan pendekatan pertumbuhan dimana dalam upaya untuk memenuhi besaran belanja pegawai yang pada tahun 2027 harus sebesar 30 persen, walaupun nantinya pada saat perhitungan keuangan daerah yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bitung tahun 2026-2030 harus dilakukan perhitungan karena harus melihat kondisi dinamika yang ada baik kondisi ekonomi global, nasional maupun regional serta melihat kemampuan keuangan negara yang ada.

Adapun besaran kapasitas riil keuangan secara lengkap daerah Kota Bitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 159
**Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Kota Bitung Tahun 2026 - 2030**

Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Kota Bitung Tahun 2026 - 2030						
No	URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	1.070.815.633.453,32	1.365.516.608.424,41	1.407.488.826.315,88	1.440.593.684.001,47	1.474.613.333.024,06
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	137.795.942.607,12	195.272.371.292,27	203.892.238.750,44	212.925.164.684,72	222.391.443.320,97
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	107.946.238.338	160.440.751.293,55	168.462.788.858,23	176.885.928.501,14	185.730.224.716,20
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	13.107.368.338	22.928.639.570,08	23.587.416.361,48	23.885.164.688,71	24.332.267.982,49
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan	4.940.125.324	4.940.125.324,00	4.940.125.324,00	4.940.125.324,00	4.940.125.324,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli	5.002.212.557	6.962.655.104,64	7.101.908.206,73	7.243.946.570,87	7.388.825.298,28
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	916.786.013.221,20	1.152.387.191.744,64	1.185.382.401.270,19	1.209.090.049.295,59	1.233.271.850.281,51
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat -	870.732.931.320,00	1.097.123.493.463,20	1.119.065.963.332,46	1.141.447.282.599,11	1.164.276.228.251,10
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.053.081.901,20	55.263.698.281,44	66.316.437.937,73	67.642.766.696,48	68.995.622.030,41
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.233.677.625,00	17.857.045.387,50	18.214.186.295,25	18.578.470.021,16	18.950.039.421,58
2	PENERIMAAN DAERAH					
3	TOTAL PENERIMAAN	1.070.815.633.453,32	1.365.516.608.424,41	1.407.488.826.315,88	1.440.593.684.001,47	1.474.613.333.024,06
	DIKURANGI					
4	BELANJA WAJIB MENGIKAT	454.834.108.988,90	472.550.850.502,70	487.987.211.639,14	504.136.255.676,48	522.599.786.827,91
	KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	615.981.524.464,42	892.965.757.921,71	919.501.614.676,74	936.457.428.324,99	952.013.546.196,15

Sumber: BKAD Pemerintah Kota Bitung 2025 (Data Diolah).

2.2.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Ketidak pastian geopolitik global dengan dinamika yang terjadi di wilayah timur tengah, serta kondisi nasional dan daerah menjadi tantangan dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah Kota Bitung untuk lima tahun kedepan. Disamping itu dengan melihat kondisi keuangan daerah Kota Bitung saat ini yang masih diperhadapkan dengan hal-hal seperti tingginya belanja pegawai serta kewajiban-kewajiban terhadap

utang, maka perlu dilakukan strategi-strategi dalam kebijakan keuangan daerah.

Dengan memperhatikan hal-hal yang disebutkan di atas, maka arah kebijakan keuangan daerah untuk lima tahun kedepan yaitu:

- a. Meningkatkan efisiensi belanja yang menjamin efektif terselenggaranya standar pelayanan dengan memantapkan analisis standart belanja (ASB) yang mencerminkan pergeseran kegiatan administrasi dari *offline* ke *online*, disamping mengoptimalkan penganggaran secara terintegrasi (nasional, provinsi, Kota, dan kelurahan) terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan yang ditargetkan.
- b. Upaya meningkatkan kapasitas pendapatan asli daerah dengan melakukan intensifikasi pajak dan retribusi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, dan penyertaan modal dipadukan dengan pengembangan profesionalisme kelembagaan badan usaha milik daerah. Meningkatkan pendapatan transfer terutama Dana Alokasi Khusus dan lainnya melalui upaya pengembangan kegiatan pembangunan serta pengembangan wilayah yang bersinergi dengan pusat dan provinsi.
- c. Sinergi Kolaborasi pembiayaan pembangunan dengan pemanfaatan *blended financing*.

Prediksi Upaya Peningkatan Penerimaan PAD Tahun 2026

Upaya Peningkatan PAD dilakukan dengan 2 cara yaitu Intensifikasi dan Extensifikasi Intensifikasi berupa Penguatan SDM, Sosialisasi Pajak Daerah, Uji Petik dilakukan per jenis pajak agar mengetahui potensi penerimaan pendapatan. Mengoptimalkan system digitalisasi pelayanan. Dalam kegiatan Ektensifikasi masih tetap dilakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru sehingga jumlah wajib pajak yang tadinya pada tahun 2026 sejumlah 730 wajib pajak, bisa meningkat.

Prediksi Upaya Peningkatan Penerimaan PAD Tahun 2027.

Upaya Peningkatan PAD dilakukan dengan 2 cara yaitu Intensifikasi dan Extensifikasi Intensifikasi berupa Penguatan SDM, Sosialisasi Pajak Daerah, Uji Petik dilakukan per jenis pajak agar mengetahui potensi penerimaan pendapatan. Mengoptimalkan system digitalisasi pelayanan perpajakan. Dor to dor ke wajib pajak yang masih aktif dan tidak aktif. Menjaring wajib pajak yang menunggak.

Dalam kegiatan Ektensifikasi masih tetap dilakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru sehingga jumlah wajib pajak yang tadinya pada tahun 2027 sejumlah 751 wajib pajak, bisa meningkat. Melakukan

kegiatan kerjasama dengan pihak external. Memperluas kanal Pembayaran diantaranya kantor pos, alfa mart, indomart dan aplikasi komersil lainnya

Prediksi Upaya Peningkatan Penerimaan PAD Tahun 2028.

Upaya Peningkatan PAD dilakukan dengan 2 cara yaitu Intensifikasi dan Extensifikasi Intensifikasi berupa Penguatan SDM, Sosialisasi Pajak Daerah, Uji Petik dilakukan per jenis pajak agar mengetahui potensi penerimaan pendapatan. Mengoptimalkan system digitalisasi pelayanan perpajakan. Dor to dor ke wajib pajak yang masih aktif dan tidak aktif. Menjaring wajib pajak yang menunggak. Melakukan rapat koordinasi setiap bulan bagi perangkat daerah pengelola PAD

Dalam kegiatan Ektensifikasi masih tetap dilakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru sehingga jumlah wajib pajak yang tadinya pada tahun 2028 sejumlah 773 wajib pajak, bisa meningkat. Melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak external. Memperluas kanal Pembayaran diantaranya kantor pos, alfa mart, indomart dan aplikasi komersil lainnya.

Prediksi Upaya Peningkatan Penerimaan PAD Tahun 2029.

Upaya Peningkatan PAD dilakukan dengan 2 cara yaitu Intensifikasi dan Extensifikasi Intensifikasi berupa Penguatan SDM, Sosialisasi Pajak Daerah, Uji Petik dilakukan per jenis pajak agar mengetahui potensi penerimaan pendapatan. Mengoptimalkan system digitalisasi pelayanan perpajakan. Dor to dor ke wajib pajak yang masih aktif dan tidak aktif. Menjaring wajib pajak yang menunggak. Melakukan rapat koordinasi setiap bulan bagi perangkat daerah pengelola PAD

Dalam kegiatan Ektensifikasi masih tetap dilakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru sehingga jumlah wajib pajak yang tadinya pada tahun 2029 sejumlah 794 wajib pajak, bisa meningkat. Melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak external. Memperluas kanal Pembayaran diantaranya kantor pos, alfa mart, indomart dan aplikasi komersil lainnya.

Prediksi Upaya Peningkatan Penerimaan PAD Tahun 2030.

Upaya Peningkatan PAD dilakukan dengan 2 cara yaitu Intensifikasi dan Extensifikasi Intensifikasi berupa Penguatan SDM, Sosialisasi Pajak Daerah, Uji Petik dilakukan per jenis pajak agar mengetahui potensi penerimaan pendapatan. Mengoptimalkan system digitalisasi pelayanan perpajakan. Dor to dor ke wajib pajak yang masih aktif dan tidak aktif. Menjaring wajib pajak yang menunggak. Melakukan rapat koordinasi setiap bulan bagi perangkat daerah pengelola PAD.

Dalam kegiatan Ektensifikasi masih tetap dilakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru sehingga jumlah wajib pajak yang tadinya pada tahun 2030 sejumlah 819 wajib pajak, bisa meningkat. Melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak external. Memperluas kanal Pembayaran diantaranya kantor pos, alfamart, indomart dan aplikasi komersil lainnya.

2.3. Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah.

Gambaran kondisi Kota Bitung yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis baik lingkungan global, nasional, maupun regional. Faktor lainnya yang berpengaruh adalah kondisi birokrasi dan Organisasi Perangkat Daerah yang nantinya akan merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan daerah Kota Bitung lima tahun kedepan.

2.3.1. Permasalahan.

Dalam kaitannya untuk perumusan isu strategis Kota Bitung, maka perlu dilakukan identifikasi dan analisis mendalam terhadap berbagai permasalahan pembangunan daerah. Analisis ini juga menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat sasaran.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya terkait dengan evaluasi kinerja pembangunan selama lima tahun (2021-2026), maka dapat diperoleh beberapa permasalahan pembangunan di Kota Bitung yang dijabarkan berdasarkan kondisi umum yang telah disampaikan dalam Bab II serta perkembangan atau evaluasi atas target-target kinerja RPJMD sebelumnya. Permasalahan tersebut tentunya akan menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk kedepan dalam kurun waktu periode RPJMD 2025-2029. Adapun permasalahan dimaksud dikelompokkan dalam beberapa aspek yaitu:

- Permasalahan pada Aspek Geografi dan Demografi, yang mencakup, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, energi, air dan kemandirian pangan, lingkungan hidup berkualitas, serta resiliensi bencana dan perubahan iklim.
- Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat, meliputi kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial

yang adaptif, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif.

- Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah, yang mencakup daya saing sumber daya manusia, iptek dan inovasi, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, serta pembangunan ekonomi daerah.
- Permasalahan Aspek Pelayanan Umum, yang terkait dengan layanan dasar dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dari permasalahan yang dikelompokkan pada aspek dimaksud, maka permasalahan tersebut kemudian diuraikan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bitung, sebagaimana berikut ini:

2.3.1.1. Permasalahan Pembangunan yang menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. Pendidikan:

1. Angka Partisipasi Murni (APM) berfluktuasi menunjukkan ketidakstabilan dalam partisipasi pendidikan di Kota Bitung;
2. Aksesibilitas pendidikan, kualitas pengajaran, dukungan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi masih rendah;
3. Menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat;
4. Masih ada sarana prasarana pendidikan yang perlu ditingkatkan.

B. Kesehatan:

1. Pertumbuhan Usia Harapan Hidup (UHH) masih tergolong lambat;
2. Pemenuhan gizi anak-anak dan ketersediaan layanan kesehatan belum memadai;
3. Rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan peningkatan pelayanan kesehatan terpadu, merata dan terjangkau;
4. Menurunnya proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan;
5. Meningkatnya prevalensi HIV pada populasi dewasa;
6. Meningkatnya prevalensi tekanan darah tinggi;
7. Tidak terkendalinya prevalensi penyalahgunaan narkoba;
8. Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum;
9. Masih tingginya Angka Kematian Neonatal (AKN);

10. Menurunnya persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

1. Akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi dan air minum layak dan berkelanjutan belum optimal;
2. Berkurangnya kualitas air sungai sebagai sumber air baku.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

1. Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan meningkat;
2. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau belum optimal.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perindungan Masyarakat:

1. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) belum maksimal karena tidak didukung dengan regulasi yang memadai;
2. Jumlah Polisi Pamong Praja mengalami penurunan;
3. Menurunnya proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya;
4. Menurunnya persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota);
5. Penguatan pengurangan risiko bencana daerah belum optimal;
6. Sarana dan prasarana penanganan dalam penanganan dan penanggulangan bencana belum optimal.

F. Sosial:

1. Masih terdapat sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
2. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial mengalami penurunan;
3. Ketimpangan antar kelompok pendapatan (Rasio Gini) dan kondisi kemiskinan di Kota Bitung masih tinggi;
4. Jumlah penduduk miskin Kota Bitung masih signifikan;
5. Perluasan akses terhadap peluang ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan program-program sosial yang berkelanjutan belum optimal.

2.3.1.2. Permasalahan Pembangunan yang menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. Tenaga Kerja:

1. Ketidaksesuaian antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan lapangan kerja yang tersedia;
2. Kesenjangan antara kualifikasi pendidikan dan kebutuhan pasar kerja masih tinggi;
3. Penyerapan tenaga kerja formal masih rendah.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan masih rendah;
2. Masih rendahnya persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif;
3. Menurunnya proporsi perempuan yang berada di posisi managerial;
4. Meningkatnya proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

C. Pangan:

1. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) menurun;
2. Menurunnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH);
3. Regulasi ketahanan pangan belum tersedia.

D. Pertanian:

1. Masih ada aset Pemerintah Kota Bitung yang belum bersertifikat.

E. Lingkungan Hidup:

1. Belum maksimalnya kinerja pengangkutan sampah;
2. Pengelolaan dan pengawasan limbah B3 belum optimal.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

1. Belum optimal kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk umur 0 - 17 tahun;
2. Belum terpenuhinya penduduk yang memiliki KTP dengan penduduk yang wajib memiliki KTP;
3. Masih banyak penduduk/anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

1. Meningkatnya angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*);
2. Meningkatnya *unmet need* (wanita subur yang tidak menggunakan kontrasepsi) pelayanan kesehatan;

3. Menurunnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.

H. Perhubungan:

1. Daya tarik dan keandalan angkutan umum di Kota Bitung belum optimal yang menyebabkan penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum;
2. Perubahan kebijakan yang tidak konsisten dalam pengaturan trayek angkutan umum;
3. Kurangnya investasi dalam infrastruktur transportasi yang diperlukan dalam meningkatkan layanan publik dan keselamatan pengguna jalan.

I. Komunikasi dan Informatika:

1. Rendahnya proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam;
2. Rendahnya proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*.

J. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil:

1. Menurunnya persentase UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke akses layanan keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
2. Jumlah koperasi setiap tahun mengalami penurunan.

K. Penanaman Modal:

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung belum mencapai tingkat investasi dan daya saing yang optimal;
2. Investasi asing di sektor pariwisata masih terbilang kurang.

L. Kepemudaan dan Olah Raga:

1. Perlu peningkatan aspek pelayanan umum dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

M. Persandian:

1. Belum tersosialisasi penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

N. Kebudayaan:

1. Masih ada bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dengan baik;
2. Masih adanya hotel, restoran dan ruang publik yang belum menampilkan budaya lokal.

O. Perpustakaan:

1. Masih kurang optimalnya kapasitas perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lembaga lainnya guna mendorong minat baca masyarakat.

P. Kearsipan:

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan.

2.3.1.3. Permasalahan Pembangunan yang menjadi Urusan Pilihan.

A. Kelautan dan Perikanan:

1. Produksi perikanan darat mengalami kondisi yang berfluktuatif menunjukkan ketidakstabilan dalam produksi hasil perikanan darat;
2. Konsumsi ikan belum optimal, cenderung konstan.

B. Pariwisata:

1. Menurunnya proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB;
2. Menurunnya jumlah wisatawan mancanegara;
3. Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara.

C. Pertanian:

1. Berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat konversi lahan pertanian menjadi tempat permukiman.

D. Perdagangan dan Perindustrian:

1. Laju pertumbuhan PDB per kapita masih rendah;
2. Perkembangan nilai industri sektor IKM mengalami kondisi yang berfluktuatif menunjukkan ketidakstabilan dalam perkembangan nilai industri;
3. Capaian kinerja industri formal, non formal dan bina kelompok pengrajin menunjukan kurang optimal, kondisi cenderung konstan.

2.3.2. Isu Strategis Daerah.

Penentuan isu strategis Kota Bitung dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Kota Bitung tahun 2025-2029.

2.3.2.1. Isu Strategis Global.

Fenomena besar global yang akan dihadapi menuju Indonesia Emas tahun 2045 memiliki dua sisi yaitu memberikan potensi kemajuan bagi

kondisi sosial ekonomi global tetapi disisi lain juga memberikan disrupsi, terdiri atas:

- a. Perkembangan demografi global;
- b. Dinamika geopolitik dan geoekonomi global;
- c. Disrupsi teknologi;
- d. Perkembangan urbanisasi dunia;
- e. Peningkatan peran perdagangan internasional;
- f. Keuangan internasional;
- g. Peningkatan penduduk kelas menengah;
- h. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam;
- i. Perubahan iklim;
- j. Pemanfaatan luar angkasa.

2.3.2.2. Isu Stategis Nasional.

- a. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing.
- b. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
- c. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta birokrasi yang bersih, efektif, ramah, dan cepat.
- d. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global.
- e. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dalam pengelolaan risiko bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan, dan guncangan.

- f. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
- g. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
- h. Kesyntambungan pembangunan yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

2.3.2.3. Isu Strategis Regional.

a. Ekonomi.

Aspek daya saing, kendala makro dan fiskal, serta aspek pembiayaan masih menjadi hambatan pembangunan di Sulawesi.

b. Sosial.

- Tingkat kesehatan masyarakat di wilayah Sulawesi masih di bawah rata-rata nasional.
- Mayoritas provinsi di Pulau Sulawesi juga memiliki angka prevalensi stunting lebih tinggi dari angka rata-rata nasional.
- Kualitas SDM pendidikan di wilayah Sulawesi juga masih relatif rendah.
- Provinsi Sulawesi Utara masih menghadapi kendala Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
- Persentase kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja untuk pekerja formal di wilayah Sulawesi juga masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

c. Sarana dan Prasarana

- Kondisi infrastruktur di Pulau Sulawesi, baik infrastruktur dasar, maupun konektivitas, masih belum optimal.
- Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil.
- Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sudah cukup merata, tetapi masih digunakan secara terbatas untuk penggunaan telekomunikasi.

d. Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

- Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Pulau Sulawesi saat ini masih belum optimal.
- Stabilitas pertahanan dan keamanan.
- Penegakan stabilitas pertahanan dan keamanan di Pulau Sulawesi, khususnya pada kawasan perbatasan laut, masih kurang optimal.

e. Sosial Budaya dan Ekologi.

- Ketimpangan gender, perkawinan anak, dan pembangunan kebudayaan masih menjadi isu dalam pembangunan ketahanan sosial budaya di Pulau Sulawesi.
- Deforestasi, ketersediaan air, kerentanan pesisir, dan bencana masih menjadi isu dalam pembangunan ketahanan ekologi di Pulau Sulawesi.
- Pulau Sulawesi memiliki ancaman bencana hidrometeorologi dan geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir, longsor, dan likuefaksi.

2.3.2.4. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Utara.

Permasalahan dan isu strategis pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dikelompokkan dalam 5 aspek: (1) Aspek standar sosial budaya, Iptek dan Kesejahteraan Sosial; (2) Aspek ekonomi - pengembangan ekonomi yang berkelanjutan; (3) Aspek pemerataan pembangunan; (4) Aspek pemantapan tatakelola pemerintahan; (5) Aspek pengembangan infrastruktur yang mendukung geoposisi dan geostrategis.

- a. Aspek standar sosial budaya, IPTEK dan kesejahteraan sosial meliputi: percepatan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan derajat dan pemerataan kesehatan; percepatan dan pengentasan kemiskinan; kecukupan pangan berkualitas; peningkatan peran kebudayaan dan kearifan lokal; dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Aspek ekonomi-pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, meliputi: penguatan struktur ekonomi industri ditopang sektor primer yang kuat; kecukupan sumberdaya air dan energi terbarukan; pemantapan lingkungan hidup berbasis *green, blue economy* dan konservasi; pemantapan antisipasi bencana dan perubahan iklim; pemberdayaan koperasi, UMKM, kewirausahaan serta ekonomi kreatif; pertumbuhan

ekonomi dan iklim investasi kondusif; dan pengembangan pariwisata dan perhubungan yang terintegrasi.

- c. Aspek pemerataan pembangunan, meliputi: percepatan pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan; pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi; dan kesetaraan antara wilayah daratan, kepulauan dan perbatasan.
- d. Aspek pemantapan tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, meliputi: pemantapan tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi; supremasi hukum; regulasi yang fleksibel dan produktif serta adaptif; kapasitas PAD dan sumber pembiayaan yang memadai; komitmen kepatuhan tata ruang; keamanan dan ketertiban masyarakat; dan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.
- e. Aspek pengembangan infrastruktur yang mendukung geoposisi dan pengembangan geostrategis, infrastruktur meliputi: ekonomi; percepatan percepatan pengembangan infrastruktur penunjang social; percepatan pengembangan infrastruktur digital; percepatan deteksi bencana, *early warning system* (EWS) dan mitigasi; dan pemantapan konektivitas.

2.3.2.5. Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kota Bitung Tahun 2025-2029.

- a. Meningkatnya kerentanan masyarakat miskin akibat belum meratanya akses terhadap perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan.
- b. Peningkatan masalah gizi dan kesehatan serta produktivitas pertanian.
- c. Belum optimalnya akses dan mutu layanan pendidikan.
- d. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan khususnya yang berkaitan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik serta ketidaksetaraan gender.
- e. Pencemaran lingkungan, resiko bencana dan terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung akses air bersih dan sanitasi.
- f. Belum optimalnya nilai tambah pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat akibat ketenagakerjaan yang belum stabil, keterbatasan infrastruktur dan tantangan dalam akses informasi serta keuangan.

2.3.2.6. Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Bitung Tahun 2025-2029.

Perumusan isu strategis dan rekomendasi RPJMD juga perlu memperhatikan isu strategis dan rekomendasi KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 1 Menuntaskan Kemiskinan dalam segala bentuk di setiap tempat.

Memuat 3 (Tiga) isu strategis dan detail penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 160
Menuntaskan Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di setiap tempat

Isu Strategis Terkait TPB	Rekomendasi			Stakeholder Yang Terlibat
	Tujuan	Sasaran PB	Program PB	
Kesenjangan Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya manusia guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memastikan kesejahteraan sosial	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan mendorong peningkatan penghasilan masyarakat	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Sosial Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Dinas Perikanan
			1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	
			1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	
			1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	
			1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	
			2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	
			3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	

	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna percepatan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat	Pendidikan yang berkualitas yang merata	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan risiko bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim	Terwujudnya Kota Bitung yang tangguh terhadap bencana	Kota Siaga Bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan air minum layak dan fasilitas sanitasi	Mewujudkan sistim infrasturkur dasar yang prima	Pemerataan Infrastruktur dasar untuk menekan disparitas	1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Mewujudkan sistim infrasturkur dasar yang prima	Pemerataan Infrastruktur dasar untuk menekan disparitas	1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

2. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2 Mengentaskan kelaparan, memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi, serta mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.**

Memuat 2 (Dua) isu strategis dan detail penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 161
Mengentaskan kelaparan, memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi, serta mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

Isu Strategis Terkait TPB	Rekomendasi			Stakeholder Yang Terlibat
	Tujuan	Sasaran PB	Program PB	
Ketersediaan Pangan Berkelanjutan	Terwujudnya sistim ketahanan pangan yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan kearifan tradisonal Masyarakat	Meningkatnya akses ketersediaan dan konsumsi pangan bergizi dan aman yang didasari pada potersi sumber daya dan kebijaksanaan lokal	3.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kesenjangan Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya manusia guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memastikan kesejahteraan sosial	Kesejahteraan Kesehatan bagi seluruh masyarakat	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2.14.04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Dinas Sosial Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

3. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 3 Memberikan Perlindungan Kesehatan dan Meningkatkan Kesejahteraan bagi Masyarakat dari Segala Usia.**

Memuat 1 (Satu) isu strategis dan detail penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 162
Memberikan Perlindungan Kesehatan dan Meningkatkan Kesejahteraan bagi Masyarakat dari Segala Usia

Isu Strategis Terkait TPB	Rekomendasi			Stakeholder Yang Terlibat
	Tujuan	Sasaran PB	Program PB	
Kesenjangan Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya manusia guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memastikan kesejahteraan sosial	Kesejahteraan Kesehatan bagi seluruh masyarakat	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

4. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 4 Menjamin tersedianya Pendidikan yang berkualitas inklusif dan merata serta meningkatkan akses terhadap pembelajaran seumur hidup untuk seluruh masyarakat.**

Memuat 1 (Satu) isu strategis dan detail penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 163
Menjamin tersedianya Pendidikan yang berkualitas inklusif dan merata serta meningkatkan akses terhadap pembelajaran seumur hidup untuk seluruh masyarakat

Isu Strategis Terkait TPB	Rekomendasi			Stakeholder Yang Terlibat
	Tujuan	Sasaran PB	Program PB	
Kesenjangan Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya manusia guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memastikan kesejahteraan sosial	Pendidikan yang adil dan berkualitas	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 5 Menjamin kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan agar lebih mandiri dan berdaya.**

Memuat 1 (Satu) isu strategis dan detail penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 164
Menjamin kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan agar lebih mandiri dan berdaya

Isu Strategis Terkait TPB	Rekomendasi			Stakeholder Yang Terlibat
	Tujuan	Sasaran PB	Program PB	
Kesenjangan Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya manusia guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memastikan kesejahteraan sosial	Kesejahteraan Kesehatan bagi seluruh masyarakat	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

6. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 6 Menjamin akses dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang lestari.**

Memuat 1 (Satu) isu strategis dan detail penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 165
Menjamin akses dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang lestari

Isu Strategis Terkait TPB	Rekomendasi			Stakeholder Yang Terlibat
	Tujuan	Sasaran PB	Program PB	
Penyediaan air minum layak dan fasilitas sanitasi	Mewujudkan sistim infrasturkur dasar yang prima	Pemerataan Infrastruktur dasar untuk menekan disparitas	1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

7. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 7 Membangun infrastruktur yang kokoh, memperluas industri yang menyertakan semua pihak dan berkelanjutan, sekaligus mendorong kreativitas dan inovasi.**

Memuat 1 (Satu) isu strategis dan detail penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 166
Membangun infrastruktur yang kokoh, memperluas industri yang menyertakan semua pihak dan berkelanjutan, sekaligus mendorong kreativitas dan inovasi

Isu Strategis Terkait TPB	Rekomendasi			Stakeholder Yang Terlibat
	Tujuan	Sasaran PB	Program PB	
Kesenjangan Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya manusia guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memastikan	Kesejahteraan Kesehatan bagi seluruh masyarakat	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

	kesejahteraan sosial			

8. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 8 Mengembangkan kota dan Kawasan pemukiman yang ramah, terlindungi, tahan bencana dan lestari.**

Memuat 1 (Satu) isu strategis dan detail penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 167
Mengembangkan kota dan Kawasan pemukiman yang ramah, terlindungi, tahan bencana dan lestari

Isu Strategis Terkait TPB	Rekomendasi			Stakeholder Yang Terlibat
	Tujuan	Sasaran PB	Program PB	
Pengelolaan risiko bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim	Terwujudnya Kota Bitung yang tangguh terhadap bencana	Kota Siaga bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya Kondisi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan	Peningkatan Kondisi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

9. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 9 Menanggapi perubahan iklim dan dampaknya melalui tindakan cepat dan tepat.**

Memuat 1 (Satu) isu strategis dan detail penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 168
Menanggapi perubahan iklim dan dampaknya melalui tindakan cepat dan tepat

Isu Strategis Terkait TPB	Rekomendasi			Stakeholder Yang Terlibat
	Tujuan	Sasaran PB	Program PB	
Pengelolaan risiko bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim	Meningkatnya Kondisi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan	Peningkatan Kondisi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

10. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 10 Melestarikan, merehabilitasi dan mengembangkan pemanfaatan ekosistem daratan secara berkelanjutan, mengelola hutan secara bertanggungjawab, menghentikan laju desertifikasi (degradasi lahan), memulihkan lahan yang mengalami degradasi dan menjaga keanekaragaman hayati tetap terjaga.**

Memuat 1 (Satu) isu strategis dan detail penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 169

Melestarikan, merehabilitasi dan mengembangkan pemanfaatan ekosistem daratan secara berkelanjutan, mengelola hutan secara bertanggungjawab, menghentikan laju desertifikasi (degradasi lahan), memulihkan lahan yang mengalami degradasi dan menjaga keanekaragaman hayati tetap terjaga

Isu Strategis Terkait TPB	Rekomendasi			Stakeholder Yang Terlibat
	Tujuan	Sasaran PB	Program PB	
Pengelolaan risiko bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim	Meningkatnya Kondisi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan	Peningkatan Kondisi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup

11. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 11 Mengembangkan Masyarakat yang adil dan inklusif dengan suasana damai untuk mendukung Pembangunan berkelanjutan, menyediakan layanan keadilan yang dapat diakses oleh semua kalangan dan memperkuat kelembagaan yang transparan dan bertanggung jawab di semua tingkat.

Memuat 1 (Satu) isu strategis dan detail penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 170

Mengembangkan Masyarakat yang adil dan inklusif dengan suasana damai untuk mendukung Pembangunan berkelanjutan, menyediakan layanan keadilan yang dapat diakses oleh semua kalangan dan memperkuat kelembagaan yang transparan dan bertanggung jawab di semua tingkat

Isu Strategis Terkait TPB	Rekomendasi			Stakeholder Yang Terlibat
	Tujuan	Sasaran PB	Program PB	
Pengelolaan Tata Pemerintahan	Meningkatnya pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya pengelolaan tata pemerintahan yang bersih dan efisien	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berkualitas melalui penyelenggaraan pengawasan yang baik.	Meningkatnya pengelolaan tata pemerintahan yang bersih dan efisien	6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat

2.3.2.7. Isu Strategis Kota Bitung.

a. **Sosial Budaya, IPTEK dan Kesejahteraan Sosial:**

1. Percepatan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan.
2. Percepatan pengentasan kemiskinan.
3. Pemantapan kecukupan pangan berkualitas.
4. Peningkatan peran kebudayaan dan kearifan lokal.
5. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung vokasi serta *innovation hub* dan Sumber Daya Manusia (SDM).
6. Peningkatan pertumbuhan penduduk secara drastis, yang disebabkan urbanisasi dari daerah lain.
7. Peningkatan urbanisasi yang menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian dan permukiman kumuh perkotaan.

b. **Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan:**

1. Pertumbuhan ekonomi inklusif.
2. Penguatan industri dan pengembangan pariwisata.
3. Pemantapan lingkungan hidup berbasis *green economy* dan *blue economy* dan konservasi mengantisipasi perubahan iklim.
4. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan.
5. Pemberdayaan koperasi, UMKM, kewirausahaan serta ekonomi kreatif.
6. Pemantapan konektivitas yang terintegrasi.

c. **Pengembangan Infrastruktur Wilayah:**

1. Tekanan pertambahan penduduk.
Tantangan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan pemukiman berbanding dengan tekanan konservasi keanekaragaman hayati.
2. Kapasitas TPA dan Tata Kelola Persampahan.
Tantangan penuhnya kapasitas TPA serta tantangan upaya pengurangan sampah.
3. Kewenangan daerah perihal konservasi dan alih fungsi lahan.
Pentingnya melakukan eksplorasi dan diskusi terkait alternatif kerjasama pengelolaan wilayah konservasi dan dampak alih fungsi lahan.
4. Digitalisasi pemerintahan daerah.
Pengembangan kota cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
5. Kurangnya pendanaan.

Khususnya pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk upaya kawasan dan investasi.

6. Sanitasi.

Akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi dan air minum layak dan berkelanjutan belum optimal.

7. Penanganan Bencana Alam.

Banjir dan tanah longsor masih menjadi salah satu ancaman bencana dengan frekuensi yang tinggi.

d. **Pemerataan Pembangunan:**

1. Percepatan pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan.
2. Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi.

e. **Tata Kelola Pemerintahan:**

1. Pemantapan tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
2. Regulasi yang fleksibel, produktif dan adaptif.
3. Pemantapan kapasitas PAD dan sumber pembiayaan yang sah.
4. Pemantapan komitmen kepatuhan tata ruang wilayah.
5. Pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat.
6. Pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

2.3.3. Potensi Daerah Yang Dapat Dikembangkan Untuk Mendukung Percepatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan.

Pengembangan daerah untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dapat dilakukan melalui pemanfaatan potensi lokal. Berikut adalah beberapa potensi daerah yang dapat dikembangkan:

1. Potensi Sumber Daya Alam (SDA).

Pengelolaan sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan secara berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. pengembangan pertanian organik atau budidaya perikanan ramah lingkungan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas produk lokal.

2. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Peningkatan keterampilan dan pendidikan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan vokasi sangat penting. Program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan mendorong kewirausahaan.

3. Potensi Sosial Budaya.

Mengembangkan kampung tematik berbasis budaya lokal dapat memperkuat identitas masyarakat dan menarik wisatawan. Kegiatan seperti festival budaya dan gotong royong memperkuat hubungan sosial antar warga serta meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan.

4. Infrastruktur dan Aksesibilitas.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur yang baik, termasuk pelabuhan dan akses jalan, sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi. Pelabuhan Bitung sebagai hub internasional akan meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pengembangan UMKM berbasis potensi lokal mampu menciptakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian lokal. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.

6. Teknologi Digital.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan sumber daya dan pemasaran produk lokal dapat meningkatkan efisiensi serta memperluas jangkauan pasar bagi produk desa.

7. Potensi Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*).

Bitung memiliki potensi Keanekaragaman Hayati yang mendukung sektor pariwisata baik wisata fauna maupun pesona keindahan bawah laut di Selat Lembeh, yang terkenal dengan keanekaragaman biota lautnya. Pengembangan sektor pariwisata dapat menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan pendapatan lokal. Pemerintah kota juga berupaya mempercantik potensi pariwisata untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDRB.

8. Potensi Perikanan.

Sebagai kota pelabuhan utama, Bitung memiliki akses ke sumber daya perikanan yang melimpah, termasuk ikan cakalang dan tuna. Pelabuhan Bitung berfungsi sebagai gerbang ekspor untuk produk perikanan, dan pengembangan industri pengolahan perikanan dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan lapangan kerja.



9. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

KEK Bitung dirancang untuk memanfaatkan potensi komoditas daerah, terutama di sektor perikanan dan industri pengolahan. Ini dapat menarik investasi dan menciptakan peluang kerja baru, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Dengan mengintegrasikan berbagai potensi ini dalam suatu program pembangunan yang komprehensif, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata dan berkeadilan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

A. Visi dan Misi.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode pertama dari RPJPD Kota Bitung tahun 2025-2045. Dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kota Bitung hal yang paling penting adalah menentukan apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan kebijakan pembangunan didasarkan pada hasil analisis kinerja pembangunan, identifikasi permasalahan serta penentuan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani. Perencanaan pembangunan di Kota Bitung merupakan suatu alur kajian perencanaan berdasarkan prinsip perencanaan pembangunan daerah. Prinsip perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya menekankan pada integrasi kondisi, potensi serta dinamika yang ada di daerah, nasional bahkan global. Adapun Visi Pemerintah Kota Bitung tahun 2025-2029 yang merupakan Visi Kepala Daerah adalah:

“HARMONISASI MENUJU BITUNG MAJU 2025-2030”

Makna dari Visi dimaksud yaitu bahwa keharmonisan mempengaruhi rencana pemerintah dan cita-cita masyarakat kota Bitung dalam menggapai serta mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur. Dalam mewujudkan Bitung maju berupaya untuk menciptakan lingkungan industri maju, sejahtera dan berkelanjutan serta menyelaraskan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, lingkungan, pendidikan, alam, dan kesehatan dalam ruang lingkup keharmonisan.

Penjelasan visi tersebut didasarkan pada 5 (lima) kata kunci yaitu:

1. Harmonisasi:

Dalam mewujudkan Bitung maju maka modal dasar utama adalah harmonisasi. Harmonisasi adalah proses untuk mencapai keselarasan, keserasian, atau kesatuan. Kata harmonisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu harmonia yang berarti terikat secara serasi dan sesuai.

Dalam konteks pemerintahan, harmonisasi dikandung maksud dalam berbagai aspek dan berbagai tingkatan pemerintahan, karena dengan harmonisasi maka kita akan mampu menciptakan lingkungan industri yang maju, menuju masyarakat yang sejahtera dalam kerangka

pembangunan berkelanjutan. Harmonisasi juga mempengaruhi peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik serta kehidupan yang toleran.

2. Menuju:

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menuju dimaknai sebagai pergi ke arah atau mengarah. Hal ini dikandung maksud bahwa dengan semangat harmonisasi maka akan menuju/mengarah ke Bitung yang lebih maju.

3. Bitung:

Bitung salah satu kota dari 15 kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Terletak di ujung timur Pulau Sulawesi pada koordinat 1023'23" – 1035'39" LU dan 12501'43" – 125018'13" BT. Wilayahnya berbatasan dengan Kecamatan Likupang (Kabupaten Minahasa Utara dan Laut Maluku) di sebelah utara, Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku di sebelah selatan, serta Kecamatan Kauditan (Kabupaten Minahasa Utara) di sebelah barat.

4. Maju:

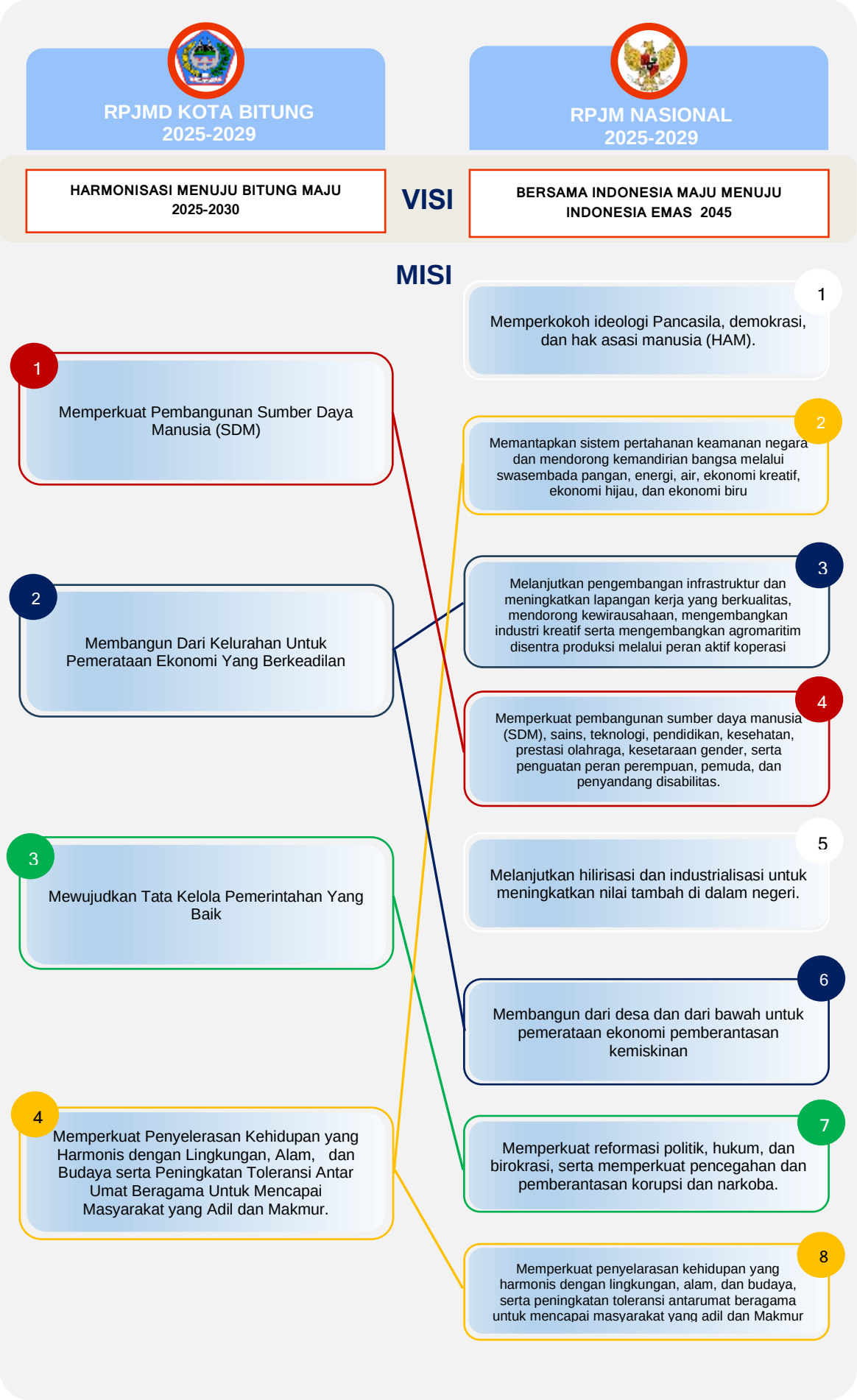
Dimaknai sebagai kondisi suatu daerah yang ditujuh dengan merujuk pada perkembangan atau kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek, seperti; ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk.

5. 2025-2030:

Adalah tahun periodisasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung, dimana Visi yang akan diwujudkan dalam rentang waktu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.

Dalam mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi maka diperlukan keterkaitan antar dokumen perencanaan (RPJMD Kota Bitung, RPJMD Sulawesi Utara, dan RPJM Nasional). Keterkaitan dimaksud dapat dilihat dari misi RPJMD Kota Bitung tahun 2025-2029 yang diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi dalam RPJM Nasional 2025-2029 seperti disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 171
Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kota Bitung dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029



Dalam mewujudkan Visi “Harmonisasi Menuju Bitung Maju 2025-2030” maka dirumuskan 4 Misi sebagai berikut:

- 1. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).**
- 2. Membangun dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan.**
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**
- 4. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**

Penjelasan dari ke 4 (empat) misi tersebut, adalah sebagai berikut:

Misi 1: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Upaya yang terkandung dalam misi pertama ini adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, yang meliputi aspek pendidikan dan kesehatan dimana SDM ini merupakan modal utama dalam pembangunan. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, masyarakat yang berdaya, tenaga kerja yang terampil serta semangat pembangunan kepemudaan.

Misi 2: Membangun dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Upaya yang terkandung dalam misi kedua yaitu Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pengembangan sarana dan prasarana yang ada pada tingkatan paling bawah, yaitu kelurahan serta pengembangan konektivitas wilayah, dengan tujuan akan mampu meningkatkan perekonomian yang berkeadilan dan mampu meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan daya tarik kota.

Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Upaya yang dilakukan sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan difokuskan pada pemantapan reformasi birokrasi, melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan manajemen internal, penyederhanaan peraturan, serta peningkatan kapasitas keuangan daerah. Pemerintahan dibentuk berlandaskan prinsip “*Good Governance*” dan “*Clean Government*” tercermin melalui kinerja aparatur pemerintah yang professional dalam melayani kebutuhan masyarakat yang semakin variatif dengan semangat Harmonis serta meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah.

Misi 4: Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Upaya yang akan dilakukan adalah memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis, dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama dalam upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta memelihara keanekaragaman hayati.

Dalam mengimplementasikan Visi Misi dimaksud maka harus dibarengi nilai-nilai yang menjiwalkannya yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah, sebab Visi, Misi dan nilai merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu nilai yang terkandung adalah “mempertahankan, integritas, menghormati perbedaan dalam masyarakat, mengejar keunggulan, mendorong kerja sama, menggalakan inovasi dan saling menghormati satu dengan yang lain”.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 172

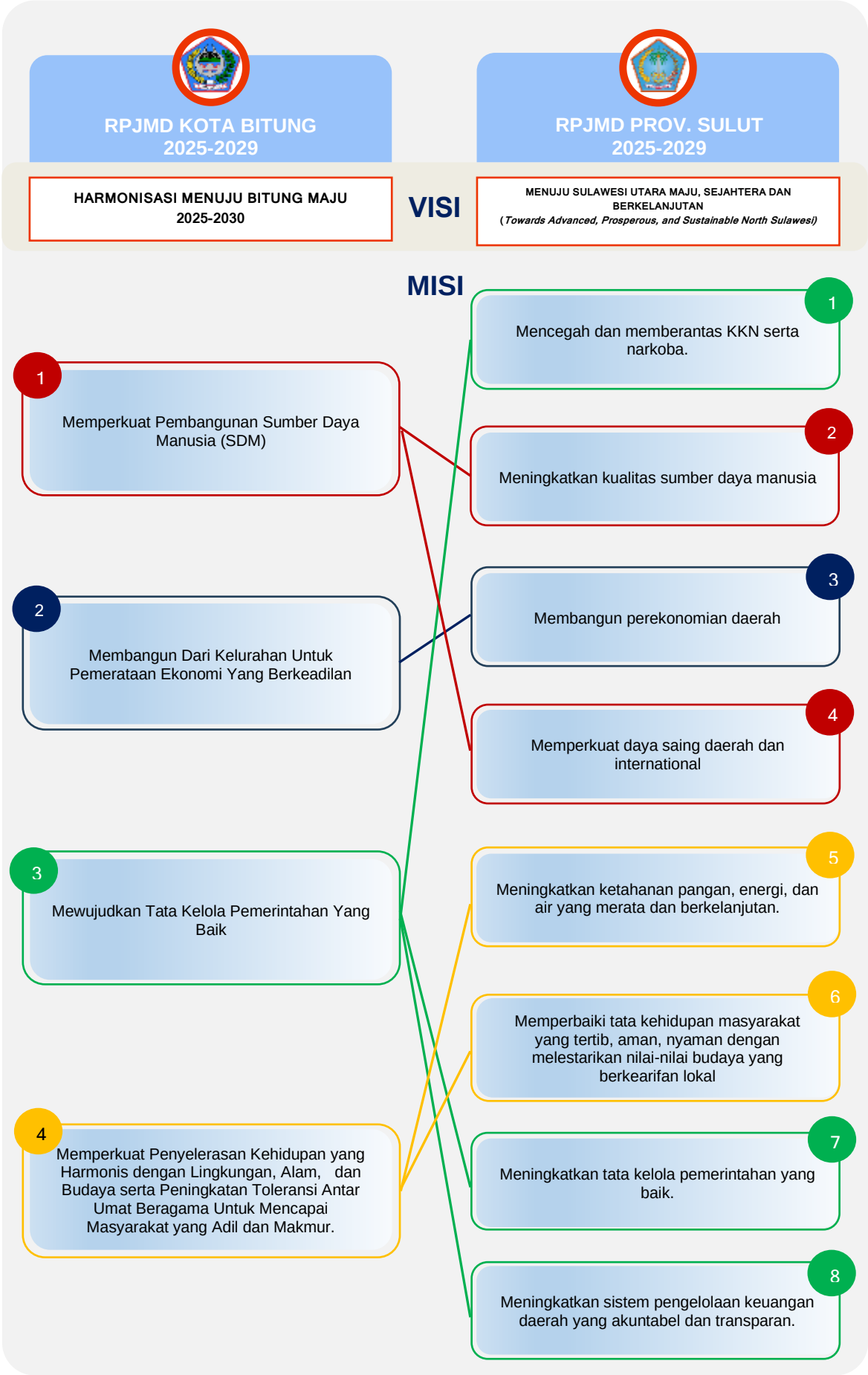
**Keselarasan Misi RPJPD Kota Bitung 2025-2045
dengan Misi RPJMD Kota Bitung Tahun 2025-2029**



Keterkaitan Visi Misi RPJMD Kota Bitung tahun 2025-2029 dengan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 173

Keterkaitan Visi Misi RPJMD Kota Bitung tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025-2029 Tahun 2025-2029



B. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat. Tujuan dan sasaran tersebut kemudian dirumuskan lebih spesifik, fokus dan terukur dalam indikator-indikator beserta targetnya, dapat diukur setiap tahunnya serta mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai selang pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung sesuai dengan waktu kepemimpinan, dan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan periodisasi dokumen RPJMD Kota Bitung Tahun 2025-2029. Untuk itu dalam pencapaian Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Periode 2025-2030, maka targetnya diukur sesuai dengan waktu kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung yaitu tahun 2025-2030.

Dalam mewujudkan visi Kota Bitung untuk 5 (lima) tahun ke depan, maka Pemerintah Kota Bitung telah merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

Misi 1. : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Tujuan : 1.1. Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan.

Sasaran : 1.1.1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

1.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

1.1.3. Menurunnya prevalensi stunting.

Tujuan : 1.2. Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan kesetaraan gender.

Sasaran : 1.2.1. Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.

Misi 2. : Membangun dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Tujuan : 2.1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Sasaran : 2.1.1. Meningkatnya investasi daerah.

2.1.2. Meningkatnya daya saing produk unggulan industri.

2.1.3. Meningkatnya daya saing sektor pertanian, dan perikanan.

2.1.4. Meningkatnya produktifitas daerah.



Tujuan : 2.2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran : 2.2.1. Mengurangi kesenjangan kemiskinan melalui iklim ekonomi yang inklusif.

2.2.2. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Misi 3. : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan : 3.1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran : 3.1.1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

3.1.2. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

3.1.3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah.

Misi 4. : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tujuan : 4.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Sasaran : 4.1.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam.

4.1.2. Meningkatnya keselarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama dan berbudaya demi masyarakat adil dan makmur.

Tabel 174
**Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja RPJMD Kota Bitung
Tahun 2025-2030**

VISI
“HARMONISASI MENUJU BITUNG MAJU 2025-2030”

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TARGET					
		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Memperkuat Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM)	1 Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan	1 Indeks Modal Manusia (IMM)	Nilai Indeks	NA	0.57	0.58	0.59	0.6	0.61	0.62
		1.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai Indeks	76.90	77.38	77.86	78.34	78.82	79.30	79.78
		1.2 Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	1.2.1 Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.43	74.66	74.88	75.105	75.33	75.555	75.78
		1.3 Menurunnya Prevalensi Stunting	1.3.1 Prevalensi Stunting	Skor	2.7	2.33	1.96	1.59	1.22	0.85	0.48
		2 Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan kesetaraan gender	2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai Indeks	94.81	94.85	94.99	95.13	95.27	95.41	95.55
		2.1 Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	2.1.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai Indeks	65.3	66.6	67.9	68.6	69.7	70.2	71.35
2	Membangun dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan	3 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	3 Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5.11	5,3 - 6,3	6,3 - 6,5	6,5 - 6,7	6,7 - 6,9	6,9 - 7,0	7,0-7,2
		3.1 Meningkatnya Investasi Daerah	3.1.1 Nilai Investasi PMDN Berskala Nasional	Rp.	557,626,300,000	585,507,615,000	614,782,995,750	645,522,145,538	677,798,252,814	711,688,165,455	747,272,573,728
			3.1.2 Nilai Investasi PMA Berskala Nasional	Rp.	466,922,832,567	490,268,974,195	514,782,422,905	540,521,544,050	567,547,621,253	595,925,002,316	625,721,252,431

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TARGET							
		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		3.2	Meningkatnya daya saing produk unggulan industri	3.2.1	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	4.3	5.4	6.1	6.85	7.15	7.7	8.1
		3.3	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	3.3.1	Laju Pertumbuhan PDRB subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	6.18	6.2	6.78	6.98	7.12	7.35	7.6
		3.4	Meningkatnya Produktifitas Daerah	3.4.1	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.48	3.68	3.88	4.08	4.28	4.48	4.68
		4	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	4	PDRB PERKAPITA (adhb)	Rp.	105,342,980	114,265,530	123,943,821	134,441,862	145,829,088	158,180,812	171,578,727
		4.1	Mengurangi kesenjangan kemiskinan melalui iklim ekonomi yang inklusif	4.1.1	Indeks Gini (Gini Ratio)	Indeks	0.374	0.354	0.334	0.314	0.294	0.274	0.254
		4.2	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	4.2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7.51	6.83	6.15	5.47	4.79	4.11	3.43
4.2.2	Persentasi Angka Kemiskinan			%	6.27	6.2	6.13	6.06	5.99	5.92	5.85		
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	5	Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	5	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks	71.75	74.75	76.75	79.25	81	82	83
		5.1	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	5.1.1	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai/ Predikat	63.47	64.97	66.47	69.47	71	72	73
				5.1.2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				5.1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	88.13	88.63	89.13	89.63	90.13	90.63	91.13

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TARGET					
		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		5.2 <i>Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik</i>	5.2.1 <i>Indeks Profesionalitas ASN</i>	<i>Nilai/ Predikat</i>	47.1	55	60	65	70	75	81
			5.2.2 <i>Indeks SPBE</i>	<i>Nilai/ Predikat</i>	3.31	3.81	7.26	4.81	7.26	5.81	7.26
		5.3 <i>Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah</i>	5.3.1 <i>Indeks Inovasi Daerah</i>	<i>Nilai Indeks</i>	51.76	53.14	54.52	55.9	57.28	58.66	60.04
4	Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	6 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.	6 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	NA	77	78	79	80	81	82
		6.1 <i>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam</i>	6.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<i>Indeks</i>	68.92	69.22	69.48	69.74	70.16	70.66	70.66
			6.1.2 Indeks Keanekaragaman Hayati	<i>Indeks</i>	0.59	0.61	0.63	0.65	0.67	0.69	0.71
		6.2 <i>Meningkatnya Keselarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama dan berbudaya demi masyarakat adil dan makmur</i>	6.2.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama	<i>Indeks</i>	79	80	80.5	81	81.5	82	83
			6.2.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan	<i>Indeks</i>	55.39	56.35	57.35	58.3	59.6	60.01	61

Sasaran Makro Pembangunan Kota Bitung Tahun 2025-2030

Sasaran makro pembangunan Kota Bitung yang hendak dicapai periode tahun 2025-2030 adalah berdasarkan indikator makro sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 175
Indikator Makro Kota Bitung
2026 - 2030

Indikator	Proyeksi pada tahun				
	2026	2027	2028	2029	2030
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.8 – 6.65	6.1 – 6.7	6.4 – 6.8	6.5 – 6.9	7.0-7.2
Tingkat kemiskinan (%)	5.50 - 5,25	5.20 -6.20	4.90 -5.15	4.60 - 5.00	4.60 - 5.00
Tingkat Pengangguran terbuka (%)	6.92 - 7.27	5.26 -5.78	4.90 -5.15	4.5 - 4.9	4.5 - 4.9
IPM	75.62	76.13	76.65	77.17	77.17
Gini Ratio	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30

C. Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Bitung.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 ini, dicantumkan pula program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bitung untuk memenuhi janji Walikota dan Wakil Walikota pada saat kampanye pemilihan kepala daerah. Adapun program program dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Menjamin ketersediaan benih, pupuk, pestisida, dan insektisida untuk menunjang ketahanan pangan.**

Program ini merupakan dukungan terhadap pelaksanaan asta cita/tujuan nasional yang pertama dan ke duabelas dari presiden dan wakil presiden, serta pelaksanaan dari misi kedua Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung yaitu membangun dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
- 2. Penyempurnaan sistem penerimaan daerah.**

Program ini merupakan dukungan terhadap peningkatan penerimaan pendapatan daerah yang merupakan pelaksanaan misi ke tiga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung.
- 3. Reformasi birokrasi serta peningkatan pelayanan publik.**

Program ini merupakan dukungan terhadap prioritas nasional yang ke tiga serta merupakan pelaksanaan misi ke tiga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung.
- 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.**

Program ini merupakan dukungan terhadap prioritas nasional yang ke tiga serta merupakan pelaksanaan misi ke tiga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung.

5. Pemberantasan kemiskinan.

Program ini merupakan dukungan terhadap prioritas nasional/astacita yang ke lima serta merupakan pelaksanaan misi ke dua Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung, dalam upaya penurunan angka kemiskinan di kota Bitung serta menunjang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 1 Tanpa kemiskinan dan TPM 10 berkurangnya kesenjangan.

6. Peningkatan pelayanan kesehatan.

Program ini merupakan dukungan terhadap prioritas nasional/astacita yang ke tujuh serta merupakan pelaksanaan misi pertama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung.

7. Penguatan Pendidikan, olahraga, keterampilan, sains serta teknologi.

Program ini merupakan dukungan terhadap prioritas nasional yang ke delapan serta merupakan pelaksanaan misi pertama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung.

8. Penguatan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Program ini merupakan dukungan terhadap prioritas nasional yang ke sepuluh serta merupakan pelaksanaan misi pertama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung.

9. Pelestarian lingkungan hidup.

Program ini merupakan dukungan terhadap prioritas nasional yang ke sebelas serta merupakan pelaksanaan misi keempat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung.

10. Pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Program ini merupakan dukungan terhadap pelaksanaan tujuan nasional/astacita yang keenam dari Presiden dan Wakil Presiden, serta pelaksanaan dari misi kedua Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung yaitu Membangun dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

11. Memperkuat kerukunan antar umat beragama.

Program ini merupakan dukungan terhadap prioritas nasional/astacita yang ke enambelas serta merupakan pelaksanaan misi keempat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung.

12. **Pelestarian seni dan budaya.**

Program ini merupakan dukungan terhadap prioritas nasional yang ke tujubelas serta merupakan pelaksanaan misi keempat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung.

13. **Pengembangan ekonomi kreatif.**

Program ini merupakan pelaksanaan misi kedua Wali Kota dan Wakil Walikota Bitung.

14. **Peningkatan infrastruktur penunjang pariwisata.**

Program ini merupakan pelaksanaan misi kedua Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung.

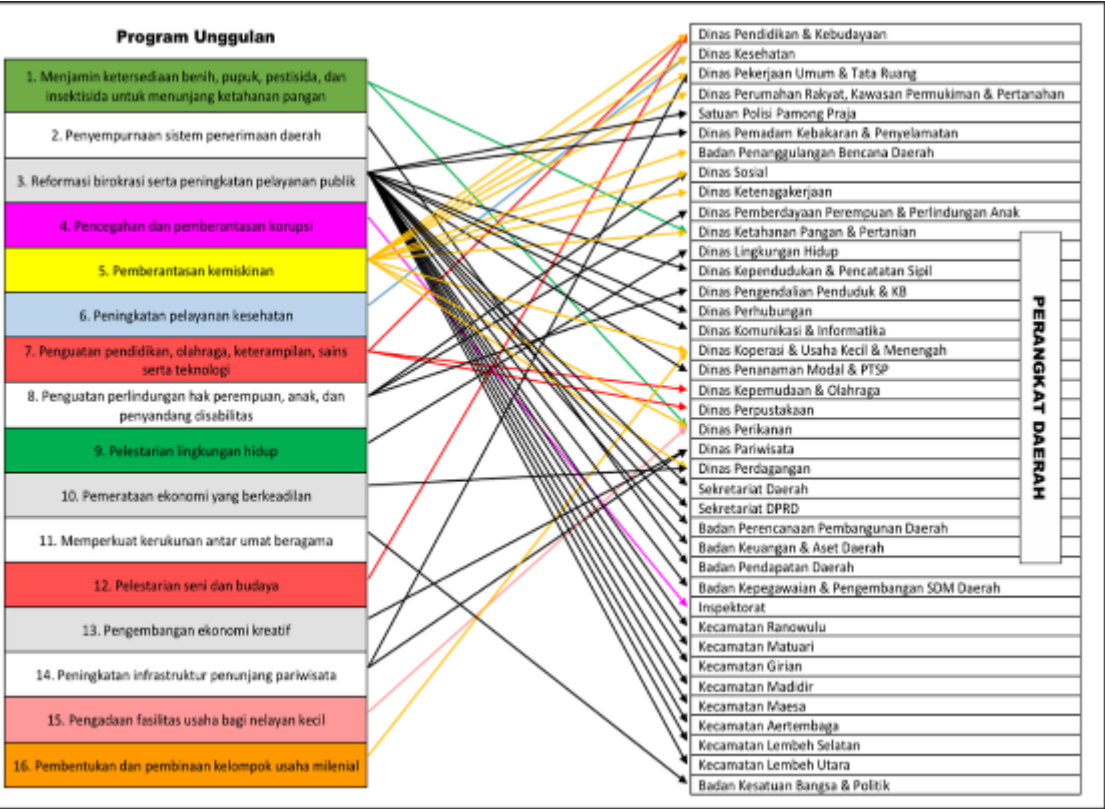
15. **Pengadaan fasilitas usaha bagi nelayan kecil.**

Program ini merupakan pelaksanaan misi kedua Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung.

16. **Pembentukan dan pembinaan kelompok usaha milenial.**

Program ini merupakan pelaksanaan misi keempat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung.

Pemetaan 16 Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Walikota ke dalam Urusan Organisasi Perangkat Daerah.



Keterkaitan Misi Walikota dan Wakil Walikota dengan Asta Cita,

17 Program Presiden Dan 16 Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2025-2029

MISI	ASTA CITA / PRIORITAS NASIONAL 2025-2029	17 PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN	16 PROGRAM UNGGULAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
1 Memperkuat Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM)	1 Memperkokoh Ideologi Pancasila,demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,air, ekonomi syariah, ekonomi digital,ekonomi hijau dan ekonomi biru	8 Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi 7 Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatn BPJS Kesehatan dan Penyediaan obat untuk rakyat 10 Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas	7 Penguatan Pendidikan, olahraga, keterampilan, sains serta teknologi 6 Peningkatan pelayanan kesehatan 8 Penguatan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas

MISI	ASTA CITA / PRIORITAS NASIONAL 2025-2029	17 PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN	16 PROGRAM UNGGULAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2 Membangun dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan	3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains,Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 6 Membanguna dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonpmi, pemerataan ekonomi dan pemberantasa kemiskinan	1 Mencapai swasembada pangan, energi dan air 5 Pemberantasan Kemiskinan 12 Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani 13 Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan 14 Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya 15 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	10 Pemerataan ekonomi yang berkeadilan 5 Pemberantasan kemiskinan 1 Menjamin ketersediaan benih, pupuk, pestisida, dan insektisida untuk menunjang ketahanan pangan. 13 Pengembangan ekonomi kreatif. 14 Peningkatan infrastruktur penunjang pariwisata. 15 Pengadaan fasilitas usaha bagi nelayan kecil 16 Pembentukan dan pembinaan kelompok usaha milenial

MISI	ASTA CITA / PRIORITAS NASIONAL 2025-2029	17 PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN	16 PROGRAM UNGGULAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	2 Penyempurnaan sistim penerimaan negara 3 Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi 4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 6 Pencegahan dab pemberantasan narkoba 9 Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemerliharaan hubungan internasional yang kondusif	3 Reformasi birokrasi serta peningkatan pelayanan publik 4 Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 2 Penyempurnaan sistem penerimaan daerah

MISI	ASTA CITA / PRIORITAS NASIONAL 2025-2029	17 PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN	16 PROGRAM UNGGULAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
4 Memperkuat Penyelesaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	8 Memperkuat Penyelesaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	11 Menjamin pelestarian lingkungan hidup 16 Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah 17 Pestaarian seni budaya, peningkatan ekonomikreatif dan peningkatan prestasi olahraga	9 Pestaarian lingkungan hidup 11 Memperkuat kerukunan antar umat beragama. 12 Pestaarian seni dan budaya

3.2 Strategi, Arah kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

A. Strategi dan Arah Kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota Bitung yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan kota Bitung tahun 2026-2030 secara efektif dan efisien.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif serta Pendekatan Kewilayahan. Selanjutnya dirumuskan program pembangunan daerah dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi pembangunan Kota Bitung merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu terhadap upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bitung bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Bitung.

Strategi juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Bitung mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien melalui pendekatan yang komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu)

sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Untuk itu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi 1: Memperkuat Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM).

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan.
	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat.	Peningkatan dan pemerataan kualitas Kesehatan.
	Menurunnya Prevalensi Stunting.	
Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan kesetaraan gender.	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.	Pengarusutamaan gender.

Misi 2: Membangun dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Tujuan	Sasaran	Strategi
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.	Meningkatnya Investasi Daerah.	Meningkatkan pelayanan penanaman modal mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi serta memprioritaskan efektivitas promosi peluang investasi.
	Meningkatnya daya saing produk unggulan industri.	
	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, dan perikanan.	Peningkatan produktivitas petani dan nelayan melalui pemanfaatan teknologi.
	Meningkatnya Produktifitas Daerah.	Peningkatkan daya tarik destinasi unggulan.
Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.	Mengurangi kesenjangan kemiskinan melalui iklim ekonomi yang inklusif.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan program kemiskinan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan penduduk miskin dan rentan miskin sehingga menjadi lebih kuat dan mandiri terhadap kerentanan sosial ekonomi.

	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran.	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis dengan regulasi ketenagakerjaan.

Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel.	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas.
	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.	Meningkatkan kualitas dan implementasi merit sistem dalam pengembangan karier ASN.
	Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah.	Peningkatan Efisiensi dan Inovasi.

Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
	Meningkatnya Keselarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama dan berbudaya demi masyarakat adil dan makmur.	Pemerataan Kualitas Hidup.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan, perlu ditetapkan arah kebijakan yang menjadi acuan perencanaan pembangunan tahunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan di tiap tahun,



diperlukan agenda atau tema pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan yang lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun fokus atau tema pembangunan Kota Bitung tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 176
**Tema Pembangunan Kota Bitung
Tahun 2026-2030**

TAHUN	TEMA PEMBANGUNAN
2026	Penguatan Transformasi Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Lingkungan Dan Pelayanan Publik Yang Di Dukung Semangat Keharmonisan
2027	Percepatan Pemulihan Perekonomian melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia
2028	Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Penguatan Daya Saing yang didukung potensi unggulan daerah
2029	Pemantapan Fondasi Transformasi menuju Bitung maju yang harmonis
2030	Perwujudan Fondasi Transformasi menuju Bitung yang maju yang harmonis

Penjabaran keterkaitan tema pembangunan daerah untuk setiap periodenya memperhatikan strategi yang telah dirumuskan, kemudian menjadi arah kebijakan pembangunan daerah yang dijabarkan pelaksanaannya setiap tahun. Adapun arah kebijakan tersebut tentunya dilaksanakan dengan memperhatikan juga dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi Sulawesi Utara setiap tahunnya sehingga terdapat sinergitas dalam pelaksanaannya. Adapun arah kebijakan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 177
Arah Kebijakan RPJMD Kota Bitung
Tahun 2026-2030

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN RENCANA				
		2026	2027	2028	2029	2030
1 Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan.	1 Penguatan pemenuhan kualitas sarana pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan					
	2 Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal					
	3 Peningkatan kualitas tenaga pendidik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi					
2 Peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan.	4 Peningkatan dan pemenuhan upaya kesehatan masyarakat					
	5 Peningkatan Kualitas pada fasilitas Kesehatan dasar dan rujukan					
	6 Peningkatan peran keluarga berencana					
3 Pengarusutamaan gender.	7 Penguatan pembangunan inklusif					
	8 Pemberdayaan masyarakat berbasis gender					
	9 Peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak					
4 Meningkatkan pelayanan penanaman modal mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi serta memprioritaskan efektivitas promosi peluang investasi.	10 Penguatan iklim investasi yang berkualitas					
	11 Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM melalui produk lokal dan unggulan daerah					
5 Peningkatan produktivitas petani dan nelayan melalui pemanfaatan teknologi.	12 Penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan industri yang berkelanjutan					
6 Peningkatkan daya tarik destinasi unggulan.	13 Peningkatan daya saing sektor pariwisata yang mendukung pariwisata berkelanjutan					
7 Meningkatkan kualitas pelaksanaan program kemiskinan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan penduduk miskin dan rentan miskin sehingga menjadi lebih kuat dan mandiri terhadap kerentanan sosial ekonomi.	14 Penguatan perlindungan sosial					
8 Peningkatan hubungan industrial yang harmonis dengan regulasi ketenagakerjaan.	15 Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja					
9 Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas.	16 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui harmonisasi regulasi, serta pengembangan <i>smart government</i> dan peningkatan aparatur					
10 Meningkatkan kualitas dan implementasi merit sistem dalam pengembangan karier ASN.						
11 Peningkatan Efisiensi dan Inovasi.	17 Mendorong penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan					
12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.	18 Pembangunan ramah lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati					
	19 Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan					
13 Pemerataan Kualitas Hidup.	20 Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan					
	21 Peningkatan kesiapsiagaan bencana, penanganan bencana dan pasca bencana					
	22 Peningkatan upaya pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal					
	23 Pemantapan implementasi pelaksanaan nilai-nilai persatuan dan toleransi ditengah perbedaan suku, agama serta budaya masyarakat kota Bitung					

B. Program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029.

Program prioritas adalah program perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan program prioritas daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Karena itu, Program Prioritas RPJMD 2025-2029 adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.

Adapun program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 178
Program Prioritas Pembangunan Daerah

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
HARMONISASI MENUJU BITUNG MAJU 2025-2030. Memperkuat Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM)	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)		Indeks Pembangunan Manusia		
				Indeks Modal Manusia		
				Rata-Rata Lama Sekolah		
				Harapan Lama Sekolah		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan		1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Iklim Inklusivitas SD	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
				Iklim Inklusivitas SMP	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga		1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	
				Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kebudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Usia Harapan Hidup (UHH)		
		Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Kejadian Malaria per 1000 orang	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



08/03/2024

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Ibu (AKI)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penemuan Kasus TBC	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Balita	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		Menurunnya Prevalensi Stunting		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman		1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan kesetaraan gender	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Rasio Gini	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Tingkat Kemiskinan	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
	Membangun dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi		
				Nilai Investasi PMA Berskala Nasional		
				Nilai Investasi PMDN Berskala Nasional		
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	STANDART PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	KEGIATAN PENERIMAAN MISI PENANAMAN MODAL	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya daya saing produk unggulan industri	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan		
				Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kota Bitung	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Tingkat hunian akomodasi	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Bitung	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Jumlah Destinasi/Objek Wisata yang diunggulkan	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah Industri Pariwisata	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	



08/03/2024

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
		Meningkatnya daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan		Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
		Meningkatnya Produktifitas Daerah		Indeks Daya Saing Daerah		
	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat			PDRB Perkapita (adhb)		
		Mengurangi kesenjangan kemiskinan melalui iklim ekonomi yang inklusif		Rasio Gini		
			Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Rasio Gini	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Tingkat Kemiskinan	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
		Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran		Tingkat Kemiskinan		
				Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Tingkat Kemiskinan	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) penyandang disabilitas terlanter, anak terlanter, lanjut usia terlanter dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Persentase irigasi kabupaten/kota dalam kondisi baik	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		Rasio Jaringan Irigasi	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi		
		Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel		Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
				Opini BPK Atas Laporan Keuangan		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah yang tidak Mendapat Temuan Hasil Pengawasan yang Material	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Persentase Perangkat Daerah (PD) Mengimplementasi-kan Pengendalian Risiko	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Peningkatan Keababilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
		Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik		Indeks Profesionalitas ASN		
				Indeks SPBE		
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Indeks Literasi Digital	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	



[Signature]

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan	Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah		
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		
		Meningkatnya Keselarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama dan berbudaya demi masyarakat adil dan makmur		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
				Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan		2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 179
Program Pembangunan Daerah Kota Bitung
Tahun 2026-2030

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program/Outcome	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
	MISI 1 : MEMPERKUAT PENGANGKUTAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)														
	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan	Indeks Modal Manusia (IMM)	0.57	0.58		0.59		0.6		0.61		0.62			
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0.48	0.96		1.44		1.92		2.40		2.88			
	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Rata-Rata Lama Sekolah	9.985	10.01		10.035		10.06		10.09		10.11			
		Harapan Lama Sekolah	12.68	12.69		12.7		12.71		12.72		12.73			
1	O1	O2	Program Pengelolaan Pendidikan												
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	52.62	55.52	39.921.177.818,00	58.42	41.917.236.708,00	61.32	44.013.098.544,00	64.22	46.213.753.471,00	67.12	48.524.441.145,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	64.02	65.12		66.22		67.32		68.42		69.52		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	59.44	60.94		62.44		63.94		65.44		66.94		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	96.76	97.01		97.26		97.51		97.76		98.01		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	21.91	26.01		30.11		34.21		38.31		42.41		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	58.09-58.39	60.59-60.89		63.09-63.39		65.59-65.89		68.09-68.39		70.59-70.89		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	75.60	78.64		81.68		84.65		87.62		90.59		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	O1	O3	Program Pengembangan Kurikulum												
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Iklim Inklusivitas SMP	58.43	60.83	30.000.000,00	63.23	31.500.000,00	65.63	33.075.000,00	68.03	34.728.750,00	70.43	36.465.187,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Iklim Inklusivitas SD	60.83	63.33		65.83		68.33		70.83		73.33		
1	O1	O4	Program Pendidik dan Tenaga Pendidik												
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pernerataan Guru	100%	100%	500.000.000,00	100%	525.000.000,00	100%	551.250.000,00	100%	578.812.500,00	100%	607.753.152,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	90%	90%		90%		90%		90%		90%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	O1	O5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan												
		Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Iain Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui		30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.187,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	19	O3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan												
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Berprestasi Nasional/ Internasional	36	38	575.767.000,00	40	604.555.350,00	42	634.783.117,00	45	666.522.273,00	50	699.848.387,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		Sasaran 2 : Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	74.66	74.88		75.105		75.33		75.56		75.78		
1	O2	O2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat			1.658.864.092,00		1.741.807.297,00		1.828.897.662,00		1.920.342.544,00		2.016.359.672,00		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat			2.653.850.000,00		2.786.542.500,00		2.925.869.625,00		3.072.163.106,00		3.225.771.261,00		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat			200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		243.101,00		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat			1.156.376.040,00		1.214.194.840,00		1.274.905.583,00		1.338.649.812,00		1.405.582.302,00		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat			2.635.300.000,00		2.767.065.000,00		2.905.418.250,00		3.050.689.162,00		3.203.223.620,00		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat			3.185.671.959,00		3.344.955.556,00		3.512.203.335,00		3.687.813.502,00		3.872.204.176,00		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat			1.311.044.660,00		1.376.596.893,00		1.445.426.738,00		1.517.698.074,00		1.593.582.978,00		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat			2.706.200.000,00		2.841.510.000,00		2.983.585.500,00		3.132.764.775,00		3.289.043.013,00		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3.8	3.6	66.664.200.000,00	3.4	69.997.410.000,00	3.2	73.497.280.500,00	3	77.172.144.525,00	2.8	81.030.751.751,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Balita	0.28	0.26		0.24		0.22		0.2		0.18		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	62	61		60		59		58		57		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	3	3		3		3		3		3		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Kejadian Malaria per 1000 orang	60	50		40		30		20		10		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Penemuan Kasus TBC	74	75		76		77		78		79		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	96.6	97.2		97.8		98.4		99		99.6		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	70	72		74		76		78		80		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	2.5	2.3		2.1		1.9		1.7		1.5		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat			9.408.560.000,00		9.878.988.000,00		10.372.937.400,00		10.891.584.270,00		11.436.163.484,00		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat			3.400.000,00		3.570.000,00		3.748.500,00		3.935.925,00		4.132.721,00		Dinas Kesehatan

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2026		2027		2028		2029				2030
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	30%	32%	965.000.000,00	33%	1.013.250.000,00	35%	1.063.912.500,00	36%	1.117.108.125,00	38%	1.172.963.531,00	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan			26.000.000,00		27.300.000,00		28.665.000,00		30.098.250,00		31.603.162,00	Dinas Kesehatan
			Sasaran 3 : Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	2.33	1.96		1.59		1.22		0.85		0.48		
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman													Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	95%	95%	6.000.000,00	95%	6.300.000,00	95%	6.615.000,00	95%	6.945.750,00	95%	7.293.037,00	Dinas Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan													Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	95%	95%	200.000,00	95%	210.000,00	95%	220.500,00	95%	231.525,00	95%	243.101,00	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		243.101,00	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		243.101,00	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		243.101,00	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		243.101,00	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				1.500.000,00		1.575.000,00		1.653.750,00		1.736.437,00		1.823.259,00	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		6.007.531,00	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		243.101,00	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		243.101,00	Dinas Kesehatan
			Tujuan 2 : Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.85	94.99		95.13		95.27		95.41		95.55		
			Sasaran 4 : Meningkatkan akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nilai	66.6	67.9		68.6		69.7		70.20		71.35		
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan													
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	43.4	43.41	280.000.000,00	43.42	294.000.000,00	43.43	308.700.000,00	43.44	324.135.000,00	43.46	340.341.750,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.85	94.99		95.13		95.27		95.41		95.55		Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	26.6	26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak													
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	100	100	90.000.000,00	100	94.500.000,00	100	99.225.000,00	100	104.186.250,00	100	109.395.562,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
			MISI 2 : MEMBANGUN DARI KEKURANGAN UNTUK PEMERATAAN EKONOMI YANG BERKEADILAN													
			Tujuan 3 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 - 6,3	6,3 - 6,5		6,5 - 6,7		6,7 - 6,9		6,9 - 7,0		7,0-7,2		
			Sasaran 5 : Meningkatkan Investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN Berskala Nasional Nilai Investasi PMA Berskala Nasional	585,507,615,000 490,268,974,195	614,782,995,750 514,782,422,905		645,522,145,538 540,521,544,050		677,798,252,814 567,547,621,253		711,688,165,455 595,925,002,316		747,272,573,728 625,721,252,431		
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal													
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	392.564.223.279	290.825.778.787	10.349.000,00	305.367.067.726	10.866.450,00	320.635.421.113	11.409.772,00	336.667.192.168	11.980.261,00	353.500.551.777	12.579.274,00	DPMTSP
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal													
			Meningkatnya angketan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100	100	3.610.000,00	100	3.790.500,00	100	3.980.025,00	100	4.179.026,00	100	4.387.977,00	DPMTSP
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal													
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	100	13.690.000,00	100	14.374.500,00	100	15.093.225,00	100	15.847.886,00	100	16.640.280,00	DPMTSP
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal													
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal	12	12	1.430.600,00	12	1.502.130,00	12	1.577.236,00	12	1.656.098,00	12	1.738.903,00	DPMTSP
2	18	06	Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal													
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Standar Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	25	2	1.740.000,00	2	1.827.000,00	2	1.918.350,00	2	2.014.267,00	2	2.114.980,00	DPMTSP
			Sasaran 6 : Meningkatkan daya saing produk unggulan industri	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	5.40	6.10		6.85		7.15		7.70		8.10		
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata													
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	9.2	9.3	8.300.000,00	9.4	8.715.000,00	9.5	9.150.750,00	9.6	9.608.287,00	9.7	10.088.701,00	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Bitung	1.26	1.27		1.28		1.29		1.30		1.31		Dinas Pariwisata
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Destinasi/ Objek Wisata yang diunggulkan	3	3		3		3		3		3		Dinas Pariwisata
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kota Bitung	21	21.2		21.4		21.6		21.8		22		Dinas Pariwisata

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2026		2027		2028		2029		2030				
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	60	70	1.215.432.000,00	80	1.276.203.600,00	90	1.340.013.780,00	100	1.407.014.469,00	110	1.477.365.192,00	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	10	12		12		12		14		14		Dinas Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah Industri Pariwisata	320	322		324		326		328		330		Dinas Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100	100	100.000.000,00	100	105.000.000,00	100	110.250.000,00					Dinas Pariwisata
			Sasaran 7 : Meningkatkan daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB subsektor pertanian, Kehutanan dan perikanan	6.2	6.78		6.98		7.12		7.35		7.6		
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap													
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	110.779,64	111.333,21	75.000.000,00	111.890,21	78.750.000,00	112.449,66	82.687.500,00	113.011,91	86.821.875,00	113.576,97	91.162.968,00	Dinas Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya													
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	1.651,27	1.692,25	85.000.000,00	1.704,12	89.250.000,00	1.733,21	93.712.500,00	1.733,21	98.398.125,00	1.745,77	103.318.031,00	Dinas Perikanan
			Sasaran 8 : Meningkatkan Produktifitas Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3.68	3.88		4.08		4.28		4.48		4.68		
3	30	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan													
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	720	727	15.000.000,00	734	15.750.000,00	748	16.537.500,00	752	17.364.375,00	764	18.232.593,00	Dinas Perdagangan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat													
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	89.50	91.29	536.000.000,00	92.20	562.800.000,00	93.12	590.940.000,00	94.06	620.487.000,00	95.00	651.511.350,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Tujuan 4 : Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	PDRB (ADHB)	27.155.44	29.792.23		32.685.06		35.858.78		39.340.67		43.160.65		
			Sasaran 9 : Mengurangi kesenjangan kemiskinan melalui iklim ekonomi yang inklusif	Indeks Gini (Gini Ratio)	0.354	0.334		0.314		0.294		0.274		0.254		
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan													
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Pengawasan Barang Pokok dan Penting	22	22	5.000.000,00	24	5.250.000,00	24	5.512.500,00	26	5.788.125,00	30	6.077.531,00	Dinas Perdagangan
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial													
			Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Tingkat Kemiskinan	6.20	6.13	487.390.000,00	6.06	511.759.500,00	5.99	537.347.475,00	5.92	564.214.844,00	5.85	592.425.591,00	Dinas Sosial
			Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergarduasi dari Kemiskinan	20	25		30		35		40		45		Dinas Sosial
			Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Rasio Gini	0.354	0.334		0.314		0.294		0.274		0.254		Dinas Sosial
			Sasaran 10 : Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.83	6.15		5.47		4.79		4.11		3.43		
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)													
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	52	55	50.000.000,00	57	52.500.000,00	60	55.125.000,00	64	57.881.250,00	67	60.775.313,00	Dinas Koperasi dan UMKM
2	17	08	Program Pengembangan UMKM													
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	10.3	10.71	50.000.000,00	11.24	52.500.000,00	11.8	55.125.000,00	12.52	57.881.250,00	13.14	60.775.313,00	Dinas Koperasi dan UMKM
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum													
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio Jaringan Irigasi	216	216	8.100.000.000,00	216	8.505.000.000,00	216	8.930.250.000,00	216	9.376.762.500,00	216	9.845.600.625,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase irigasi kabupaten/kota dalam kondisi baik	70	75		80		85		90		95		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan													
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	82.25%	82.25%	26.150.000.000,00	83.07%	27.457.500.000,00	83.90%	28.830.375.000,00	84.74%	30.271.893.750,00	85.59%	31.785.488.437,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial													
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	28	36	2.160.000.000,00	41	2.268.000.000,00	46	2.381.400.000,00	51	2.500.470.000,00	57	2.625.493.500,00	
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Tingkat Kemiskinan	6.20	6.13		6.06		5.99		5.92		5.85		
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial													
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	90	90	2.325.000.000,00	90	2.441.250.000,00	90	2.563.312.500,00	90	2.691.478.125,00	90	2.826.052.031,00	Dinas Sosial
2	07	05	Program Hubungan Industrial													
			Terlindunginya hak-hak pekerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	61	63	2.491.500.000,00	65	2.616.075.000,00	67	2.746.878.750,00	67	2.884.222.687,00	70	3.028.433.821,00	Dinas Tenaga Kerja
			Terlindunginya hak-hak pekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.83	6.15		5.47		4.79		4.11		3.43		Dinas Tenaga Kerja

Kode		Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program/Outcome	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
		MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK													
		Tujuan 5 : Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	BB		A		A		A			
		Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	B	B	B		BB		BB		BB			
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP			
			Indeks Kepuasan Masyarakat	91.20	91.35	91.55		91.65		91.85		92.00			
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan												
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Peningkatan Keababilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	700.000.000,00	3	735.000.000,00	3	771.750.000,00	3	810.337.500,00	3	850.854.375,00	
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah (PD) Mengimplementasi-kan Pengendalian Risiko	100	100		100		100		100		100		
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah yang tidak Mendapat Temuan Hasil Pengawasan yang Material	100	100		100		100		100		100	10060.00%	
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi												
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	500.000.000,00	3	525.000.000,00	3	551.250.000,00	3	578.812.500,00	3	607.753.125,00	3
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100	3	
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah												
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	18.668.121.599,00	100	19.601.527.678,95	100	20.581.604.062,90	100	21.610.684.266,04	100	22.691.218.479,34	
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah												
		Meningkatnya tata kelola aset daerah	Pengamanan BMD Kota Bitung	85	86	926.741.000,00	87	973.078.050,00	88	1.021.731.952,00	89	1.072.818.550,00	90	1.126.459.477,00	
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah												
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak PPJ	52	52	677.657.000,00	53	711.443.250,00	54	747.015.412,50	54	784.366.183,13	57	823.584.492,28	5871.00%
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Meningkatkatnya jumlah WP PBB-P2 yang terdaftar dan terdata	49.010,00	49.990,00		50.990,00		52.009,00		53.049,00		54.109,00		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Meningkatnya Jumlah WP BPHTB yang terdaftar	1.400,00	1.428,00		1.456,00		1.485,00		1.514,00		1.544,00		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak Membayar Tunggalan Pajak	992.421.947	1.012.270.385		1.032.515.792		1.053.166.107		1.074.229.429		1.095.714.017		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal	500	510		520		530		540		550		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah terhadap Penerimaan PAD	5.800.000.000	2.750.000.000		2.850.000.000		3.000.000.000		3.100.000.000		3.200.000.000		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Realisasi Pendapatan Pajak Reklame terhadap Penerimaan PAD	2.500.000.000	2.650.000.000		2.809.000.000		2.977.540.000		3.156.192.400		3.345.563.944		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Air Tanah	94	96		96		96		96		96		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hiburan	41	43		45		47		49		51		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hotel	42	43		43		45		45		47		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak MBLB	14	4		4		4		4		4		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Parkir	8	9		9		9		9		9		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Reklame	311	323		334		334		356		357		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Restoran	145	152		159		166		173		180		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Sarang Walet	8	8		8		8		8		8		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Air Tanah	60	62		62		62		62		62		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Reklame	40	42		42		42		42		42		

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program/Outcome	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
			Sasaran 12 : Meningkatkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks Profesionalitas ASN	55	62		68		72.5		78		80		
				Indeks SPBE	3.81	4.31		4.81		5.31		5.81		6.31		6.50
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika													
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Literasi Digital	1.2	1.4	2.613.550.798,00	1.6	2.744.228.338,00	1.8	2.881.439.754,00	1.9	3.025.511.742,00	2	3.176.787.329,00	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.1	3.15		3.2		3.25		3.3		3.3		6.50
1	05	02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda	90	90	5.294.919.000,00	95	5.559.664.950,00	97	5.837.648.197,00	100	6.129.530.607,00	100	6.436.007.137,00	100%
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90	92		94		96		98		100		100%
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak lanjuti	90	91		92		93		94		95		1.47%
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum			-		-		-		-		-		15%
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat			-		-		-		-		-		-
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS													
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah													
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	5	7	33.000.000,00	9	34.650.000,00	11	36.382.500,00	15	38.201.625,00	17	40.111.706,00	60%
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN	55	60		65		70		75		81		35%
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN													
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN									30%		35%		35%
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN									60%		60%		60%
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia													
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10	15	3.000.000,00	20	3.150.000,00	25	3.307.500,00	30	3.472.875,00	35	3.646.518,00	30%
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	4	5		5		5		5		5		90%
			Sasaran 13 : Meningkatnya penerapan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	53.14	54.52		55.9		57.28		58.66		60.04		
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan													
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	53.14	54.52	156.736.006,00	55.90	164.572.806,00	57.28	172.801.446,00	58.66	181.441.518,00	60.04	190.513.594,00	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	3.68	3.88		4.08		4.28		4.48		4.68		
			Menimngkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah													
			Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan													
			Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah													
5	05	03	Program Riset dan Inovasi													
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	53.14	54.52	2.000.000,00	55.90	3.000.000,00	57.28	4.000.000,00	58.66	5.000.000,00	60.04	6.000.000,00	
			MSI 4 : Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur													
			Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.	Indeks Kualitas layanan infrastruktur	77.00	78.00		79.00		80.00		81.00		82.00		
			Sasaran 14 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas lingkungan hidup	69.22	69.48		69.74		70.16		70.66		70.66		
				Indeks Keanekaragaman Hayati	0.61	0.63		0.65		0.67		0.69		0.71		
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup													
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk mitigasi dampak KRP	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	1	0	50.000.000,00	0	52.500.000,00	0	55.125.000,00	1	57.881.250,00	0	60.775.312,00	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program/Outcome	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2026		2027		2028		2029				2030	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan														
			Menurunnya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	55.82	58.56	81.500.000,00	61.3	85.575.000,00	64.04	89.853.750,00	66.78	94.346.437,00	69.52	99.063.759,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Menurunnya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	84.6	84.7		84.8		84.9		85		85.1		Dinas Lingkungan Hidup	
			Menurunnya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air	55.6	55.7		55.8		55.9		56		56.1		Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	04	Program Pengelolaan Keragaman Hayati (KEHATI)														
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Indeks Keanegarakanan Hayati	0.61	0.63	100.000.000,00	0.65	105.000.000,00	0.67	110.250.000,00	0.69	115.762.500,00	0.71	121.550.625,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Sasaran 15 : Meningkatnya Keselarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama dan berbudaya demi masyarakat adil dan makmur	Indeks Kerukunan Umat beragama	80.00	80.50		81.00		81.50		82.00		83.00			
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	56.35	57.35		58.30		59.60		60.01		61.00			
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan														
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Pengembangan Kebudayaan	10	10	1.021.250.000,00	12	1.072.312.500,00	12	1.125.928.125,00	14	1.182.224.531,00	16	1.241.335.787,00	18 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan														
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3	4	1.000.000.000,00	5	1.050.000.000,00	6	1.102.500.000,00	7	1.157.625.000,00	8	1.215.506.250,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Subbab ini memuat seluruh program perangkat daerah dalam mencapai Pembangunan daerah yang dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030. Program-program tersebut berdasarkan penanggung jawab bidang urusan yang disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen renstra perangkat daerah.

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Indikasi rencana program prioritas Kota Bitung tahun 2026 -2030 berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Walikota, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang).

Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya. Adapun program perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 181
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					-		-		-		-		-		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					-		-		-		-		-		
Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	1.409.203.800,00	B	1.479.663.990,00	BB	1.553.647.189,00	BB	1.631.329.548,00	BB	1.712.896.026,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					-		-		-		-		-		
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen	49.72	52.62	55.52	39.921.177.818,00	58.42	41.917.236.708,00	61.32	44.013.098.544,00	64.22	46.213.753.471,00	67.12	48.524.441.145,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen	62.92	64.02	65.12		66.22		67.32		68.42		69.52		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen	57.94	59.44	60.94		62.44		63.94		65.44		66.94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam	96.52	96.76	97.01		97.26		97.51		97.76		98.01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam	17.81	21.91	26.01		30.11		34.21		38.31		42.41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
	pendidikan kesetaraan														
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	72.46	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	55.59-55.89	58.09- 58.39	60.59- 60.89		63.09- 63.39		65.59- 65.89		68.09- 68.39		70.59- 70.89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam	72.56	75.60	78.64		81.68		84.65		87.62		90.59		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					-		-		-		-		-		
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Iklim Inklusivitas SMP	56.03	58.43	60.83	30.000.000,00	63.23	31.500.000,00	65.63	33.075.000,00	68.03	34.728.750,00	70.43	36.465.187,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
	Iklim Inklusivitas SD	58.33	60.83	63.33		65.83		68.33		70.83		73.33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					-		-		-		-		-		
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan					500.000.000,00		525.000.000,00		551.250.000,00		578.812.500,00		607.753.152,00		
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					-		-		-		-		-		
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan					30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.187,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					-		-		-		-		-	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	67.639.465.439,00	B	71.021.438.710,00	BB	74.572.510.464,00	BB	78.301.136.178,00	BB	82.216.192.988,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	3.376.440.000,00	B	3.545.262.000,00	BB	3.722.525.100,00	BB	3.908.651.355,00	BB	4.104.083.922,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					1.658.864.092,00		1.741.807.297,00		1.828.897.662,00		1.920.342.544,00		2.016.359.672,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					2.653.850.000,00		2.786.542.500,00		2.925.869.625,00		3.072.163.106,00		3.225.771.261,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		243.101,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					1.156.376.040,00		1.214.194.840,00		1.274.905.583,00		1.338.649.812,00		1.405.582.302,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					2.635.300.000,00		2.767.065.000,00		2.905.418.250,00		3.050.689.162,00		3.203.223.620,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					3.185.671.959,00		3.344.955.556,00		3.512.203.335,00		3.687.813.502,00		3.872.204.176,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					1.311.044.660,00		1.376.596.893,00		1.445.426.738,00		1.517.698.074,00		1.593.582.978,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					2.706.200.000,00		2.841.510.000,00		2.983.585.500,00		3.132.764.775,00		3.289.043.013,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	4	3.8	3.6	66.664.200.000,00	3.4	69.997.410.000,00	3.2	73.497.280.500,00	3	77.172.144.525,00	2.8	81.030.751.751,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita	0.3	0.28	0.26		0.24		0.22		0.2		0.18		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI)	63	62	61		60		59		58		57		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	3	3	3		3		3		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Kejadian Malaria per 1000 orang.	75	60	50		40		30		20		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC	73	74	75		76		77		78		79		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	96.8	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	96	96.6	97.2		97.8		98.4		99		99.6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan	68	70	72		74		76		78		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	2.7	2.5	2.3		2.1		1.9		1.7		1.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					9.408.560.000,00		9.878.988.000,00		10.372.937.400,00		10.891.584.270,00		11.436.163.484,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					3.400.000,00		3.570.000,00		3.748.500,00		3.935.925,00		4.132.721,00	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan					965.000.000,00		1.013.250.000,00		1.063.912.500,00		1.117.108.125,00		1.172.963.531,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan					26.000.000,00		27.300.000,00		28.665.000,00		30.098.250,00		31.603.162,00	
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan					6.000.000,00		6.300.000,00		6.615.000,00		6.945.750,00		7.293.037,00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		243.101,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		243.101,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		243.101,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		243.101,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		243.101,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					1.500.000,00		1.575.000,00		1.653.750,00		1.736.437,00		1.823.259,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		6.007.531,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		243.101,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		243.101,00	
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN					-		-		-		-		-	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	5.517.879.111,00	B	5.793.773.066,00	BB	6.083.461.719,00	BB	6.387.634.805,00	BB	6.707.016.546,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					-		-		-		-		-	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap iriqasi	Rasio Jaringan Irigasi	216	216	216	8.100.000.000,00	216	8.505.000.000,00	216	8.930.250.000,00	216	9.376.762.500,00	216	9.845.600.625,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase irigasi kabupaten/kota dalam kondisi baik	65	70	75		80		85		90		95		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	84,18	87,00	90	2.750.000.000,00	93	2.887.500.000,00	96	3.031.875.000,00	99	3.183.468.750,00	100	3.342.642.187,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase jumlah sampah yang tertangani	75,18	75,19	75,20	650.000.000,00	75,21	682.500.000,00	75,22	716.625.000,00	75,23	752.456.250,00	75,24	790.079.062,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah					1.400.000.000,00		1.470.000.000,00		1.543.500.000,00		1.620.675.000,00		1.701.708.750,00	
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	68	73	78	3.800.000.000,00	83	3.990.000.000,00	88	4.189.500.000,00	93	4.398.975.000,00	98	4.618.923.750,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman					300.000.000,00		315.000.000,00		330.750.000,00		347.287.500,00		364.651.875,00	
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					-		-		-		-		-	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata					4.050.000.000,00		4.252.500.000,00		4.465.125.000,00		4.688.381.250,00		4.922.800.312,00	
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	3,3	2,8	2,3	1.500.000.000,00	1,8	1.575.000.000,00	1,3	1.653.750.000,00	0,8	1.736.437.500,00	0,3	1.823.259.375,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman					26.150.000.000,00		27.457.500.000,00		28.830.375.000,00		30.271.893.750,00		31.785.488.437,00	
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi					350.000.000,00		367.500.000,00		385.875.000,00		405.168.750,00		425.427.187,00	
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang					6.050.000.000,00		6.352.500.000,00		6.670.125.000,00		7.003.631.250,00		7.353.812.812,00	
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN					-		-		-		-		-	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	4.308.869.232,00	B	4.524.312.694,00	BB	4.750.528.328,00	BB	4.988.054.745,00	BB	5.237.457.482,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					-		-		-		-		-	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program	Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni	50	50	60	1.795.000.000,00	70	1.884.750.000,00	80	1.978.987.500,00	90	2.077.936.875,00	100	2.181.833.718,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Presentasi Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	30	30	44	535.000.000,00	58	561.750.000,00	72	589.837.500,00	86	619.329.375,00	100	650.295.844,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas perumahan kawasan permukiman	Presentasi Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	30	30	44	350.000.000,00	58	367.500.000,00	72	385.875.000,00	86	405.168.750,00	100	425.427.187,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM					-		-		-		-		-	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU	92	98	98	694.000.000,00	98	728.700.000,00	99	765.135.000,00	99	803.391.750,00	100	843.561.337,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU	92	98	98	5.000.000,00	98	5.250.000,00	99	5.512.500,00	99	5.788.125,00	100	6.077.531,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	3.800.955.953,00	B	3.991.003.750,00	BB	4.190.553.938,00	BB	4.400.081.635,00	BB	4.620.085.716,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	6.430.443.838,00	B	6.751.966.029,00	BB	7.089.564.331,00	BB	7.444.042.547,00	BB	7.816.244.675,00	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	4.759.710.532,00	B	4.997.696.058,00	BB	5.247.580.861,00	BB	5.509.959.904,00	BB	5.785.457.899,00	
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda	100	90	90	5.294.919.000,00	95	5.559.664.950,00	97	5.837.648.197,00	100	6.129.530.607,00	100	6.436.007.137,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	90	92		94		96		98		100		
	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak lanjuti	100	90	91		92		93		94		95		
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum					-		-		-		-		-	
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat					-		-		-		-		-	
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100	100	100	987.932.619,00	100	1.037.329.249,00	100	1.089.195.712,00	100	1.143.655.498,00	100	1.200.838.272,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana					-		-		-		-		-	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat					-		-		-		-		-	
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan bahaya kebakaran	100	100	100	1.096.000.000,00	100	1.150.800.000,00	100	1.208.340.000,00	100	1.268.757.000,00	100	1.332.194.850,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					-		-		-		-		-	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					-		-		-		-		-	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	4.194.965.333,00	B	4.404.713.599,00	BB	4.624.949.279,00	BB	4.856.196.743,00	BB	5.099.006.580,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Tingkat Kemiskinan	6.27	6.20	6.13	487.390.000,00	6.06	511.759.500,00	5.99	537.347.475,00	5.92	564.214.844,00	5.85	592.425.591,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	0	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Rasio Gini	0.374	0.354	0.334		0.314		0.294		0.274		0.254		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	5.3	28	36	2.160.000.000,00	41	2.268.000.000,00	46	2.381.400.000,00	51	2.500.470.000,00	57	2.625.493.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Tingkat Kemiskinan	6.27	6.20	6.13		6.06		5.99		5.92		5.85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja	90	90	90	2.325.000.000,00	90	2.441.250.000,00	90	2.563.312.500,00	90	2.691.478.125,00	90	2.826.052.031,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi Landa	100	100	100	575.000.000,00	100	603.750.000,00	100	633.937.500,00	100	665.634.375,00	100	698.916.093,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	100	100	100	2.000.000,00	100	2.100.000,00	100	2.205.000,00	100	2.315.250,00	100	2.431.012,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					-		-		-		-		-	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan PerangkatA Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	2.673.979.906,00	B	2.807.678.901,00	BB	2.948.062.846,00	BB	3.095.465.988,00	BB	3.250.239.288,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					-		-		-		-		-	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana	0	40	50	20.000.000,00	60	21.000.000,00	70	22.050.000,00	80	23.152.500,00	90	24.310.125,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.51	6.83	6.15	130.000.000,00	5.47	136.500.000,00	4.79	143.325.000,00	4.11	150.491.250,00	3.43	158.015.812,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	0	60	65	265.000.000,00	70	278.250.000,00	75	292.162.500,00	80	306.770.625,00	90	322.109.156,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	346	500	550		500		500		550		500		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					-		-		-		-		-	
Terlindunginya hak-hak pekerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	67.23	61	63	2.491.500.000,00	65	2.616.075.000,00	67	2.746.878.750,00	67	2.884.222.687,00	70	3.028.433.821,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.51	6.83	6.15		5.47		4.79		4.11		3.43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					-		-		-		-		-	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan PerangkatA Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	3.225.041.175,00	B	3.386.293.233,00	BB	3.555.607.895,00	BB	3.733.388.290,00	BB	3.920.057.704,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	43.39	43.4	43.41	280.000.000,00	43.42	294.000.000,00	43.43	308.700.000,00	43.44	324.135.000,00	43.46	340.341.750,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.81	94.85	94.99		95.13		95.27		95.41		95.55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat	26.6	26.6	26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					-		-		-		-		-	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	100	60.000.000,00	100	63.000.000,00	100	66.150.000,00	100	69.457.500,00	100	72.930.375,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan	0	100	100	15.000.000,00	100	15.750.000,00	100	16.537.500,00	100	17.364.375,00	100	18.232.593,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					-		-		-		-		-	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	0	61	61.2	110.000.000,00	61.4	115.500.000,00	61.6	121.275.000,00	61.8	127.338.750,00	62	133.705.687,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	100	100	100	90.000.000,00	100	94.500.000,00	100	99.225.000,00	100	104.186.250,00	100	109.395.562,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					-		-		-		-		-	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan PerangkatA Daerah	Ketersediaan pangan utama Cadangan Beras Pemerintah Kota	15.47	18	21	7.366.909.827,00	24	7.735.255.318,35	28	8.122.018.084,26	32	8.528.118.988,48	37	8.954.524.937,90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama Cadangan Beras Pemerintah Kota	15.47	18	21	536.000.000,00	24	562.800.000,00	28	590.940.000,00	32	620.487.000,00	37	651.511.350,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					-		-		-		-		-	
2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	2.000.000,00	B	2.100.000,00	BB	2.205.000,00	BB	2.315.250,00	BB	2.431.012,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong					3.000.000,00		3.150.000,00		3.307.500,00		3.472.875,00		3.646.518,00	
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah					2.000.000,00		2.100.000,00		2.205.000,00		2.315.250,00		2.431.012,00	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah					2.000.000,00		2.100.000,00		2.205.000,00		2.315.250,00		2.431.012,00	
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					-		-		-		-		-	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	4.404.017.527,00	B	4.624.218.403,00	BB	4.855.429.323,00	BB	5.098.200.789,00	BB	5.353.110.829,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					-		-		-		-		-	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	1	1	0	50.000.000,00	0	52.500.000,00	0	55.125.000,00	1	57.881.250,00	0	60.775.312,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					-		-		-		-		-	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49.41	55.82	58.56	81.500.000,00	61.3	85.575.000,00	64.04	89.853.750,00	66.78	94.346.437,00	69.52	99.063.759,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	92.24	84.6	84.7		84.8		84.9		85		85.1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Peningkatan Indeks Kualitas Air	67.14	55.6	55.7		55.8		55.9		56		56.1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Indeks Keanekaragaman Hayati	0.59	0.61	0.63	100.000.000,00	0.65	105.000.000,00	0.67	110.250.000,00	0.69	115.762.500,00	0.71	121.550.625,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						-		-		-		-		-
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	16	88	90	4.000.000,00	92	4.200.000,00	94	4.410.000,00	96	4.630.500,00	98	4.862.025,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						-		-		-		-		-
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	100	100	100	4.000.000,00	100	4.200.000,00	100	4.410.000,00	100	4.630.500,00	100	4.862.025,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0	2	0		2		0		1		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						-		-		-		-		-
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	1	1	1	75.000.000,00	1	78.750.000,00	1	82.687.500,00	1	86.821.875,00	1	91.162.968,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						-		-		-		-		-
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	100	100	100	5.500.000,00	100	5.775.000,00	100	6.063.750,00	100	6.366.937,00	100	6.685.284,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						-		-		-		-		-
Meningkatnya tata kelola persampahan					15.552.210.000,00		16.329.820.500,00		17.146.311.525,00		18.003.627.101,00		18.903.808.456,00	
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						-		-		-		-		-
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-		-		-		-		-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	5.812.208.541,00	B	6.102.818.968,00	BB	6.407.959.916,00	BB	6.728.357.912,00	BB	7.064.775.807,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	60.92	62	65	111.840.000,00	68	117.432.000,00	70	123.303.600,00	75	129.468.780,00	80	135.942.219,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Perekaman KTP elektronik	98.01	98.05	99.02		99.07		99.08		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraian nya dilaporkan	79.7	100	100	90.000.000,00	100	94.500.000,00	100	99.225.000,00	100	104.186.250,00	100	109.395.562,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	97.72	98	98.5		99		99.5		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	78.98	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	1.67	30	35	50.000.000,00	40	52.500.000,00	45	55.125.000,00	50	57.881.250,00	55	60.775.312,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	0	1	1	50.000.000,00	1	52.500.000,00	1	55.125.000,00	1	57.881.250,00	1	60.775.312,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					-		-		-		-		-	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan PerangkatÃ Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	4.433.758.178,00	B	4.655.446.086,00	BB	4.888.218.391,00	BB	5.132.629.310,00	BB	5.389.260.776,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					-		-		-		-		-	
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.78	1,71	1,71	140.478.150,00	1,70	147.502.057,00	1,70	154.877.160,00	1,69	162.621.018,00	1,67	170.752.069,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2.15	2	2		2,13		2,13		2,12		2,12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	85	86	86.5	1.630.615.000,00	86.10	1.712.145.750,00	86.10	1.797.753.037,00	86.10	1.887.640.689,00	86.10	1.982.022.723,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8-8	5-5	4-4		32,3-32,3		31,1-31,1		30,1-30,1		1,2-1,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	51:51	51.5:51.5	52:52	311.583.004,00	52.5:52.5	327.162.154,00	53:53	343.520.261,00	53.5:53.5	360.696.275,00	54:54	378.731.088,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					-		-		-		-		-	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	9.605.014.031,00	B	10.085.264.732,00	BB	10.589.527.969,00	BB	11.119.004.367,00	BB	11.674.954.586,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1	1,05	1,1	1.700.000.000,00	1,15	1.785.000.000,00	1,2	1.874.250.000,00	1,25	1.967.962.500,00	1,3	2.066.360.625,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut					88.000.000,00		92.400.000,00		97.020.000,00		101.871.000,00		106.964.550,00	
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					-		-		-		-		-	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	4.861.500.000,00	B	5.104.575.000,00	BB	5.359.803.750,00	BB	5.627.793.937,00	BB	5.909.183.634,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					-		-		-		-		-	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80	82	85	669.000.000,00	87	702.450.000,00	88	737.572.500,00	89	774.451.125,00	90	813.173.681,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	75	75	80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Literasi Digital	0	1.2	1.4	2.613.550.798,00	1.6	2.744.228.338,00	1.8	2.881.439.754,00	1.9	3.025.511.742,00	2	3.176.787.329,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.02	3.1	3.15		3.2		3.25		3.3		3.3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					-		-		-		-		-	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	2.038.054.019,00	B	2.139.956.719,00	BB	2.246.954.555,00	BB	2.359.302.283,00	BB	2.477.267.397,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif dan sehat	71.38	93.02	94.19	50.000.000,00	95.35	52.500.000,00	97.09	55.125.000,00	98.84	57.881.250,00	99.41	60.775.313,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase BPR/LKM aktif	6.11	6.11	6.11	50.000.000,00	6.12	52.500.000,00	6.12	55.125.000,00	6.12	57.881.250,00	6.13	60.775.313,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98.66	52	55	50.000.000,00	57	52.500.000,00	60	55.125.000,00	64	57.881.250,00	67	60.775.313,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	9.99	10.3	10.71	50.000.000,00	11.24	52.500.000,00	11.8	55.125.000,00	12.52	57.881.250,00	13.14	60.775.313,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					-		-		-		-		-	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	6.134.632.523,00	B	6.441.364.149,00	BB	6.763.432.356,00	BB	7.101.603.974,00	BB	7.456.684.173,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	276,976,932,178	392,564,23,279	290,825,778,787	10.349.000,00	305,367,067,726	10.866.450,00	320,635,421,113	11.409.772,00	336,667,192,168	11.980.261,00	353,500,551,777	12.579.274,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100	100	100	3.610.000,00	100	3.790.500,00	100	3.980.025,00	100	4.179.026,00	100	4.387.977,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	100	100	13.690.000,00	100	14.374.500,00	100	15.093.225,00	100	15.847.886,00	100	16.640.280,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					-		-		-		-		-	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	KEGIATAN PENERIMAAN MISI PENANAMAN MODAL	12	12	12	1.430.600,00	12	1.502.130,00	12	1.577.236,00	12	1.656.098,00	12	1.738.903,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	STANDART PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	30	25	2	1.740.000,00	2	1.827.000,00	2	1.918.350,00	2	2.014.267,00	2	2.114.980,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					-		-		-		-		-	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	3.496.265.868,00	B	3.671.079.161,00	BB	3.854.633.119,00	BB	4.047.364.775,00	BB	4.249.733.014,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	15	100	100	75.000.000,00	100	78.750.000,00	100	82.687.500,00	100	86.821.875,00	100	91.162.968,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	36	36	38	575.767.000,00	40	604.555.350,00	42	634.783.117,00	45	666.522.273,00	50	699.848.387,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	0	10	10.5	7.500.000,00	11	7.875.000,00	11.5	8.268.750,00	12	8.682.187,00	12.5	9.116.296,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					-		-		-		-		-	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan PerangkatÃ Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	158.712.424.849,00	B	166.648.046.091,00	BB	174.980.448.396,00	BB	183.729.470.815,00	BB	192.915.944.356,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan					1.021.250.000,00		1.072.312.500,00		1.125.928.125,00		1.182.224.531,00		1.241.335.787,00	
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					-		-		-		-		-	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	2.648.068.896,00	B	2.780.472.340,00	BB	2.919.495.957,00	BB	3.065.470.755,00	BB	3.218.744.293,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Perpustakaan	1	1	1	306.000.000,00	1	321.300.000,00	1	337.365.000,00	1	354.233.250,00	1	371.944.912,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					-		-		-		-		-	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					-		-		-		-		-	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	0	1	2	125.898.662,00	3	132.193.595,00	4	138.803.274,00	5	145.743.438,00	6	153.030.610,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					-		-		-		-		-	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Tingkat Ketersediaan Arsip	0	5	10	10.000.000,00	15	10.500.000,00	20	11.025.000,00	22	11.576.250,00	25	12.155.062,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	0	5	8		11		14		16		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					-		-		-		-		-	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	2.440.683.688,00	B	2.562.717.872,00	BB	2.690.853.766,00	BB	2.825.396.454,00	BB	2.966.666.277,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					-		-		-		-		-	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	110228.50	110779.64	111333.21	75.000.000,00	111890.21	78.750.000,00	112449.66	82.687.500,00	113011.91	86.821.875,00	113576.97	91.162.968,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	11255	1651.27	1692.25	85.000.000,00	1704.12	89.250.000,00	1733.21	93.712.500,00	1733.21	98.398.125,00	1745.77	103.318.031,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	9	5	5	5.000.000,00	6	5.250.000,00	6	5.512.500,00	7	5.788.125,00	7	6.077.531,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	710	720	727	15.000.000,00	734	15.750.000,00	748	16.537.500,00	752	17.364.375,00	764	18.232.593,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					-		-		-		-		-	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	4.052.191.418,00	B	4.254.800.988,00	BB	4.467.541.038,00	BB	4.690.918.090,00	BB	4.925.463.994,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	9.16	9.2	9.3	8.300.000,00	9.4	8.715.000,00	9.5	9.150.750,00	9.6	9.608.287,00	9.7	10.088.701,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Bitung	1.25	1.26	1.27		1.28		1.29		1.30		1.31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah Destinasi/Objek Wisata yang diunggulkan	3	3	3		3		3		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kota Bitung	20.91	21	21.2		21.4		21.6		21.8		22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	50	60	70	1.215.432.000,00	80	1.276.203.600,00	90	1.340.013.780,00	100	1.407.014.469,00	110	1.477.365.192,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	10	10	12		12		12		14		14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Industri Pariwisata	318	320	322		324		326		328		330		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100	100	100	100.000.000,00	100	105.000.000,00	100	110.250.000,00	100	115.762.500,00	100	121.550.625,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					-		-		-		-		-	
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	215	215	217	50.000.000,00	219	52.500.000,00	220	55.125.000,00	220	57.881.250,00	221	60.775.312,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Produktivitas Padi per hektar	50	50	50	50.000.000,00	50	52.500.000,00	50	55.125.000,00	50	57.881.250,00	50	60.775.312,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Jagung, Kacang Tanah, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	49.375	49.385	49.39		49.41		49.44		49.45		49.45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Cakupan bina kelompok petani	547	549	551	500.000.000,00	552	525.000.000,00	553	551.250.000,00	554	578.812.500,00	555	607.753.125,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					-		-		-		-		-	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	3.483.733.991,00	B	3.657.920.690,00	BB	3.840.816.725,00	BB	4.032.857.561,00	BB	4.234.500.439,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) yang dilakukan oleh instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (SKA)	2093	1800	1800	18.000.000,00	1800	18.900.000,00	1800	19.845.000,00	1800	20.837.250,00	1800	21.879.112,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Pengawasan Barang Pokok dan Penting	22	22	22	5.000.000,00	24	5.250.000,00	24	5.512.500,00	26	5.788.125,00	30	6.077.531,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pengawasan Barang Pokok dan Penting	22	22	22	11.000.000,00	24	11.550.000,00	24	12.127.500,00	26	12.733.875,00	30	13.370.568,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Peningkatan kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	96	90	90	10.000.000,00	90	10.500.000,00	92	11.025.000,00	92	11.576.250,00	94	12.155.062,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) yang dilakukan oleh instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (SKA)	2093	1800	1800	10.000.000,00	1800	10.500.000,00	1800	11.025.000,00	1800	11.576.250,00	1800	12.155.062,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					-		-		-		-		-	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					-		-		-		-		-	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Pertumbuhan industry	50	51	51	347.000.000,00	52	364.350.000,00	52	382.567.500,00	53	401.695.875,00	53	421.780.668,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Jumlah Bina Industri Kecil dan Menengah	20	20	30	5.000.000,00	30	5.250.000,00	40	5.512.500,00	40	5.788.125,00	40	6.077.531,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					-		-		-		-		-	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	BB	225.632.000,00	BB	236.913.600,00	A	248.759.280,00	A	261.197.244,00	A	274.257.106,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	3.225.631.960,00	B	3.386.913.558,00	BB	3.556.259.235,00	BB	3.734.072.197,00	BB	3.920.775.807,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	164.214.000,00	B	172.424.700,00	BB	181.045.935,00	BB	190.098.231,00	BB	199.603.143,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	200.175.000,00	B	210.183.750,00	BB	220.692.937,00	BB	231.727.584,00	BB	243.313.963,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	244.462.000,00	B	256.685.100,00	BB	269.519.355,00	BB	282.995.322,00	BB	297.145.088,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	15.273.749.353,00	B	16.037.436.820,00	BB	16.839.308.662,00	BB	17.681.274.094,00	BB	18.565.337.799,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	254.216.400,00	B	266.927.220,00	BB	280.273.581,00	BB	294.287.260,00	BB	309.001.623,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	230.095.000,00	B	241.599.750,00	BB	253.679.737,00	BB	266.363.724,00	BB	279.681.910,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.13	88.63	89.13	225.632.000,00	89.63	236.913.600,00	90.13	248.759.280,00	90.63	261.197.244,00	91.13	274.257.106,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Pelayanan Publik.	4.47	4.51	4.55		4.59		4.63		4.67		4.71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	B	B	B		B		BB		BB		BB		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B		B		BB		BB		BB		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	176.034.274,00	B	184.835.987,00	BB	194.077.787,00	BB	203.781.676,00	BB	213.970.760,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	401.169.000,00	B	421.227.450,00	BB	442.288.822,00	BB	464.403.263,00	BB	487.623.426,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	40.959.478.855,00	B	43.007.452.797,00	BB	45.157.825.437,00	BB	47.415.716.709,00	BB	49.786.502.545,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	195.915.000,00	B	205.710.750,00	BB	215.996.287,00	BB	226.796.101,00	BB	238.135.906,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	203.802.000,00	B	213.992.100,00	BB	224.691.705,00	BB	235.926.290,00	BB	247.722.604,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	97	98	98	256.042.000,00	98	268.844.100,00	98	282.286.305,00	98	296.400.620,00	98	311.220.651,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	95	95	95	957.905.000,00	95	1.005.800.250,00	95	1.056.090.262,00	95	1.108.894.775,00	95	1.164.339.514,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					149.598.000,00		157.077.900,00		164.931.795,00		173.178.384,00		181.837.304,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					8.025.457.000,00		8.426.729.850,00		8.848.066.342,00		9.290.469.659,00		9.754.993.142,00	
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan					86.418.000,00		90.738.900,00		95.275.845,00		100.039.637,00		105.041.619,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan					71.415.000,00		74.985.750,00		78.735.037,00		82.671.789,00		86.805.378,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan					620.553.000,00		651.580.650,00		684.159.682,00		718.367.666,00		754.286.049,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan					84.255.000,00		88.467.750,00		92.891.137,00		97.535.694,00		102.412.479,00	
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					-		-		-		-		-	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	28.686.478.970,00	B	30.120.802.918,00	BB	31.626.843.064,00	BB	33.208.185.217,00	BB	34.868.594.478,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	75	80	85	16.242.000.000,00	90	17.054.100.000,00	95	17.906.805.000,00	100	18.802.145.250,00	100	19.742.252.512,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					-		-		-		-		-	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	4.966.425.528,00	B	5.214.746.804,00	BB	5.475.484.144,00	BB	5.748.834.601,00	BB	6.036.002.831,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	90	90	92	450.000.000,00	94	472.500.000,00	96	496.125.000,00	98	520.930.000,00	100	547.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	90	90	92		94		96		98		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90	90	92	300.000.000,00	94	315.000.000,00	96	330.750.000,00	98	347.500.000,00	100	365.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan infrastruktur	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah	90	90	92	300.000.000,00	94	315.000.000,00	96	330.750.000,00	98	347.500.000,00	100	365.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	90	90	92		94		96		98		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					-		-		-		-		-	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	12.082.204.976,00	B	12.686.315.224,80	BB	13.320.630.986,04	BB	13.986.662.535,34	BB	14.685.995.662,11	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	14.701.475.234,00	B	19.601.527.678,95	BB	20.581.604.062,90	BB	21.610.684.266,04	BB	22.691.218.479,34	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola anggaran	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	18.668.121.599,00	WTP	19.601.527.678,95	WTP	20.581.604.062,90	WTP	21.610.684.266,04	WTP	22.691.218.479,34	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Pengamanan BMD Kota Bitung	83	85	86	926.741.000,00	87	973.078.050,00	88	1.021.731.952,00	89	1.072.818.550,00	90	1.126.459.477,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak PPJ	51	52	52	677.657.000,00	53	711.443.250,00	54	747.015.412,50	54	784.366.183,13	57	823.584.492,28	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Meningkatkatnya jumlah WP PBB-P2 yang terdaftar dan terdata	28.585	49.010	49990		50990		52009		53049		54109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Meningkatnya Jumlah WP BPHTB yang terdaftar	1345	1400	1428		1456		1485		1514		1544		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak Membayar Tungggakan Pajak	972.962.694	992.421,947	1.012,270,385		1.032,515,792		1.053,166,107		1.074,229,429		1.095,714,017		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal	631	500	510		520		530		540		550		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah terhadap Penerimaan PAD	2138849912,44	5800000000	2750000000		2850000000		3000000000		3100000000		3200000000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Realisasi Pendapatan Pajak Reklame terhadap Penerimaan PAD	1.824,925,511	2,500.000,000	2.650,000,000		2,809,000,000		2,977,540,000		3,156,192,400		3,345,563,944		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Air Tanah	96	94	96		96		96		96		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hiburan	39	41	43		45		47		49		51		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hotel	41	42	43		43		45		45		47		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak MBLB	19	14	4		4		4		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Parkir	8	8	9		9		9		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Reklame	301	311	323		334		334		356		357		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Restoran	127	145	152		159		166		173		180		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Sarana Walet	8	8	8				8				8		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Air Tanah	60	60	62		62		62		62		62		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Reklame	40	40	42		42		42		42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan		
5.03 - KEPEGAWAIAN					-		-		-		-		-	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	4.897.088.786,00	B	5.141.943.225,00	BB	5.399.040.386,00	BB	5.668.992.405,00	BB	5.952.442.026,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	3	5	7	33.000.000,00	9	34.650.000,00	11	36.382.500,00	15	38.201.625,00	17	40.111.706,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Indeks Profesionalitas ASN	47.1	55	60		65		70		75		81		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN					-		-		-		-		-	
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					-		-		-		-		-	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	4	10	15	3.000.000,00	20	3.150.000,00	25	3.307.500,00	30	3.472.875,00	35	3.646.518,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	3	4	5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					-		-		-		-		-	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	2.885.730.755,00	B	3.030.017.292,00	BB	3.181.518.157,00	BB	3.340.594.065,00	BB	3.507.623.768,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Menimngkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan					-				-		-		-	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah					-				-		-		-	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	51.76	53.14	54.52	156.736.006,00	55.90	164.572.806,00	57.28	172.801.446,00	58.66	181.441.518,00	60.04	190.513.594,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Indeks Daya Saing Daerah	3.48	3.68	3.88		4.08		4.28		4.48		4.68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	51.76	53.14	54.52	2.000.000,00	55.90	3.000.000,00	57.28	4.000.000,00	58.66	5.000.000,00	60.04	6.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					-		-		-		-		-	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	12.293.892.889,00	B	12.908.587.533,00	BB	13.554.016.910,00	BB	14.231.717.755,00	BB	14.943.303.643,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					-		-		-		-		-	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Peningkatan Kebabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	700.000.000,00	3	735.000.000,00	3	771.750.000,00	3	810.337.500,00	3	850.854.375,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah (PD) Mengimplementasi-kan Pengendalian Risiko	75	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah		
	Persentase Perangkat Daerah yang tidak Mendapat Temuan Hasil Pengawasan yang Material	88	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	500.000.000,00	3	525.000.000,00	3	551.250.000,00	3	578.812.500,00	3	607.753.125,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	68.24	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah		
7.01 - KECAMATAN					-		-		-		-		-	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	6.028.280.000,00	B	6.329.694.000,00	BB	6.646.178.700,00	BB	6.978.487.635,00	BB	7.327.412.016,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	5.511.708.911,00	B	5.787.294.356,00	BB	6.076.659.074,00	BB	6.380.492.028,00	BB	6.699.516.629,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	9.089.174.757,00	B	9.543.633.494,00	BB	10.020.815.169,00	BB	10.521.855.928,00	BB	11.047.948.724,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	6.520.120.499,00	B	6.846.126.523,00	BB	7.188.432.850,00	BB	7.547.854.492,00	BB	7.925.247.217,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	5.957.214.576,00	B	6.255.075.304,00	BB	6.567.829.070,00	BB	6.896.220.523,00	BB	7.241.031.549,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	5.232.104.199,00	B	5.493.709.408,00	BB	5.768.394.879,00	BB	6.056.814.623,00	BB	6.359.655.354,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	5.082.134.206,00	B	5.336.240.916,00	BB	5.603.052.962,00	BB	5.883.205.610,00	BB	6.177.365.890,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	5.980.891.136,00	B	6.279.935.692,00	BB	6.593.932.477,00	BB	6.923.629.101,00	BB	7.269.810.556,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	77.04	80	85	3.610.944.000,00	90	3.791.491.200,00	93	3.981.065.760,00	96	4.180.119.048,00	98	4.389.125.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	96.29	96	96.5	1.633.570.960,00	97	1.715.249.508,00	97.5	1.801.011.983,00	98	1.891.062.582,00	98.5	1.985.615.711,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	98.91	95	96	3.548.452.960,00	97	3.725.875.608,00	98	3.912.169.388,00	98	4.107.777.857,00	99	4.313.166.750,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	86.47	90	91	2.703.000.000,00	92	2.838.150.000,00	94	2.980.057.500,00	96	3.129.060.375,00	98	3.285.513.393,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	79	82	85	4.398.242.188,00	88	4.618.154.297,00	91	4.849.062.012,00	94	5.091.515.112,00	97	5.346.090.868,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	98	98	98	3.868.141.200,00	98	4.061.548.260,00	98	4.264.625.673,00	98	4.477.856.956,00	98	4.701.749.804,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	92	93	94	3.596.000.000,00	95	3.775.800.000,00	96	3.964.590.000,00	97	4.162.819.500,00	98	4.370.960.475,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	98	90	92	3.040.000.000,00	93	3.192.000.000,00	95	3.351.600.000,00	96	3.519.180.000,00	98	3.695.139.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	24	27	30	1.148.503.927,00	33	1.205.929.123,00	36	1.266.225.579,00	39	1.329.536.858,00	42	1.396.013.701,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	95	95	95	856.181.500,00	96	898.990.575,00	96	943.940.103,00	96	991.137.108,00	96	1.040.693.964,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	80	83	85	1.200.000.000,00	87	1.260.000.000,00	89	1.323.000.000,00	91	1.389.150.000,00	93	1.458.607.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	50	50	60	1.575.000.000,00	65	1.653.750.000,00	70	1.736.437.500,00	75	1.823.259.375,00	80	1.914.422.343,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	65	85	90	2.044.494.720,00	93	2.146.719.456,00	95	2.254.055.428,00	97	2.366.758.200,00	100	2.485.096.110,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	71.42	80	83	1.035.500.000,00	86	1.087.275.000,00	89	1.141.638.750,00	92	1.198.720.687,00	95	1.258.656.721,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	0	80	82	1.610.452.496,00	85	1.690.975.120,00	98	1.775.523.876,00	92	1.864.300.070,00	96	1.957.515.074,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	62	75	87.5	1.167.175.084,00	90	1.225.533.838,00	92	1.286.810.530,00	95	1.351.151.056,00	100	1.418.708.609,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	97	97.5	10.500.000,00	98	11.025.000,00	98.5	11.576.250,00	99	12.155.062,00	100	12.762.815,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	90	92	100.000.000,00	94	105.000.000,00	96	110.250.000,00	98	115.762.500,00	98	121.550.625,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	8.853.948,00	100	9.296.645,00	100	9.761.477,00	100	10.249.551,00	100	10.762.029,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	66.000.000,00	100	69.300.000,00	100	72.765.000,00	100	76.403.250,00	100	76.403.250,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.187,00	
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					-		-		-		-		-	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	3.189.048.778,00	B	3.348.501.216,00	BB	3.515.926.277,00	BB	3.691.722.591,00	BB	3.876.308.721,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2	3	4	1.000.000.000,00	5	1.050.000.000,00	6	1.102.500.000,00	7	1.157.625.000,00	8	1.215.506.250,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					-		-		-		-		-	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	1	1	1	724.810.808,00	1	761.051.348,00	1	799.103.915,00	1	839.059.111,00	1	881.012.067,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	80	90	100	75.000.000,00	100	78.750.000,00	100	82.687.500,00	100	86.821.875,00	100	91.162.968,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi	90	91	92	4.010.000,00	93	4.210.500,00	94	4.421.025,00	95	4.642.076,00	96	4.874.180,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100	100	3.235.760.000,00	100	3.397.548.000,00	100	3.567.425.400,00	100	3.745.796.670,00	100	3.933.086.503,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Subbab ini menyajikan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bitung selama periode RPJMD Kota Bitung Tahun 2025-2029. Penetapan target kinerja ini dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan, serta untuk menjadi acuan dalam upaya perbaikan dan peningkatan di masa mendatang.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam subbab ini sangat krusial, karena akan dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatan.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun, atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Dengan demikian, kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai secara bertahap dan terukur.

Indikator kinerja daerah pada RPJMD Kota Bitung Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah yang bersangkutan. Hal ini memastikan bahwa indikator yang dipilih relevan, signifikan, dan dapat diandalkan dalam mengukur kemajuan pembangunan daerah.

4.2.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bitung Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU Daerah).

Bagian ini menyajikan target-target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target-target ini diukur menggunakan indikator-indikator kinerja utama daerah (IKU Daerah) yang mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, kualitas lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan.

Tabel 182
Indikator Kinerja Utama Daerah
Kota Bitung tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	77	78	79	80	81	82	
2.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.3-6.3	6.4	6.6	6.8	6.95	7.1	
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94.85	94.99	95.13	95.27	95.41	95.55	
4.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	76.75	79.25	81	82	83	
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77.38	77.86	78.34	78.82	79.30	79.78	
6.	PDRB Perkapita (adhb)	Rp	114,265,530	123,943,821	134,441,862	145,829,088	158,180,812	171,578,727	
7.	Indeks Modal Manusia	Indeks	0.57	0.58-0.58	0.59-0.59	0.6-0.6	0.61-0.61	0.62-0.62	
8.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.985	10.01	10.035	10.06	10.085	10.11	
9.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	56.35	57.35	58.3	59.6	60.01	61	
10.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	53.14	54.52	55.90	57.28	58.66	60.04	
11.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74.66	74.88	75.105	75.33	75.555	75.78	
12.	Tingkat Kemiskinan	(%)	6.2	6.13	6.06	5.99	5.92	5.85	
13.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
14.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	(%)	0.61	0.63	0.65	0.67	0.69	0.71	
15.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	55	60	65	70	75	81	
16.	Rasio Gini	Indeks	0.354	0.334	0.314	0.294	0.274	0.254	
17.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	2.33	1.96	1.59	1.22	0.85	0.48	
18.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	69.22	69.48	69.74	70.16	70.66	70.66	
19.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.68	3.88	4.08	4.28	4.48	4.68	
20.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.68	12.69	12.7	12.71	12.72	12.73	
21.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	66.6	67.9	68.6	69.7	70.2	71.35	
22.	Nilai Investasi PMDN Berskala Nasional	Rp	585,507,615,000	614,782,995,750	645,522,145,538	677,798,252,814	711,688,165,455	747,272,573,728	
23.	Nilai Investasi PMA Berskala Nasional	Rp	490,268,974,195	514,782,422,905	540,521,544,050	567,547,621,253	595,925,002,316	625,721,252,431	
24.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	5.4	6.1	6.85	7.15	7.7	8.1	
25.	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	6.2	6.78	6.98	7.12	7.35	7.6	
26.	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Nilai	B	66.47	69.47	71	72	73	
27.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88.63	89.13	89.63	90.13	90.63	91.13	
28.	Indeks SPBE	Nilai	3.1	4.31	4.81	5.31	5.81	6.31	
29.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6.83	6.15	5.47	4.79	4.11	3.43	
30.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	80	80.5	81	81.5	82	83	



4.2.2. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKPPD).

Bagian ini menyajikan target-target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur menggunakan indikator-indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (IKPPD). IKPPD mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan, seperti pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, dan kapasitas aparatur sipil negara.

Tabel 4.3
**Indikator Kinerja Daerah Kota Bitung
Tahun 2025-2030**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KE T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
AA										
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3.02	3.02	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.78	1,71	1,71	1,70	1,70	1,69	1,67	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
AA										
1	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	Orang	3	3	3	3	3	3	3	
2	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	62	63	63	64	64	65	65	
3	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok Tani	547	549	551	552	553	554	555	
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.67	12.68	12.69	12.7	12.71	12.72	12.73	
5	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	58.33	60.83	63.33	65.83	68.33	70.83	73.33	
6	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	56.03	58.43	60.83	63.23	65.63	68.03	70.43	
7	Iklim Keamanan SD	Nilai	75.45	76.35	77.25	78.15	79.05	79.95	80.85	
8	Iklim Keamanan SMP	Nilai	67.70	69.20	70.70	72.20	73.70	75.20	76.70	

9	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	70.06	71.06	72.06	73.06	74.06	75.06	76.06	
10	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	69.78	70.78	71.78	72.78	73.78	74.78	75.78	
11	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	51.76	53.14	54.52	55.90	57.28	58.66	60.04	
12	Indeks Literasi Digital	Angka	0	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2	
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94.81	94.85	94.99	95.13	95.27	95.41	95.55	
14	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	51:51	51.5:51.5	52:52	52.5:52.5	53:53	53.5:53.5	54:54	
15	Jumlah Bina Industri Kecil dan Menengah	IKM	20	20	30	30	40	40	40	
16	Jumlah kelompok perikanan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Kelompok	131	135	140	150	155	156	158	
17	Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Ton/Tahun	710	720	727	734	748	752	764	
18	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	11,255.00	1,651.27	1,692.25	1,704.12	1,712.35	1,733.21	1,745.77	

19	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	110,228.50	110,779.64	111,333.54	111,890.21	112,449.66	113,011.91	113,576.97	
20	Jumlah Rumah Tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha	Rumah Tangga	1,871	1,891	1,943	2,026	2,057	2,076	2,102	
21	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Dokumen	9	5	5	6	6	7	7	
22	Jumlah Tanda Daftar bagi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Dokumen	6	4	2	3	3	4	5	
23	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	72.56	75.60	78.64	81.68	84.65	87.62	90.59	
24	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	96.52	96.76	97.01	97.26	97.51	97.76	98.01	
25	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	17.81	21.91	26.01	30.11	34.21	38.31	42.41	
26	Ketersediaan energi	Kkal/Kapita /Hari	3,387	2,420	2,430	2,440	2,450	2,460	2,470	
27	Ketersediaan pangan utama Cadangan Beras Pemerintah Kota	Ton	15.47	18.00	21.00	24.00	28.00	32.00	37.00	

28	Ketersediaan protein perkapita	Gram	119.20	65.00	65.50	66.00	66.50	67.00	67.50	
29	Konsumsi Energi/kapita/hari	Kkal/Kapita /Hari	2,206	2,150	2,160	2,170	2,180	2,190	2,200	
30	Konsumsi Protein/kapita/hari	Gram	70.50	65.00	66.00	67.00	68.00	69.00	70.00	
31	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Kelompok Tani	215	215	217	219	220	220	221	
32	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		47	47	48	48	49	49	50	
33	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		90	90	92	92	94	94	95	
34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (Produksi Rata-rata / tahun) (Aren)	%	20.95	23.65	27.40	30.25	34.50	37.20	40.25	
35	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (Produksi Jagung)	Ton	9,937.60	9,938.00	9,938.50	9,939.50	9,942.50	9,945.50	9,950.50	
36	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Produksi Komoditas Hortikultura (sayuran, cabe, wortel) (ton)	Ton	313.30	313.30	313.50	313.50	313.70	313.70	313.80	
37	Pengawasan Barang Pokok dan Penting	Kegiatan	22	22	22	24	24	26	30	

38	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	72.46	100	100	100	100	100	100	
39	Persentase BPR/LKM aktif	%	6.11	6.11	6.11	6.12	6.12	6.12	6.13	
40	Persentase Koperasi Aktif dan sehat	%	71.38	93.02	94.19	95.35	97.09	98.84	99.41	
41	Persentase Peningkatan kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	%	96	90	90	90	92	92	94	
42	Persentase Peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	4	5	5	7	7	7	7	
43	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	%	100	100	100	100	100	100	100	
44	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	9.99	10.3	10.71	11.24	11.8	12.52	13.14	
45	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98.66	52	55	57	60	64	67	
46	Pertumbuhan industry	%	50	51	51	52	52	53	53	
47	Pertumbuhan Jumlah IKM di Kota Bitung	IKM	4	4	4	5	5	6	6	
48	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	48.86	53.42	54.92	56.42	57.92	59.42	60.92	

49	PPH Ketersediaan	Skor	89.10	85.10	85.20	85.30	85.40	95.50	85.60	
50	PPH Konsumsi	Skor	87.80	85.00	85.50	86.00	86.50	87.00	87.50	
51	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	2.7	2.33	1.96	1.59	1.22	0.85	0.48	
52	Produktivitas bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Jagung, Kacang Tanah, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Kwintal	49.38	49.39	49.39	49.41	49.44	49.45	49.45	
53	Produktivitas Padi per hektar	Kwintal	50	50	50	50	50	50	50	
54	Rasio Gini	Indeks	0.374	0.354	0.334	0.314	0.294	0.274	0.254	
55	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	55.59-55.89	58.09-58.39	60.59-60.89	63.09-63.39	65.59-65.89	68.09-68.39	70.59-70.89	
56	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	49.72	52.62	55.52	58.42	61.32	64.22	67.12	
57	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62.92	64.02	65.12	66.22	67.32	68.42	69.52	
58	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	57.94	59.44	60.94	62.44	63.94	65.44	66.94	
59	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.96	9.985	10.01	10.035	10.06	10.085	10.11	

60	Tingkat Kemiskinan	(%)	6.27	6.20	6.13	6.06	5.99	5.92	5.85	
61	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7.51	6.83	6.15	5.47	4.79	4.11	3.43	
62	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74.43	74.66	74.88	75.105	75.33	75.555	75.78	
III ASPEK DAYA SAING DAERAH										
AA										
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	51.76	53.14	54.52	55.90	57.28	58.66	60.04	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	
3	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata	Indeks	BB	BB	BB	A	A	A	A	
4	Jumlah Destinasi/Objek Wisata yang diunggulkan	Destinasi	3	3	3	3	3	3	3	
5	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar di HAKI	Produk	20	25	25	30	30	35	35	
6	KEGIATAN PAMERAN PENANAMAN MODAL	Laporan	-	-	1	1	1	1	1	
7	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Bitung	%	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	1,3	1,31	
8	Laporan BMD Kota Bitung tepat waktu dan sesuai peraturan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	
9	Opini BPK Atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

10	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kegiatan	16	88	90	92	94	96	98	
11	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
12	Pengamanan BMD Kota Bitung	Persentase	83 %	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %	
13	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	49,41	55,82	58,56	61,3	64,04	66,78	69,52	
14	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
17	Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bitung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	Persentase	76 %	78 %	80 %	82 %	84 %	86 %	88 %	
18	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	276,976,932,178	392,564,223,279	290,825,778,787	305,367,067,726	320,635,421,113	336,667,192,168	353,500,551,777	

19	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	
20	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Dokumen	1	1	-	-	-	1	-	
IV ASPEK PELAYANAN UMUM										
AA										
1	Cakupan Event/Kegiatan Kepariwisataa (Jumlah Event Pariwisata)	Kegiatan	3	4	4	4	5	5	5	
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		2	3	4	5	6	7	8	
3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0	0	0	1.45	1.45	1.45	1.45	
4	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.48	3.68	3.88	4.08	4.28	4.48	4.68	
5	Indeks Profesionalitas ASN		47.1	55	60	65	70	75	81	
6	Indeks Reformasi Birokrasi		BB	BB	BB	BB	A	A	A	
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3.02	3.1	3.15	3.2	3.25	3.3	3.3	
8	Jumlah Alat UTP yang ditera	Alat	285	285	285	290	295	295	300	

9	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Unit	523.000	530.000	540.000	550.000	560.000	570.000	580.000	
10	Jumlah Industri Pariwisata	Unit	318	320	322	324	326	328	330	
11	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	3	3	3	4	4	4	4	
12	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	Judul	6,423	6,600	6,750	6,900	7,100	7,250	7,400	
13	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	19972	20000	22000	24000	26000	28000	30000	
14	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	416.823	420.000	430.000	440.000	450.000	460.000	470.000	
15	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Destinasi	10	10	12	12	12	14	14	
16	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	145.000	160.000	180.000	200.000	225.000	250.000	275.000	
17	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	613.000	650.000	700.000	750.000	800.000	850.000	900.000	
18	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha	50	60	70	80	90	100	110	
19	Jumlah Pembinaan terhadap pelaku usaha dan kerjasama	Kali	2	1	1	1	2	2	2	

	dengan penggerak pariwisata									
20	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	712	912	1,112	1,312	1,512	1,712	1,912	
21	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU	Angka	92	98	98	98	99	99	100	
22	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki Sertifikat	Orang	3	3	3	5	6	7	8	
23	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	60	63	66	69	73	75	78	
24	Jumlah Terminal Bis	Lokasi	1	1	1	1	1	1	1	
25	Jumlah TPU yang tertata dan terpelihara	Lokasi	2	2	3	3	4	4	4	
26	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	343	176	180	200	220	240	260	
27	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Orang	1	1	1	1	1	1	1	
28	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evaukasi Korban Bencana	Angka	2553	10	10	10	10	10	10	

29	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Orang	100	100	100	100	100	100	100	
30	Kawasan Penerangan Perkotaan yang baik	Kawasan	6	8	9	7	8	9	9	
31	KEGIATAN PENERIMAAN MISI PENANAMAN MODAL	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
32	KEGIATAN SEMINAR PENANAMAN MODAL	Laporan	3	2	2	2	2	2	2	
33	Ketersediaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran yang Memadai	%	98	98	98	100	100	100	100	
34	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eksemplar	12,679	14,000	14,300	14,600	14,900	15,200	15,500	
35	KONSULTASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Pelaku Usaha	43	23	23	23	23	23	23	
36	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB harga berlaku	%	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	
37	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kota Bitung	%	20,91	21	21,2	21,4	21,6	21,8	22	
38	LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	
39	LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	
40	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3	3	3	3	3	3	

41	Meningkatkatnya jumlah WP PBB-P2 yang terdaftar dan terdata	Pengembang (Badan Usaha) atau Per Orangan	28,585	49,010	49,990	50,990	52,009	53,049	54,109	
42	Meningkatnya Jumlah WP BPHTB yang terdaftar	Pengembang (Badan Usaha) atau Per Orangan	1,345	1,400	1,428	1,456	1,485	1,514	1,544	
43	Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak Membayar Tunggalan Pajak	Rp	972,962,694	992,421,947	1,012,270,385	1,032,515,792	1,053,166,107	1,074,229,429	1,095,714,017	
44	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal	Pengembang (Badan Usaha) atau Per Orangan	631	500	510	520	530	540	550	
45	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah		0	1,2	1,4	1,6	1,8	5,81	2	
46	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	%	74	76	78	78	79	79	79	
47	Panjang garis pantai	Km	139,549	139,549	139,549	139,549	139,549	139,549	139,549	
48	Panjang garis pantai yang membutuhkan pengamanan	Km	39,78	55	60	65	70	75	80	
49	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	0	31	41	51	61	71	81	

50	Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	Unit	1	1	1	1	1	1	1	
51	Pembangunan sabodam penampung sedimen pasir untuk pencegahan banjir pasir ke pemukiman penduduk.	Unit	19	21	23	25	28	31	33	
52	Pembangunan Saluran Alur yang mengendalikan air buangan dari sabodam	Meter	19,2	150	200	250	300	350	400	
53	Pembangunan Saluran Outlet yang mengendalikan air buangan di ujung saluran ke laut yang berhubungan dengan badan air.	Meter	12,15	200	250	300	350	400	450	
54	PEMBINAAN APARATUR PENANAMAN MODAL	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
55	PEMBINAAN PENANAMAN MODAL PMA & PMDN	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
56	PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL	Izin	2,944	400	400	400	400	400	400	
57	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) yang dilakukan oleh instansi Penerbit	Surat	2,093	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	

	Surat Keterangan Asal (SKA)									
58	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
59	Pengawasan bahan berbahaya	Kegiatan	-	4	6	6	8	8	10	
60	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	67,14	55,6	55,7	55,8	55,9	56	56,1	
61	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,24	84,6	84,7	84,8	84,9	85	85,1	
62	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Orang	0	2	0	2	0	1	0	
63	Peningkatan Kebabailitan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3	3	3	3	3	3	
64	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	0	1	2	3	4	5	6	
65	PERDA/ PERKADA / PRODUK HUKUM PENANAMAN MODAL	Dokumen	9	9	5	5	5	5	5	

66	Perkuatan tebing sungai untuk mencegah abrasi air sungai atau daya rusak air sungai. (Bronjong/Talud)	Meter	15,15	100	150	200	250	300	350	
67	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		3	3	3	3	3	3	3	
68	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		4	10	15	20	25	30	35	
69	Persentase cakupan area pelayanan	Rasio	74	75	75	75	75	75	75	
70	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	68	73	78	83	88	93	98	
71	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	90	92	94	96	98	100	
72	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	%	B	B	B	B	BB	BB	BB	
73	Persentase irigasi kabupaten/kota dalam kondisi baik	%	65	70	75	80	85	90	95	
74	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,026	

75	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	75,18	75,19	75,20	75,21	75,22	75,23	75,24	
76	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	0,14	90	90	90	90	90	90	
77	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	90.00	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00	100.00	
78	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	90.00	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00	100.00	
79	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	90.00	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00	100.00	
80	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan		4	5	6	7	8	9	10	
81	Persentase layanan angkutan darat	%	0,6	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	
82	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	80	82	85	87	88	89	90	
83	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	75	75	80	80	80	80	90	
84	Persentase PD yang menyerahkan Khazanah Arsip ke	%	0	5	10	15	20	22	25	

	LKD (Lembaga Kearsipan Daerah)									
85	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak lanjuti	%	100	90	91	92	93	94	95	
86	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	67	70	75	80	85	90	95	
87	Persentase penduduk berakses air minum	%	84,18	87	90	93	96	99	100	
88	Persentase Penegakan Perda	%	100	90	90	95	97	100	100	
89	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	3	4	5	5	5	5	5	
90	Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni	%	50	50	60	70	80	90	100	
91	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	%	-92,75	-75	-80	-85	-90	-90	-90	
92	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	%	5.3	28	36	41	46	51	57	

93	Persentase Perangkat Daerah (PD) Mengimplementasikan Pengendalian Risiko	%	75	100	100	100	100	100	100	
94	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku	%	0	4	14	24	34	44	54	
95	Persentase Perangkat Daerah yang tidak Mendapat Temuan Hasil Pengawasan yang Material	%	88.88	100	100	100	100	100	100	
96	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	95	95	95	95	95	95	95	
97	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	100	100	100	100	100	100	100	
98	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	3,30	2,8	2,3	1,8	1,3	0,8	0,3	
99	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
100	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang bersertifikat	%	10,53	10,6	10,7	10,8	10,9	11	11,1	
101	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan	%	90	91	95	95	95	95	95	

	Sandi Pemerintah Daerah									
102	Persentase warga negara yang memperoleh layanan bahaya kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
103	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi pencegahan kebakaran dan penyelamatan	%	25	100	100	100	100	100	100	
104	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
105	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
106	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi hewan liar	%	100	100	100	100	100	100	100	
107	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	

108	Persentasi Pelayanan SPAM Jaringan non Perpipaan	%	79,2	82	85	88	91	94	97	
109	Persentasi Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	%	47,20	50	55	60	65	70	80	
110	Presentasi Bangunan yang memiliki Proteksi dan Mitigasi kebakaran	%	91	402	403	405	405	407	410	
111	Presentasi Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	%	30	30	44	58	72	86	100	
112	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	84,45	84,45	84,45	84,87	85,29	85,72	85,90	
113	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) denganketerampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	(%)	99,494	115,000	130,000	150,000	200,000	225,000	250,000	
114	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	84,18	87	90	93	96	99	100	
115	Rasio ijin trayek	Rasio	0,005	0	0,007	0,008	0,009	0,01	0,12	
116	Rasio Jaringan Irigasi	%	216	216	216	216	216	216	216	

117	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km	418,921	418,921	418,921	419,345	419,893	420,440	420,954	
118	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	
119	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	%	0,22	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37	0,40	
120	Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah terhadap Penerimaan PAD	Rp	2,138,849,912	5,800,000,000	2,750,000,000	2,850,000,000	3,000,000,000	3,100,000,000	3,200,000,000	
121	Realisasi Pendapatan Pajak Reklame terhadap Penerimaan PAD	Rp	1,824,925,511	2,500,000,000	2,650,000,000	2,809,000,000	2,977,540,000	3,156,192,400	3,345,563,944	
122	Rekrutmen Petugas Linmas	Orang	0	0	0	69	69	69	69	
123	STANDART PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	SOP	30	25	2	2	2	2	2	
124	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Air Tanah	Pengembangan (Badan Usaha) atau PerOrangan	96	94	96	96	96	96	96	
125	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hiburan	Pengembangan (Badan Usaha) atau PerOrangan	39	41	43	45	47	49	51	
126	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hotel	Pengembangan (Badan Usaha) atau PerOrangan	41	42	43	43	45	45	47	
127	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak MBLB	Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	19	14	4	4	4	4	4	

128	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Parkir	Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	8	8	9	9	9	9	9	
129	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak PPJ	Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	51	52	52	53	54	54	57	
130	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Reklame	Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	301	311	323	334	344	356	367	
131	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Restoran	Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	127	145	152	159	166	173	180	
132	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Sarang Walet	Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	8	8	8	8	8	8	8	
133	TERSEDIA DATA DAN INFORMASI PERIZINAN & NON PERIZINAN	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	
134	Timbulan sampah yang ditangani	Ton/Tahun	42.869	58.055,22	58.055,26	58.055,30	58.055,32	58.055,37	58.055,39	
135	Tingkat Hunian Akomodasi	%	9,16	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	
136	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	42,33	51	55	60	65	75	80	
137	Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Air Tanah	Pengemban g (Badan Usaha) atau PerOrangan	60	60	62	62	62	62	62	

138	Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Reklame	Pengembangan (Badan Usaha) atau PerOrangan	40	40	42	42	42	42	42	
139	Tingkat waktu tanggap (response time rate).	%	100	100	100	100	100	100	100	
140	Tingkat waktu tanggap (response time rate).	Angka	90	90	90	90	90	90	90	
V INDIKATOR KINERJA KUNCI										
AA										
1	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Orang	4	3.8	3.6	3.4	3.2	3	2.8	
2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	8-8	5-5	4-4	32,3-32,3	31,1-31,1	30,1-30,1	1,2-1,2	
3	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)		2.15	2	2	2,13	2,13	2,12	2,12	
4	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0.3	0.28	0.26	0.24	0.22	0.2	0.18	
5	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	63	62	61	60	59	58	57	
6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	67.23	61	63	65	67	67	70	

7	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	0	61	61.2	61.4	61.6	61.8	62	
9	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	0	20	25	30	35	40	45	
11	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton/Tahun	11255	1651.27	1692.25	1704.12	1733.21	1733.21	1745.77	
12	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	346	500	550	500	500	550	500	
13	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kasus	75	60	50	40	30	20	10	
14	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	98	90	92	93	95	96	98	
15	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	98.91	95	96	97	98	98	99	
16	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	92	93	94	95	96	97	98	
17	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	98	98	98	98	98	98	98	

18	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	86.47	90	91	92	94	96	98	
19	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	96.29	96	96.5	97	97.5	98	98.5	
20	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	79	82	85	88	91	94	97	
21	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	77.04	80	85	90	93	96	98	
22	Penemuan Kasus TBC	%	73	74	75	76	77	78	79	
23	Perekaman KTP elektronik	%	98.01	98.05	99.02	99.07	99.08	100	100	
24	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	78.98	100	100	100	100	100	100	
25	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
26	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96.8	100	100	100	100	100	100	
27	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	3	5	7	9	11	15	17	

28	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
29	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	97.72	98	98.5	99	99.5	100	100	
30	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianya dilaporkan	%	79.7	100	100	100	100	100	100	
31	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persentase	97	98	98	98	98	98	98	
32	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	80	83	85	87	89	91	93	
33	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	24	27	30	33	36	39	42	
34	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	71.42	80	83	86	89	92	95	
35	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga	Persentase	0	80	82	85	98	92	96	

	Kemasyarakatan Desa (LKD)									
36	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	65	85	90	93	95	97	100	
37	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	50	50	60	65	70	75	80	
38	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	95	95	95	96	96	96	96	
39	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	62	75	87.5	90	92	95	100	
40	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	96	96.6	97.2	97.8	98.4	99	99.6	
41	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	%	60.92	62	65	68	70	75	80	
42	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi		90	91	92	93	94	95	96	
43	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	0	40	50	60	70	80	90	

	yang mengacu ke rencana tenaga kerja									
44	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	90	90	92	94	96	98	100	
45	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	90	90	92	94	96	98	100	
46	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	90	90	92	94	96	98	100	
47	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	%	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	
48	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

49	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
50	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	68	70	72	74	76	78	80	
51	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		80	90	100	100	100	100	100	
52	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
53	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		1	1	1	1	1	1	1	
54	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	Persentase	1.67	30	35	40	45	50	55	

55	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan	%	0	60	65	70	75	80	90	
56	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Perpustakaan	Persentase	1	1	1	1	1	1	1	
57	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	Persentase	0	5	8	11	14	16	20	
58	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/ Internasional	Persentase	36	36	38	40	42	45	50	
59	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Persentase	90	90	90	90	90	90	90	

60	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Persentase	85	86	86.5	86.10	86.10	86.10	86.10	
61	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	4	10	15	20	25	30	35	
62	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	15	100	100	100	100	100	100	
63	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	BB	BB	BB	
64	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	BB	BB	BB	
65	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	BB	BB	BB	
66	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	BB	BB	BB	
67	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	BB	BB	BB	
68	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	BB	BB	BB	
69	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	BB	BB	BB	
70	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	BB	BB	BB	
71	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	BB	BB	BB	

72	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	BB	BB	BB	
73	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	BB	BB	BB	
74	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	BB	BB	BB	
75	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	BB	BB	BB	
76	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	BB	BB	BB	
77	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	BB	BB	BB	
78	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	BB	BB	BB	
AB	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Tingkat hunian akomodasi	%	9.16	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	
AC										
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		75	80	85	90	95	100	100	
2	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	0	5	10	15	20	22	25	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	43.39	43.4	43.41	43.42	43.43	43.44	43.46	
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	0	10	10.5	11	11.5	12	12.5	

6.

0.5

5	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	



Melalui penetapan target kinerja yang komprehensif, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bitung. Informasi ini akan menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Penetapan target ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah komitmen untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah secara terukur. Dengan adanya target yang jelas, setiap perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat bekerja secara sinergis dan terarah. Target-target ini juga menjadi alat kontrol bagi masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah daerah dan memastikan akuntabilitas publik. Selain itu, penetapan target kinerja ini juga menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja di akhir periode RPJMD. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan berharga untuk penyusunan RPJMD berikutnya, sehingga pembangunan daerah dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Bitung.

BAB V PENUTUP

RPJMD Kota Bitung Tahun 2025-2029 merupakan suatu dokumen yang memuat kerangka kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang sekaligus merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung.

RPJMD Kota Bitung Tahun 2025-2029 sebagai dokumen bersama seluruh stakeholders pembangunan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bitung selama periode Tahun 2025 – 2030, serta menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang disusun setiap 5 (lima) tahun, serta pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renja PD yang disusun setiap tahun untuk mewujudkan Visi Kota Bitung : ”Harmonisasi Menuju Bitung Maju 2025-2030”

Kaidah pelaksanaan yang menjadi landasan dalam implementasi RPJMD meliputi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Pelaksanaan RPJMD juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan, keadilan, dan pemerataan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Koordinasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antar tingkatan pemerintahan, serta dengan pihak swasta dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi RPJMD.

Pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah akan dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan supervisi yang terstruktur dan sistematis. Pemantauan dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, serta mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut. Supervisi dilakukan untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan supervisi akan menjadi bahan untuk melakukan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan.

Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah akan dilakukan secara berkala, meliputi evaluasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan. Evaluasi pada tahap perencanaan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara rancangan RPJMD dengan RPJPD dan RTRW, serta untuk menilai tingkat keterukuran dan ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Evaluasi pada tahap pelaksanaan dilakukan untuk menilai kemajuan implementasi program dan kegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi pascapelaksanaan dilakukan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta untuk mendapatkan umpan balik bagi perencanaan pembangunan berikutnya.

Berbagai indikator kinerja telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, baik melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bitung Tahun 2025-2029 tidak hanya bergantung pada peran pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, swasta, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Sinergi dan kolaborasi antar pihak ini akan memperkuat upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan komitmen bersama dan implementasi yang konsisten, diharapkan RPJMD ini dapat mewujudkan Kota Bitung yang lebih maju, sejahtera.

